

DRAFT



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SCENARIO PLANNING, DAMPAK, DAN PROYEKSI DI BERBAGAI BIDANG PADA MASA DAN PASCA PANDEMI COVID-19:

PANDANGAN PARA PAKAR DAN PRAKTISI

BUKU SERI 1
***STRATEGIC
FORESIGHT***
BPK



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



1

2

3

4

1. Achsanul Qosasi - Anggota
2. Pius Lustrilanang - Anggota
3. Harry Azhar Azis - Anggota
4. Isma Yatun - Anggota



5

6

7

8

9

- 5. Agung Firman Sampurna - Ketua
- 6. Agus Joko Pramono - Wakil Ketua
- 7. Hendra Susanto - Anggota
- 8. Nyoman Adhi Suryadnyana - Anggota
- 9. Daniel Lumban Tobing - Anggota



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SCENARIO PLANNING, DAMPAK, DAN PROYEKSI DI BERBAGAI BIDANG PADA MASA DAN PASCA PANDEMI COVID-19:

PANDANGAN PARA PAKAR DAN PRAKTISI

BUKU SERI 1
***STRATEGIC
FORESIGHT***
BPK



BUKU SERI | STRATEGIC FORESIGHT BPK

Scenario Planning, Dampak, dan Proyeksi di Berbagai Bidang pada Masa dan Pasca Pandemi COVID-19: Pandangan Para Pakar dan Praktisi

ISBN:

x + xx halaman

20,7 x 26 cm

Kontributor

- Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA., QGIA. ▪ Drs. Daniel Sparringa, M.A., Ph.D.
- Shuhaela F. Haqim ▪ Dr. Adhiatma Gunawan ▪ Caroline Riady, BA. ▪ Prof Dr. Anwar Nasution
- Teguh Dartanto, Ph.D; Dr. Imam B. Prasodjo ▪ Metta Dharmasaputra, S.E., M.M
- Burhanuddin Muhtadi, Taberez A. Neyazi & Sourabh B. Paul ▪ Julian Aldrin Pasha, M.A., Ph.D.
- Yunarto Wijaya ▪ Prof. Dr. Raldi Hendro Koestoer, M.Sc., Ph.D., APU ▪ Agus Pratama Sari, Ph.D. ▪ Ir. Onno W. Purbo, M.Eng., Ph.D

Editor:

Dr. Agung Firman Sampurna, C.S.F.A., C.Fr.A., C.G.C.A.E., Q.G.I.A.

Penata letak

Tim Penyusun Buku Seri Strategic Foresight BPK

Perancang sampul:

Tim Penyusun Buku Seri Strategic Foresight BPK

Foto sampul:

Shutterstock

Diterbitkan oleh:

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Jalan Gatot Subroto Kav. 31

Jakarta Pusat 10210

Telepon (6221) 25549000,

Faksimile (6221) 57950288

Website: <http://www.bpk.go.id>

Email: eppid@bpk.go.id

Cetakan Pertama: Maret 2022

@Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)



“Foresight memfasilitasi pembuatan kebijakan dalam situasi ketidakpastian yang tinggi melalui identifikasi tren, peluang, dan tantangan di berbagai bidang, eksplorasi berbagai perkembangan untuk menyusun strategi masa depan, serta identifikasi dampak jangka panjang dari kebijakan yang diambil.”

**Dr. Agung Firman Sampurna, C.S.F.A., C.Fr.A., C.G.C.A.E., Q.G.I.A.
Ketua BPK RI**

DAFTAR ISI



PARA KONTRIBUTOR	X
PROLOG	1

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Mendukung Peran <i>Foresight</i> BPK	4
--	---

SCENARIO PLANNING

<i>Seeing the Future of Indonesia: A Scenario Approach</i>	20
Menata Indonesia Pascapandemi Covid-19: Manfaat dan Aplikasi <i>Foresight</i>	22

PEMIKIRAN BIDANG KESEHATAN

Kesehatan Digital Pascapandemi	28
Ketidakpastian Masa Depan pada Sektor Kesehatan	30

PEMIKIRAN DI BIDANG EKONOMI/PERBANKAN

Dampak Ekonomi COVID-19	40
Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi: Peluang dan Tantangan	48



PEMIKIRAN DI BIDANG SOSIOLOGI

Dampak Pandemi COVID-19 Dalam Transformasi Tatanan Sosial	58
Antisipasi Dampak Sosial Pandemi Covid-19	64



PEMIKIRAN DI BIDANG POLITIK/GEOPOLITIK

Kepercayaan Politik, Tekanan Ekonomi, dan Sikap Partisan: Mendiskusikan <i>Approval</i> Presiden Pada Masa Krisis COVID-19	78
Proyeksi Kebijakan Antisipasi Pandemi: Opsi Kebijakan Pemerintah	96
Menata Politik Indonesia Pasca Pandemi	116



PEMIKIRAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

<i>Scenario Planning, Impacts and Projections in Various Fields Amid the Post-Pandemic</i>	130
Menghadapi Krisis Iklim dan Lingkungan Hidup Global Pascapandemi	142



PEMIKIRAN DI BIDANG TEKNOLOGI

Transformasi Digital yang Terdorong Covid-19	160
--	-----

EPILOG

175

PARA KONTRIBUTOR



Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE (Ketua BPK RI periode 2019-2022)

Dr. Agung Firman Sampurna merupakan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI periode 2019-2022. Sebelum menjabat Ketua BPK, beliau pernah menjabat Anggota I, V dan III pada Badan Pemeriksa Keuangan. Sejak sekolah menengah pertama, beliau yang merintis karirnya dari bawah, sudah aktif dalam berbagai organisasi kesiswaan hingga di perguruan tinggi.

Penerima Bintang Mahaputra Nararya ini juga banyak terlibat dalam kegiatan pelatihan, riset, seminar dan berbagai forum lainnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Latar Belakang Pendidikan

- Pascasarjana (S3) Program Studi Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia (2011);
- Pascasarjana (S2) Program Studi Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia (1998);
- Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya – Inderalaya (1996).



Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA (Wakil Ketua BPK RI periode 2019-2022)

Dr. Agus Joko Pramono merupakan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI periode 2019-2022. Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua BPK, beliau menjabat Anggota II dan III Badan Pemeriksa Keuangan. Beliau terpilih sebagai Wakil Ketua Komite Penasihat Audit Independen (*Independent Audit Advisory Committee/IAAC*) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) periode 2020-2022 dan sebagai *Board Member, Intosai Development Initiative (IDI)* Norway 2020-2023. Aktif sebagai Wakil Ketua Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024.

Beliau terpilih menjadi Anggota Dewan Penasihat IAI periode 2018-2022, sebelumnya beliau adalah Ketua Dewan Penasihat Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) IAI periode 2016-2019

Saat ini beliau juga merupakan dosen Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan beberapa Universitas swasta seperti Universitas Trisakti dan Universitas Pancasila.

Latar Belakang Pendidikan

- Doktoral Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjajaran (2015).
- Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada (2009).
- Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2004).



Drs. Daniel Sparringa, M.A., Ph.D
Dosen Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga

Daniel Sparringa merupakan Dosen Departemen Sosiologi Universitas Airlangga dari 1983 hingga sekarang, Dosen Pasca Sarjana Fisip Universitas Airlangga 1997 hingga sekarang dan juga Dosen Pasca Sarjana Sekolah Bisnis dan Ekonomi di Universitas Surabaya dari 1997 sampai dengan sekarang. Beliau juga merupakan aktivis dengan berbagai pengalaman, diantaranya menjadi pembicara internasional di berbagai negara seperti Belanda, Norwegia, Jerman, Argentina, Inggris, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Beberapa bidang yang beliau alami diantaranya adalah the complexity of interrelations between state/government, civil society, and business; Transformative communication; Negotiation, mediation, transformation of conflict and peace building; Social capital and good society; Leadership and staffship in business corporation; dan Scenario planning for Business Organization and Pubic Organization.

Saat ini beliau aktif dalam berbagai organisasi, diantaranya Ikatan Sosiologi Indonesia, ISI dari 1983 hingga sekarang, Himpunan Peminat Ilmu-ilmu Sosial, HIPIS dari 1985 hinggga sekarang, Ikatan Bankir Indonesia dari 2015 sampai sekarang, dan Indonesia Economic Forum dari 2015 hingga sekarang. Di Luar aktifitas sebagai akademisi, beliau pernah menjadi Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Komunikasi Politik(2009-2014), Anggota Dewan Pengawas Indonesia Power, (2012-2014), dan Komisaris Bank Negara Indonesia tahun 2015 hingga 2015.

Latar belakang pendidikan

- Ph.D. in Sociology, Flinders University, South Australia (1997).
- Master in Sociology, Flinders University, South Australia (1991).
- Sarjana, Drs in Sociology, University of Airlangga, Surabaya, Indonesia (1985).



Shuhaela F. Haqim

Shuhaela F. Haqim merupakan Direktur Eksekutif (Partner) *Government and Public Sector* (GPS) di *Deloitte Consulting Southeast Asia*. Deloitte sendiri merupakan salah satu perusahaan manajemen konsultan global terbesar di dunia. Shuhaela dikenal sebagai pemimpin muda Indonesia yang memiliki rekam jejak dalam memimpin berbagai proyek konsultansi di lingkungan pemerintahan, beberapa portofolio yang pernah dilaksanakan diantaranya menjadi penasihat nasional bagi PMO *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi (MP3EI) serta pembentukan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIP). Selain portofolio pengalaman di sektor publiknya, Shuhaela juga memiliki spesialisasi keahlian dalam menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta strategi dan implementasi transformasi digital. Saat ini, Shuhaela merupakan Partner termuda di Deloitte Consulting Indonesia. Sebelumnya, Shuhaela merupakan Direktur di *Tusk Advisory*, perusahaan manajemen konsultan yang berfokus pada infrastruktur dan sektor publik.

Latar Belakang Pendidikan

- Sarjana Ekonomi, Akuntansi, Universitas Indonesia (2008).
- *Oxford-Chicago Valuation Program, Said Business School, University of Oxford* (2014).



Dr. Adhiatma Gunawan

Adhiatma Gunawan adalah seorang Head of Medical, Good Doctor Technology Indonesia dari September 2019 sampai dengan sekarang. Tugasnya mengelola operasi medis berdasarkan kualitas tertinggi standar praktik medis, mengembangkan bisnis dan memperkuat kemitraan dengan semua pemangku kepentingan sektor kesehatan. Sebelumnya, dari Juni 2013 sampai dengan September 2019 beliau memimpin tim kecil digital yang terdiri dari 30+ orang yang tergabung dalam VP Digital / VP Healthcare, mengembangkan bisnis dan mempertahankan profitabilitas di bidang industri pemasaran perawatan kesehatan sebagai CEO/Founder. Sebelumnya, dari November 2011 sampai dengan November 2015 beliau menjadi CEO/Founder MeetDoctor yang berhasil mengembangkan bisnis menjadi 3 pemain teratas di pasar kesehatan digital Indonesia (#1 pada 2012-2013, sebelum Alodokter dan Halodoc memasuki pasar).

Keahlian yang dikuasainya antara lain Public Speaking, Strategic and Analytical thinking, dan berpengalaman pada bidang Integrated Healthcare marketing, digital strategy and digital marketing.

Latar belakang Pendidikan

- Medical Doctor (MD), Universitas Airlangga, 1999-2005.



Caroline Riady, BA.

Memperoleh gelar Bachelor of Arts di bidang pendidikan sekolah dasar dari Wheaton College, Wheaton, Illinois, Amerika Serikat, pada tahun 2004.

Caroline Riady memulai karirnya di bidang pendidikan dasar, mengajar di sekolah negeri dan swasta di AS dan Indonesia. Kemudian, beliau bekerja sebagai dosen di Pelita Harapan Teachers College, mempersiapkan calon guru untuk mengajar di pedesaan, komunitas kurang mampu di Indonesia. Pada tahun 2012, beliau mulai menjabat sebagai Direktur Eksekutif Siloam Hospitals Kebon Jeruk dan pada tahun 2016 diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur Siloam Hospitals Group yang memimpin jaringan Siloam Hospitals dengan 39 rumah sakit.

Karir:

- Siloam Hospitals Group Chief Executive Officer (2019 – Sekarang).
- Wakil Presiden Direktur (2016 – 2019).
- Direktur Pelaksana Operasi, Produktivitas & Efektivitas (Mei 2016 – Oktober 2016).
- Siloam Hospitals Kebon Jeruk Chief Executive Officer (2012 – Mei 2016).
- Sekolah Pelita Harapan dan Universitas Pelita Harapan, Guru (2006 – 2012).
- Lincoln Elementary School, Guru (2004 – 2006) Prof.



Dr. Anwar Nasution
(Ketua BPK RI periode 1999-2004)

Prof. Dr. Anwar Nasution merupakan ahli ekonomi Indonesia dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan periode 2004-2009 dan Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 1999-2004. Beliau juga merupakan anggota dari banyak asosiasi ekonomi internasional, seperti *International Advisory Group of Finance Forum of the Pacific Economic Cooperation Council (PECC)*, *The Asian Economic Panel*, dan *The Center for Pacific Basin Monetary and Economic Studies of San Francisco*. Beliau juga terkenal atas berbagai publikasi mulai dari tulisan akademis hingga editorial, baik nasional maupun internasional, khususnya di bidang ekonomi

Latar Belakang Pendidikan

- Ph.D, Ekonomi, *Tufts University*, AS (1982).
- *Master of Public Administration*, *The Kennedy School of Government*, *Harvard University*, AS (1973).
- Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (1968).



Dr. Imam B. Prasjo

Dr. Imam B. Prasjo merupakan tokoh sosiolog nasional dan pengajar/dosen di FISIP UI. Beliau juga merupakan Ketua Yayasan Nurani Dunia, yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan bagi kalangan yang berasal dari keadaan ekonomi yang kurang mampu. Sebelumnya, beliau memiliki pengalaman sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum periode 1999-2004, dan Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2011. Beliau kerap kali muncul sebagai narasumber di berbagai acara TV maupun seminar nasional.

Latar Belakang Pendidikan

- Ph.D, *Brown University*, AS (1997).
- *Master of Arts*, *Kansas State University*, AS (1990).
- Sarjana Sosial, FISIP, Universitas Indonesia (1986).



Meta Dharmasaputra, SE, MM.

Adalah Co-founder dan CEO Katadata, perusahaan media, data dan riset di bidang ekonomi dan bisnis yang berdiri pada April 2012. Selama hampir 25 tahun karier jurnalistiknya, sepanjang 2001-2012 dihabiskannya di Grup Tempo, antara lain sebagai Redaktur Pelaksana Desk Ekonomi dan Investigasi di Koran dan Majalah *Tempo*. Jabatan terakhirnya Redaktur Eksekutif *Koran Tempo*.

Berkat liputan investigasi kasus pajak Asian Agri yang dituliskannya dalam buku *Saksi Kunci (Key Witness)*, ia dianugerahi Udin Award dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia (2008) dan Journalist of the Year (2007) versi PWI Reformasi. Buku terbarunya “Mengejar Fajar” (2018) berisi cerita dan fakta di balik penyelamatan Bank Century.

Lulusan Fakultas Ekonomi UGM dan Magister Manajemen Prasetiya Mulya Business School ini, pada 2008 mengikuti Jefferson Fellowship, *East-West Center*, Hawaii, untuk 12 jurnalis Asia-Pasifik. Ia juga terlibat di Badan Pengawas Transparency International Indonesia (TII), Majelis Etik Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Badan Penasihat LBH Pers.



Dr. Burhanuddin Muhtadi

Menempuh S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan S2 (MA) serta S3 (PhD) di Universitas Nasional Australia. Pada 2010, beliau menjadi dosen di Prodi Ilmu Politik, FISIP UIN Syarif Hidayatullah. Burhanuddin juga pernah mengemban tugas sebagai Direktur *Public Affairs* pada Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2003. Pada tahun 1996-2004, ratusan artikel yang dibuat oleh Burhanuddin Muhtadi termuat dalam berbagai media massa, baik di tingkat lokal maupun nasional. Artikel yang dibuatnya tersebut terdiri dari dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Beragam artikel yang ia tulis di antaranya berjudul Pasifisme Demokrasi, Mengukur Viabilitas Politik Aliran, Menyoal Hegemoni Bahasa Agama, Pembebasan Kaum Tertindas, Dilema Kampanye Dialogis, Reward dan Punishment dalam Pemilu, Dunia yang Terbelah, Formasi Inteligensia Muslim Indonesia, dan Lahirnya Partai Miniatur Indonesia.

Pada 2019, Burhanuddin mendapatkan penghargaan dalam Indonesian and Best Corporate Award 2019 untuk kategori 'The Most Trusted Survey Institution Company of the Year'. Disamping itu, Disertasi dari Burhanuddin yang berjudul "*Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, and Winning Margins*" diterbitkan dalam buku yang berjudul "Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru" oleh Palgrave McMillan dan mendapat penghargaan *Honourable Mention for the 2020 Asian Studies Association of Australia's Early Career Book Prize* pada tahun 2020.



Julian Aldrin Pasha, MA., PhD.

Menempuh S1 di FISIP UI, dan S2 (MA) serta S3 (PhD) di Hosei University, Tokyo, Jepang. Saat sebagai Wakil Dekan FISIP UI, mendapat tugas negara sebagai Juru Bicara Kepresidenan pada periode 2009-2014. Penerima penghargaan Bintang Jasa Utama dari Pemerintah RI, dan anggota kehormatan korps marinir TNI-AL. Setelah mendapat PhD., sempat mengajar memberi kuliah S1 selama dua tahun di Jepang (2003-2005), sebelum kembali ke almamater Universitas Indonesia. Di samping sebagai dosen tamu di beberapa universitas di China dan Jepang dan melakukan riset, juga mengajar di Sesdilu-Kemenlu RI, FISIP UI dan SKSG-UI. Saat ini sebagai Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Ketua Bidang HAM di Habibie Center serta Ketua Asosiasi Studi Jepang di Indonesia. Di samping mengajar di almamater, juga aktif dalam *public lectures*, penelitian serta riset terkait kebijakan. Menaruh minat terhadap *subject matter* studi kebijakan dan perkembangan geopolitik, khususnya konstelasi politik di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.



Yunarto Wijaya

Yunarto Wijaya merupakan Direktur Eksekutif dari Charta Politika, sebuah perusahaan konsultan politik yang menyediakan jasa riset dan analisis politik, *media monitoring* dan strategi pemenangan yang berbasis penggunaan *database*, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang lengkap. Yunarto juga dikenal sebagai pengamat politik yang seringkali diundang dalam berbagai acara atau diskusi panel pada skala nasional. Sebelum di Charta Politika, Yunarto sempat menjadi banker profesional di *Citi Bank*.

Latar Belakang Pendidikan

- Magister Manajemen, Ekonomi, Universitas Indonesia (2007-2009).
- Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan (2004).



Raldi Hendro T. Koestoer (Drs, MSc., PhD., APU., AKAU, Prof.)

Raldi Hendro Koestoer dikenal sebagai seorang aktivis lingkungan hidup, dermawan, *social entrepreneur* dan sebagai guru besar bidang lingkungan UI. Pria kelahiran Jakarta 10 April 1958 ini telah mengabdikan di Kementerian Koordinator pada Bidang Perekonomian Republik Indonesia sejak 2006 dengan menjadi Eselon I di berbagai bidang perekonomian hingga sekarang yang telah menjadi profesor/peneliti senior, disamping juga menjadi *researcher-associatae professor* di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak 1983.

Perjalanannya dimulai dari memperoleh gelar Sarjana (Bs.c) jurusan Geografi dari Universitas Indonesia pada 1980, kemudian mengambil gelar S2 (Drs.) di kampus dan jurusan yang sama pada Tahun 1982. Kemudian dilanjutkan meraih gelar *Master of Science* bidang *Regional Science* pada Universitas *Queensland, Australia* pada 1986 dan terakhir di Tahun 1992 beliau mendapatkan gelar (Ph. D) dari *Griffith University, Australia*. Atas dedikasinya, Prof Raldi menerima penghargaan atau tanda jasa dari pemerintah Indonesia yakni Satria Lancana Karya Satya XX *National Honor Charter* pada 2004 dari Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada 2014, ia kembali dianugerahi bintang Satria Lancana Karya Satya XX *National Honor Charter* dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Beberapa jabatan sektor swasta yang diembannya, antara lain Presiden *Commissioner* PT Enviro Total Solusi sejak 2018, President *Commissioner* PT Radian Grup Indonesia sejak 2020, dan *Board Commissioner* PT Vinisx Hoki Sejahtera sejak 2019. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi *Board of Commissioner Member* di PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan *President Commissioner* di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).



Agus P. Sari

Agus Pratama Sari adalah seorang Chief Executive Officer (CEO) Landscape Indonesia (PT Bentang Alam Indonesia), perusahaan yang menjembatani pengelolaan lanskap berkelanjutan dengan keuangan sejak tahun 2017 sampai sekarang. Beliau sempat menjabat sebagai wakil ketua bidang perencanaan dan pembiayaan Badan Pengelola Penurunan Emisi Deforestasi dan Degradasi Hutan (Badan Pengelola REDD+) periode 2014 sampai 2015. Sebelumnya beliau merupakan Ketua Pokja Instrumen Pendanaan, Gugus Tugas Presiden tentang REDD+ pada periode 2010 sampai 2013, dan pernah menjabat sebagai Country Director Indonesia dan Strategic Policy Director Asia Tenggara, Ecoscurities pada tahun 2005 sampai 2010.

Beliau pernah menjadi Penasihat Senior, Program Pembangunan PBB, tentang Pembiayaan REDD+ dan Komoditas Berkelanjutan pada tahun 2015-2016. Beliau juga merupakan anggota dan penulis utama (hingga 2007, dan 2020 hingga sekarang), Hadiah Nobel Perdamaian - Winner Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Selain itu, beliau juga merupakan dosen senior, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung.

Latar belakang pendidikan

- Doctor of Philosophy, Energy and Resources Group, University of California, Berkeley, AS (1999).
- Masters of Arts, Energy and Resources Group, University of California, Berkeley, USA (1996).
- Insinyur, Jurusan Listrik dan Elektronika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Indonesia, Indonesia (1992).



Ir. Onno W Purbo, M.Eng, PhD

Onno W Purbo merupakan pakar yang prominent di bidang teknologi informasi. Beliau dikenal aktif dalam berbagai seminar, konferensi nasional, maupun internasional, dan mempublikasikan tulisan-tulisannya, seperti buku dan artikel secara terbuka di internet. Karya inovatifnya diantaranya adalah Wajanbolic, sebagai upaya membangun koneksi internet murah tanpa kabel sampai Kawasan pelosok Indonesia dan RT/RW-Net sebagai jaringan komputer swadaya masyarakat untuk menyebarkan akses internet di masyarakat, serta penerapan Open BTS. Beliau menerima berbagai penghargaan, seperti Postel Service Award dari Internet Society sebagai apresiasi bagi kontribusi yang luar biasa bagi pengembangan teknologi internet di Indonesia.

Latar Belakang Pendidikan

- Ph.D, *Waterloo University*, Kanada (1994)
- *Master of Engineering*, *McMaster University*, Kanada (1989)
- Sarjana Teknik, Elektro, Insititut Teknologi Bandung (1987)



PROLOG



PROLOG



Dr. Agung Firman Sampurna, C.S.F.A., C.Fr.A., C.G.C.A.E., Q.G.I.A.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

BERSAMAAN dengan semakin meningkatnya intensitas *volatility, uncertainty, complexity and ambiguity*, bencana pandemi Covid-19 telah mengakibatkan perubahan di berbagai bidang. Perubahan itu terbentang mulai dari cara kita berkomunikasi, berbelanja, belajar, berpolitik, dan seterusnya. Pendeknya, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan cara kita berkebudayaan berubah.

Dengan berbagai perubahan tersebut, persepsi kita terhadap berbagai hal itu pun ikut berubah. Akhirnya, faktor-faktor pembentuk masa depan pun ikut berubah. Semua ini pada gilirannya mendorong setiap negara merancang skenario masa depan dalam menyusun strategi guna menyongsong perubahan tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memiliki peran untuk memberikan keyakinan (*assurance*), saran perbaikan, pendapat, pertimbangan dan pandangan ke depan kepada pemerintah dan masyarakat untuk menangani Covid-19 sekaligus merancang masa depan Indonesia. Untuk itu, BPK dengan peran *oversight, increasing insight*, dan kini *facilitating foresight* telah menetapkan arah strategis dalam Rencana Strategis BPK 2020-2024.

Penyusunan buku berjudul *Scenario Planning, Dampak, dan Proyeksi di Berbagai Bidang pada Masa dan*

Pascapandemi Covid-19: Pandangan Para Pakar dan Praktisi ini adalah salah satu implementasi renstra tersebut. Penyusunan buku ini juga merupakan wujud aktualisasi prinsip yang tertuang dalam INTOSAI (The International Organization of Supreme Audit Institutions) Principle 12 on the Value and Benefits of Supreme Audit Institutions, di antaranya '*demonstrating ongoing relevance to citizens, parliament and other stakeholders,*' dan '*being a credible source of independent and objective insight and guidance to support beneficial change in the public sector.*'

Dalam buku ini, BPK mengundang sejumlah pakar dan praktisi di berbagai bidang antara lain dari bidang ekonomi, keuangan, kesehatan, sosiologi, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi untuk membagi pandangannya mengenai *scenario planning*, dampak, dan proyeksi di berbagai bidang yang menggambarkan kemungkinan yang terjadi pada masa depan. Para pakar dan praktisi ini memulainya dengan membahas ketidakpastian (*critical uncertainties*) yang melingkupi Indonesia dan dunia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin memengaruhi masa depan.

Para pakar dan praktisi tersebut kemudian memberikan tinjauan masa depan dengan menyoroti implikasi

jangka panjang kebijakan pemerintah saat ini, mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang dihadapi sebelum hal tersebut muncul menjadi krisis, serta merespons isu strategis yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Dengan membagikan pandangannya itu, para pakar dan praktisi tersebut sekaligus memfasilitasi para pengambil keputusan untuk memilih alternatif kebijakan masa depan.

Untuk memudahkan pemahaman, buku ini membagi pandangan para pakar dan praktisi itu ke dalam 7 bab. Yang pertama pemikiran di bidang *scenario planning*, kedua di bidang kesehatan, ketiga di bidang perekonomian/perbankan, keempat di bidang sosiologi, kelima di bidang politik/geopolitik, keenam di bidang lingkungan hidup, ketujuh di bidang teknologi.

Di bidang *scenario planning*, Daniel Sparringa dan Shuhaela F. Haqim akan membagikan pandangan mereka tentang skenario masa depan Indonesia. Di bidang kesehatan, Adhiatma Gunawan dan Caroline Riady akan mengungkapkan perspektif mengenai layanan kesehatan pada era pascapandemi. Lalu di bidang ekonomi/perbankan ada Anwar Nasution dan Teguh Dartanto yang membagikan pandangannya tentang dampak ekonomi pandemi Covid-19 serta peluang dan tantangan yang tersedia.

Adapun di bidang sosiologi, Imam B. Prasodjo dan Metta Dharmasaputra akan mengupas aspek transformasi dalam tatanan sosial pascapandemi. Di bidang politik/geopolitik ada Burhanuddin Muhtadi, Taberez A. Neyazi dan Sourabh B. Paul, serta Julian Aldrin Pasha dan Yunarto Wijaya yang membahas tatanan politik Indonesia pascapandemi. Di bidang lingkungan hidup ada Raldi Hendro Koestoer dan Agus Pratama Sari yang mengulas krisis iklim dan lingkungan global pascapandemi, dan di bidang teknologi ada Onno W. Purbo yang membahas transformasi digital akibat pandemi.

Pandangan para pakar dan praktisi tersebut diharapkan dapat menginspirasi para pengambil keputusan, kementerian, lembaga, dan instansi di pusat dan daerah, juga masyarakat luas agar menggunakan *foresight* dalam rangka meningkatkan kualitas dan

Untuk memudahkan pemahaman, buku ini membagi pandangan para pakar dan praktisi itu ke dalam 7 bab. Yang pertama pemikiran di bidang *scenario planning*, kedua di bidang kesehatan, ketiga di bidang perekonomian/perbankan, keempat di bidang sosiologi, kelima di bidang politik/geopolitik, keenam di bidang lingkungan hidup, ketujuh di bidang teknologi.

efektivitas kebijakannya. Hal itu dilakukan terutama untuk keluar dari pandemi Covid-19 dan menjadi pemerintah serta masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai krisis serta mengawal agenda 2030 dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Masa depan Indonesia pascapandemi Covid-19 sudah pasti akan dihadapkan pada sejumlah tantangan. Namun, pada saat yang sama, juga terdapat banyak peluang dan kemungkinan yang bisa diambil untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tangguh. Mari kita melakukan perjalanan ke masa masa depan untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia Jaya.

Jakarta, Maret 2022

Ketua BPK

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFA., CGCAE., QGIA.



PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DALAM Mendukung PERAN *FORESIGHT* BPK

Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFA., QGIA
Wakil Ketua BPK RI

Untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional selama masa pandemi Covid-19, pemerintah telah menerapkan kebijakan keuangan negara yang bersifat *countercyclical* berupa peningkatan belanja. Belanja tersebut digunakan untuk program pemulihan ekonomi nasional, perlindungan sosial, dan penanganan pandemi.

Sementara itu, di sisi lain pemerintah menurunkan target pendapatan negara, di antaranya dengan menerapkan beberapa insentif perpajakan. Kondisi ini menciptakan tekanan pada APBN berupa defisit yang semakin melebar.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan keuangan negara yang bersifat *extraordinary* untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 melalui Perppu No. 1/2020 yang kemudian ditetapkan oleh DPR menjadi Undang-Undang No. 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Salah satu ketentuan penting dalam UU No. 2/2020 adalah pelanggaran batas defisit APBN dari maksimal

3% dari produk domestik bruto (PDB) menjadi dapat melampaui 3% dari PDB hingga tahun 2022. Setelah tahun 2023, defisit APBN harus kembali menjadi paling tinggi 3% dari PDB.

BPK telah melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atas penanganan Pandemi Covid-19 dengan pendekatan *risk-based comprehensive audit*. Pemeriksaan tersebut merupakan perwujudan *oversight* dan *insight* dari suatu *Supreme Audit Institution* (SAI).

Akan tetapi, pandemi Covid-19 telah menimbulkan turbulensi dan disrupsi terhadap berbagai aspek kehidupan. Banyak ketidakpastian terkait dengan kondisi tata kelola dunia pascapandemi Covid-19. Dalam kondisi ini, SAI dituntut untuk mengambil peranan yang lebih besar dengan memberikan *foresight* kepada pemerintah dan masyarakat.

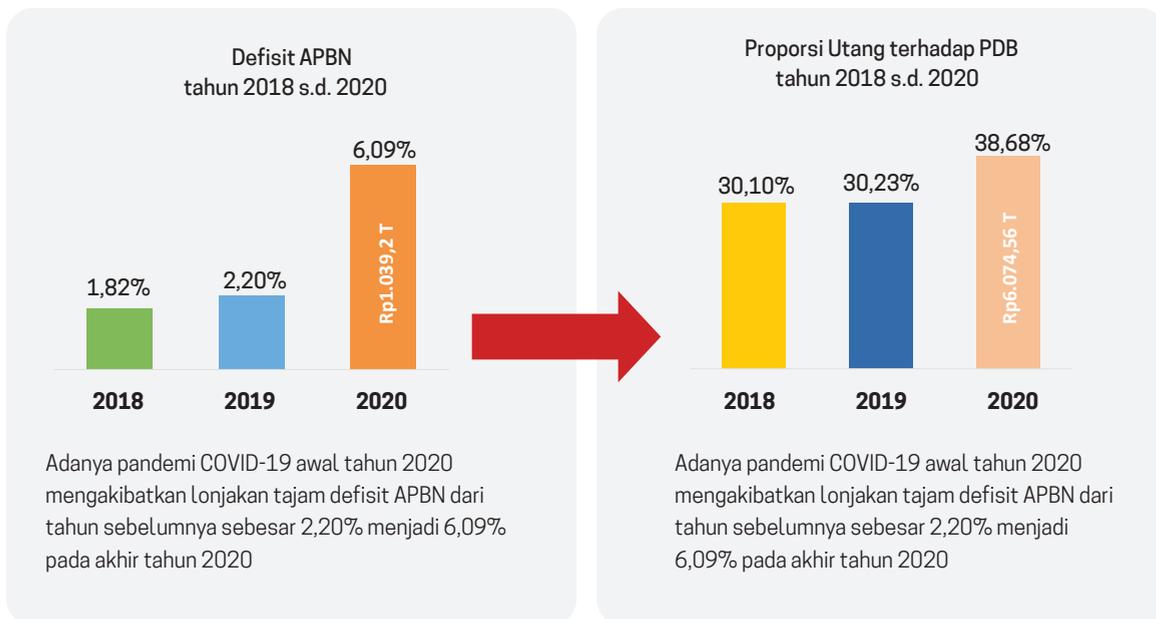
Membengkaknya defisit dan bertambahnya utang membuat beberapa pihak khawatir terhadap posisi fiskal pemerintah. Meski demikian, pemerintah selalu meyakinkan publik bahwa perekonomian masih berada dalam kendali dan tertangani dengan baik. Selain itu pemerintah selalu menyampaikan optimisme bahwa keadaan akan membaik pada tahun-tahun ke depan.

Di satu sisi optimisme tersebut diperlukan sebagai bentuk kepercayaan diri untuk bisa segera bangkit dari keterpurukan, tetapi di sisi lain terdapat pertanyaan besar apakah hal tersebut merupakan kondisi yang faktual. Di sinilah perlunya peran lembaga independen dan kredibel untuk memberikan penilaian objektif atas kondisi saat ini melalui fungsi *oversight* dan *insight*

serta proyeksi masa depan melalui fungsi *foresight*.

Sebelum merebaknya pandemi Covid-19 pemerintah selalu menjaga defisit APBN di bawah 3% dari PDB, di mana pada tahun 2018 dan 2019 angkanya adalah 1,82% dan 2,2%. Namun pada tahun 2020, defisit APBN mengalami lonjakan tajam sebesar Rp1.039,2 triliun atau menjadi 6,09% dari PDB.

Gambar 1. Defisit APBN Akibat Pandemi COVID-19



Primary Balance tahun 2018-2020

2018	2019	2020
11,49 T	73,13 T	517,78 T

*estimasi

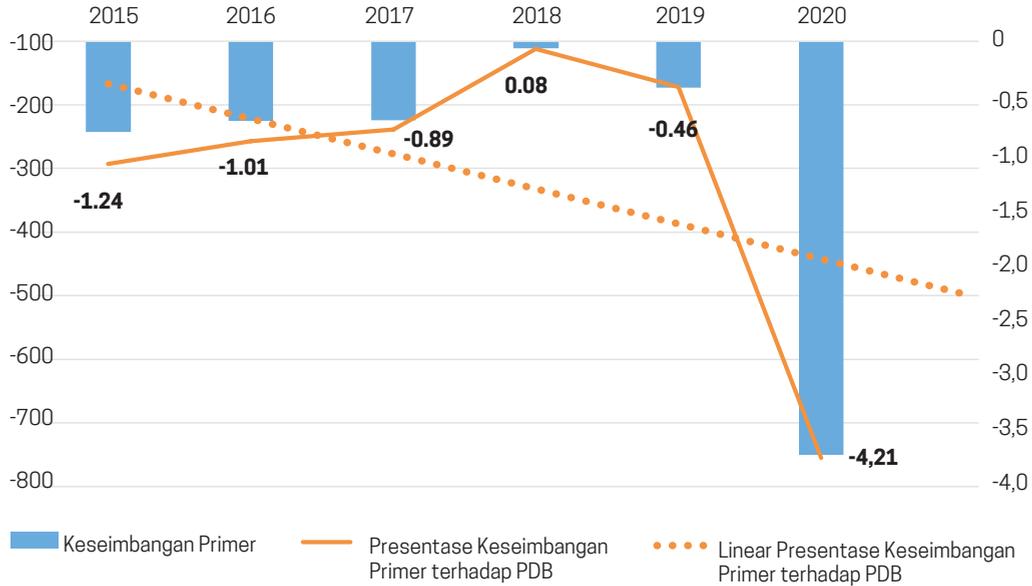
Proporsi utang terhadap PDB

naik 8,45% tahun 2019 sebesar 30,23% menjadi 38,68% pada tahun 2020

Pelebaran defisit pada tahun 2020 berdampak pada peningkatan utang. Pada tahun 2020, pemerintah mencatat utang sebesar Rp6.074,56 triliun atau 38,68% dari PDB. Proporsi ini meningkat signifikan jika dibandingkan dengan proporsi utang terhadap PDB pada tahun 2018 dan 2019 yang masing-masing sebesar 30,10% dan 30,23%.

Indikator untuk menilai dampak utang terhadap kesinambungan fiskal adalah melalui analisis keseimbangan primer (*primary balance*), yaitu selisih antara pendapatan dan belanja selain bunga utang. Rasio keseimbangan primer terhadap PDB Indonesia menunjukkan perbaikan dari tahun 2015 s.d. 2018, tetapi kemudian mengalami penurunan tajam dari minus 0,46 pada tahun 2019 menjadi minus 4,21 pada tahun 2020.

Gambar 2. Keseimbangan Primer



Dari grafik keseimbangan primer tersebut terlihat jelas bahwa analisis *forecast* dengan menggunakan metode *trend linier* hasilnya tidak akurat baik untuk tahun 2018, 2019, dan 2020. Di sinilah perlunya BPK mengembangkan dan mengaplikasikan metode *foresight* dengan berbagai *scenario planning* untuk mendapatkan gambaran apa yang mungkin terjadi di masa datang

Debt service to revenue menunjukkan perbandingan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang terhadap penerimaan negara dan sejak tahun 2018 selalu di melampaui ambang batas maksimal seperti yang telah direkomendasikan International Monetary Fund (IMF) yaitu 35%.

Gambar 2. Keseimbangan Primer

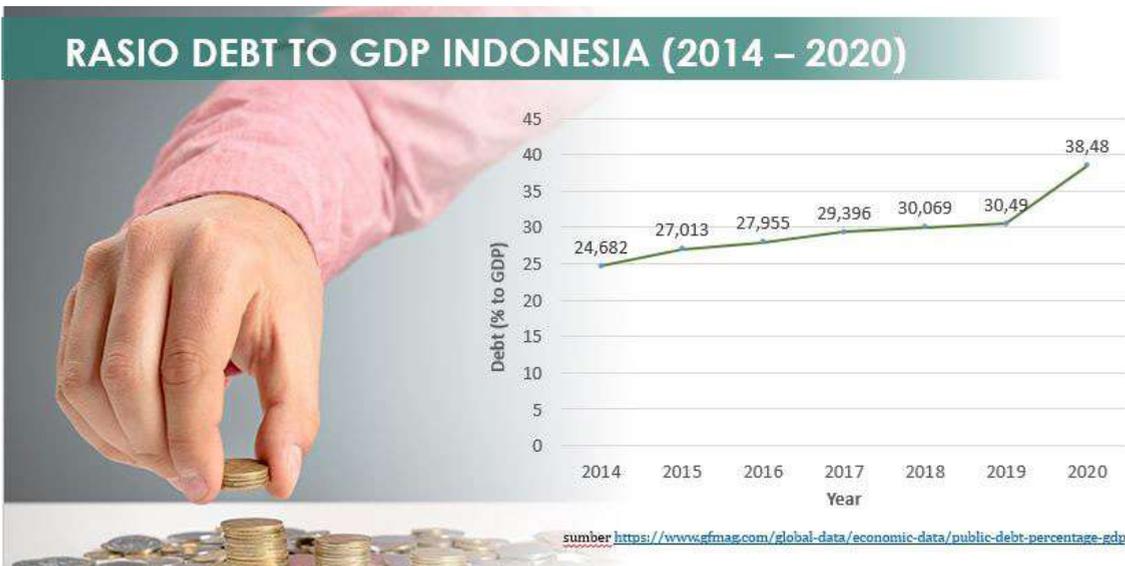


Demikian pula rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara melampaui batas yang direkomendasikan IMF. Peningkatan kedua rasio tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja bunga dan pembayaran pokok utang tidak diimbangi dengan kenaikan penerimaan negara. Rasio saldo

utang terhadap penerimaan mengalami peningkatan bahkan jauh melampaui ambang batas yang ditetapkan IMF dan International Debt Relief (IDR). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan utang tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan.

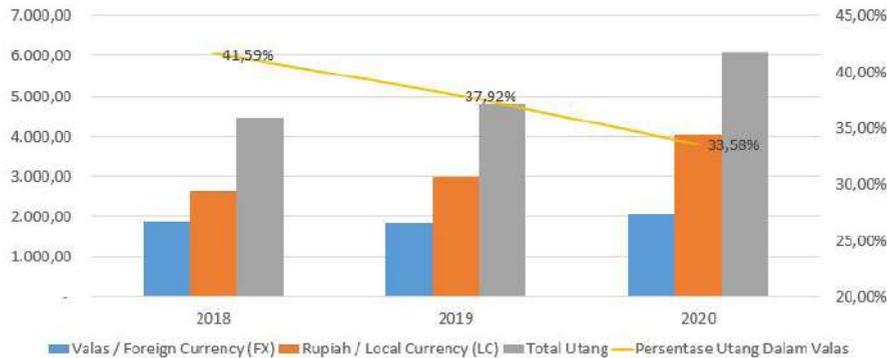


Rasio utang terhadap PDB selalu mengalami peningkatan tetapi masih dibawah ambang batas yang ditetapkan *Maastricht Treaty* yaitu 60%. Yang patut dicermati adalah akibat pandemi Covid-19, peningkatan rasio utang terhadap PDB yang terjadi pada tahun 2020 lebih tinggi dari tren kenaikan dalam lima tahun terakhir.



Lebih lanjut, perlu dicermati komposisi utang dalam denominasi rupiah dan valas dan posisi cadangan devisa. Jumlah utang pemerintah dalam denominasi valas selalu mengalami peningkatan tetapi secara proporsi sudah menurun dalam tiga tahun terakhir.

Komposisi valuta asing dalam utang pemerintah mencapai 33,58% pada tahun 2020. Utang pemerintah rentan membengkak apabila terjadi pelemahan rupiah terhadap mata uang asing sebagai akibat adanya ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global



Permasalahan membengkaknya utang akibat pandemi bukan hanya dialami oleh Indonesia tetapi juga negara-negara lainnya. Hampir semua negara mengeluarkan kebijakan perekonomian yang bersifat *countercyclical* sehingga mengalami peningkatan utang.

Sebaliknya, PDB mengalami penurunan sehingga menyebabkan peningkatan rasio utang terhadap PDB. Walaupun demikian, rasio utang terhadap PDB Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 relatif lebih baik dibanding negara-negara G20 lainnya.

Perbandingan Total Utang, Utang Pemerintah dalam Denominasi Mata Uang Asing, dan Cadangan Devisa Negara G20+Singapore

Negara	2018			2019			2020			% FX Debt to FX Reserves		
	Total Debt	% FX Debt	FX Reserves	Total Debt	% FX Debt	FX Reserves	Total Debt	% FX Debt	FX Reserves	2018	2019	2020
Argentina	331.264,20	76,19	65.785,80	321.192,50	77,67	44.848,30	333.523,20	76,29	39.387,10	383,7%	956,3%	645,0%
Australia	629.743,70	-	66.597,70	708.784,40	-	53.880,50	906.755,50	-	38.754,70	0,0%	0,0%	0,0%
Brazil	1.220.936,50	2,56	374.714,80	1.283.433,90	2,97	356.884,10	1.199.037,00	4,10	355.619,90	8,7%	10,7%	13,8%
Canada	693.219,50	1,20	83.926,00	728.106,30	1,14	85.297,00	1.090.255,20	0,79	90.428,00	9,9%	9,7%	9,5%
China	2.183.080,00	0,35	3.168.000,00	2.405.009,30	0,76	3.222.900,00	3.196.679,70	0,92	3.356.500,00	0,2%	0,6%	0,9%
Germany	1.514.292,00	-	198.027,10	1.459.727,60	-	224.028,00	1.798.206,70	-	-	0,0%	0,0%	na
Perancis	2.461.708,80	0,00	152.706,40	2.507.125,50	0,00	175.209,30	2.870.782,90	0,00	189.506,10	0,0%	0,0%	0,0%
India	1.157.629,58	-	393.797,93	1.318.350,13	-	452.078,26	1.480.428,52	-	573.593,99	0,0%	0,0%	0,0%
Indonesia	305.151,28	40,96	121.481,05	343.732,27	37,86	124.628,07	430.663,33	33,53	131.970,53	102,9%	104,4%	109,4%
Italia	2.292.856,40	-	152.361,94	2.324.836,40	-	175.397,95	2.488.764,60	-	na	0,0%	0,0%	na
Jepang	1.100.526,60	-	1.270,98	1.110.780,70	-	1.323,75	1.212.468,00	-	1.394,68	0,0%	0,0%	0,0%
Mexico	422.491,76	12,69	176.513,85	468.653,61	21,25	184.012,03	438.237,45	25,38	198.783,10	54,3%	54,1%	55,9%
Korsel	636.303,55	1,22	403.143,13	663.005,70	1,18	407.533,47	na	na	na	1,9%	1,9%	na
Rusia	193.125,81	31,60	463.387,33	233.075,57	29,50	545.768,33	219.409,75	29,07	589.867,00	13,2%	12,6%	10,8%
Saudi Arabia	149.327,73	45,54	501.851,39	180.780,00	45,01	496.340,07	227.604,04	41,11	452.413,73	13,5%	16,4%	20,7%
Singapore	546.699,50	-	397.088,97	641.094,30	-	376.638,50	704.721,40	-	470.947,23	0,0%	0,0%	0,0%
Afsl	192.045,61	10,47	50.826,33	225.004,93	10,35	54.826,67	260.997,87	10,21	54.143,67	39,6%	42,5%	49,2%
Turki	244.875,35	38,53	90.075,67	264.754,08	42,79	105.033,00	278.226,89	49,12	84.561,33	104,7%	107,9%	161,6%
UK	2.381.275,89	-	171.343,55	2.549.851,23	-	179.811,96	2.820.085,60	-	179.820,99	0,0%	0,0%	0,0%
US	11.997,04	-	125,80	23.222,59	-	129,48	27.768,01	-	144,89	0,0%	0,0%	0,0%

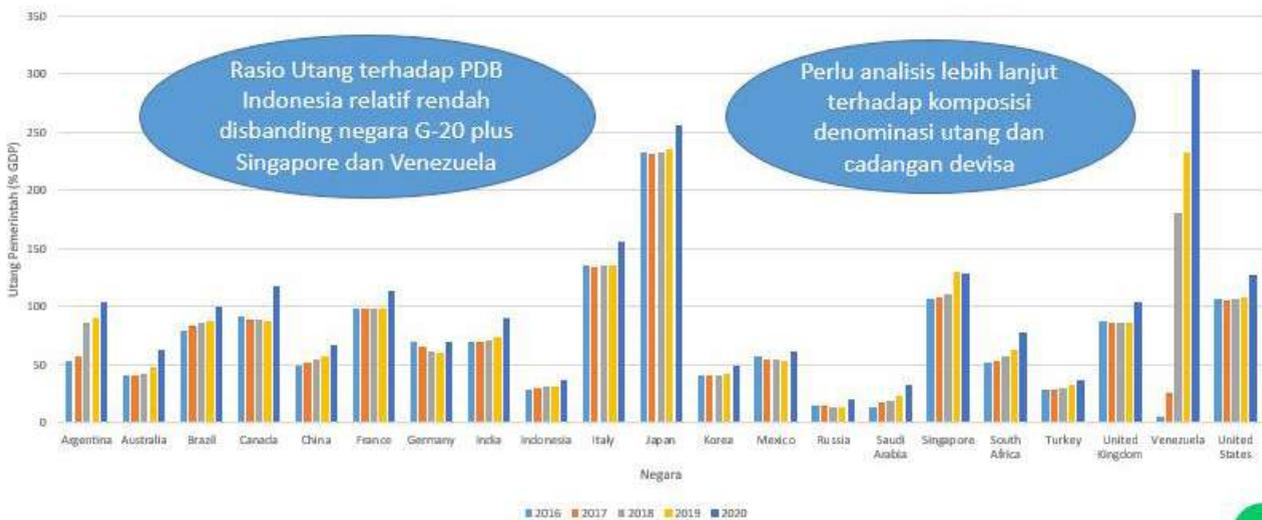
Utang LN Sektor Publik (Pemerintah dan BI) Tahun 2020 sebesar USD 209,2 miliar atau 158,33% dari Cadangan Devisa

Untuk menggambarkan besaran rasio utang terhadap PDB negara G20 lainnya, pada tahun 2019 terdapat tiga negara yang rasio utang per GDP-nya di atas 100% (USA, Italy dan Japan) dan pada tahun 2020 jumlahnya bertambah menjadi tujuh negara (Brazil, United Kingdom, Canada, France, USA, Italy, Japan).

Rasio utang terhadap PDB Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan negara-negara Asean. Rata-rata semua negara G-20 mengalami kenaikan utang pada tahun 2020 sebagai upaya untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19



11

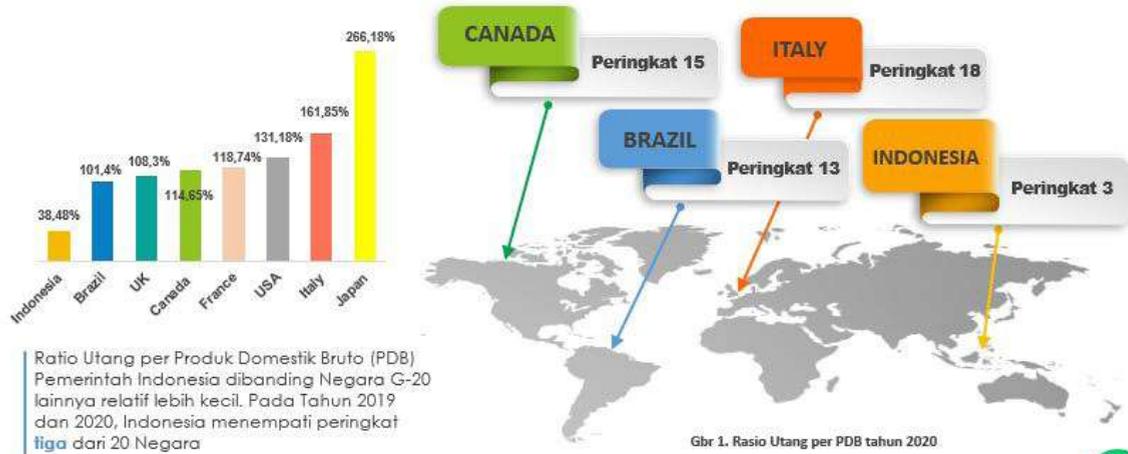


14

Rasio utang terhadap PDB Indonesia juga relatif lebih baik dibandingkan dengan negara-negara G-20. Rata-rata semua negara G-20 mengalami kenaikan utang pada tahun 2020 sebagai upaya untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19

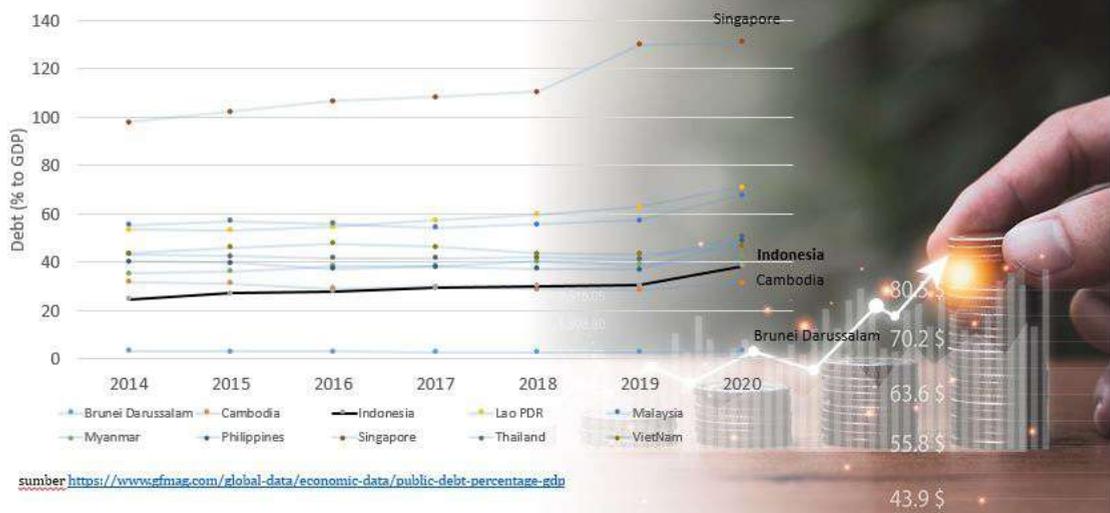
Di wilayah ASEAN, pada tahun 2019 dan 2020 Indonesia menempati peringkat 3 dari 10 negara dari sisi rasio utang/GDP. Hanya saja Indonesia menempati peringkat 9 dari sisi pertumbuhan rasio utang/GDP.

PERBANDINGAN UTANG PEMERINTAH RI DENGAN NEGARA G-20



12

RASIO DEBT TO GDP NEGARA ASEAN (2014 – 2020)

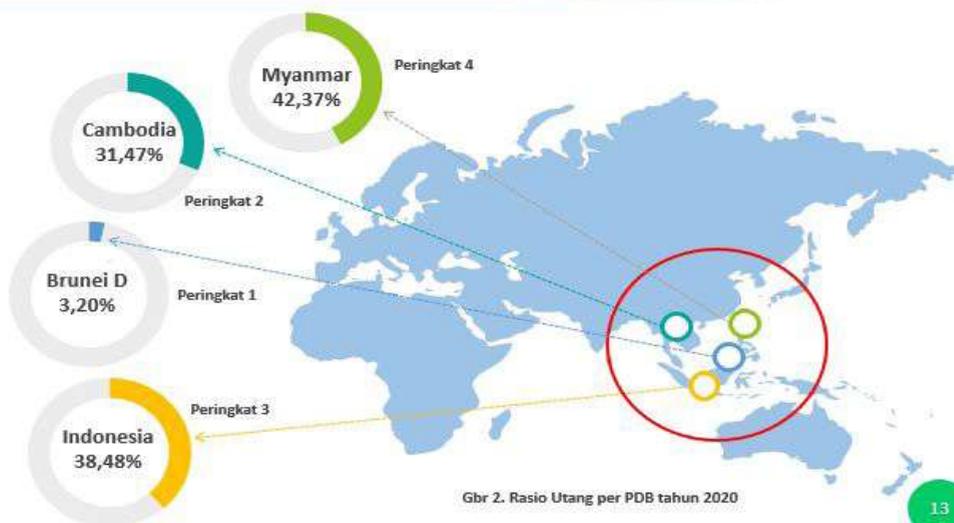


Meskipun dari rasio tersebut Indonesia dalam posisi yang baik dibandingkan dengan negara-negara lain, pemerintah harus tetap berhati-hati agar tidak terlena yang menyebabkan terjebak dalam utang yang akan membahayakan kesinambungan fiskal.

Beberapa anggota G20 memiliki rasio utang terhadap GDP yang sangat tinggi seperti Jepang sebesar 266,18%, USA sebesar 131,18%, dan Singapura sebesar 131,19%. Akan tetapi negara-negara tersebut ternyata tidak memiliki utang dalam denominasi valas.

PERBANDINGAN UTANG PEMERINTAH RI DENGAN NEGARA ASEAN

Pada tahun 2019 dan 2020, Indonesia menempati peringkat tiga dari 10 Negara ASEAN dari sisi Rasio Utang per Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, dari sisi pertumbuhan rasio utang per PDB, Indonesia menempati peringkat sembilan. Pemerintah tetap harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam utang yang dapat membahayakan kesinambungan fiskal.



Gbr 2. Rasio Utang per PDB tahun 2020

13

Di antara negara G-20, rasio total utang luar negeri terhadap total cadangan devisa Indonesia masih lebih besar dari Mexico, Brazil, India, Korea Selatan, dan Rusia.

Kondisi yang berbeda dihadapi oleh Argentina, Turki, dan Indonesia. Proporsi utang valas Argentina, Turki, dan Indonesia cukup tinggi yaitu masing-masing sebesar 76,29%, 33,53%, dan 49,12% pada tahun 2020. Kondisi ini diperparah dengan jumlah cadangan devisa yang terbatas yaitu Argentina hanya sebesar 39,39 miliar USD, Indonesia sebesar 131,97 miliar USD, dan Turki sebesar 84,56 miliar USD. Dengan demikian, rasio utang valas terhadap terhadap posisi cadangan devisa lebih besar dari 100%. Kondisi ini menyebabkan kurs rupiah rawan terhadap guncangan yang ditimbulkan oleh berbagai faktor eksternal.

Dalam kondisi seperti ini, peran *foresight* sangat penting untuk menyusun skenario berbagai faktor yang mungkin dapat menimbulkan guncangan terhadap rupiah dan alternatif upaya mitigasi yang tersedia.

Salah satu indikator untuk menilai kesinambungan fiskal adalah keseimbangan primer (*primary balance*), yang merupakan selisih antara pendapatan dan belanja selain bunga utang. Kondisi dianggap baik ketika keseimbangan primer tetap positif, yang berarti bahwa bunga utang dibayar dengan pendapatan negara, bukan dengan utang baru.

Nilai keseimbangan primer pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar negatif Rp11,49 triliun dan Rp73,13 triliun. Kondisi keseimbangan primer pada

tahun 2020 diperkirakan memburuk menjadi minus Rp517,78 triliun.

Aspek penting lain yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan utang luar negeri adalah rasio total utang luar negeri (*external debt stocks*) terhadap cadangan devisa (*international reserve*) yang menjelaskan perlindungan terhadap utang luar negeri oleh cadangan devisa suatu negara.

Rasio tersebut untuk Indonesia di tahun 2020 adalah lebih tinggi dari 100% dan menunjukkan bahwa cadangan devisa kita tidak cukup besar untuk menjamin seluruh kebutuhan valas yang diperlukan untuk pembayaran utang. Rasio ini juga menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengelola utang dengan lebih baik lagi, di antaranya dengan terus berupaya menurunkan utang dengan denominasi valuta asing.

Big Data Analytic

Renstra 2020-2024 menunjukkan komitmen BPK terhadap peningkatan kapasitas organisasi. *Pertama*, Renstra periode ini sangat kental dengan nuansa revolusi industri 4.0 dimana salah satu *flagship* adalah pemanfaatan *big data* untuk mendukung pelaksanaan mandat BPK.

Kedua, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perekonomian negara termasuk keuangan negara. *Ketiga*, renstra ini juga tidak luput dari pengaruh pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan strategi nasional pemerintah.

Mengingat dampak yang terjadi begitu besar, BPK merasa perlu melakukan percepatan pencapaian kematangan organisasinya untuk dapat memerankan fungsi *foresight* dengan memberikan alternatif pilihan kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah. Percepatan ini ditempuh termasuk dengan mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang mampu mengolah data dalam ukuran besar dengan kecepatan tinggi.

BPK telah menginisiasi penggunaan *big data analytics* untuk meningkatkan kemampuan *foresight* BPK. Kemampuan melakukan peran *foresight* dimiliki BPK melalui cara pandang dan cara berpikir yang berorientasi masa depan, dengan mengantisipasi dan memberikan alternatif-alternatif persiapan menghadapi perubahan-perubahan, baik yang *predictable* maupun yang bersifat *disruptive* yang dapat memengaruhi sistem pemerintahan dan kenegaraan.

Muncul pertanyaan mendasar terkait dengan *foresight*, yaitu apa yang membedakan *foresight* dengan *prediction*? Kedua terminologi tersebut sering dipertukarkan karena keduanya mengandaikan kemampuan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Prediction maupun *foresight* sama-sama membutuhkan data dan informasi masa lalu dalam kuantitas yang besar dengan kualitas yang memadai untuk mendukung perencanaan. *Prediction* merupakan hasil dari sebuah proses *forecast planning* di mana institusi berusaha merencanakan apa yang akan dipenuhi atau dilaksanakan di masa yang akan datang.

Contohnya dalam sebuah *material requirement planning*, terdapat sebuah proses untuk merencanakan beberapa *purchase order* dalam bentuk *Planned POs* yang nantinya akan direalisasikan. Dalam pemerintahan, hal ini serupa proses penyusunan anggaran yang hanya menargetkan beberapa titik yang diperkirakan, yaitu nilai anggaran dan *output* yang diharapkan. Indikator-indikator yang digunakan untuk proses *prediction* relatif terstruktur dan pasti.

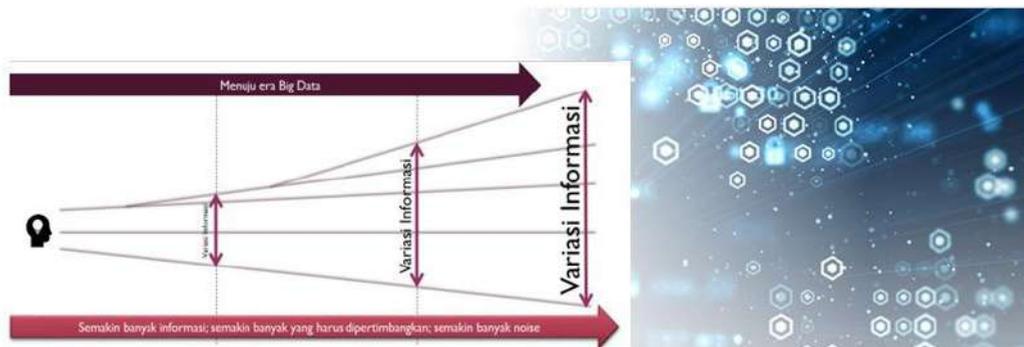
Sementara *foresight* merupakan hasil dari proses *scenario planning* di mana institusi berusaha memformulasikan alternatif-alternatif kebijakan yang akan dijalankan di masa yang akan datang berdasarkan peristiwa-peristiwa masa lampau. Namun, indikator-indikator yang digunakan dalam proses *foresight* cenderung tidak terstruktur dan tidak pasti.

Penggunaan Big Data Analytics Untuk Mendukung Foresight



Pada era *big data* saat ini, data dan informasi terus meningkat secara eksponensial sehingga proses perumusan *foresight* menjadi lebih kompleks dan melibatkan data yang terus menerus bertambah. Dengan demikian, proses perumusan *foresight* perlu memperhatikan *noise* yang muncul di masa lampau maupun yang akan muncul di masa depan.

Informasi yang mengandung *noise* ini merupakan tantangan sendiri dalam pengelolaan dan analisis data. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis data dan mengurangi *noise* secara signifikan adalah dengan menggunakan pendekatan *big data analytics*.



Gbr. Tantangan Big Data terhadap kapasitas foresight

- Proses perumusan *foresight* perlu memperhatikan *noise* yang muncul di masa lampau maupun yang akan muncul di masa depan. Informasi yang mengandung *noise* menjadi tantangan sendiri dalam pengelolaan dan analisis data.
- Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis data dan mengurangi *noise* secara signifikan adalah dengan menggunakan pendekatan ***big data analytics***.
- ***Big data analytics*** merupakan konsep menganalisis data yang ukurannya besar, bervariasi, dan saling terkait antara satu data dengan lainnya dari berbagai sumber.

Kemajuan teknologi informasi saat ini memungkinkan BPK untuk menerapkan prosedur-prosedur analitis terhadap data dalam jumlah sangat besar dan bervariasi. Pemanfaatan *big data analytics* untuk mempercepat peningkatan kematangan BPK menuju *foresight* menjadi sangat relevan. *Big data analytics* merupakan konsep menganalisis data yang ukurannya besar, bervariasi, dan saling terkait antara satu data dengan lainnya dari berbagai sumber.

Tahapan pemanfaatan *big data analytics* untuk meningkatkan kemampuan BPK dalam menghasilkan *foresight* memerlukan kolaborasi dan interaksi antara *human* dan *machine* yang sangat intens di setiap tahapan yang dilalui.

Tahap pertama adalah *data centric* di mana terjadi proses pengumpulan data termasuk pembersihan data agar data siap untuk dianalisis lebih lanjut. Di tahap ini, sudah terjadi interaksi antara manusia dan mesin di mana manusia berusaha mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk diserahkan kepada mesin komputer untuk disimpan agar dapat diperoleh kembali di kemudian hari.

Pada proses ini pula manusia melakukan perbaikan data berdasarkan kebutuhan analisisnya. Tahap ini merupakan tahapan di mana manusia menyerahkan aktivitas yang sulit dilakukan oleh manusia, tetapi sangat mudah dilakukan oleh komputer.

FORESIGHT DAN BIG DATA ANALYTICS

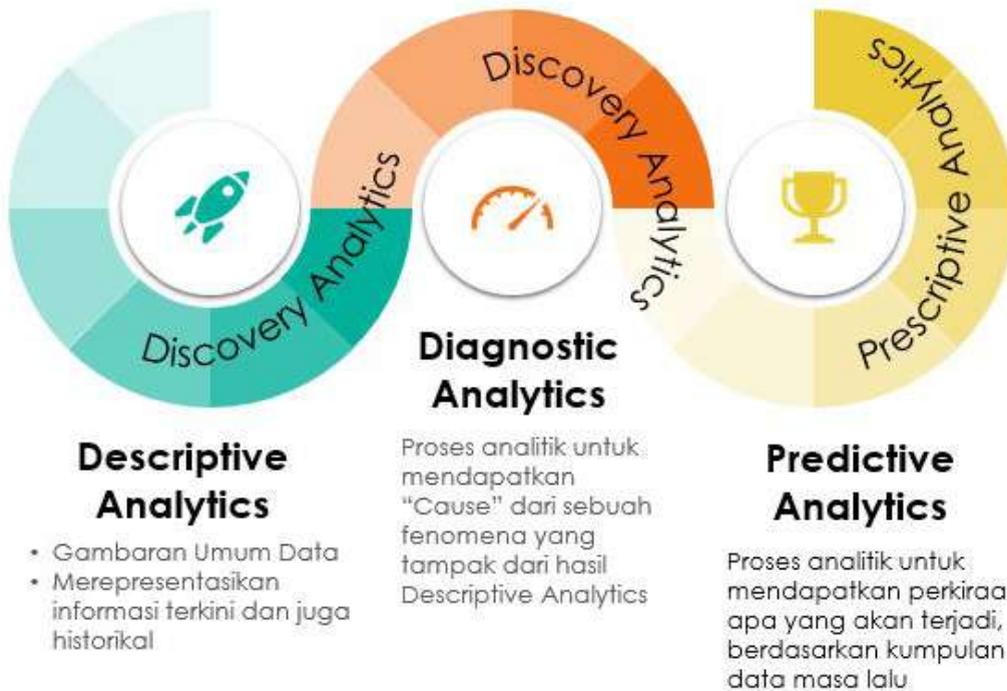


Tahap kedua adalah penerapan algoritma untuk menganalisis data dan menghasilkan model data sesuai dengan kebutuhan atau sering juga disebut sebagai sebuah *use case*, *research question* atau *interesting question*. Di tahap ini juga terjadi interaksi antara manusia dan komputer, di mana manusia sebagai makhluk berpikir memberikan instruksi kepada komputer untuk melakukan serangkaian prosedur analisis.

Hasil dari sebuah penerapan algoritma, salah satunya adalah *prediction* yang erat kaitannya dengan perumusan sebuah *foresight*. *Prediction* adalah hasil dari belajarnya komputer atas data-data yang sudah dipahaminya. Manusia menyerahkan dan menyimpan data ke dalam komputer, manusia mengajarkan komputer, dan komputer kemudian menerapkannya secara cepat, akurat, dan netral.

Tahap berikutnya adalah menghasilkan *foresight* dimana ini merupakan proses analisis dari banyak *prediction* yang saling terkait, sehingga akan muncul banyak skenario untuk merespons *prediction* yang dihasilkan dari proses pembelajaran mesin atau sering juga disebut *machine learning process*.

Terdapat tiga kelompok hasil analitik yang lazim dihasilkan dari proses *machine learning*, yaitu; *descriptive analytics*, *diagnostic analytics*, dan *predictive analytics*. Ketiga analisis tersebut lebih dominan dihasilkan oleh mesin komputer melalui penerapan beberapa algoritma. Selain ketiga analisis tersebut, terdapat dua analisis yang lebih dominan dilakukan oleh manusia, yaitu *discovery analytics* dan *prescriptive analytics*.

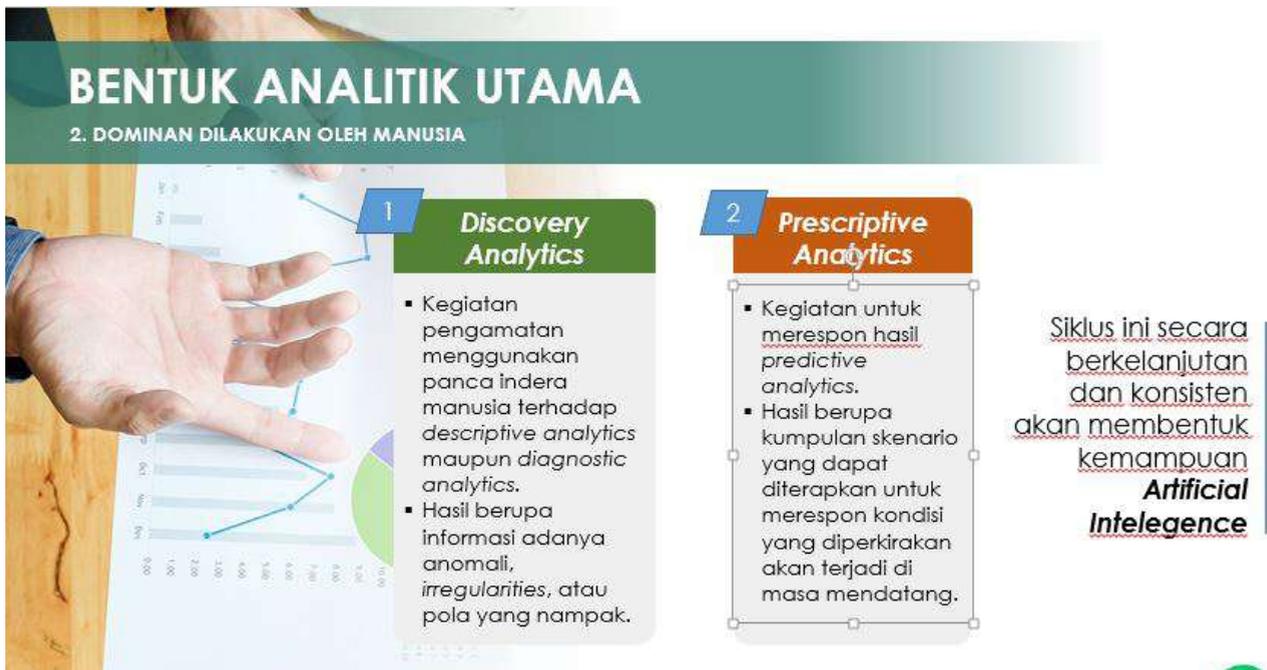


BENTUK ANALITIK UTAMA

1. HASIL MACHINE LEARNING PROCESS

Discovery analytics merupakan kegiatan pengamatan menggunakan panca indera manusia terhadap *descriptive analytics* maupun *diagnostic analytics*. Hasil dari *discovery analytics* adalah berupa informasi adanya *anomaly*, *irregularities*, atau pola yang nampak, sehingga sampai tingkat tertentu memerlukan tindakan lebih lanjut.

Sementara itu, *prescriptive analytics* adalah kegiatan yang juga dominan dilakukan oleh manusia untuk merespons hasil yang berupa *predictive analytics*. Hasil dari *prescriptive analytics* adalah berupa kumpulan skenario yang dapat diterapkan untuk merespons kondisi yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang. Kumpulan skenario inilah yang kemudian dapat memberikan manfaat bagi perumusan *foresight*. Siklus ini secara berkelanjutan dan konsisten akan membentuk kemampuan *Artificial Intelligence*.



Artificial Intelligence adalah sebuah proses yang sangat mudah bagi manusia, tetapi sangat sulit bagi komputer. Manusia perlu mengajari komputer untuk dapat berpikir layaknya manusia melalui proses *machine learning*. Selain *artificial intelligence*, proses *foresight* juga memerlukan data *intelligence*.

Data *intelligence* adalah sebuah proses yang sulit bagi manusia, tetapi sangat mudah bagi komputer. Komputer sangat mampu mengingat dan menyimpan data lampau serta memperoleh data tersebut kembali dengan cepat, sehingga manusia cukup menyimpan data-data elektronik ke dalam komputer untuk dapat

digunakan kembali kemudian. Gabungan dari data *intelligence* dan *artificial intelligence* menciptakan ekosistem *big data analytics* yang merupakan syarat mutlak untuk membangun kapasitas *foresight* yang handal, responsif, strategis, dan menyeluruh.

Pandemi Covid-19 telah menciptakan ketidakpastian terkait dengan kondisi di masa yang akan datang. Ketidakpastian tersebut mencakup kapan pandemi Covid-19 akan berakhir, bagaimana tata kelola dunia pascapandemi Covid-19, apakah pemerintah mampu mengembalikan defisit APBN ke kondisi normal yaitu 3% dari PDB pada tahun 2023, dan lainnya.

Sampai saat ini, BPK telah berperan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 melalui peran *oversight* dan *insight* dalam bentuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Akan tetapi, BPK dituntut untuk memberikan kontribusi

yang lebih besar dalam bentuk *foresight* dalam era *turbulence* yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Peran *foresight* tersebut akan dapat dijalankan dengan baik apabila BPK dapat meningkatkan kecerdasan institusi melalui pemanfaatan *big data analytics*.



Referensi:

- BPK RI, (2020), Laporan Hasil Reviu BPK RI atas Kestinambungan Fiskal Pemerintah tahun 2019.
- Gabriel, Johannes dan Hinch, Liana Lim, Foresight Intelligence, Link: http://repository.crmsindonesia.org/bitstream/123456789/267/2/Foresight%20Intelligence_D2020.pdf
- Graefe, Andreas, Luckner, Stefan, dan Weinhard, Christof, Prediction markets for foresight, Futures, Volume 42, Issue 4, May 2010, Pages 394-404, link: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328709001980>
- Kementerian Keuangan, link: <https://www.kemenkeu.go.id/media/17049/apbn-kita-januari-2021.pdf>
- Pemerintah Republik Indonesia, (2020), Pepres 54 tahun 2020.
- <https://tradingeconomics.com/country-list/external-debt> dan <https://tradingeconomics.com/country-list/foreign-exchange-reserves>. the World Bank, International Debt Statistics 2021.
- Youngjun Kim A, (2020), Public-based Exploratory Approach to Technology Foresight: Text Mining and Scenario Planning, Department of Industrial Engineering, The Graduate School Seoul National University. Link: <https://s-space.snu.ac.kr/handle/10371/167584>

SCENARIO PLANNING

- *Seeing the Future of Indonesia: A Scenario Approach*
- **Menata Indonesia Pascapandemi Covid-19: Manfaat dan Aplikasi Foresight**





SEEING THE FUTURE OF INDONESIA: A SCENARIO APPROACH

Drs. Daniel Sparringa, M.A., Ph.D

Dosen Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga

Elitius nos rempereriae estiorae sint et mos est is
estrum et verfero dolestio blab ipsaperum res as
rehenda dolo blaboris ipsam everum am eictem nima
qui cum quuntotatate iumquo illam, tem nobitae
stibust otatint.

Dus mo bere nestiur, veribeatquis dolut aut et qui ut
magnime odi ut auta imusam corerum eos exerupta
velent unt. Aborpor ibusant unt eati ulliqui odia et, ut
aute eturem. Itas derionsed quaepud aestibus ea vid
que natus is ea nis ilignisciam ipsa ducia nisti dolupis
es eiunt.

Ommos autempo ribusam dignit laut quibusam, ute
nimi, que re a aboratus pro to et et occusam quis essi
ium dolum in nempero volorio voluptatquia sintibu
samenti aepercil moluptat odit dolesse ndenia ius
alibusa ndebis dolorup tatur, aut fuga. Ment eate es
nullecto dolores dolorum acrestias consed que se
prepelitam hilicid elentotat apit alitaque simpero rrovit
opti inventu sandanda doluptaernam in cum fuga. Ut ut
qui ute necaeria volupta quiatem vendicient quianihita
ipiet re nimodis delessimus re re plit explit quis et fugiti
doluptus eate delit volupta culliquiatem ea cullibea
dis seque sincti nam untiat quid magnihic te nonsed
que enda si quodici psuntur, quam quatibusam ne dunt
am incillest omnihil is magnatur asit enet, nis ducieni
mincitatos eri tectatiore doluptatia volupti cus modis

nis debit am consed ea neste nus dolorum quassum
re quia sit quiatium is mo ium rerro od quiaerum et
aut ipide officiatest laut quunt aut am volor si officie
nihiciant, que venet pa qui nonsequ atquat quiam quis
mo beaque niet re, sinci to dolent. Es doluptur, ipsunt
et illaut volupta temporendae prae maiorro milit, si
dolorat iumquo in plabor re pelessunt.

Ex escid quias eatur, sit quisque eliquae vita con
cullupt atatus ut dolores sequam quatqui offic
temporem eum sa quundem explaut eos explaut
maio ex ernatum volupta ersperc hillab ipsande runtis
milique nim qui dolore vel mod exeria arum vento dit
omnininveni aciant qui volecatio. Ficia dicilig niaturio
cus et imus. Ihicill aboriorie nis est omnimuste ex
estrum quis simenti oreptin peri odisiminis es repta
sit eos dit od milibus. Gitet laut quam, suntorem qui
volorepe lignitiumque cus rehenisquid magnimaximi,
sita adit vellace prepudam veribus. Tur? Ene nonsequis
de aliquisquam sumeni blaut eatiist que dolupta
dolum quis esto di id que et ut aut laute a sed eum
entius es ullabor estrum velit quiam quid expe sitiisi
odis eos pero que dolorerrum eriorepro blandip isquis
nimet porera ducia imilitius, inctotatur

Iqui dolestem et ut landiciatis etur molor arionse
quatem facil intem. Pe volestintia con non nobit ut quo
voluptatur mos nimusci isimustrum ex eosa



MENATA INDONESIA PASCAPANDEMI COVID-19: MANFAAT DAN APLIKASI FORESIGHT

Shuhaela Haqim

Direktur Eksekutif (Partner) *Government and Public Services*,
Deloitte Consulting Southeast Asia

BERDASARKAN tren global di masa lalu, terdapat beberapa kejadian/skenario di luar dugaan yang gagal diprediksi dengan menggunakan pendekatan konvensional (*forecasting*). Ada beberapa contoh untuk kegagalan ini.

Misalnya, terjadinya krisis keuangan Asia pada 1997. Krisis keuangan tahun 1997 ini disebabkan oleh *snowball effect* dari *bubbling* nilai tukar mata uang. Hal ini berdampak pada jatuhnya nilai mata uang, pasar modal, dan nilai aset. Hasil proyeksi (*forecasting*) dengan menggunakan data historis sebelum tahun 1997 belum dapat memberikan gambaran kemungkinan terjadinya skenario krisis keuangan tersebut.

Kemudian juga tumbuhnya perdagangan *e-commerce* pada 2009. Ledakan dalam lini bisnis *e-commerce* ini berimplikasi langsung kepada peningkatan aksesibilitas produk ataupun jasa yang dapat mempengaruhi pola konsumsi dan perekonomian masyarakat serta membuka peluang untuk usaha kecil dan menengah berkompetisi dan berinovasi dalam *marketplace* baru.

Kejadian terakhir adalah *the internet of things*. Tingginya tingkat interkoneksi gawai dan peralatan lainnya ternyata memiliki implikasi tersendiri terhadap privasi individu, pemanfaatan data pribadi, dan etika dalam menggunakan internet. Hasil dari *the internet of things* ini belum sepenuhnya dapat diprediksi dengan menggunakan pendekatan konvensional.

Dalam praktiknya, kapabilitas *foresight* telah terbukti

membantu pemerintah untuk menyiapkan diri dalam memitigasi skenario-skenario buruk yang mungkin terjadi secara preventif. *Foresight* membedakan dirinya dengan *hindsight* dan *insight*.

Jika *hindsight*, pemerintah meninjau apa yang berhasil diterapkan berdasarkan data historis. Dalam *insight*, pemerintah meninjau apa yang sedang terjadi dengan menggunakan data eksisting. Untuk *foresight*, pemerintah meninjau apa yang mungkin terjadi berdasarkan skenario dan simulasi respons.

Studi kasus peristiwa pandemi Covid-19 di Taiwan misalnya. Pada bulan September 2020, Taiwan hanya mengalami 550 kasus positif Covid-19 dan 7 pasien meninggal ketika seluruh dunia sedang mengalami serangan pandemi kedua dengan kasus positif dan tingkat kematian yang sebagian besar jauh di atas angka Taiwan tersebut.

Menggunakan pendekatan *hindsight*, Pemerintah Taiwan melakukan pembelajaran dari serangan pandemi SARS tahun 2003 dengan membangun kepercayaan masyarakat melalui penyebaran informasi secara transparan dan tangkas (*agile*).

Secara pendekatan *insight*, Badan CECC Taiwan memublikasikan stok masker wajah secara *live* kepada masyarakat setiap 30 detik dengan sistem *hacktivist* untuk menghindari adanya *panic buying* di awal masa pandemi Covid-19.

Dengan mengaplikasikan *Foresight*, pada bulan April



2020, Pemerintah Taiwan dan seluruh jajaran pejabat pemerintahan di level provinsi melakukan simulasi respons yang dibangun atas berbagai skenario terjadinya gelombang kedua pandemi Covid-19. Pendekatan berbasis *foresight* tersebut berhasil memberikan masukan kepada pemangku kepentingan yang pada akhirnya berhasil menekan angka penularan dan kematian dari gelombang kedua pandemi.

Beberapa negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) juga membangun kapabilitas *foresight* pada peran Lembaga Supreme Audit Institution (SAI) dalam rangka mendukung pengembangan kebijakannya (OECD, Supreme Audit Institutions, 2016)

Tribunal de Contas da União (TCU) di Brasil misalnya, menggunakan *foresight* untuk mengembangkan *framework* kebijakan di bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan, kestabilan ekonomi dan finansial serta teknologi dan infrastruktur.

Auditor General of Canada (OAG), menyusun simulasi kondisi *ageing population* yang semakin membesar dengan menggunakan *foresight* dalam rangka memberikan masukan terhadap perencanaan anggaran untuk dapat mengakomodasi skenario tersebut.

Korean Board of Audit and Inspection (BAI) menggunakan *foresight* dalam rangka mensimulasikan kebijakan *housing* untuk keluarga kecil-menengah dengan target untuk mengurangi inefisiensi dalam implementasi kebijakan perumahan.

Kemudian Auditor General of South Africa (AGSA) juga menggunakan *foresight* dalam rangka memberikan input atas perencanaan kementerian berdasarkan skenario yang sudah dibangun sebelumnya.

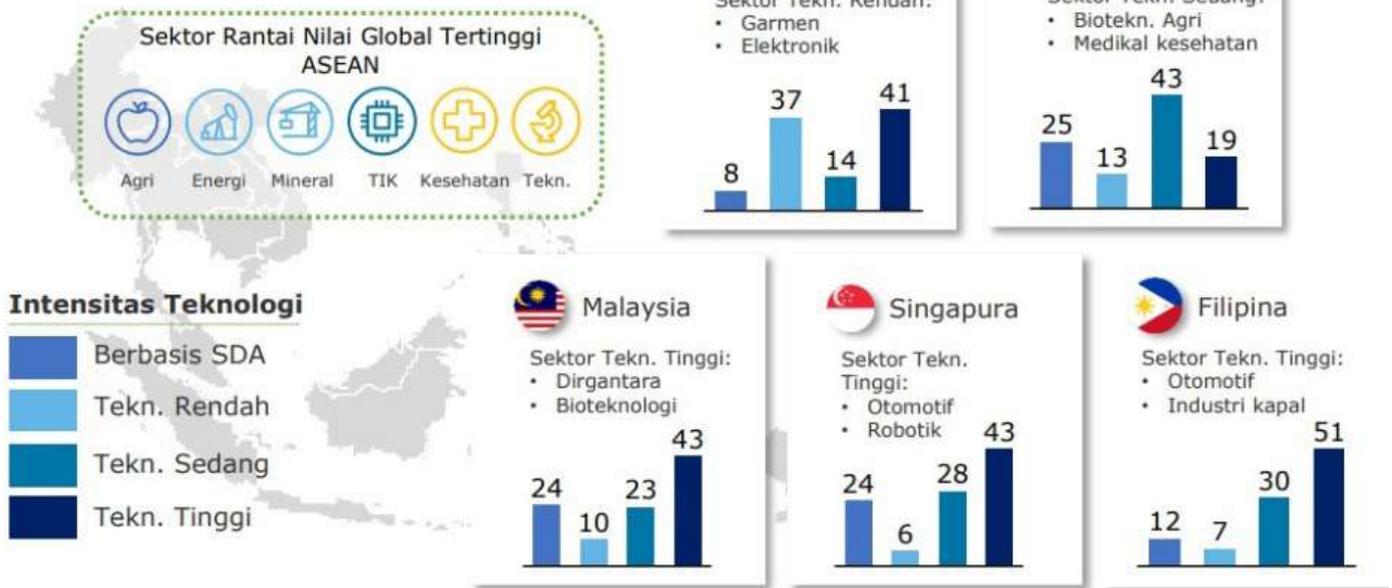
US Government Accountability Office (GAO), memberikan masukan tidak hanya kepada Kongres, tetapi juga kepada eksekutif terkait dengan bagaimana meningkatkan kinerja pemerintah dengan menyusun berbagai skenario di masa depan.

Lembaga SAI di Belanda, The Netherlands Court of Audit (NCA), melakukan *assessment* risiko finansial dengan berbagai skenario sebagai acuan bagi kebijakan finansial kementerian terkait dalam menerapkan upaya preventif.

Pertanyaannya, lalu bagaimana menerapkan *foresight* atau aplikasi *scenario planning* dalam konteks Indonesia? Salah satu contoh kasus yang dapat digunakan adalah menggunakan *foresight* untuk menentukan berbagai skenario posisi baru Indonesia pada rantai nilai global (*global value chain*).

Menggunakan dasar data belanja di sepanjang rantai nilai tersebut, dapat disusun berbagai kemungkinan skenario perbaikan ataupun penurunan ranking Indonesia di tingkat global. Simak tabel berikut ini.

Profil Ekspor Manufaktur ASEAN (% berdasarkan Intensitas Teknologi)



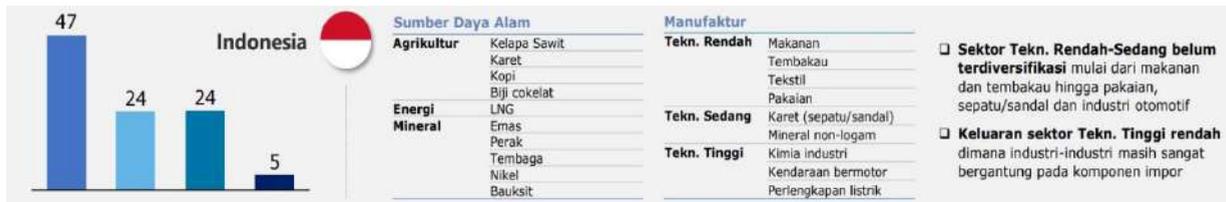
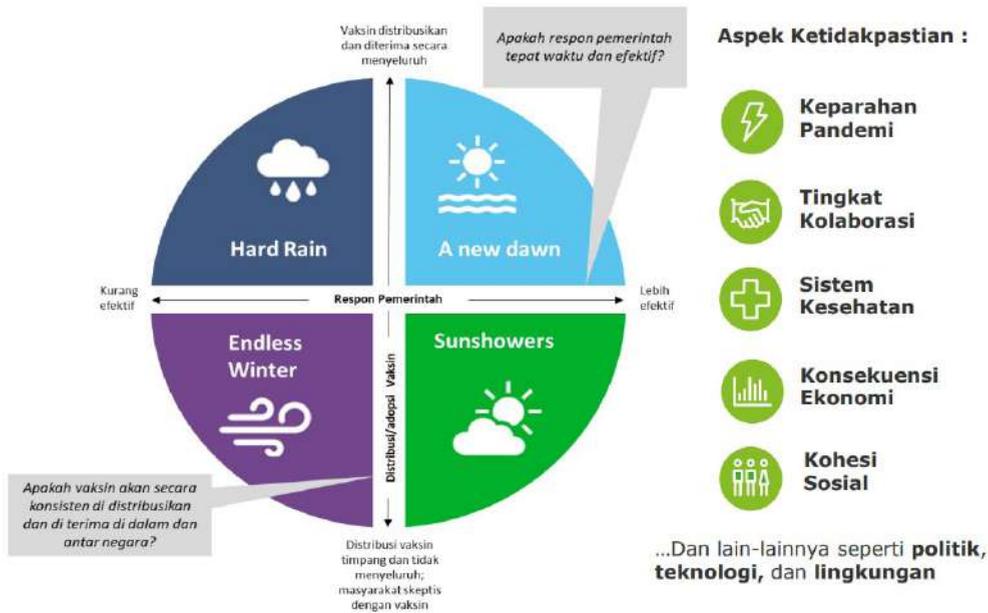
GPD, MVA* dan MEx** ASEAN (2018, dalam USD Miliar)

	PDB	MVA	MEx								
Singapura (CIP #9)	332	63	186	Thailand (CIP #24)	449	120	224	Indonesia (CIP #39)	999	207	124
Malaysia (CIP #23)	343	78	211	Vietnam (CIP #38)	235	37	212	Filipina (CIP #43)	355	73	61

Sumber: ASEAN Economic Community

Keterangan:

*MVA = *Manufacturing Value Added* - Total nilai estimasi untuk nilai tambah manufaktur (*net-output* dari seluruh semua unit aktivitas manufaktur penduduk yang diperoleh dengan menjumlahkan *output* dan mengurangi konsumsi antara) **MEx = *Manufactured Export Goods* - Total nilai estimasi untuk ekspor manufaktur



Menggunakan berbagai data dari hasil pemeriksaan terkait dengan sektor industri, perdagangan, UMKM, dan ristik, BPK dapat menyusun berbagai skenario posisi baru Indonesia dalam GVC dan memberikan pendapat mengenai arah *delivery* yang efektif.

Deloitte sendiri telah menyusun kajian *foresight* berjudul *The World Remade: COVID-19 and beyond: Scenarios for Resilient Leaders* yang dirilis pada April 2020 dan diperbaharui Februari 2021. Kajian ini menggambarkan ketidakpastian dan skenario yang mungkin terjadi pada dunia pascapandemi Covid-19. Berikut ringkasan skenario kondisi dunia pasca Covid-19 yang diambil dari kajian tersebut:

Setiap skenario di atas, yang menggunakan analogi cuaca,

menunjukkan narasi terkait dengan kondisi yang mungkin terjadi di masa depan (*plausibility*) untuk menjadi acuan dalam perencanaan mitigasi dan tindakan ke depan.

Keempat skenario tersebut, yakni *hard rain*, *a new dawn*, *endless winter*, dan *sunshowers*, didasarkan pada dua *critical uncertainties* yang membentuk kondisi ekonomi selama 2021: Respons pemerintah terhadap pandemi dan tingkat distribusi/ adopsi vaksin. Dengan menggambarkan berbagai skenario yang mungkin terjadi, pemangku kepentingan diharapkan dapat bersiap diri dengan lebih adaptif di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sebagaimana manfaat yang diharapkan dari pendekatan *foresight*.*

Referensi:

- Data dan analisis Deloitte
- Deloitte Insight, Government Trends 2021
- OECD, 2016. Supreme Audit Institutions
- Data ASEAN Economic Community
- Deloitte, February 2021. *The World Remade: Covid-19 and beyond: Scenarios for Resilient Leaders*

PEMIKIRAN DI BIDANG KESEHATAN

- Kesehatan Digital Pascapandemi
- Ketidakpastian Masa Depan pada Sektor Kesehatan



KESEHATAN DIGITAL PASCAPANDEMI

dr. Adhiatma Gunawan

Head of Medical Management Good Doctor Technology Indonesia

Good Doctor Technology Indonesia memiliki misi untuk menyediakan satu dokter bagi setiap keluarga di Indonesia dan memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi dan terjangkau yang dapat diakses oleh setiap keluarga di setiap sudut Asia Tenggara.

Kami sudah berkiprah sejak sebelum pandemi Covid-19 menghantam Indonesia. Pada bulan Februari 2020 kami bergabung bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meluncurkan kampanye edukasi perilaku hidup bersih sehat.

Lalu pada bulan Maret 2020, segera setelah Covid-19 resmi dinyatakan telah masuk ke Indonesia, kami ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai mitra resmi dalam perjuangan melawan Covid-19.

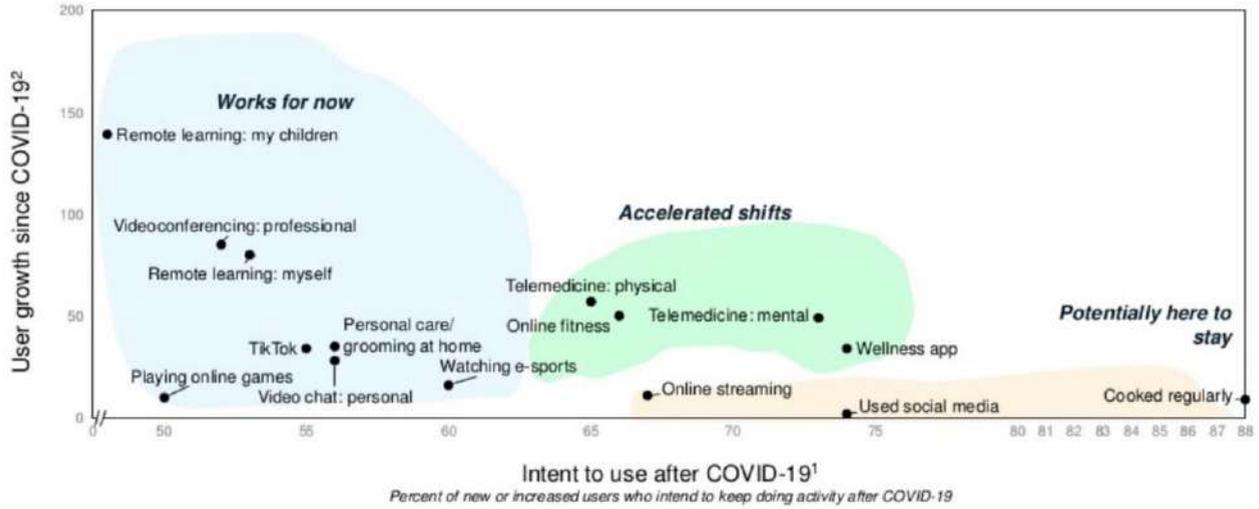
Pada bulan April – Juni 2020 kami menyelenggarakan lebih dari 5.000 tes rapid dan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) test secara gratis untuk tenaga kesehatan dan mitra pengemudi *Grab* di 13 kota, 8 provinsi di Indonesia.

Selanjutnya pada bulan September 2020, kami bersama Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan Program PSBB OK (Promo Spesial BeBas Ongkos Kirim) untuk semua pembelian produk di *Good Doctor* bagi warga Jakarta selama 1 bulan.

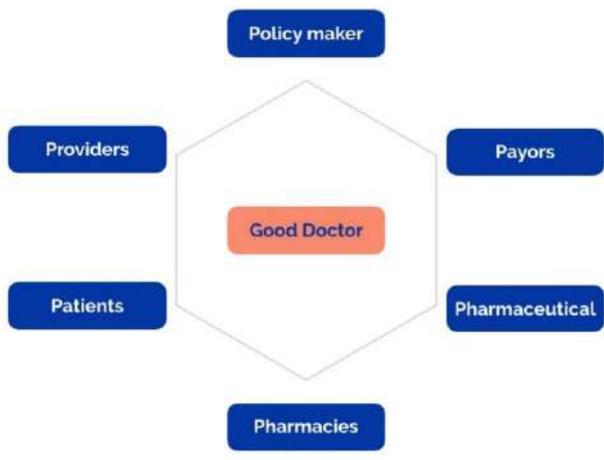
Pada bulan Desember 2020, layanan *Good Doctor* resmi dapat diakses dalam aplikasi *PeduliLindungi*. Hal ini kemudian berlanjut ke bulan Februari 2021, kami bersama *Grab* menyelenggarakan Pusat Vaksinasi Pertama di Indonesia dengan konsep 3-in-1.

Pada bulan Maret 2021, dua vaksinasi lainnya dibuka di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, dan Bandung Arcamanik. Lebih dari 17.000 vaksinasi telah dicapai hanya dalam waktu 10 hari pelaksanaan.

Berdasarkan survei pelanggan McKinsey di Indonesia, *telemedicine* kemungkinan akan tetap relevan setelah pandemi Covid-19 (*McKinsey & Company Covid-19 Indonesia Consumer Pulse Survey in Sep 2021, n=1000+*).



¹ Q: Compared to now, will you do or use the following more, less, or not at all, once the coronavirus (COVID-19) situation has subsided? Possible answers: "will stop this"; "will reduce this"; "will keep doing what I am doing now"; "will increase this." Number indicates respondents who chose "will keep doing what I am doing now" and "will increase this" among new or increased users.
² User growth is calculated as % of respondents who replied that they are new users over % of respondents who replied that they were using the product/service pre-COVID-19 (using more, using the same, or using less).



Good Doctor sebagai perusahaan penyedia layanan *telemedicine* yang berbasis teknologi informasi menghubungkan antara pembuat kebijakan kesehatan, ribuan penyedia rumah sakit dan klinik, pasien, ribuan apotek, pabrik obat, dan para pembayarnya secara efektif.*

Referensi:

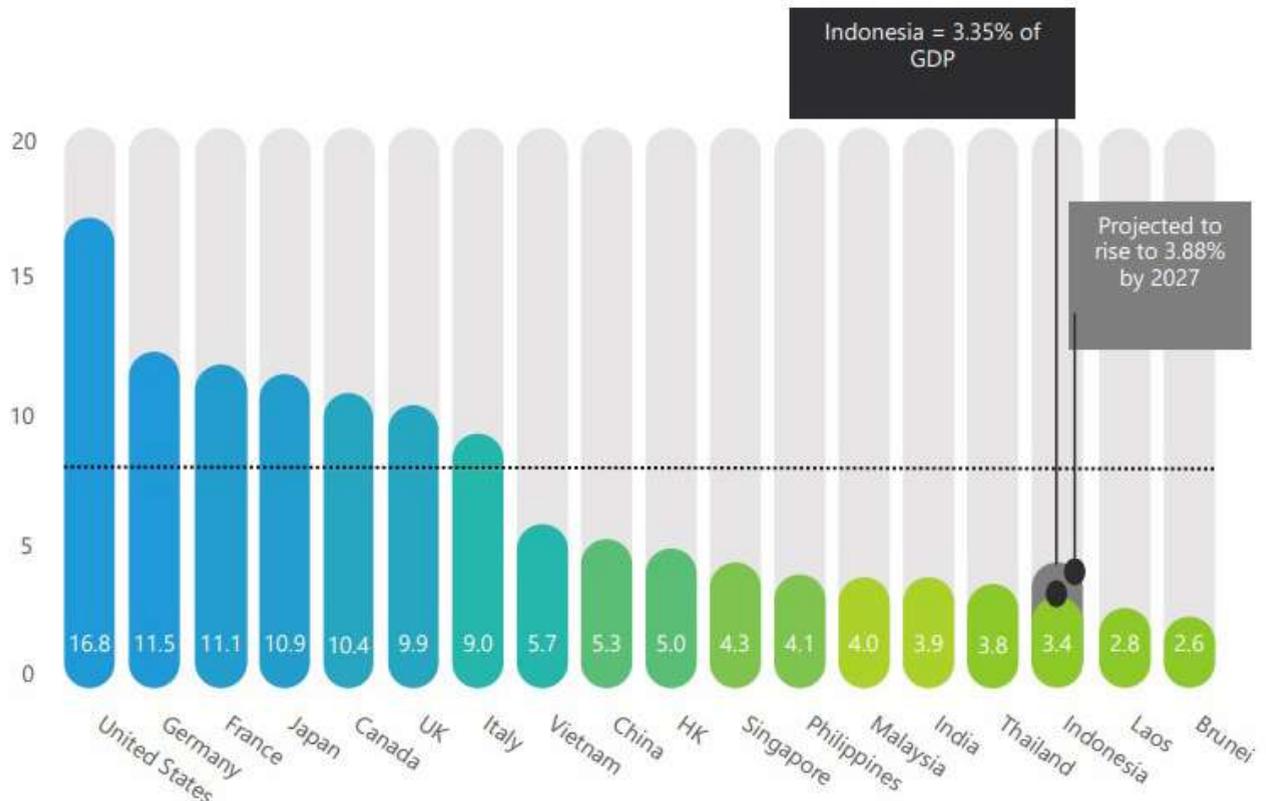
- Bank Indonesia. (2021). Kebijakan Keuangan Hijau Bank Indonesia. Jakarta: DKMP.
- Bank Indonesia. (2020). Kajian Stabilitas Sistem Keuangan No. 37 September 2021: Bersinergi Mendorong Intermediasi, Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi. Jakarta.
- Bappenas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta, Indonesia, 2018.

KETIDAKPASTIAN MASA DEPAN PADA SEKTOR KESEHATAN

Caroline Riady
CEO Siloam Hospitals Group

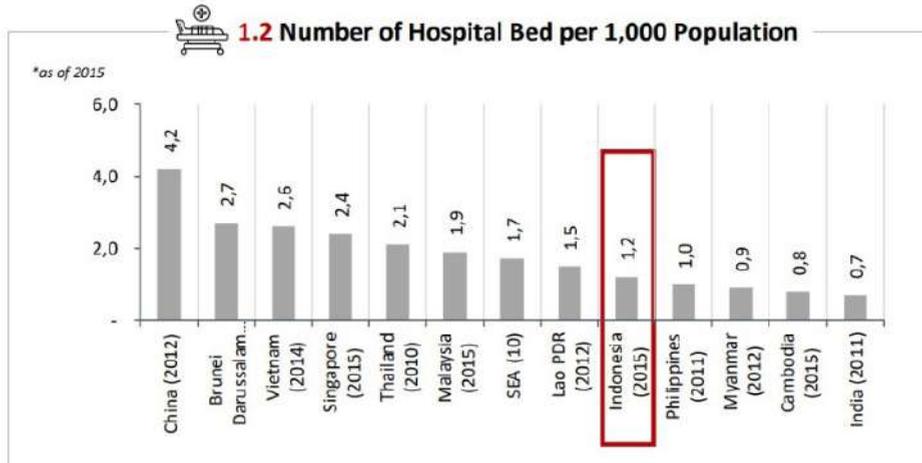
BELANJA layanan kesehatan Indonesia kini baru mencapai 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 8%. Bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia cuma unggul dari Laos dan Brunei Darussalam.

Belanja layanan kesehatan di Indonesia berjumlah Rp403,9 triliun atau US\$30,2 miliar pada 2017. Kami memproyeksikan pengeluaran ini akan meningkat menjadi Rp692,2 triliun atau US\$47,1 miliar pada 2022 dan Rp1.224 triliun atau US\$78,0 miliar pada 2027. (Riset BMI)



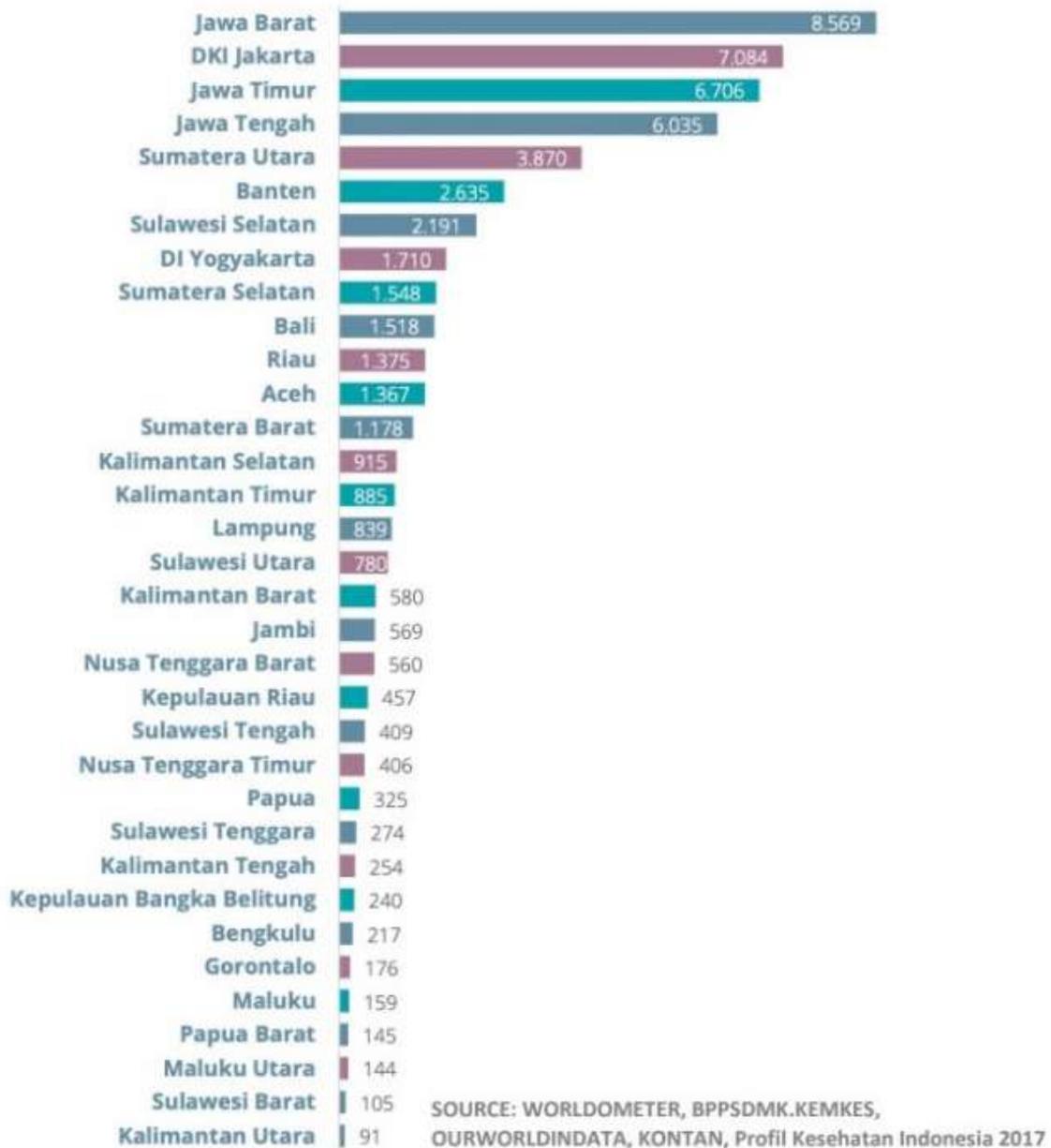
Indonesia juga memiliki distribusi rumah sakit yang tidak merata di 34 provinsi. Indonesia memiliki rata-rata 1,16 tempat tidur rumah sakit untuk 1.000 orang, sehingga kurang dari seperempat dari rasio yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia/WHO 5 banding 1000.

Distribusi rumah sakit ini paling terkonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan 2,24 tempat tidur per 1.000 penduduk. Adapun konsentrasi terendah ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni hanya 0,68 tempat tidur per 1.000 penduduk.



Fakta-fakta ini menunjukkan jumlah tempat tidur rumah sakit dan dokter Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk masih lebih rendah dari standar global. Selain itu, selain jumlah dokter spesialis yang sedikit, persebaran dokter spesialis juga tidak merata.

Kalau dilihat dari kronologi waktu, terlihat masa puncak kasus mingguan Covid-19 terjadi pada bulan Januari 2021. Pada bulan itulah pemerintah mulai memperkenalkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pada saat yang sama, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga mengizinkan penggunaan darurat vaksin Covid-19.

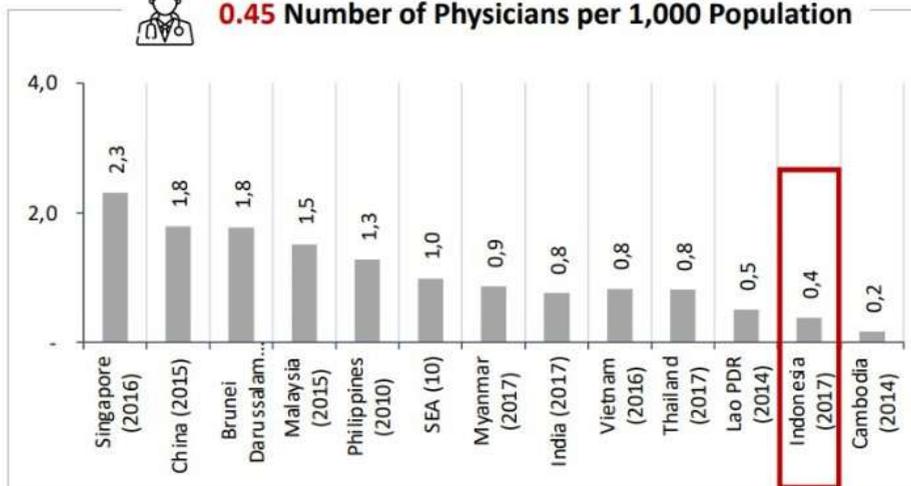




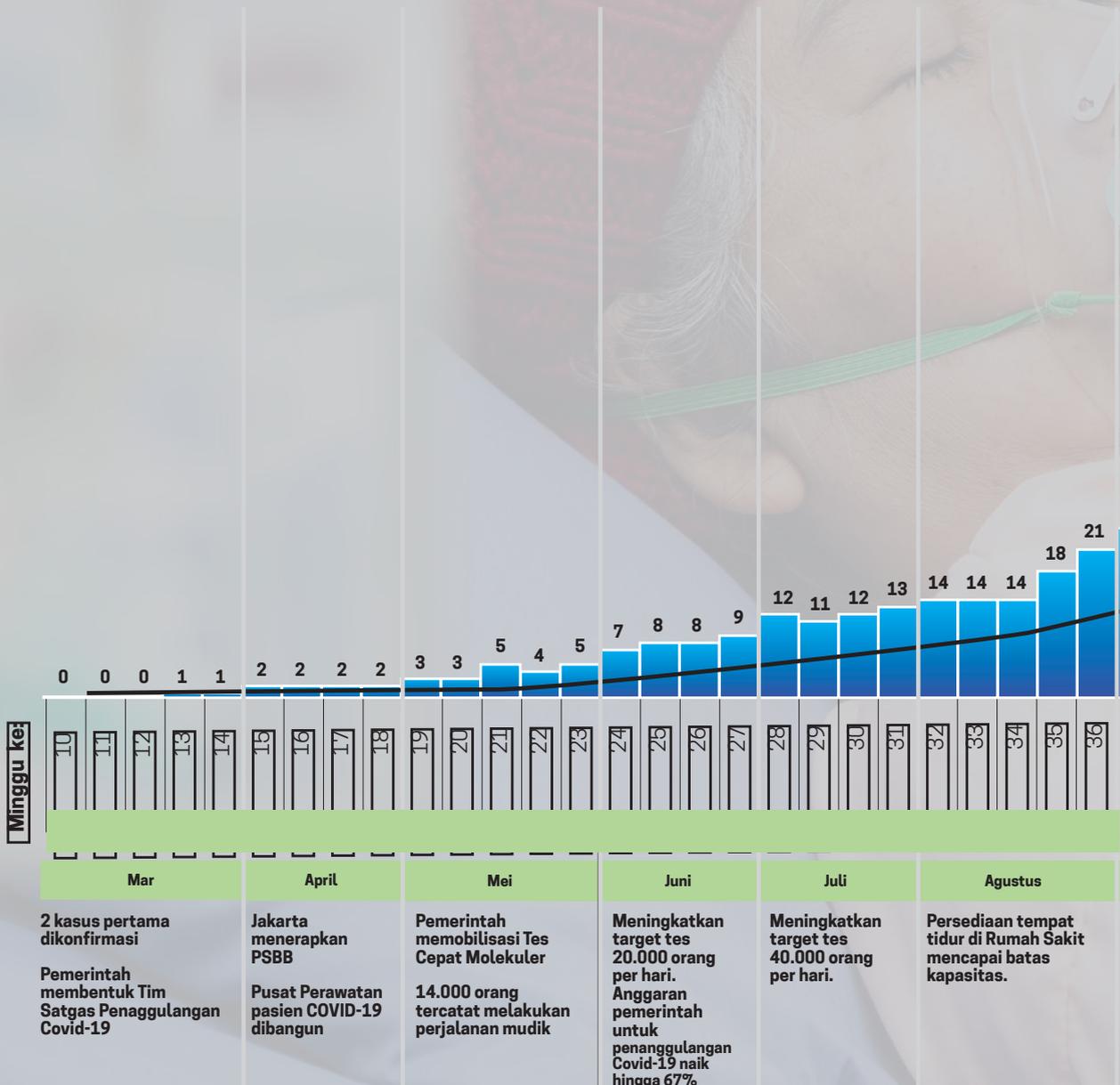
0.13 Number of Specialist per 1,000 Population

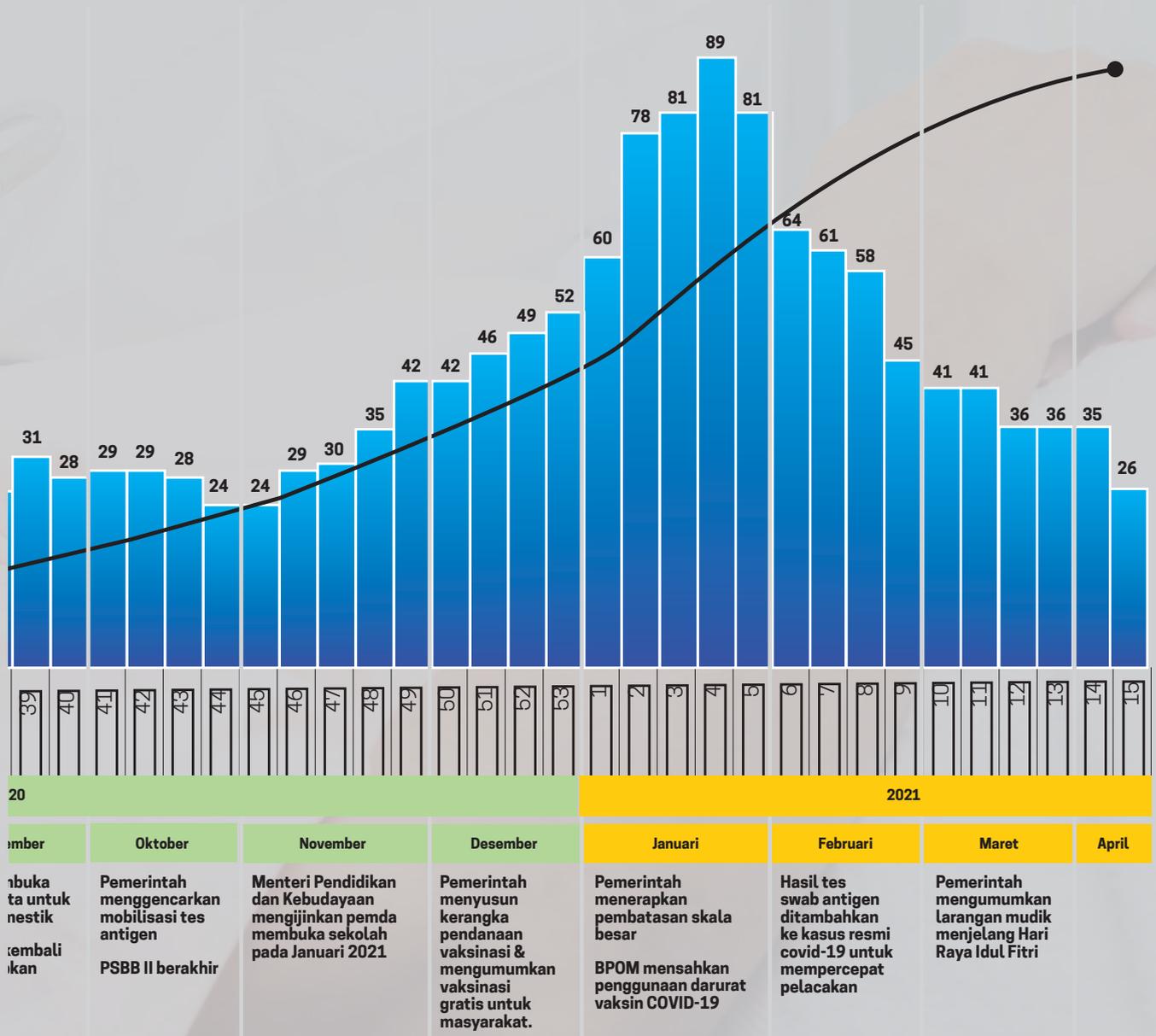


0.45 Number of Physicians per 1,000 Population



Gambaran kondisi kesehatan terkait pandemi COVID-19:





Secara nasional, saat ini kapasitas tempat tidur isolasi dan intensive care unit (ICU) dibandingkan dengan jumlah pasien yang dirawat masih mencukupi. Namun, di tingkat provinsi, DKI Jakarta diprediksi akan mencapai kapasitas 100%

Situasi tidak meratanya infrastruktur kesehatan inilah yang menjelaskan kenapa sebanyak 24% pasien yang dirawat di rumah sakit di DKI Jakarta adalah warga dari luar DKI Jakarta. Jumlah tempat tidur di DKI Jakarta sendiri 24.498 tempat tidur, dengan asumsi maksimal 50% dari tempat tidur dapat diubah menjadi tempat tidur Covid-19.

Saat ini ada 8.420 tempat tidur Covid-19 untuk isolasi dan ICU. Ruang isolasi akan cenderung aman selama dapat mengonversi isolasi non- Covid-19. Karena itu, penting untuk menyusun strategi peningkatan kapasitas ICU Covid-19, dengan memastikan pasien dengan gejala ringan dan tanpa penyakit penyerta tidak dirawat di rumah sakit.



950 Total Hospitals assigned in Indonesia

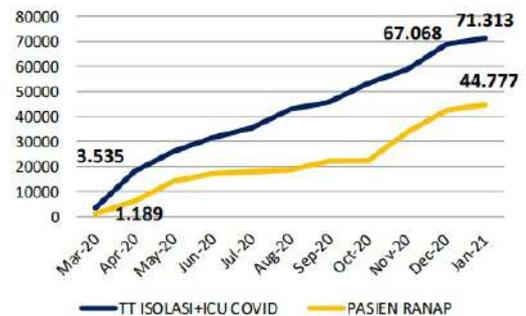
132 Hospitals assigned by Kemenkes

818 Hospitals assigned by Governor

No.	Ownership	Hospitals
1	Kemenkes	28
2	Kementerian Lain	14
3	PEMDA	498
4	TNI POLRI	83
5	BUMN	14
6	Swasta	313
Total		950



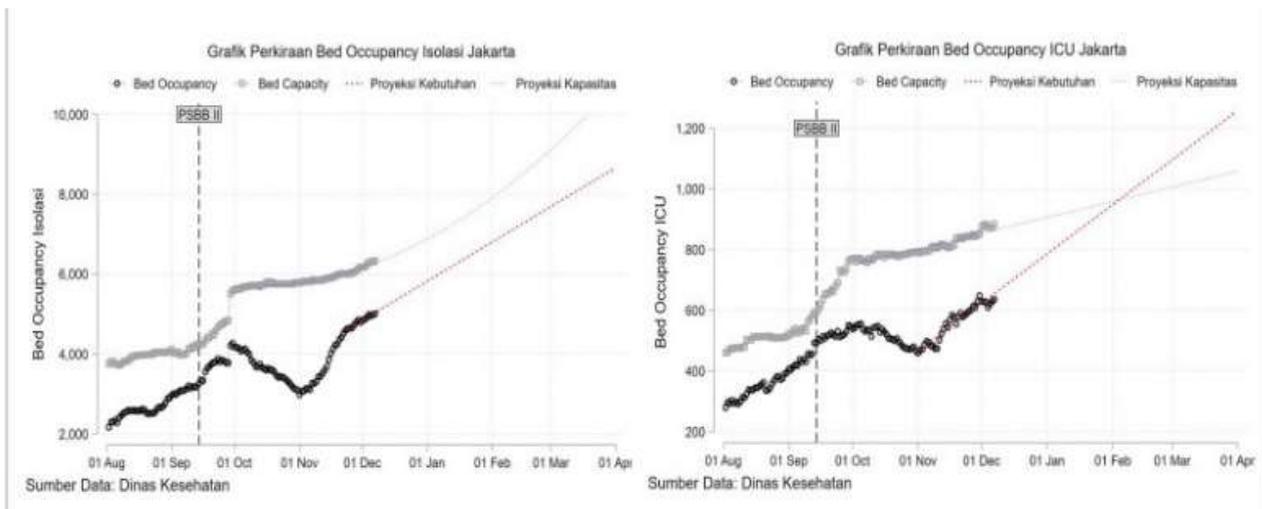
71,313 Total number of Beds



Increase of 4,245 Bed compared to the 67,068 in December 2020

Data as of 9 Jan 20

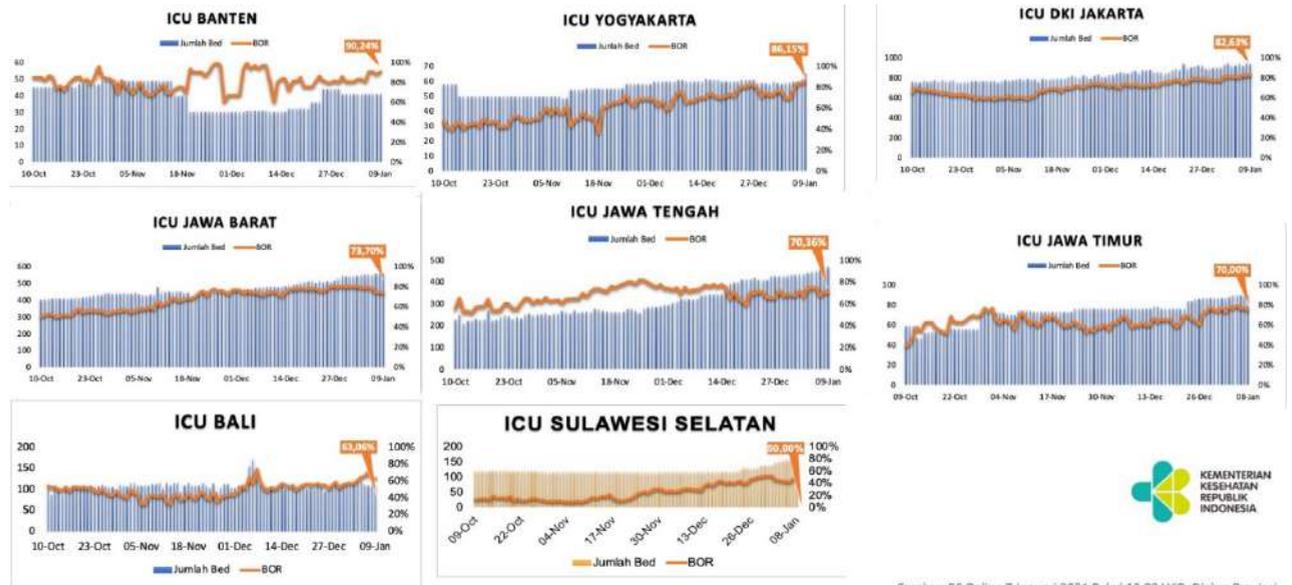
Ketersediaan Tempat Tidur Isolasi Covid-19 di 8 Provinsi



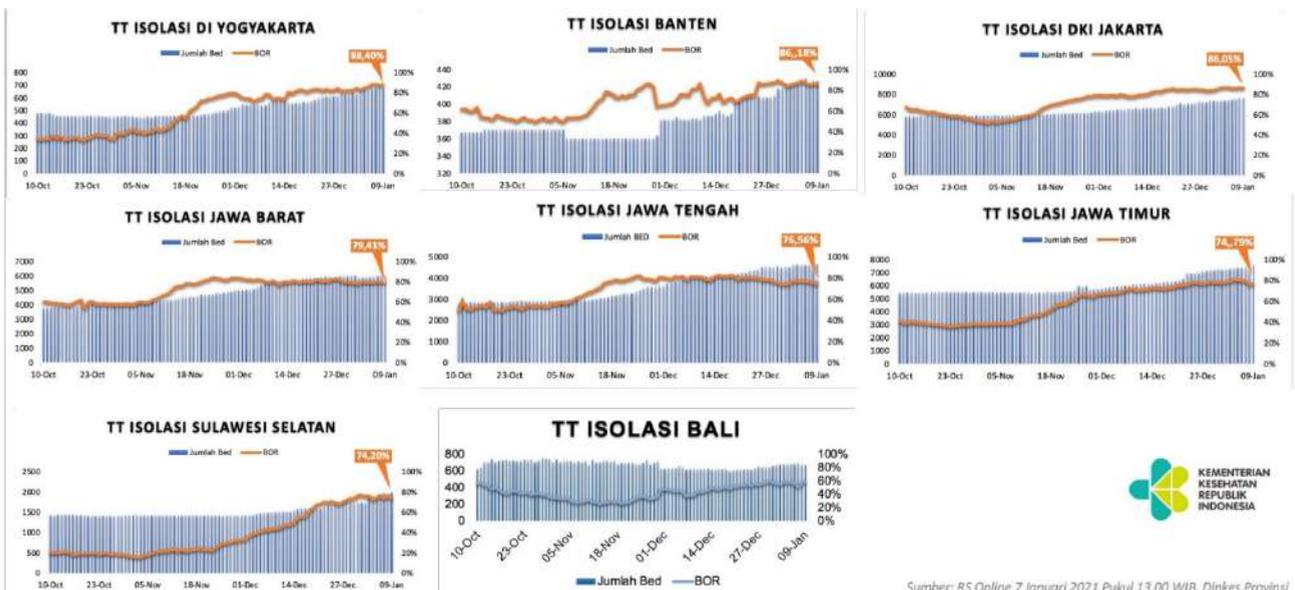


Ketersediaan Tempat Tidur ICU Covid-19 di 8 Provinsi

Pada saat yang sama, volume orang yang diuji Covid-19 terakhir di Indonesia sudah melampaui standar Organisasi Kesehatan Dunia sebesar 38,1 ribu per hari, tetapi dengan tingkat kepositifan yang masih di bawah 5%.



Sumber: RS Online 7 Januari 2021 Pukul 13.00 WIB, Dinkes Provinsi



Sumber: RS Online 7 Januari 2021 Pukul 13.00 WIB, Dinkes Provinsi

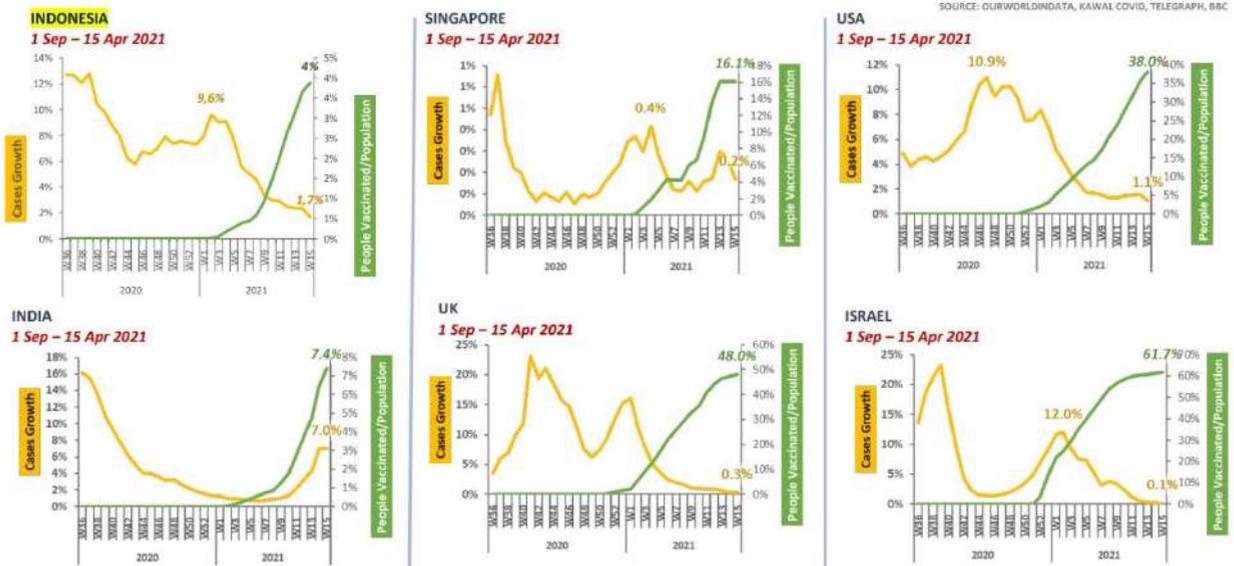
INDONESIA COVID-19 TESTING
2 Mar 2020 – 15 Apr 2021



- In 15 April 2021, Indonesia tested 48,728 people
- However in total, only 3.4% (9.1mn people) of Indonesia population were tested for Covid

SOURCE: RAWAL COVID

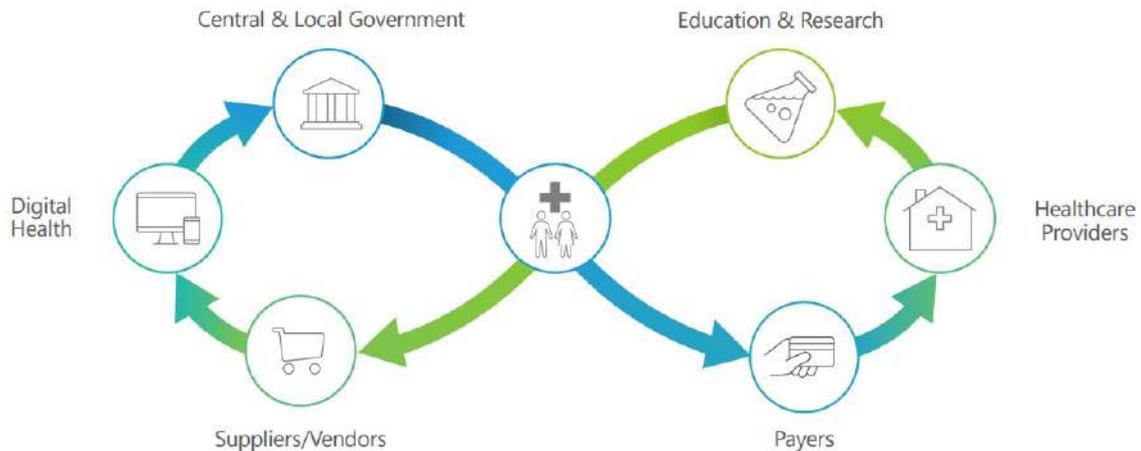
Setelah vaksinasi dimulai, terlihat tren perkembangan vaksinasi berbanding terbalik dengan perkembangan kasus Covid-19. Kondisi ini juga terjadi beberapa negara seperti Singapura, Amerika Serikat, Inggris dan Israel, kecuali India yang kasus Covid-19-nya kembali naik.



- India is facing a shortage of vaccines and placed a temporary hold on all exports of the Oxford-AstraZeneca coronavirus vaccine

Perkembangan Vaksinasi versus Perkembangan Kasus Covid-19

Singkatnya, seluruh *stakeholder* kesehatan perlu bekerja sama dan bersinergi untuk bersama-sama memperbaiki ekosistem layanan kesehatan di Indonesia. Setiap pemangku kepentingan adalah pemain kunci penting yang tanpanya ekosistem layanan kesehatan tidak dapat berfungsi.



Simpulan dan Saran

Pertama, liberalisasi layanan kesehatan demi pembangunan ekosistem kesehatan di Indonesia oleh seluruh pemangku kepentingan (pasien, rumah sakit, dokter, pembayar, pembuat kebijakan) harus dilakukan. Dengan liberalisasi ini, ada harapan peningkatan infrastruktur layanan kesehatan.

Kedua, reformasi di bidang kesehatan harus diwujudkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kerumah Sakit dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Ketiga, peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai pelaksana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus diperkuat untuk membantu meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan.

Keempat, jumlah dokter spesialis perlu didorong untuk ditambah dengan cara memperbanyak Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di universitas pemerintah, tetapi terutama di universitas swasta, memperbanyak jumlah lulusan dokter spesialis, mempermudah dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri untuk praktik di Indonesia.*

Referensi:

- Data Profil Kesehatan Indonesia, Kemenkes
- Data EIU
- Data worldometer
- Data bppsdmk.kemkes
- Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta
- RS Online 7 Januari 2021 pukul 13.00 wib
- Data *Kontan*
- Data *KawalCovid19.id*
- *Ourworldindata*, *Telegraph*, *BBC*



PEMIKIRAN DI BIDANG PEREKONOMIAN/ PERBANKAN

- **Dampak Ekonomi COVID-19**
- **Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi: Peluang dan Tantangan**



Online Shop

di GF1 Blok B12 No. 2 & 3

ENCERAN

GF 1 Blok B 12 No. 2 & 3

DAMPAK EKONOMI COVID-19

Anwar Nasution

Mantan Ketua BPK RI Periode 1999-2004

Covid-19 mempengaruhi perekonomian nasional dari dua sisi, yakni sisi penawaran dan sisi permintaan. Cara penggulangan meluasnya wabah Covid-19 dan penanganannya telah semakin memperparah dampak negatif tersebut. Cara pencegahan perluasan wabah Covid-19 termasuk: anjuran tidak keluar rumah dan melakukan perjalanan, larangan bergerombol, dilarang melakukan kontak apakah bersalaman ataupun berpelukan, menjaga jarak (*social distance*), pakai masker penutup mata, mulut dan hidung.

Dampak ekonomi Covid-19 terutama terjadi pada masyarakat kelompok pendapatan menengah dan miskin pekerja tidak tetap, dan disektor non-formal, seperti industri kerajinan rakyat, pedagang eceran, kedai kopi, restoran, oplet dan bis kota. Sebagian besar dari Produk Domestik Bruto dan lapangan kerja disediakan oleh pengusaha kecil dan menengah. Dengan demikian, Covid 19 akan menurunkan tingkat pendapatan nasional dan meningkatkan tingkat pengangguran tenaga kerja. Melalui kebijakan moneter target inflasi ("*inflation targeting*"), Bank Indonesia memperkirakan tingkat laju inflasi sebesar tingkat 3-4 persen pada tahun 2021. Cadangan luar negeri Bank

Indonesia, sebesar \$137,1 milyar pada akhir Maret 2021, diharapkan dapat menstabilisir kurs devisa sehingga meredam kenaikan harga barang-barang impor.

Rumah golongan masyarakat ini berdempetan dengan dinding yang bocor atau terbuat dari bambu sehingga mudah terjangkau wabah dari satu ke lain rumah. Pedagang eceran itu melakukan transaksi dengan kontak dengan pembeli, seperti pedagang sayur keliling kampung maupun pedagang di Pasar Tanah Abang, Majestik dan pasar di pedesaan. Karena sistem perbankan belum maju dan sistem transaksi elektronik belum maju dan karena jumlah transaksi relatif kecil, pembayaran pun dilakukan dengan uang tunai melalui pertukaran antar telapak tangan. Hampir tidak ada transaksi ekonomi golongan menengah dan kecil yang dilakukan melalui sistem cek ataupun elektronik. Upah buruh harian atau mingguan pun dibayar secara tunai dengan menggunakan uang.

Menurunnya tingkat pendapatan masyarakat telah mengurangi tingkat pengeluasrannya. Melalui dampak ekonomi itu, Covid-19 sekaligus mempengaruhi akses



**PEMBATASAN MOBILITAS
PADA MASA PPKM DARURAT
DI RUAS / JALAN KALIDERES**

**MOHON MAAF ADA PEMERIKSAAN
SELAIN PEKERJA SEKTOR ESENSIAL DAN KRITIKAL DILARANG MELINTAS**



DITLANTAS POLDA METRO JAYA

keuangan dan perbankan kepada kelompok golongan menengah dan kecil. Tingkat suku bunga yang berlaku untuk kredit mikro bagi nasabah kecil akan meningkat dan memang lebih tinggi daripada pada nasabah besar. Rapat Dewan Gubernur BI bulan April 2021 menyebut tingkat suku bunga bagi kredit mikro mencapai 12,72 persen sedangkan untuk kredit korporasi hanya 8,26 persen (Harian Kompas, Senin 26 April 2021, halaman 3). Tingginya tingkat suku bunga bagi kelompok menengah dan kecil juga terjadi karena risiko kredit yang lebih tinggi terjadi untuk kelompok nasabah ini.

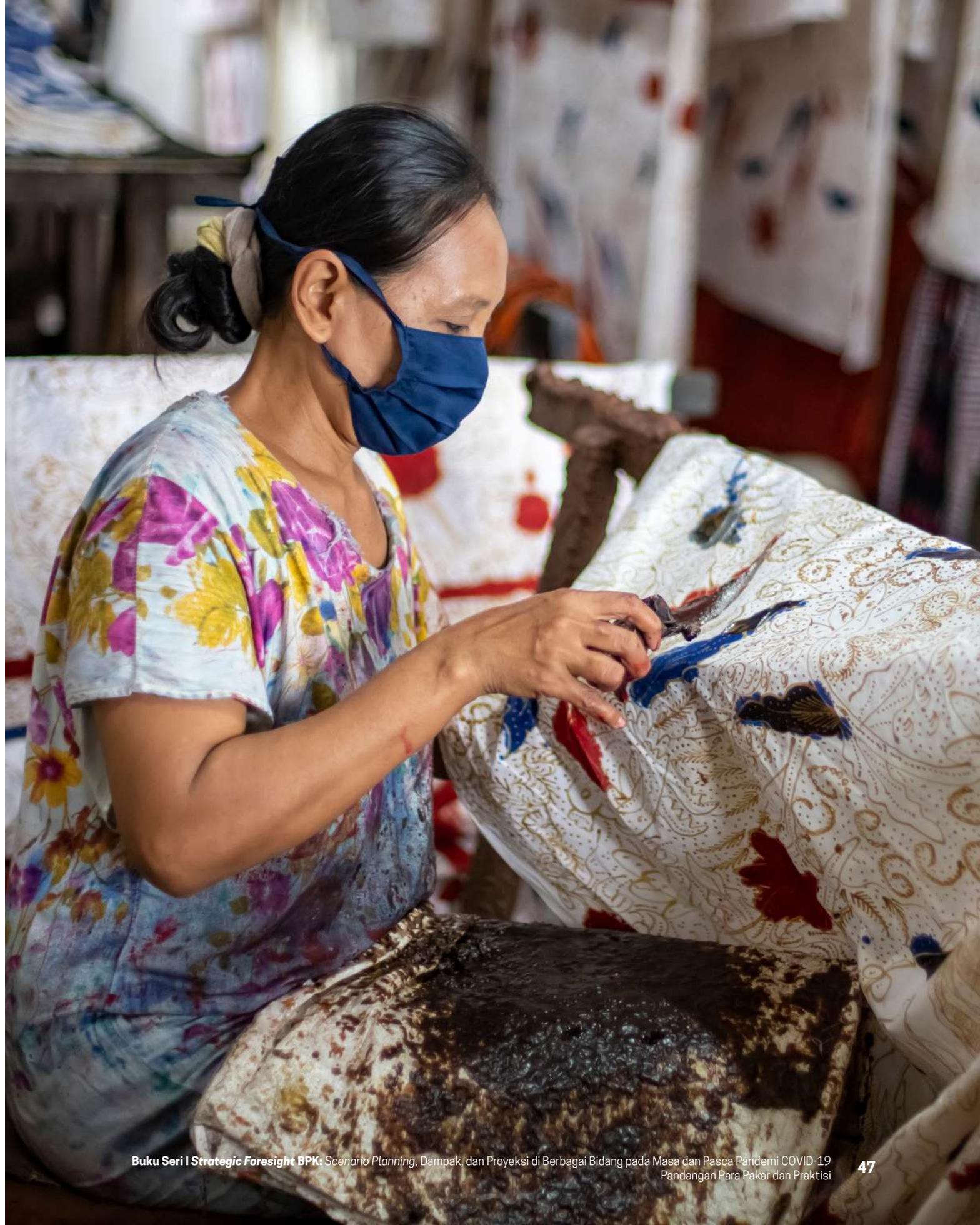
Sementara itu, lembaga keuangan yang khusus melayani kelompok nasabah kecil dan menengah belum berkembang, seperti BRI Unit Desa dan Lembaga Kredit Pedesaan (LKP). LKP yang besar hanya ada di Bali dan Jawa Tengah.

Apa yang harus dilakukan?

Pemerintah perlu mengutamakan kesehatan rakyat dengan menggalakkan vaksinasi anti Covid 19. Karena serumnya adalah terutama berasal dari impor, jika perlu minta hibah dari negara-negara maju penghasil vaksin ataupun melakukan pinjaman luar negeri. Bahan baku vaksin merah putih buatan Dinas Kesehatan Angkatan Darat juga berasal dari California. Hal kedua yang perlu dilakukan adalah untuk membantu golongan masyarakat miskin untuk memenuhi keperluan pokok sehari-hari membeli makanan, memelihara kesehatan dan uang sekolah anak. Secara bertahap, kondisi perumahan daerah padat (slums) juga perlu diperbaiki. Investasi harus digalakkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Demikian pula untuk peningkatan ekspor terutama produk UKM. Selain memelihara kurs devisa yang mendorong ekspor, melakukan deregulasi untuk menurunkan biaya produksi juga perlu promosi ekspor terutama produk industri kecil dan menengah.

Peluang pasar Saudi Arabia harus diutamakan karena Indonesia merupakan negara asal Jemaah Haji dan Umrah yang terbesar di dunia. Indonesia harus dapat mengekspor produk industri kecil dan menengah seperti pakaian Haji seperti baju gamis, kerudung, tasbih dan sandal serta thermos, kipas angin maupun kaligrafi. Pembukaan restoran Padang, Banjar dan Surabaya pun harus di tingkatkan di Saudi Arabia. Ekspor makanan halal juga harus dimulai. Rendang Padang sudah mulai dikenal dunia dan kalau diolah dengan baik, rendang itu tahan berminggu-minggu jadi makanan tambahan selama diperlanaan menuju dan berada di Tanah Suci. Rendang juga apat dijadikan sebagai makanan kaleng yang dijual di pasar dunia. Demikian juga dengan pemondokan seperti hotel dan losmen penginapan milik pengusaha Indonesia untuk jemaah Indonesia yang terus penuh berkunjung ke Tanah Suci sepanjang tahun. Untuk ini, Departemen Agama perlu berperan untuk membantu Departemen lainnya guna memanfaatkan pasar Saudi Arabia yang besar itu. Kalau perlu, semua Jemaah Haji dan Umrah dibekali dengan tas kecil berisi pakaian dan makanan keperluan perjalanan ke Tanah Suci.

Semua hal diatas memerlukan pengeluaran APBN dan pembangunan lembaga keuangan baru. Untuk meningkatkan penerimaan pajak perlu dilakukan intensifikasi tanpa merubah taripnya. Enforcemen harus ditingkatkan dengan melakukan audit perpajakan dan penegakan hukum pajak. Himbuan dan amnesti pajak (tax amnesty) yang sudah dilakukan berkali kali tidak menambah jumlah wajib pajak maupun penerimaan pajak secara signifikan. Untuk itulah diperlukan law enforcement termasuk menyita aset penggelap pajak. Lembaga keuangan untuk golongan masyarakat UKM perlu segera dibangun, apakah Unit Desa BRI, Bank Tabungan Pos dan LPD. Dana Pensiun, Bank Tabungan Pos dan industri asuransi juga perlu dibangun untuk dapat menyerap surat utang negara guna mengurangi ketergantungan pada hidah dan bantuan luar negeri.



PEMULIHAN EKONOMI DI MASA PANDEMI: PELUANG DAN TANTANGAN

Teguh Dartanto

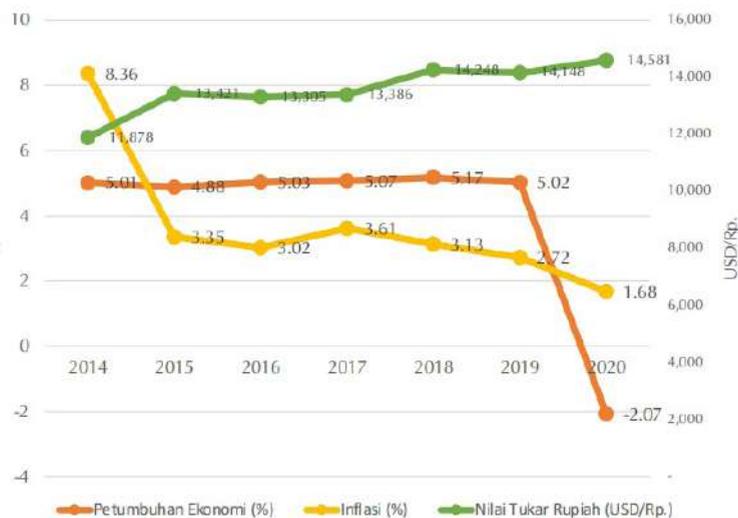
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan FEB UI

SAMPAI dengan pertengahan April 2021, jumlah rata-rata kasus baru Covid-19 di Indonesia dalam sepekan masih di atas 5.000 kasus. Memang sudah menurun dibandingkan dengan posisi akhir Januari 2021 yang menembus di atas 10.000 kasus.

Dari rata-rata kasus baru hingga pertengahan April 2021 itu, jumlah orang yang meninggal sudah mendekati 200 orang per hari. Jumlah ini memang menurun dari posisi akhir Januari 2021 yang sudah melampaui 300 orang per hari.

Sementara itu, pada saat yang sama lebih dari 10 juta orang sudah divaksin satu kali, dan lebih dari 5 juta orang divaksin sebanyak 2 kali. Adapun jumlah tes Covid-19 yang dilakukan di Indonesia sudah mencapai 40 ribu per hari.

Situasi Covid-19 ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memang belum berakhir. Perlu kerja keras sekaligus kerja sama dari semua pihak untuk meredakan pandemi ini, sehingga pandemi ini bisa cepat berlalu, dan tidak menyisakan berbagai problem ekonomi.



Sumber: BPS & Bank Indonesia



Secara makro, laju pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu sudah terpapar pandemi dengan terkontraksi -2,07% dari sebelumnya masih melaju 5,02% (2019) dan 5,17% (2018). Sementara itu, inflasi kita pada tahun yang sama melaju 1,68% dari sebelumnya 2,72% (2019) dan 3,13% (2018). Adapun nilai tukar rupiah relatif stabil yaitu pada Rp14.581 per dolar AS, dari tahun sebelumnya Rp14.148 per dolar AS.

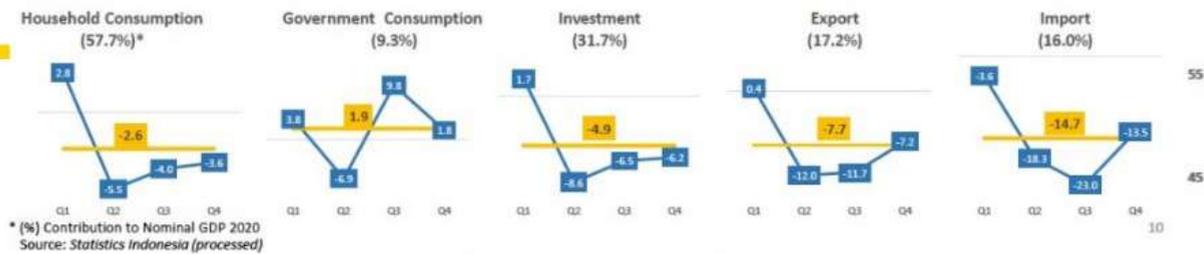
Situasi makroekonomi ini terang merefleksikan adanya pukulan terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Inflasi yang rendah itu sekaligus merefleksikan *perlemahan* daya beli masyarakat. Covid-19 telah menghentikan banyak aktivitas ekonomi, sekaligus menahan orang untuk belanja.

Memang, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, pertumbuhan ekonomi kita hanya kalah dari beberapa negara seperti Vietnam, China, dan Korea Selatan, yang pertumbuhan ekonominya masing-masing melaju 2,9%, 2,3%, dan -1%.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, lalu tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, pada periode sama masing-masing terjerembab -3,5%, -4,7%, -5,6%, -5,8%, -6,2%, dan -9,5%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga kita pada 2020 tumbuh -2,6% dengan kontribusi pertumbuhan sebesar 57,7%, belanja pemerintah tumbuh 1,9% dengan kontribusi 9,3%, investasi -4,9% dengan kontribusi 31,7%, serta ekspor dan impor masing-masing tumbuh -7,7% dengan kontribusi 17,2% dan -14,7% dengan kontribusi 16,0%.

Secara sektoral, pertumbuhan tinggi dialami oleh sektor komunikasi dan informasi sebesar 10,6% dan sektor layanan jasa kesehatan sebesar 11,6%. Sementara itu, sektor pertanian tumbuh 1,8%, sektor jasa pendidikan tumbuh 2,6%, sektor perumahan tumbuh 2,3%, dan sektor keuangan melaju 3,3%.



Sumber: Kemenkeu, 2021 berdasarkan data BPS



Sementara itu, kontraksi dialami sektor manufaktur, pertambangan, perdagangan, dan konstruksi. Selain itu, ada 2 sektor usaha yang terpukul paling dalam, yakni sektor akomodasi, makanan dan minuman yang berkontraksi 10,2% dan sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh -15,0%.

Dari potret itu, terlihat kunci pemulihan ekonomi kita terletak pada 3M, yaitu manusia, mobilitas dan modal kerja. Faktor manusia menjadi penting karena sumber daya manusia yang berkualitas adalah faktor penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Mobilitas juga penting karena itu akan menentukan seberapa besar dampak perekonomian yang ditimbulkan. Yang tidak kalah penting adalah faktor modal kerja. Tanpa modal kerja, manusia tidak bisa berpindah tempat dan mentransmisikan sumberdayanya untuk menggerakkan ekonomi.

Dari sisi realisasi investasi, perkembangan realisasi investasi pada 2016 sampai kuartal I/2021

menunjukkan pola yang normal, baik untuk penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

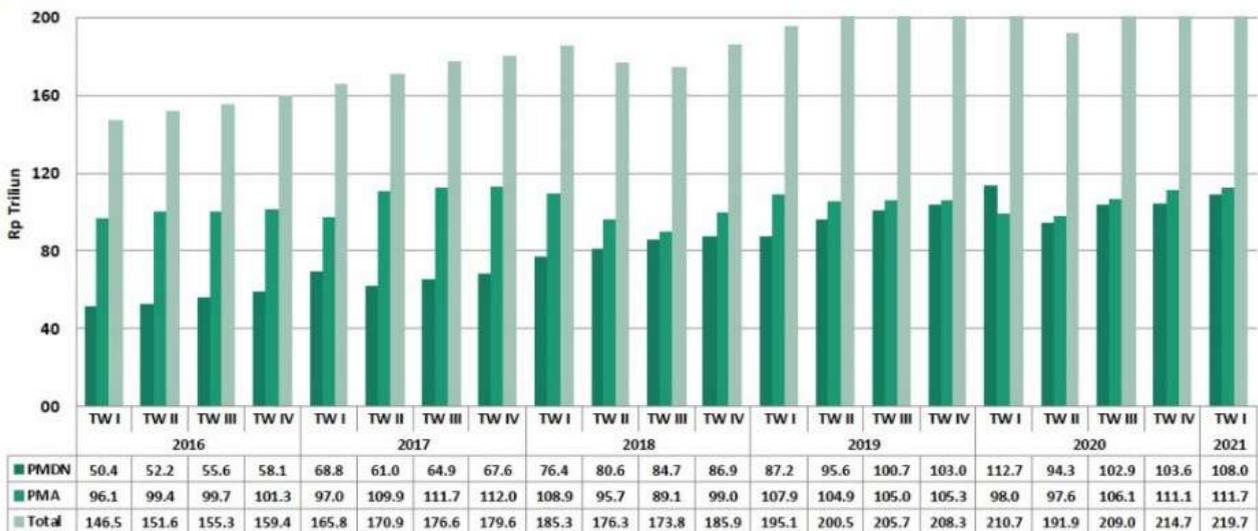
Dari pola yang normal ini juga terlihat keseimbangan realisasi investasi antara PMA dan PMDN, juga keseimbangan antara besaran investasi di Pulau Jawa sebagai sentrum utama pemerintahan, dan di Luar Pulau Jawa.

Dengan pola normal dan keseimbangan antara PMA dan PMDN itu, ada harapan pemulihan ekonomi pascapandemi bisa berlangsung lebih cepat. Namun, yang perlu diingat, terdapat 4 bias dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang perlu diperhatikan.

Pertama, skilled bias. Tenaga kerja *unskilled* terdampak lebih parah dibandingkan dengan tenaga kerja *skilled*. Faktor karakteristik pekerjaan dan *work from office* juga berpengaruh. *Kedua, sectoral bias.* Sektor pertanian, kesehatan dan telekomunikasi merupakan sektor yang terus tumbuh di masa pandemi Covid-19.



Perkembangan Realisasi Investasi 2016 – Maret 2021: Per Triwulan



Sumber: BKPM, 2021

Ketiga, sized bias. Usaha kecil dan mikro terdampak lebih buruk dibandingkan dengan kelompok usaha menengah dan besar. *Keempat, regional bias.* Daerah di luar Pulau Jawa- dan Bali serta pedesaan lebih resilien terhadap pandemi Covid-19.

Dari sisi sosial ekonomi, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak terhadap 29,12 juta tenaga kerja di Indonesia, baik itu berupa *scarring effect* maupun *habituatation effect*. Dari 29,12 juta tenaga kerja itu, 2,56 juta tenaga kerja di antaranya terpaksa menganggur karena kehilangan pekerjaan.

Kemudian sebanyak 0,76 juta tenaga kerja bukan termasuk angkatan kerja. Sisanya, sebanyak 1,77 juta tenaga kerja sementara tidak bekerja. Yang lain, sebanyak 24,03 juta tenaga kerja harus mengalami pengurangan gaji karena ada pengurangan jam kerja.

Merefleksikan hal ini, tingkat kemiskinan pada 2020 naik dari 9,22% menjadi 10,19%. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka juga bertambah dari 5,23% menjadi 7,07%. Sebagai akibatnya,

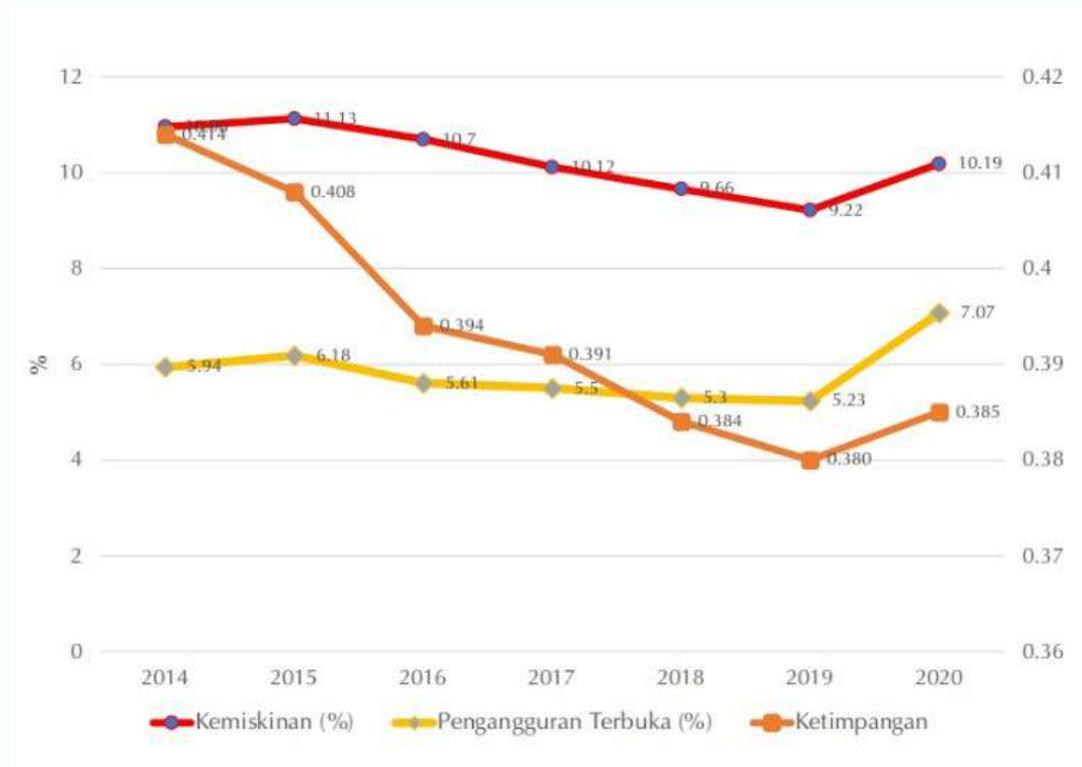
tingkat ketimpangan pendapatan pun bertambah dari sebelumnya 0,38% menjadi 0,385%.

Untuk mengatasi berbagai problem yang muncul akibat pandemi Covid-19 ini, pemerintah telah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020-2021. Program ini dilaksanakan pada APBN 2020 dan APBN 2021.

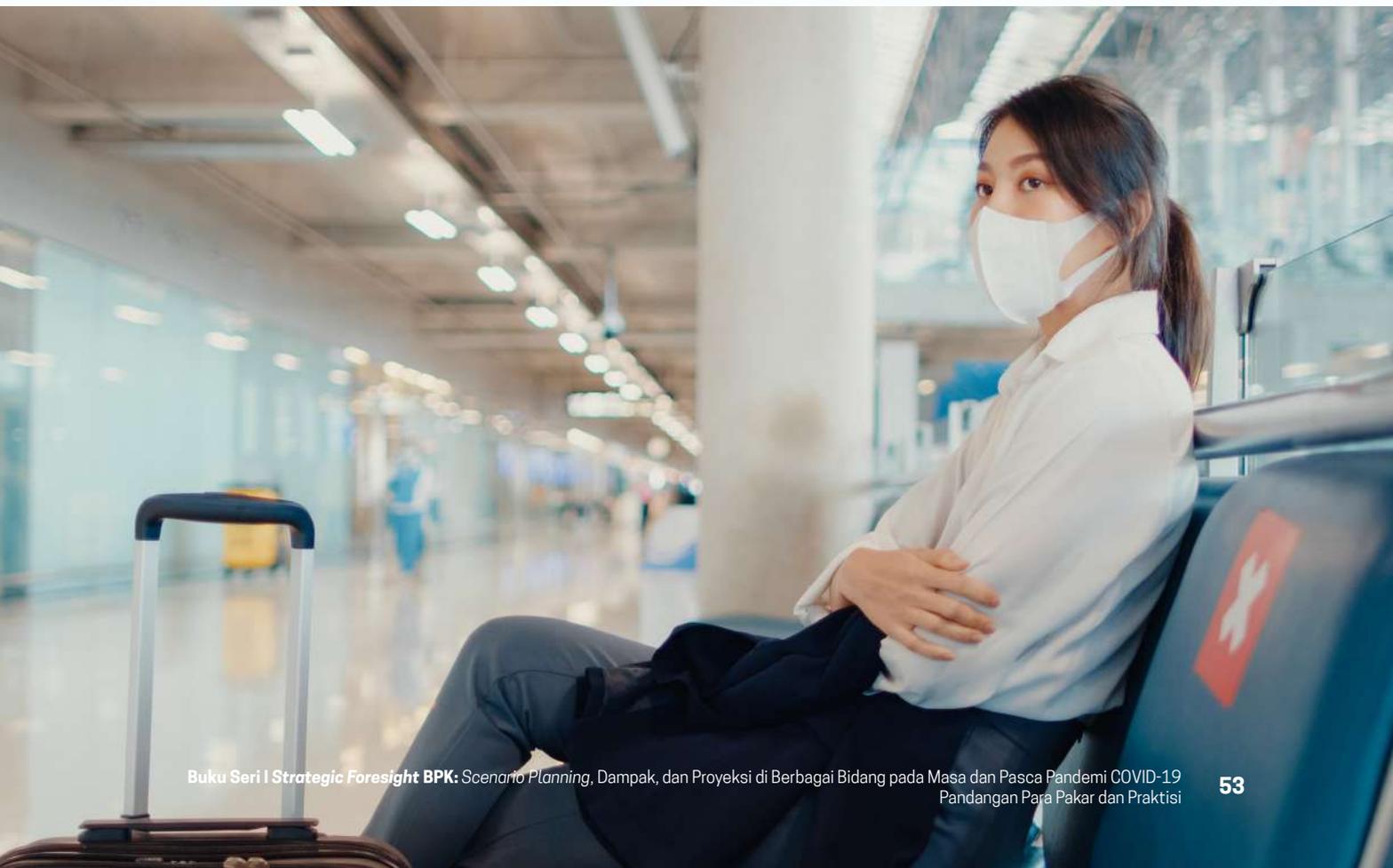
Pada 2020, realisasi belanja program ini mencapai Rp579,8 triliun, terbagi atas program kesehatan Rp63,5 triliun, program perlindungan sosial Rp220,4 triliun, dukungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan perusahaan Rp173,2 triliun, insentif usaha Rp56,1 triliun, dan program prioritas Rp66,6 triliun.

Pada 2021, alokasi belanja program ini mencapai Rp699,43 triliun, terbagi atas program kesehatan Rp176,3 triliun, program perlindungan sosial Rp157,4 triliun, dukungan pembiayaan UMKM dan usaha besar Rp184,8 triliun, insentif usaha Rp58,5 triliun, dan program prioritas Rp122,4 triliun.

Dari program itu terlihat, realisasi program PEN pada



Projected Allocation for PEN 2021 IDR 699.43 T* (2020 PEN Realization at IDR 579.78 T)*



2020 baru mencapai 85%. Apakah realisasi belanja ini betul-betul cepat, tepat dan akuntabel? Di sisi lain, dari program ini, terlihat belum ada upaya untuk melindungi tenaga kerja agar tetap dapat bekerja (*keeping workers at jobs*).

Dalam program itu juga belum terlihat adanya program *exit strategy* pascapandemi, dan bagaimana kesinambungan fiskalnya, terutama di lihat dari sisi defisit anggaran pada 2023 yang harus kembali ke level di bawah 3% sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.

Pengendalian kasus Covid-19 adalah kunci pemulihan ekonomi. Pengendalian ini sekaligus akan menghentikan adanya gelombang kedua pandemi (*a stop second wave*). Di sisi lain, sudah dimulainya vaksinasi adalah harapan akan berhentinya pandemi Covid-19. Namun, hal itu sangat tergantung pada ketersediaan vaksin dan kecepatan distribusi.

Dalam program pemulihan ekonomi itu juga harus diperhatikan bias-bias yang terjadi, seperti bias sektor, bias keterampilan, bias ukuran usaha, dan bias wilayah. Dibutuhkan rumusan strategi atau intervensi khusus yang tepat dan berbeda-beda untuk setiap bias, agar program pemulihan itu efektif.

Untuk kepentingan itulah, perlu dilakukan optimalisasi pada dana PEN agar tercapai keseimbangan antara kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitasnya. Dana PEN yang sangat besar jangan dibiarkan digunakan untuk kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan pemulihan dari pandemi.

Selain itu, fokus pada dampak sosial ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19. Kenaikan pengangguran dan kemiskinan akan secara simultan menaikkan ketimpangan pendapatan. Sementara itu, untuk

Dalam program pemulihan ekonomi itu juga harus diperhatikan bias-bias yang terjadi, seperti bias sektor, bias keterampilan, bias ukuran usaha, dan bias wilayah. Dibutuhkan rumusan strategi atau intervensi khusus yang tepat dan berbeda-beda untuk setiap bias, agar program pemulihan itu efektif.

kesehatan dan pendidikan ada risiko penurunan kualitas SDM dalam jangka panjang.

Masa depan kita sangat bergantung pada pemulihan ekonomi yang *contactless* dan berkelanjutan ini. Karena itu, ruang digitalisasi harus dibuka seluas-luasnya baik yang menyangkut *access*, *usage* maupun *knowledge*, sehingga tercipta kesempatan yang sama untuk melakukan inovasi.

Promosi investasi inklusif berupa investasi *pro-job*, *pro-poor*, *pro-environment*, *pro-knowledge creation*, *pro-empowerment*, *pro-social cohesion*, harus didorong. Ini semua merupakan bagian dari kata kunci pemulihan ekonomi, yakni *beyond conventional*, *extra miles* dan *synergi*.*

Referensi:

- Data Bloomberg dan HIS Markit
- Data Badan Pusat Statistik
- Data Kementerian Keuangan
- Data Bank Indonesia
- Data Badan Koordinasi Penanaman Modal RI





PEMIKIRAN DI BIDANG SOSIOLOGI

- **Dampak Pandemi COVID-19 Dalam Transformasi Tatanan Sosial**
- **Antisipasi Dampak Sosial Pandemi COVID-19**



DAMPAK PANDEMI COVID-19 DALAM TRANSFORMASI TATANAN SOSIAL

Imam B. Prasodjo
Sosiolog Universitas Indonesia

“APA mesin pendorong perubahan?” tanya Francis Fukuyama pada 1992. Ia kemudian menjawab sendiri pertanyaan itu. Ada 3. *Pertama*, keinginan meraih kesejahteraan fisik (*physical well-being*) yang berangkat dari Etika Protestan. *Kedua*, teknologi yang mampu memenuhi keinginan manusia. *Ketiga*, keinginan untuk diakui. Ketiga hal inilah yang kemudian bertubrukan dengan pandemi Covid-19, dan menghela perubahan dari sisi interaksi sosial (*social interaction*) cara hidup (*way of life*).

Kita ingat, perubahan peradaban masyarakat dari sejak mula dimulai dari berburu dan perladangan berpindah. Setelah itu, peradaban berubah menjadi masyarakat pertanian, masyarakat industri, lalu masyarakat informasi, dan akhirnya masyarakat jejaring (*network society*). Dari sini, peradaban berangsur-angsur akan berubah menjadi era industri 5.0 (era robot).

Futurolog Alvin Toffler berpendapat masyarakat mengalami perubahan struktural yang sangat besar, sebuah revolusi dari masyarakat industri menjadi ‘masyarakat industri super’. Perubahan ini membuat orang kewalahan.

Dia berargumen bahwa laju perubahan teknologi dan sosial yang semakin cepat membuat orang-orang terputus dan menderita ‘stres yang menghancurkan dan disorientasi’. Toffler menyatakan mayoritas

masalah sosial merupakan gejala *shock* di masa depan. Dalam pembahasannya tentang komponen *shock* itu, ia mempopulerkan istilah ‘informasi yang berlebihan (*information overload*).

Sebagai negara-bangsa yang multikultural, Indonesia terdiri atas lebih dari 50 etnis besar, lebih dari 700 suku, ratusan agama dan kepercayaan, serta 70.611 desa dengan hukum adat berbeda. Etnis besar itu lalu membentuk *etho-nation*. Keberagaman suku dan agama kemudian membentuk kelompok-kelompok identitas dan kelas, dan desa adat tadi membentuk komunitas adat.

Namun, kini negara bangsa multikultural itu harus berhadapan dengan sebuah dunia dinamis yang hibrid (*the dynamic hybrid world*). Sebuah dunia di mana dunia nyata yang ditandai dengan interaksi *face to face* bertemu dengan dunia virtual yang menggunakan interaksi online dan teknologi berjejaring.

Dengan kata lain, ada tubrukan antara *local space* tempat dunia nyata berlangsung dengan *cyber space* tempat dunia virtual berlangsung. Tubrukan ini kemudian membentuk konstruksi baru *sociability*, menjadi bentuk baru sosial, ekonomi, politik, dan organisasi.

Tumbuh bentuk baru pengorganisasian kegiatan ekonomi, sosial dan politik. Teknologi Internet yang mendorong munculnya situs-situs jaringan sosial



akhirnya melahirkan budaya baru kehidupan sosial yang berbasis Internet. Di sana ada ekspresi bebas (*free expression*), komunikasi massa-diri (*mass-self communication*), interaktivitas, multimodal, dan sosiabilitas yang dipilih (*chosen sociability*).

Terjadi perubahan masyarakat dan perubahan pola alur informasi dan komunikasi dari tersentralisasi (*centralized*) menjadi tersebar (*distributed*), dah akhirnya menjadi jaringan (*network*). Eksistensi kota berada di dalam jaringan sistem kota yang bersifat kompleks. Jaringanlah yang menjadi penentu kemajuan desa maupun kota

The network society adalah bentuk khusus karakteristik struktur sosial yang terjadi dalam

era informasi. Ini adalah sebuah periode historis di mana masyarakat melakukan aktivitasnya dalam sebuah paradigma teknologi yang dibangun atas *microelectronics-based information/communication technologies* dan *genetic engineering*.

Menurut Manuel Castells, dalam hubungan itu akan berlangsung tranformasi pusat kekuasaan. Pemegang kekuasaan yang terpusat pada negara, pada era masyarakat jejaring, mengalami transformasi dramatis.

Pertama, kedaulatan negara mendapat tantangan dengan terjadinya arus deras aliran kekayaan, komunikasi dan informasi yang bersifat global yang melintasi semua negara. *Kedua*, keabsahan negara memudar dengan banyaknya skandal politik dan

semakin besarnya ketergantungan pada media *politics*. *Ketiga*, melemahnya kekuasaan dan kredibilitas negara mendorong rakyat membangun sistem pertahanan sendiri dan keterwakilan identitas mereka, dan selanjutnya mendelegimitasi keberadaan negara. Namun kekuasaan negara tidak serta-merta hilang, tetapi beradaptasi dan melakukan transformasi.

Dengan kata lain, negara baru itu bukan lagi negara-bangsa. Negara dalam abad informasi adalah *a network state*, negara yang terdiri dari jaringan kompleks pembagian kekuasaan (*a complex web of power-sharing*), dan pengambilan keputusan yang dinegosiasikan dilakukan antara berbagai pihak seperti internasional, multinasional, nasional, regional, lokal, nonpemerintahan, dan institusi politik.

Paradigma Pembangunan

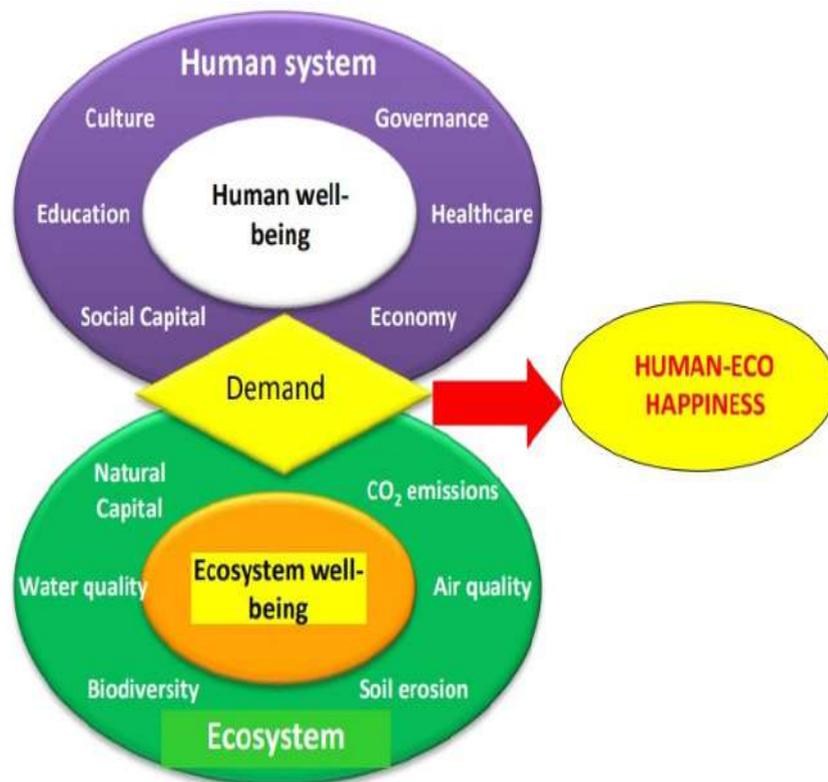
SIMAK pernyataan Chief Environmental Economist United Nations Environment Programme Pushpam Kumar berkaitan

dengan Covid-19. Menurutnya, wabah pandemi seperti Covid-19 mengungkapkan prinsip dasar pertukaran yang secara konsisten kita hadapi.

Manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, tetapi kapasitas planet ini terbatas untuk memuaskan mereka. Terlepas dari penyebab atau asalnya, munculnya Covid-19 telah menggarisbawahi hubungan afektif yang saling terkait antara manusia dan alam.

Sekarang, kita harus mencoba memahami dan menghargai batas-batas yang dapat ditempuh manusia dalam mendorong alam, sebelum dampaknya negatif. Batasan tersebut harus menjadi acuan dalam aspirasi konsumsi dan produksi kita.

Pernyataan tersebut akan membawa kita pada perdebatan klasik antara kaum *conservationist* (*de growth*) dan kaum *developmentalist* (*pro growth*). Kaum *conservationist* memakai prinsip mengurangi pemanasan global, melindungi keragaman hayati, memulihkan *ecosystem service*, dan melindungi spesies yang terancam punah.



Sebaliknya, kaum *developmentalist* menggunakan prinsip mengentaskan kemiskinan, keamanan pangan, mempersempit ketimpangan pendapatan, mempersempit ketimpangan gender, dan memperluas akses pendidikan. Setelah muncul pandemi Covid-19, ke mana arah paradigma *sustainable development*?

Di sinilah kemudian muncul paradigma pembangunan berwawasan lingkungan dan sosial. Ukuran keberhasilan pembangunan pun berubah. Dari situlah kemudian muncul *gross national happiness index*, yang pada 2015 menempatkan Bhutan sebagai negara dengan penduduk paling bahagia di muka bumi.

Ketidakpastian dan Survival

KASUS Covid-19 di Indonesia hingga 24 April 2021 telah menyentuh angka 1.636.792, atau naik 4.544 kasus dibandingkan dengan posisi 23 April 2021. Sebaran 4.544 kasus baru itu didominasi DKI Jakarta dengan 907 kasus. Disusul Jawa Barat 630, Riau 421, Jawa Tengah 317, dan Sumatera Barat 295 kasus.

Dalam kelompok lima besar penyumbang kasus positif terbanyak, posisi Sumatera Barat pada Sabtu (24/4/2021), naik dari peringkat 7 dengan 232 kasus. Menggeser Bangka Belitung (Babel) yang kemarin melaporkan 339 kasus baru. Saat ini, Babel ada di peringkat 8 dengan 167 kasus.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Pemerintah Indonesia tengah bersiap mengantisipasi masuknya varian baru Covid-19 dari sejumlah negara. Di antaranya B.1.1.7 dari Inggris, B.1.351 dari Afrika Selatan, P.1 dari Brasil, serta varian mutasi ganda B.1.617 di India yang diperkirakan lebih berbahaya dan cepat menular.

Menurut Budi, mutasi-mutasi itu memunculkan kekhawatiran akan terjadinya lonjakan kasus yang sangat tinggi secara global. “Gelombang kasus di India dipengaruhi mutasi virus dan pelanggaran penegakan protokol kesehatan. Akibatnya, penularan terjadi kembali dengan mutasi baru dan naik sangat tinggi,” ujar Budi dilansir dari siaran pers di laman resmi

Kemendes, Sabtu (24/4/2021).

Dengan banyaknya jumlah kasus meninggal pada pandemi Covid-19 ini, mungkin baik kita mengup pendapat Charles Darwin. Pada 1809, ilmuwan Charles Darwin berkata. “*It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change,*” katanya.

Jared Diamond berpendapat karakteristik geografis, iklim dan lingkungan yang mendukung perkembangan awal masyarakat pertanian yang stabil pada akhirnya menyebabkan kekebalan terhadap penyakit endemik pada hewan pertanian, dan perkembangan negara yang kuat dan terorganisir yang mampu mendominasi orang lain.

Orang-orang non-Eropa (Afrika sub-Sahara, Pribumi Amerika, Aborigin Australia dan Guinea Baru, dan penduduk asli Asia Tenggara tropis), sebagian besar ditaklukkan oleh masyarakat berbasis pertanian seperti Eurasia dan Bantu. Jared Diamond percaya hal ini karena keunggulan teknologi dan imunologi masyarakat ini, yang berasal dari kebangkitan awal pertanian setelah Zaman Es terakhir.

Transformasi Tatanan Sosial

Pemutusan mata rantai penularan Covid-19 ada pada 3 hal, yaitu memperkuat ketahanan tubuh, menemukan vaksin efektif anti-Covid-19, dan memperkuat ketangguhan komunitas. Namun, untuk melakukan transformasi tatanan-sosial, dibutuhkan pergulatan yang panjang, yang berangkat dari 3 hal, yaitu orientasi teoretik, pergulatan nilai-nilai, dan pergulatan kepentingan. Inilah yang menghasilkan tatanan sosial baru.

Orientasi teokritik bisa berupa perdebatan pertemuan tatap muka dalam sekolah, atau perdebatan mana yang harus didahulukan, pembenahan ekonomi atau pembenahan kesehatan. Pergulatan nilai-nilai bisa terlihat dari perdebatan nilai keagamaan versus protokol kesehatan. Misalnya, rapatkan shaf salat versus *physical distancing*. Sementara itu,

pergulatan kepentingan misa terlihat dari perdebatan antara kerumunan suppoter versus bisnis sepakbola, pembukaan mal, atau kampanye.

Perubahan perilaku bisa berangkat dari sikap mengetahui, mendalami, atau menyadari. Inilah yang kemudian menghasilkan perilaku sosial dengan protokol kesehatan, yang melahirkan perubahan tatanan sosial.

Perubahan ini akan terwujud dalam berbagai hal seperti aktivitas perdagangan, aktivitas hiburan, aktivitas keagamaan, aktivitas olahraga, aktivitas perkantoran, aktivitas pendidikan, aktivitas rumah tangga, pelayanan kesehatan, serta arsitektur dan tata ruang.

Adapun dampak Covid-19 terhadap perubahan interaksi sosial dan ruang publik berawal dari kebijakan memutus mata rantai covid-19 terkait dengan perilaku individu dan interaksi sosial, yaitu kebijakan mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, kebijakan *social/physical distancing*, kebijakan tinggal di rumah, pembatasan transportasi publik, pembatasan penggunaan fasilitas ruang publik, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Secara makro, berbagai kebijakan ini melahirkan perubahan perilaku individu dan interaksi sosial di ruang-ruang publik. Dampaknya terhadap ruang publik akan terlihat dari segi desain, penggunaan, dan persepsi.

Sementara itu, secara mikro berbagai kebijakan

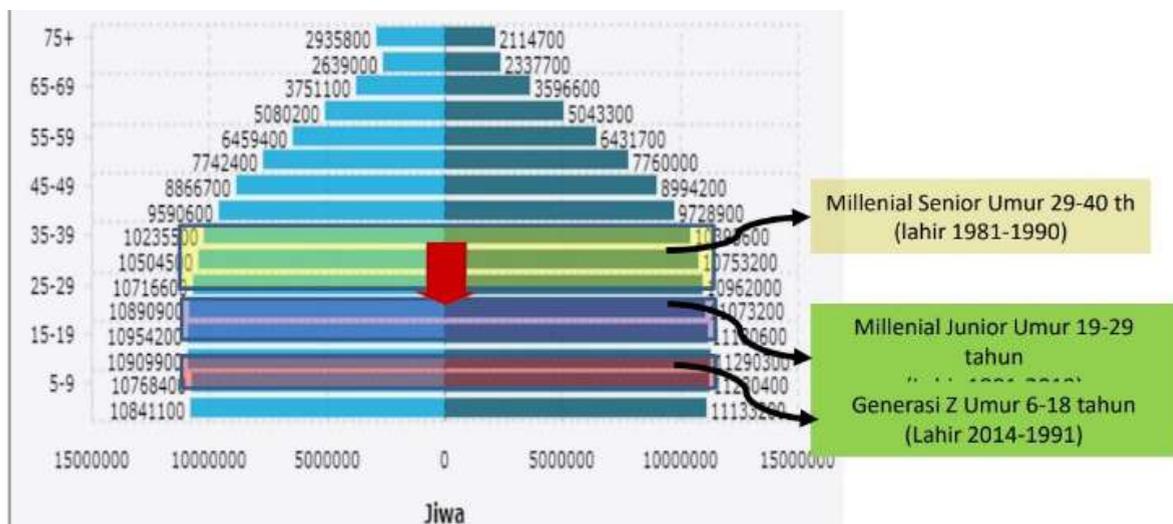
tersebut juga akan menghasilkan perubahan interaksi sosial di ruang-ruang privat. Dampak ke depannya terhadap ruang privat juga akan terlihat dari segi desain, penggunaan, dan persepsi.

Pertanyaannya, akankah hubungan manusia dengan ruang publik berubah? Bila ya, berapa lama? Adakah pengaruh desain ruang publik terhadap penularan Covid-19? Apakah perubahan perilaku saat ini terus bertahan? Apakah akan ada hubungan emosi masyarakat dengan ruang berubah?

Lalu, apa dan bagaimana keuntungan yang diperoleh dari perubahan *urban nature* ini? Apakah ada kaitan respons penanggulangan dampak Covid 19 dengan isu pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim? Apakah pengalaman ini akan menggiring kita untuk memikirkan cara baru membangun dan redesain ulang kota?

Dalam proses ini, hukumnya adalah alur adaptasi akan mendorong transformasi adaptasi. Arena aktivitasnya misalnya, ada pada tiga matra, yaitu kebijakan politik/ sosial, arena administratif, dan arena pelaksanaan.

Pada arena kebijakan politik/sosial akan menyebabkan perubahan struktural, legislasi, dan alokasi sumber daya. Pada sisi arena administratif, akan terjadi restrukturisasi administratif, ditandai dengan penggunaan *applied research*, penggunaan tenaga ahli teknis/praktisi.





Pada arena pelaksanaan, hal ini akan berdampak pada keterlibatan aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan, pemahaman terhadap mekanisme administratif, kemudian mengetahui, memahami, menyadari dan menjalankan perilaku positif dan bertanggung-jawab.

Hal ini sudah ditunjukkan dengan maraknya telemedicine, wisuda dan menikah secara online, pertandingan sepakbola tanpa penonton, pertemuan RT/RW dengan protokol kesehatan, salat atau misa dengan protokol kesehatan, pergeseran perilaku cara belanja, dan seterusnya.

Solusi

Dalam lingkup Indonesia, generasi millennial merupakan pelindung komunitas untuk memasuki era baru industri 4.0. Dengan memahami ini, maka sasaran perubahan perilaku (*societal*) harus diletakkan pada 3 sisi, yaitu lembaga bisnis (perkantoran), komunitas

(*civil society*) dan lembaga pemerintahan mulai dari kabupaten, kecamatan, sampai desa.

Di lembaga bisnis (perkantoran), sasarannya adalah perilaku kolektif subbagian lembaga dan individu. Di komunitas (*civil society*) sasarannya perilaku keluarga dan individu. Adapun sasaran di lembaga pemerintahan adalah perilaku kolektif organ pemerintah hingga ke individu.

Dengan kata lain, kita semua yang terdampak oleh pandemi Covid-19 ini harus bekerja sama untuk membangun komunitas pendidikan rakyat, membangun modal sosial, dan meningkatkan ketangguhan ekonomi rumah tangga.

Misalnya seperti yang dilakukan pada program peningkatan kualitas SDM di perdesaan melalui Kampung Ilmu, di Cisarua, Tegalwaru, Purwakarta Jawa Barat. Kemudian juga melalui 'Kampung Inggris' di Pare, Kediri, Jawa Timur. Juga membangun sentra pembelajaran dan pemberdayaan seperti melalui pelatihan-pelatihan untuk usaha mikro, kecil dan menengah.

Referensi:

- Manuel Castells, 2013. "The Impact of the Internet on Society: A Global Perspective"
- British Journal of Sociology Vol. No. 51 Issue No. 1 (January/March 2000) pp. 5-24
- Adam Jamrozik and Luisa Nocella 2000

ANTISIPASI DAMPAK SOSIAL PANDEMI COVID-19

Metta Dharmasaputra

Jurnalis, Co-founder & CEO Katadata

KECEMASAN menjaral dengan cepat. Hari itu, 2 Maret 2020, pemerintah secara resmi mengumumkan kasus pertama warga Indonesia yang terpapar virus Covid-19. Sekitar satu setengah bulan sebelumnya pemerintah Tiongkok memberlakukan kebijakan *lock-down* atas kota Wuhan—episentrum global pandemi virus mematikan ini. Sebelas juta penduduknya dikunci di dalam kota. Terisolasi dari ‘dunia luar’.

Ketika publik domestik masih terkesiap dan dilanda cemas, tak lama berselang giliran World Health Organization (WHO) mengeluarkan pengumuman mengejutkan. Badan Kesehatan Dunia ini mengumumkan bahwa Covid-19 telah menjadi pandemi global. Stempel ini harus diterakan karena penyebaran virus semakin meluas. Hanya dalam dua pekan, jumlah kasus positif Covid-19 di Tiongkok meningkat hingga 13 kali lipat. Jumlah negara yang terjangkit wabah ini pun melonjak tiga kali lipat. Jika ditotal, saat itu sudah lebih dari 118 ribu kasus Covid-19 ditemukan di 114 negara. Lebih dari empat ribu pasien di antaranya bahkan harus kehilangan nyawa.

Sebagai langkah antisipasi, untuk mencegah penularan wabah yang kian meluas, pemerintah memutuskan

terhitung mulai Senin, 16 Maret 2020, para pegawai di institusi pemerintahan dan BUMN harus bekerja dari rumah. Bersamaan dengan itu, perusahaan-perusahaan swasta pun memberlakukan kebijakan *Work From Home* (WFH). Jakarta dan kota-kota di berbagai belahan bumi berubah seketika. Jalan-jalan protokol yang biasanya tak pernah tidur, mendadak sepi. Denyut aktivitas ekonomi sontak melambat. Perkantoran nyaris tutup. Hotel dan restoran ditinggalkan para pengunjung.

Yang paling terpuak adalah sektor informal dan kalangan ekonomi lemah. Warung-warung makan, para pedagang kecil, serta kelompok usaha mikro, kecil dan menengah hampir kehabisan ‘napas’. Tingkat kemiskinan yang semula trennya menunjukkan penurunan, langsung berbalik arah. Angka kemiskinan melejit. Penduduk miskin di Indonesia per September 2020 meningkat menjadi hampir 28 juta.¹ Ini membuat tingkat kemiskinan di Indonesia kembali naik ke level dua digit. Dari semula 9,2 persen (24,8 juta) per September 2019 menjadi 10,2 persen (27,6 juta) setahun kemudian. Ini berarti jumlah penduduk miskin bertambah 2,8 juta hanya dalam kurun setahun.²

Hal yang juga perlu dicatat, meski episentrum

1 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/15/penduduk-miskin-indonesia-bertambah-jadi-2755-juta-per-september-2020>

2 <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20Maret,juta%20orang%20terhadap%20Maret%202020.>



pandemi Covid-19 berada di perkotaan, khususnya Jakarta dan sekitarnya, lonjakan angka kemiskinan tak hanya terjadi di kota, melainkan juga di perdesaan. Peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan memang jauh lebih tinggi ketimbang di perdesaan. Dalam kurun setahun, kenaikannya mencapai 22,1 persen dari 9,9 juta per September 2019 menjadi 12 juta. Sementara, jumlah orang miskin di perdesaan hanya naik 3,9 persen menjadi 15,5 juta dari sebelumnya 14,9 juta orang. Meski begitu, tingkat kemiskinan di perdesaan masih jauh lebih tinggi (13,2 persen) dibandingkan perkotaan (7,9 persen).

Yang sedikit melegakan, kenaikan angka kemiskinan akibat pandemi ini tidak separah perkiraan Bank Dunia yang memproyeksikan 10,7-11,6 persen. “Ini karena

adanya bantuan pemerintah, terutama untuk lapisan bawah,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto.³ Meski begitu, BPS juga mencatat tingkat kesenjangan menjadi kian lebar. Hal ini tercermin pada tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau rasio gini yang mencapai 0,385 pada September 2020. Angka ini meningkat 0,004 poin dari posisi enam bulan sebelumnya pada Maret 2020 dan meningkat 0,005 poin dibandingkan September 2019. Ketimpangan tertinggi terdapat di wilayah perkotaan sebesar 0,399. Angka ini naik dibandingkan Maret 2020 (0,393) dan September 2019 (0,391). Sementara di perdesaan tercatat sebesar 0,319, juga meningkat dibandingkan Maret 2020 (0,317) dan September 2019 (0,315).⁴

³ “Terpukul Pandemi, Penduduk Miskin Indonesia Bertambah 2,76 juta Orang”, *katadata.co.id*, 15 Februari 2021, pk. 16.03. <https://katadata.co.id/happy-fajrian/finansial/602a75af4f726/terpukul-pandemi-penduduk-miskin-indonesia-bertambah-2-76-juta-orang>

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/16/rasio-gini-indonesia-naik-jadi-0385-pada-september-2020>

Kerentanan Sektor UMKM

Kenaikan angka kemiskinan dan melebarnya kesenjangan, khususnya di perkotaan, sesungguhnya tak mengagetkan. Mengingat, krisis yang terjadi kali ini bersifat multidimensi yang berakar pada sektor kesehatan dan langsung memukul sektor riil. Ini jelas berbeda dengan krisis keuangan global pada 2008 yang hanya sebatas sektor finansial. Penting juga dicatat bahwa krisis kali ini bahkan amat berbeda dibanding krisis 1998 yang menghantam Indonesia hingga menumbangkan pemerintahan Orde Baru. Meski kala itu negeri ini dilanda krisis ganda di bidang ekonomi dan politik, sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mampu bertahan dari badai. Bahkan UMKM menjadi penopang pilar ekonomi nasional yang goyah.

Dalam konteks itu, dampak krisis kali ini perlu dicermati dan disikapi secara berbeda oleh pemerintah. Badai di sektor kesehatan telah ikut menyapu kelompok UMKM dan sektor informal. Padahal, jumlah pelaku di sektor ini sangat besar. Ditaksir mencapai 64 juta UMKM di seluruh Indonesia.⁵ Kelompok Usaha Mikro dengan nilai aset hingga Rp 50 juta dan omset hingga Rp 300 juta setahun, berada di lapisan terbawah piramida. Proporsinya sangat besar, mencapai 98,7 persen. Di urutan kedua terbesar yaitu kelompok usaha kecil dengan aset Rp 50-500 juta dan omset Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar setahun, yang diperkirakan sekitar 1,2 persen. Jika ditotal, maka dari kelompok usaha mikro dan kecil ini saja proporsinya sudah mencapai 99,9 persen.

Adapun kelompok usaha menengah (aset Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar dan omset Rp 2,5-Rp 50 miliar setahun) serta usaha besar (aset di atas Rp 10 miliar dan omset di atas Rp 50 miliar setahun) yang berada di lapis piramida teratas, masing-masing porsinya hanya 0,09 persen dan 0,01 persen. Melihat data-data itu

tergambar jelas bahwa peran kelompok usaha Mikro dan Kecil sangat signifikan. Kontribusi Usaha Mikro terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pun mencapai 37,8 persen. Angka ini hampir setara dengan kontribusi Usaha Besar yang mencapai 38,9 persen terhadap PDB.

Karena itulah, efek pandemi Covid-19 yang memukul kelompok usaha mikro dan kecil tidak bisa dipandang remeh. Dengan jumlahnya yang sangat besar, hal ini pun memunculkan kerentanan sosial dan politik yang tidak kecil, jika tidak segera dilakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan sektor ini. Untunglah sejumlah langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk meredam dampak hebat badai pandemi. Bahkan paket stimulus ekonomi pertama sudah dilansir sepekan sebelum kasus Covid-19 pertama diumumkan.⁶

Gerak cepat amat diperlukan mengingat daya tahan UMKM menghadapi badai pandemi pun terbatas. Survei yang diadakan oleh Katadata Insight Center (KIC) di Jabodetabek pada Juni 2020 menunjukkan kerentanan ini.⁷ Dalam jajak pendapat itu, sebesar 82,2 persen UMKM yang sudah beroperasi lebih dari setahun, mengaku sangat terpuak oleh badai pandemi. Padahal pada krisis moneter 1998, hanya 3,1 persen UMKM yang terimbas krisis. Apalagi pada 2008, hanya 0,7 persen yang mengaku terimbas oleh krisis finansial global. Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 37 persen di antaranya mengaku hanya bisa bertahan hidup paling lama setahun setelah pandemi meledak. Bahkan, seperempat di antaranya hanya mampu bertahan maksimal enam bulan. Perkiraan lain menyebutkan, separuh dari warung tegal di Jabodetabek pun terancam tutup pada 2021.

5 Data Kementerian Koperasi dan UMKM, 2018

6 Martha Ruth Thertina, "Menyorot Tiga Jilid Stimulus Ekonomi di Tengah Pandemi Corona", *katadata.co.id*, 19 Maret 2020, pk. 12.56. <https://katadata.co.id/marthathertina/indepth/5e9a42138f0a8/menyorot-tiga-jilid-stimulus-ekonomi-di-tengah-pandemi-corona>

7 Survei UMKM di Jabodetabek oleh Katadata Insight Center (KIC), Juni 2020. <https://katadata.co.id/umkm>



Pengangguran dan Deurbanisasi

Dari gambaran itu terlihat jelas juga bagaimana dahsyatnya krisis kali ini yang menjalar ke semua lini. Yang pasti, pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi berkontraksi hebat, ditandai dengan laju inflasi yang rendah. Dampaknya tingkat pengangguran terbuka pun naik dan persentase pekerja setengah pengangguran meningkat. Diperkirakan sedikitnya terdapat sekitar 29 juta pekerja yang terkena dampak pandemi Covid-19. Sekitar 24 juta di antaranya terkena pengurangan jam kerja, dan lebih dari 2,5 juta orang bahkan harus kehilangan pekerjaan.⁸

Ada sejumlah implikasi yang perlu diwaspadai akibat ledakan pengangguran, yang pada akhirnya juga berpotensi memicu problem sosial. *Pertama*, berpindahnya beban kota ke desa. Sektor informal dan usaha kecil di perkotaan yang tertekan, akan memunculkan fenomena deurbanisasi. Kehilangan mata pencaharian di kota membuat para pekerja kembali mengalir ke desa-desa tempat asal mereka hanya untuk sekadar bertahan hidup, berhubung biaya hidup yang jauh lebih murah.

Persoalannya, daya dukung ekonomi desa amat terbatas dan tidak siap menanggung beban yang tiba-tiba membesar. Bahkan ada banyak ekonomi desa, yang selama ini justru bergantung pada aliran uang dari warganya yang merantau ke kota. Ketidaksiapan menanggung beban berlebih ini pada akhirnya akan membuat angka kemiskinan di perdesaan menjadi kian tinggi. Semakin mengkhawatirkan jika wabah pandemi pun kemudian menjalar ke desa-desa, terbawa oleh para perantau yang pulang kampung. Jika desa-desa kemudian 'kolaps', stabilitas pasokan pangan nasional yang menjadi taruhannya.

Kedua, membesarnya pengangguran kelompok usia muda. Di perkotaan, kondisi ini memunculkan potensi meningkatnya kriminalitas. Sementara di perdesaan, akan terjadi kesenjangan (*gap*) yang lebar antara

keahlian yang dimiliki oleh para pekerja muda yang pulang kampung dan peluang lapangan kerja yang tersedia, yang sebagian besar masih bertumpu pada sektor pertanian tradisional. Membesarnya pengangguran kelompok usia muda ini tentu saja harus diwaspadai mengingat Indonesia sedang menikmati bonus demografi, yang ditandai dengan kian besarnya proporsi penduduk usia produktif dan diperkirakan berpuncak pada 2030. Jika hal ini tidak teratasi, maka berkah bonus demografi akan berbalik menjadi petaka. Besarnya penduduk usia muda produktif justru menjadi beban ekonomi nasional.

Ketiga, dalam fenomena sosial, ledakan pengangguran yang berkepanjangan dan kemiskinan kronis akibat pandemi, dapat memicu frustrasi publik. Bukan tidak mungkin, fenomena ini pada akhirnya juga akan memicu berbagai aksi radikalisme hingga terorisme. Selain itu, kondisi ini dapat berpotensi memunculkan kerawanan menjelang berlangsungnya Pemilihan Umum pada 2024. Sebab, kemiskinan dan pengangguran akan membuka peluang tumbuh suburnya berbagai praktik politik uang dalam upaya mendulang suara dari para pemilih.

Ketimpangan Layanan Kesehatan Daerah

Di luar aspek ekonomi, yang perlu juga diwaspadai adalah potensi kerawanan sosial-politik akibat ketimpangan layanan kesehatan antar-daerah. Ancaman ini muncul seiring dengan menjalarnya pandemi Covid-19 ke berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan "Indeks Kerentanan Provinsi dalam Menghadapi Covid-19" yang dilansir KIC pada April 2020⁹, daya dukung layanan kesehatan antar-daerah amat timpang. Ini berimplikasi pada tingkat kerentanan yang tinggi pada sejumlah daerah terhadap bahaya pandemi yang mengintai.

DKI Jakarta meski memiliki tingkat kerentanan penyebaran virus yang tinggi, memiliki daya dukung

⁸ <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5fb33f097f7c7/wabah-pengangguran-di-masa-covid-19>

⁹ "Indeks Kerentanan Provinsi di Indonesia dalam Menghadapi Covid-19," Katadata Insight Center (KIC), April 2020. https://cdn1.katadata.co.id/media/files/Kerentanan_Provinsi_Di_Indonesia_Dalam_Menghadapi_Covid_19.pdf

A hand in a black sleeve holds a white sign with rounded corners. The sign is suspended by a string and features the text 'TUTUP SEMENTARA SELAMA PPKM' in bold, black, uppercase letters. The background is a blurred outdoor scene with warm, golden light, suggesting a sunset or sunrise.

**TUTUP
SEMENTARA
SELAMA
PPKM**

layanan kesehatan terbaik dibanding daerah-daerah lainnya. Berbeda halnya dengan Jawa Barat dan Banten. Dua wilayah berpenduduk padat dengan mobilitas tinggi dan tetangga ibu kota negara ini, juga memiliki tingkat kerentanan penularan tertinggi, namun dukungan layanan kesehatan yang dimilikinya tergolong rendah. Situasi ini sangat tidak ideal, mengingat keduanya merupakan wilayah krusial penopang ibu kota.

Fenomena gelombang kedua pandemi yang menghantam Indonesia pada pertengahan 2021 menunjukkan secara jelas bagaimana banyak daerah sangat kewalahan dalam menghadapi lonjakan pasien Covid-19, yang dapat memicu frustrasi publik dan instabilitas sosial-politik. Ketersediaan sarana dan infrastruktur Rumah Sakit serta tenaga medis yang tidak memadai, membuat tingkat kematian pasien pun cukup tinggi. Masih rendahnya kesiapan daya dukung layanan kesehatan ini juga penting dilihat dalam konteks fenomena deurbanisasi. Sangat penting kiranya segera disusun strategi nasional untuk memperkuat daya dukung layanan kesehatan yang memadai hingga level perdesaan, apalagi dengan adanya tambahan beban akibat fenomena deurbanisasi.

Dalam kaitan ini, upaya revitalisasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai penyedia fasilitas kesehatan tingkat pertama, yang pernah digalakkan semasa Orde Baru, perlu segera dilakukan. Sementara itu, di level nasional dan dalam jangka panjang, pendirian Pusat Analisis, Perencanaan dan Pengendalian Wabah Terintegrasi seperti dilakukan oleh pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden, juga perlu dipertimbangkan. Melalui strategi pusat-daerah yang terintegrasi ini diharapkan bahaya kemunculan pandemi di masa depan dapat diantisipasi lebih dini, dan langkah-langkah taktis penanganannya pun dapat secara cepat dilakukan hingga ke berbagai pelosok Nusantara.

Soliditas Persepsi Publik

Hal penting lain yang perlu dibangun—tapi juga kerap terpinggirkan—dalam penanganan pandemi adalah ‘*soft infrastructure*’ menyangkut strategi komunikasi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan publik. Melihat tingkat kerentanan penyebaran Covid-19 di berbagai wilayah, dengan karakteristik dan strata sosial berbeda, soliditas persepsi publik tentang virus mematikan ini jelas amat dibutuhkan. Dengan modal ini, meluasnya pandemi di tengah keterbatasan daya dukung layanan kesehatan di berbagai daerah, dapat diredam. Fakta di lapangan selama ini menunjukkan, masyarakat cukup terbelah dalam menyikapi hoaks yang berkembang luas tentang Covid-19. Salah satu pemicunya adalah masih kuatnya fragmentasi masyarakat akibat perbedaan preferensi politik pada Pemilu Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Di luar faktor politik dan kekuasaan, faktor dominan lain yang amat mempengaruhi persepsi publik tentang Covid-19 adalah sentimen agama. Mulai dari soal pemahaman tentang ada-tidaknya virus Covid-19 hingga menyangkut isu halal-haram vaksin. Mispersepsi ini diperparah dengan berkembangnya sentimen anti-asing dan nasionalisme sempit di sebagian masyarakat Indonesia.

Salah satu hoaks yang beredar menyebutkan bahwa Covid-19 sesungguhnya merupakan senjata biologis dari negara tertentu. Hasil survei KIC di 34 provinsi pada Februari 2021—hampir setahun setelah pandemi diumumkan—bahkan menunjukkan, sekitar separuh dari responden memercayai rumor itu. Sekitar separuh responden juga meyakini hoaks yang menyatakan bahwa virus Covid-19 disebar oleh orang yang memiliki kekuasaan demi uang. Setelah itu, masih ada hoaks lain yang dipercaya dengan proporsi cukup besar, yaitu vaksin yang disuntikkan ke tubuh Presiden Joko Widodo sesungguhnya bukanlah vaksin Covid-19, dan di dalam vaksin itu terdapat *microchip*.¹⁰

10 “Survei Kesiapan Divaksinasi Covid-19”, *Katadata Insight Center*, 12 Maret 2021, pk. 15.00. <https://katadata.co.id/persepsi-vaksinasi> dan https://cdn1.katadata.co.id/media/files/KIC_Survei%20Perilaku%20Vaksinasi%20%20Masyarakat_120321%20FIX.pdf

Untunglah, secara berangsur-angsur kesadaran publik untuk melakukan vaksinasi semakin membaik. Munculnya kesadaran ini sangat penting, karena vaksin diyakini akan menjadi faktor kunci keberhasilan suatu negara dalam mengatasi pandemi alias *game changer*. Semakin tumbuhnya kesadaran akan pentingnya vaksinasi ini setidaknya terlihat juga pada survei KIC tersebut. Pada hasil jajak pendapat ini kelompok masyarakat yang menolak vaksinasi sudah menyusut tinggal di kisaran 12 persen. Padahal, pada survei sebelumnya, Agustus-September 2020, kelompok yang menolak masih berkisar 52 persen.

Seiring dengan itu, kelompok yang setuju untuk menerima vaksinasi pun meningkat menjadi 54 persen, dibanding sebelumnya yang hanya setengahnya. Peningkatan signifikan jumlah penduduk yang bersedia divaksinasi ini tak lepas dari telah dikeluarkannya izin penggunaan darurat vaksin oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Meski begitu, sebagai catatan, kesadaran di kelompok lanjut usia dan kaum muda masih terbilang relatif rendah. Di awal 2021, baru sekitar separuh kaum muda yang bersedia divaksinasi anti-Covid-19.



Jaminan Pasokan Vaksin

Tantangan lain yang sempat muncul adalah ketersediaan vaksin yang masih terbatas. Pasokan vaksin ke Indonesia yang sudah direncanakan akan datang bertahap, sempat tersendat. Kendala ini muncul sehubungan dengan adanya pembatasan ekspor vaksin AstraZeneca akibat meledaknya gelombang kedua pandemi di India dan Eropa dengan kemunculan varian Delta yang menyebar dengan cepat. Hingga April 2021, jumlah penerima vaksin (dosis 1 dan 2) di Indonesia baru sekitar 14 juta. Padahal, total populasi yang perlu divaksinasi saat itu mencapai 181 juta. Namun demikian, capaian ini tidaklah buruk. Hingga April 2021, dalam peringkat vaksinasi dunia, Indonesia menempati nomor empat vaksinasi terbanyak di antara negara-negara non-produsen vaksin dan urutan kedelapan dari seluruh negara di dunia.

Beruntung dalam perkembangan selanjutnya, ketersediaan dan kecepatan vaksinasi melaju lebih kencang. Di pengujung 2021, dari target baru populasi yang harus divaksinasi sebesar 208,2 juta orang, sudah 75 persen (154,6 juta) yang mendapat suntikan dosis pertama, dan 52 persen (108,4 juta) dari target yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Dengan capaian itu, Indonesia berarti sudah memenuhi standar WHO yang mematok angka 40 persen dari seluruh populasi yang sudah harus divaksinasi secara penuh. Per 22 Desember 2021, cakupan vaksinasi dosis lengkap (*fully vaccinated*) di Indonesia sudah mencapai sekitar 40,1 persen dari total penduduk Indonesia.

Mengingat perannya yang penting sebagai *game changer*, ketersediaan vaksin tampaknya akan terus menjadi isu krusial dalam jangka panjang. Apalagi hingga kini masih terjadi ketimpangan yang lebar dalam hal distribusi vaksin di antara negara maju dengan negara berkembang dan miskin. Isu pasokan vaksin ini bukan hanya menyangkut soal kesehatan, tapi juga akan menentukan seberapa cepat dan lambat pemulihan ekonomi sebuah negara. Gangguan terhadap pasokan

vaksin akan membuat pemulihan ekonomi pun tidak secepat yang direncanakan, yang pada akhirnya dapat berpengaruh besar terhadap stabilitas sosial dan politik negara. Itu sebabnya, ketersediaan vaksin akan terus menjadi isu utama sosial, ekonomi dan politik.

Dalam konteks pembentukan soliditas pemahaman publik terhadap Covid-19 dan pentingnya vaksinasi sebagai *game changer*, peran pemerintah dan tokoh agama, selain orang tua, sangatlah penting. Dari hasil survei KIC terlihat bahwa tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat kepada orang tua, pemerintah dan pemuka agama cukup tinggi.¹¹ Pengenaan sanksi bahkan dinilai sebagai bukan hal yang utama. Fakta yang juga cukup menarik, anjuran tokoh agama atas vaksinasi dapat mempengaruhi sekitar 60 persen responden. Sementara itu, penolakan tokoh agama terhadap vaksinasi hanya berpengaruh pada 15 persen responden. Berdasarkan data ini, sangat penting bagi pemerintah untuk mendekati para tokoh agama dalam upaya menggerakkan vaksinasi dan melawan berbagai hoaks seputar Covid-19.

Dalam tatanan sosial kemasyarakatan, terlihat juga peran penting dari kelompok berhimpun terkecil di lingkungan tempat tinggal masyarakat, yaitu di level RT/RW. Indikasi ini setidaknya terlihat dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap RT/RW dalam pendataan Bantuan Sosial (Bansos) yang mencapai 70 persen. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin lokal di level terkecil ini bahkan yang tertinggi dibandingkan level desa/kelurahan (50 persen), kabupaten/kota (43 persen), provinsi (46 persen), dan pemerintah pusat (54 persen).¹² Berkaca pada fakta ini, sebuah langkah tepat ketika pemerintah kemudian memberlakukan kebijakan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di level mikro untuk meredam penyebaran Covid-19. Cara ini dilakukan dengan mengaktifkan kembali Satuan Tugas di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, Kampung, bahkan tingkat RT/RW.

11 "Survei Kesiapan Divaksinasi Covid-19", *Katadata Insight Center (KIC)*, 12 Maret 2021.

12 Sana Jaffrey, "The Role of Neighbourhood Leaders in Indonesia's Covid-19 Response," Asia Research Institute, National University of Singapore, 16 Desember 2020. <https://ari.nus.edu.sg/ariscope/the-role-of-neighbourhood-leaders-in-indonesias-covid-19-response/>



Akselerasi Tren Digital

Terakhir, hal penting lain yang perlu dicermati, pandemi telah mengakselerasi proses transformasi digital. Tak hanya di level global dan regional, tapi juga Indonesia. Laporan Google, Temasek, Bain & Co. menunjukkan bahwa di masa pandemi ketika gerak ekonomi melambat, jumlah pengguna internet di Asia Tenggara sepanjang 2020 justru bertambah 40 juta menjadi 400 juta, dan menjadi 440 juta pada 2021. Pertumbuhan ini jauh lebih cepat dari kurun 2015-2019 yang hanya bertambah 100 juta pengguna dalam empat tahun. Dengan penambahan itu, maka sudah sekitar 75 persen populasi di Asia Tenggara terkoneksi internet.¹³

Seiring dengan itu, jumlah pengguna internet di Indonesia pun bertambah signifikan. Kini telah mencapai lebih dari 150 juta orang dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Proses transformasi digital

dan tren pertumbuhan yang pesat ini diperkirakan akan bertahan hingga pasca pandemi Covid-19. Karena itu, diproyeksikan nilai ekonomi internet di Asia Tenggara dan Indonesia akan terus membesar. Nilai ekonomi digital Indonesia yang kini di kisaran US\$ 70 juta diperkirakan meroket menjadi sekitar US\$ 146 miliar pada 2025 mendatang. Ini berarti sekitar 40 persen dari nilai ekonomi internet Asia Tenggara, yang juga diperkirakan melesat dari kini sebesar US\$ 174 miliar menjadi US\$ 363 miliar pada 2025.

Tren transformasi digital ini mendatangkan peluang sekaligus tantangan yang tidak kecil, baik dalam tatanan sosial, ekonomi, politik, maupun kesehatan publik. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah kian berkembangnya disinformasi dan hoaks. Menarik melihat dua kasus yang bisa dipetik sebagai pelajaran mahal akibat merajalelanya disinformasi dan hoaks.

13 "E-ConomySEA2020" dan "E-ConomySEA2021", Google, Temasek, Bain & Co.

Pertama, kasus Brexit. Kasus ini terungkap berkat liputan investigasi wartawan the Guardian/the Observer Carole Cadwalladr, yang mengantarkannya menjadi salah satu calon penerima penghargaan tertinggi jurnalistik, Pulitzer. Kerja investigasinya berawal dari keheranannya atas tanah kelahirannya, South Wales, yang 62 persen penduduknya mendukung keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Warga kota itu mayoritas pro-Brexit karena percaya bahwa Uni Eropa tidak memberi manfaat apa pun untuk South Wales. Selain itu, di media sosial berembus kencang kabar bahwa wilayah itu diserbu imigran dan pengungsi. Tak hanya itu, tersebar luas pula informasi bahwa Turki yang berpenduduk 76 juta jiwa sedang dalam proses bergabung ke Uni Eropa.

Semua informasi itu sesungguhnya bohong belaka. Misalnya saja tentang *sport center* dan jalan tol di South Wales yang faktanya justru dibangun dengan dana dari Uni Eropa. Pengumuman soal ini terpampang jelas di jalan. Tapi anehnya masyarakat lebih memercayai disinformasi yang beredar luas. Dari hasil penelusurannya, terungkap bahwa disinformasi ini ditebar luas oleh perusahaan konsultan politik Cambridge Analytica melalui 50 juta akun milik para pengguna Facebook yang diretasnya. Keberadaan sistem algoritma dari platform teknologi ini, membuat penyebaran disinformasi dan hoaks dalam bentuk konten yang telah dipersonalisasi (*personalized content*) pun, menjadi semakin mudah.

Kedua, kasus penentangan terhadap vaksin polio di Nigeria pada 2003. Kasus ini diungkap oleh Prof. Heidi Larson, seorang antropolog yang juga Direktur Vaccine Confidence Project dan pernah berkiprah di Global Immunisation Communication, Unicef. Prof. Larson mengungkapkan bahwa saat itu terjadi aksi boikot atas program pemberantasan polio hingga 11 bulan lamanya. Langkah penentangan ini dipicu oleh aksi terorisme 9/11 di Amerika Serikat yang meletup dua tahun sebelumnya. Beredar rumor di masyarakat Nigeria bahwa vaksinasi polio sesungguhnya dilatarbelakangi oleh aksi balas dendam Amerika untuk menghancurkan kelompok Muslim, sehubungan

dengan keberadaan Al-Qaeda di balik aksi terorisme itu. Kecurigaan semakin kuat berhubung dalam program pemberantasan polio global itu, AS merupakan penyokong utama pendanaan program ini.

Longsornya kepercayaan di kelompok masyarakat Muslim ini yang kemudian menyebar dengan cepat. Rumor bahkan tersebar ke lebih dari 20 negara, termasuk Indonesia. Akibatnya program terhenti. Dan untuk memulihkan 11 bulan yang hilang itu, sedikitnya dibutuhkan biaya hingga US\$ 500 juta. Ongkos rumor yang sungguh mahal. Pengalaman ini mengajarkan bahwa para ilmuwan kerap tidak siap menghadapi ‘tsunami’ keraguan, pertanyaan hingga ketidakpercayaan publik. Hiperkoneksi yang terjadi di jaringan media sosial, membuat arus ketidakpercayaan yang muncul pun menjadi kian deras.

Terkait fenomena ini, temuan Prof. Larson dari riset yang dilakukannya selama enam bulan terhadap ratusan juta perbincangan di media sosial pada 2019, sangat menarik. Dari pengelompokan atas suara yang pro, belum memutuskan (*undecided*), dan kontra, ternyata kelompok yang kontra tumbuh 500 persen lebih cepat. Temuan lain yang menarik, arus politik yang berkembang di sebuah negara, juga amat mempengaruhi akseptabilitas masyarakatnya. Negara-negara Eropa yang rakyatnya memilih partai populis, memiliki kecenderungan lebih sulit menyetujui efektifitas dari program vaksinasi. *Lessons learned* dari fenomena ini, program vaksinasi tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial-politik sebuah negara atau wilayah. Selain itu, kolaborasi multi-disiplin ilmu, seperti antropolog, epidemiolog, digital media specialist, mathematical modellers dan psikolog, amat diperlukan untuk meraih sukses dari program vaksinasi yang dicanangkan.

Tantangan lain yang muncul adalah ancaman segmentasi kelompok masyarakat. Seperti kita tahu, ketimpangan digital antar-daerah masih cukup tinggi. Ditambah dengan tingkat literasi digital yang rata-rata masih tergolong rendah. Jika tidak hati-hati, maka ketimpangan digital ini akan mempertajam segmentasi

antar-wilayah, kelas, dan kelompok masyarakat. Kondisi ini bahkan dapat membuat para pekerja yang tidak memiliki keahlian dan pola-pikir digital (*unskilled and non-digital mindset labor*) akan tersisih. Selain itu, dalam hal kesempatan kerja, tingkat penyerapan tenaga kerja formal akan menurun. Sebaliknya, jika teknologi digital bisa didayagunakan, maka akan tercipta berbagai peluang baru dan perluasan pasar bagi para UMKM.

Kesimpulan

Perubahan sosial di masa pandemi dan tren ke depan pascapandemi pada akhirnya harus dilihat sebagai sebuah keniscayaan. Dunia tak akan lagi sama pasca-pandemi dengan segala dampak yang ditimbulkannya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana meminimalkan dampak negatif dari proses perubahan dramatis ini, sambil memetakan peluang yang bisa diraih dari sebuah tatanan ekosistem yang baru.

Dari sisi ekonomi, seperti telah dijelaskan di atas, pukulan berat kepada para pekerja di sektor informal dan UMKM yang sangat rentan terperosok ke lembah kemiskinan, patut menjadi perhatian serius. Fenomena deurbanisasi yang membuat beban ekonomi desa meningkat, juga perlu diantisipasi secara tepat agar tidak memunculkan ledakan kemiskinan di perdesaan. Sehubungan dengan itu, program-program perlindungan sosial dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Langsung Tunai, dan program pemerintah lainnya, sangat penting diakselerasi dalam hal pemerataan dan daya jangkauannya. Program ini akan menjadi bantalan penopang kehidupan masyarakat miskin di kota dan desa, sekaligus berfungsi sebagai peredam potensi konflik sosial.

Terkait ini, kesiapan data dan infrastruktur pusat-daerah dalam penyaluran Bansos yang kerap masih menjadi kendala, harus segera diatasi. Salah satunya, data tentang para calon penerima program perlindungan sosial yang selama ini baru relatif tertata di lapisan terbawah. Derasnya arus dan tren digitalisasi di Indonesia

Perubahan sosial di masa pandemi dan tren ke depan pascapandemi pada akhirnya harus dilihat sebagai sebuah keniscayaan. Dunia tak akan lagi sama pasca-pandemi dengan segala dampak yang ditimbulkannya.

sesungguhnya membuka peluang terciptanya percepatan transformasi penyaluran program bantuan ke dalam bentuk ekosistem digital yang lebih berdaya jangkau luas, cepat, dan transparan. Keberhasilan program Kartu Prakerja bisa menjadi contoh dan dapat diduplikasi untuk program-program perlindungan sosial lainnya. Transformasi digital juga menjadi solusi alternatif untuk menyerap tumbuhnya angkatan kerja muda di daerah.

Dengan sejumlah langkah antisipasi dan perbaikan kebijakan tersebut, diharapkan dampak pandemi di masa dan pasca-pandemi akan menjadi lebih terkelola (*manageable*). Pengalaman krisis 1998 mengajarkan, krisis ekonomi yang bertaut dengan krisis politik, meremukkan bangsa ini. Karena itu, harus dicegah agar krisis ekonomi plus kesehatan yang kini terjadi, tidak berpadu dengan krisis lainnya di bidang sosial dan politik. Dengan antisipasi yang baik, niscaya bangsa ini akan terhindar dari malapetaka yang menghancurkan.

PEMIKIRAN DI BIDANG POLITIK/GEOPOLITIK

- **Kepercayaan Politik, Tekanan Ekonomi, dan Sikap Partisan**
- **Proyeksi Kebijakan Antisipasi Pandemi: Opsi Kebijakan Pemerintah**
- **Menata Politik Indonesia Pasca Pandemi**



KEPERCAYAAN POLITIK, TEKANAN EKONOMI, DAN SIKAP PARTISAN: MENDISKUSIKAN APPROVAL PRESIDEN PADA MASA KRISIS COVID-19

Burhanuddin Muhtadi¹, Taberez A. Neyazi² & Sourabh B. Paul³

HUBUNGAN antara kepercayaan (*trust*) terhadap pemerintah dan tingkat penerimaan terhadap pemimpin (*approval*) telah banyak diteliti dalam riset-riset sebelum munculnya COVID-19, terutama yang menyoroti aspek kepemimpinan. Studi menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah berkorelasi dengan peningkatan kepuasan publik terhadap presiden (Citrin, 1974). Sebaliknya, penurunan kepercayaan politik mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan (Warren, 1999).

Merosotnya kepercayaan politik juga memengaruhi proses pembuatan dan implementasi kebijakan, karena warga akan skeptis terhadap intensi pemerintah (Hetherington, 2006). Studi juga menunjukkan bahwa tingkat *approval* terhadap presiden tergantung pada sikap partisan –biasanya dioperasionalkan dengan pertanyaan apakah seseorang memilih petahana

yang sedang berkuasa atau tidak. Pada saat yang sama, *trust* pada pemerintahan pusat dan kepuasan terhadap demokrasi merupakan prediktor penting yang menjelaskan tingkat *approval* terhadap pemimpin (Hetherington & Rudolph, 2015). Literatur juga menunjukkan bahwa kepuasan atas berjalannya demokrasi di sebuah negara berhubungan dengan tingkat *approval* pemimpin, meskipun hasilnya bervariasi antara demokrasi yang miskin dan kaya (Daoust & Nadeau, 2020).

Meskipun sikap partisan, kepercayaan pada pemerintah pusat dan kepuasan demokrasi merupakan prediktor penting tingkat penerimaan terhadap presiden, kita tidak tahu apakah ketiga variabel tersebut masih menjadi prediktor yang kuat untuk menjelaskan *approval* presiden ketika warga menghadapi kesulitan ekonomi yang parah selama pandemi. Hal ini penting

1. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Associate Professor FISIP UIN Jakarta dan visiting research fellow di ISEAS – Yusof Ishak Institute.
2. Assistant Professor & Director of Digital Campaign Asia Project, Department of Communications and New Media National University of Singapore dan penulis buku “Political Communication and Mobilisation: The Hindi Media in India,” Cambridge University Press (2018).
3. Assistant Professor; Indian Institute of Technology Delhi, India.



Meskipun sikap partisan, kepercayaan pada pemerintah pusat dan kepuasan demokrasi merupakan prediktor penting tingkat penerimaan terhadap presiden

diketahui untuk pembuatan kebijakan karena kesulitan ekonomi dapat menimbulkan tantangan serius bagi pemerintahan dan memengaruhi implementasi kebijakan kesejahteraan di negara-negara demokrasi.

Pemerintah seringkali memiliki sumber daya yang terbatas yang perlu didistribusikan kembali ketika kesulitan ekonomi menghantam negara. Selama krisis, kebijakan redistribusi seringkali tidak ditentukan berdasarkan pilihan rasional, yang mensyaratkan bahwa kelompok warga yang miskin dan terpinggirkan yang seharusnya mendapat prioritas, tetapi lebih karena faktor kepentingan politik untuk melayani konstituen mereka agar berpeluang dipilih kembali (Nichter, 2010).

Penelitian juga menunjukkan bahwa warga miskin

memiliki opini positif terhadap redistribusi, yang dapat menjelaskan tingkat kepuasan mereka terhadap demokrasi (Nadeu et al., 2020). Oleh karena itu, kami ingin memahami bagaimana tingkat *approval* presiden, dalam kaitan dengan sikap partisan, kepercayaan politik, dan kepuasan terhadap demokrasi, bisa bertahan ketika peristiwa eksogen seperti COVID-19 terjadi, yang kita tahu telah menciptakan ledakan masalah yang menyulitkan ekonomi warga.

Dampak ekonomi COVID-19 telah menyita perhatian warga dan para pemimpin dunia. Banyak laporan menunjukkan bahwa orang kehilangan pekerjaan di tengah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat kebijakan penguncian warga (*lockdowns*) dan penutupan aktivitas bisnis dalam usaha menangkul penyebaran virus (Rump & Zwiener-Collins, 2021).

Meskipun sebagian besar negara telah mengumumkan program bantuan sosial untuk membantu orang miskin dan pekerja yang di-PHK karena dampak COVID-19, langkah tersebut belum membantu lapisan masyarakat secara merata.

Selain itu, negara demokrasi berpenghasilan rendah tentu memiliki sumber daya yang terbatas untuk menggulirkan program bantuan sosial dalam jangka waktu yang lama. Survei menunjukkan bahwa di tengah krisis COVID-19 tingkat *approval* beberapa pemimpin dunia meningkat, tetapi sebagian yang lain mengalami penurunan (Noack, 2020). Menariknya, di negara demokrasi berpenghasilan rendah seperti Indonesia, *approval* Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, secara umum tidak terdampak (Soderborg & Muhtadi, 2020).

Terdapat beberapa faktor yang mungkin menjelaskan naik, stabil atau anjloknya tingkat penerimaan seorang pemimpin di masa krisis. Karena sikap partisan, kepuasan demokrasi dan kepercayaan pada pemerintah berhubungan dengan tingginya tingkat *approval* terhadap presiden, kita perlu menyelidiki apakah asosiasi ini dimoderatori oleh kesulitan ekonomi secara personal. Ini penting mengingat penelitian terbaru menunjukkan bahwa faktor pribadi berkorelasi dengan kepercayaan politik (Rump & Zwiener-Collins, 2021; Tormos, 2019).

Untuk itu, kami secara khusus menyelidiki faktor-faktor determinan yang menjelaskan tingkat penerimaan seorang presiden selama krisis. Dalam makalah ini, kami menganalisis hubungan antara kepercayaan, kepuasan pada demokrasi, sikap partisan, dan penerimaan publik terhadap presiden dan bagaimana hubungan ini dimoderasi oleh kesulitan ekonomi. Bukti empiris baru yang kami ajukan berasal dari survei nasional secara representatif (N=1.200) dari kasus Indonesia, yang menyediakan alasan penting untuk mengeksaminasi hipotesis tersebut karena negara ini memiliki seorang pemimpin yang populis yang basisnya dari kelas menengah ke bawah, tetapi pemerintah pada masa-masa awal tidak menangani krisis COVID-19 secara baik (Mietzner, 2020).

Meski penanganan COVID-19 oleh Presiden Jokowi dikritik bertubi-tubi, basis dukungannya tetap utuh (Soderborg & Muhtadi, 2020). Temuan kami menunjukkan bahwa hubungan antara sikap partisan dan *approval* presiden dipengaruhi secara negatif oleh kondisi ekonomi rumah tangga. Menariknya, orang-orang yang menghadapi kesulitan ekonomi selama pandemi terus memiliki *approval* yang tinggi kepada Presiden Jokowi ketika mereka puas dengan berjalannya demokrasi di negara ini. Kami membahas implikasi kebijakan dari temuan ini dan membuat kerangka teoretis untuk memahami mekanisme bagaimana faktor-faktor individual bisa memengaruhi tingkat persetujuan terhadap presiden.

Tingkat Persetujuan pada Pemimpin dan Kepercayaan Politik

Kepercayaan politik adalah sebuah konsep multifaset dengan tradisi penelitian yang panjang. Studi telah lama menunjukkan peran penting kepercayaan (*trust*) dalam menjaga pemerintahan yang demokratis, partisipasi politik dan implementasi kebijakan (Hetherington, 2006; Hetherington & Rudolph, 2015). Hetherington dan Rudolph (2015) menunjukkan bagaimana tingkat kepercayaan politik yang rendah berdampak negatif terhadap dukungan terhadap kebijakan publik. Kepercayaan politik dapat diukur dalam tiga tingkatan – pemerintah, kelembagaan dan individu (Grönlund & Setälä, 2007).

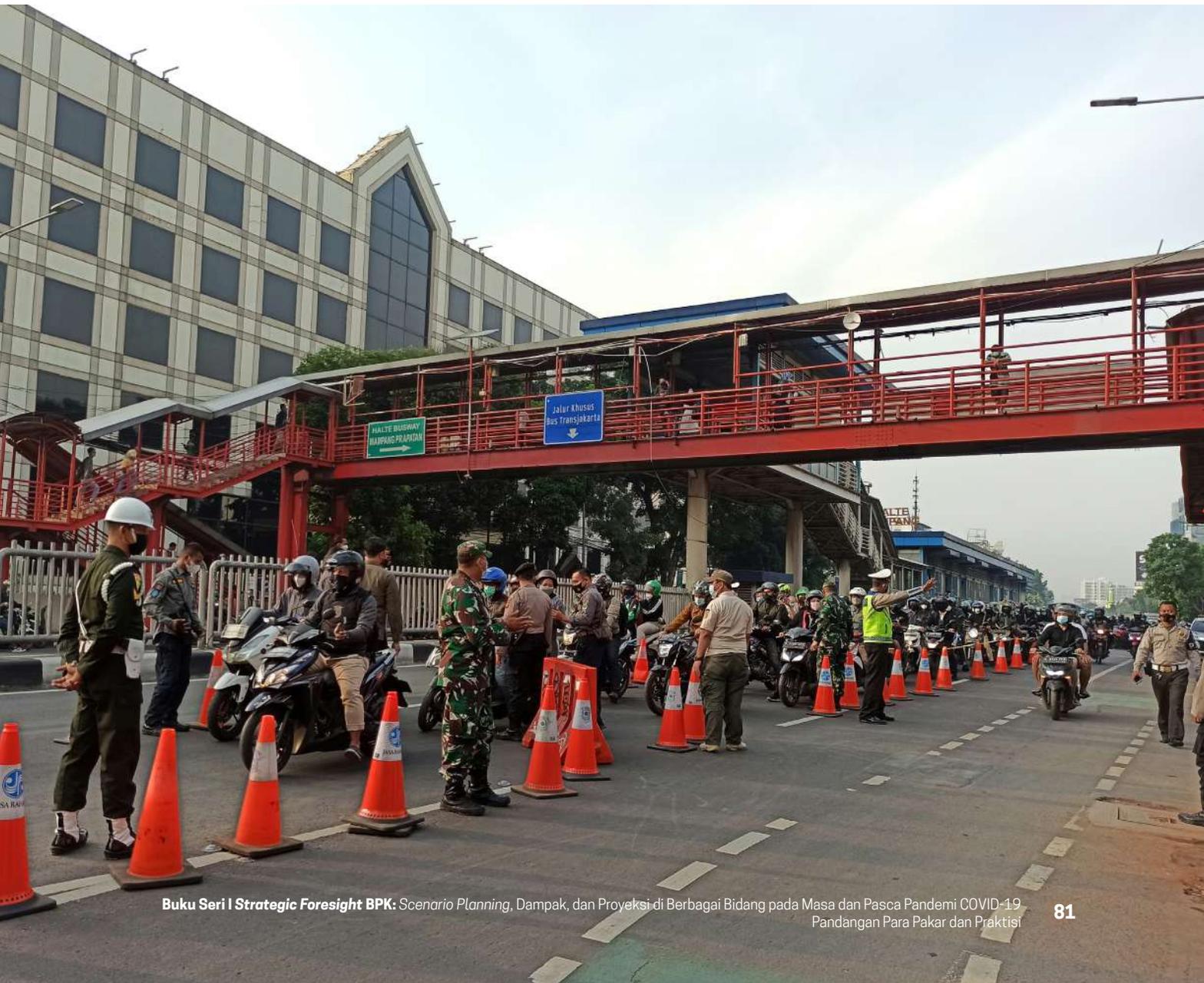
Trust kepada pemerintah mengacu pada sikap percaya terhadap pemerintah petahana dan pelbagai kebijakannya; kepercayaan pada institusi mengacu pada kepercayaan pada parlemen, sistem hukum dan birokrasi; dan pada tingkat individu, kepercayaan berkaitan dengan sikap percaya publik terhadap pemimpin yang sedang menjabat (Grönlund & Setälä, 2007). Tentu seorang warga bisa saja memiliki tingkat kepuasan secara umum kepada pemerintah, tetapi tidak percaya kepada pemimpin politik secara individual. Bisa juga sebaliknya: seorang individu percaya kepada seorang pemimpin karismatik, tetapi



tidak puas dengan pemerintahan yang berkuasa, kebijakan dan sistemnya (Grönlund & Setälä, 2007).

Hubungan antara ketiga aspek *trust* ini agak kompleks karena studi menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan warga negara pada pemerintah terkait erat dengan kinerja berbagai lembaga pemerintah (Papadakis, 1999). Dengan demikian, perbedaan dalam tiga dimensi kepercayaan tidak mudah dipetakan. Kami secara khusus fokus membedah aspek kepercayaan pada pemerintah dan bagaimana hal tersebut memengaruhi tingkat *approval* dalam konteks krisis eksogen yang bersifat multidimensional.

Pada saat krisis nasional melanda, mungkin muncul lonjakan dukungan rakyat kepada seorang pemimpin yang dikenal sebagai fenomena “rally round the flag” (Mueller, 1970). Tetapi bisa jadi dukungan seperti itu bersifat temporer dan segera berkurang begitu krisis teratasi. Sementara kepercayaan jangka panjang terhadap sistem demokrasi secara umum mungkin masih berlanjut, meskipun mungkin terjadi fluktuasi jangka pendek yang melibatkan kepercayaan antara pemerintah dan presiden. Namun, krisis besar seperti COVID-19 dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap lembaga-lembaga dan fungsi demokrasi,



jika mereka tidak mampu menangani tekanan dalam struktur kelembagaan yang dirancang untuk menghadapi situasi krisis. Pada umumnya krisis besar meninggalkan dampak ekonomi yang luar biasa terhadap warga biasa.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa evaluasi publik atas kinerja pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi, merupakan faktor penting untuk kepercayaan pemerintah dan *approval* presiden, baik di negara-negara Barat maupun Asia (Hetherington, 1998; Wong et al., 2009). Hubungan antara faktor ekonomi dan kepercayaan politik ini telah dianalisis secara mendalam dan konsisten menemukan bahwa hubungan positif antara ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan ketidakpuasan dengan kinerja ekonomi.

Dengan kata lain, kinerja ekonomi sering muncul sebagai faktor paling kuat yang menjelaskan *trust* kepada pemerintah. Studi lain juga meneliti efek timbal balik, dan kepercayaan politik akan dipanen kembali ketika kehidupan ekonomi telah pulih (Chanley et al., 2001). Studi-studi ini membantu kita memahami bagaimana kinerja ekonomi secara umum dapat memengaruhi kepercayaan politik dan tingkat *approval* seorang presiden.

Evaluasi individu dan pengalaman pribadi mengalami kesulitan ekonomi, baik jangka pendek atau panjang, disinyalir berhubungan dengan penurunan kepercayaan institusional (Chanley et al., 2001; Clarke et al., 1993). Penurunan kepercayaan institusional seperti itu mungkin tidak berdampak pada penurunan kepercayaan terhadap pemimpin politik. Meskipun ada beberapa penelitian yang menganalisis hubungan antara kinerja ekonomi makro dan kepercayaan politik (Anderson & Guillory, 1997; Lockerbie, 1993) dan pilihan berdasarkan faktor ekonomi (Healy et al., 2017), para sarjana kurang memerhatikan bagaimana efek kesulitan ekonomi yang dialami seorang warga pada saat krisis berdampak pada legitimasi pemimpin.

Studi kepercayaan politik selama ini terlalu menekankan evaluasi yang bersifat sosiotropik

seperti persepsi warga terhadap kinerja ekonomi secara umum atau layanan publik dan situasi politik (Tormos, 2019). Namun, hanya sedikit studi empiris yang dilakukan untuk menguji dimensi egotropik, yakni faktor individual yang mungkin dapat memengaruhi *approval* presiden. Penekanan berlebihan pada dimensi sosiotropik ketimbang egotropik terhadap kepercayaan politik terlihat dalam penelitian terbaru (Rump & Zwiener-Collins, 2021).

Padahal Tormos (2019) dalam studinya tentang krisis keuangan di Spanyol menunjukkan bahwa kesulitan personal memang memengaruhi kepercayaan politik. Kita tahu, krisis COVID-19 tidak hanya mendorong kemiskinan global, tetapi juga berdampak buruk bagi rakyat jelata di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, penting untuk memahami apakah pengalaman kesulitan ekonomi seseorang juga dapat memengaruhi legitimasi seorang pemimpin politik. Berdasarkan pembahasan ini, kami mengajukan pertanyaan penelitian dan hipotesis sebagai berikut:

RQ1. Sejauh mana kepercayaan terhadap kinerja presiden selama krisis dipengaruhi oleh kesulitan ekonomi?

H1a. Kepercayaan pada pemerintah akan berhubungan positif dengan tingkat *approval* seorang presiden.

H1b. Kesulitan ekonomi secara negatif akan memoderasi hubungan antara kepercayaan pada pemerintah dan tingkat penerimaan seorang presiden.

Tingkat *Approval* Pemimpin dan Sikap Partisan

Penelitian juga menunjukkan bahwa sikap partisan berkaitan dengan kepercayaan pada pemerintah dan tingkat *approval* presiden. Seorang warga lebih cenderung mempercayai pemerintah ketika partai pilihannya berkuasa (Wilkes, 2015). Hetherington dan Rudolph dalam studi mereka tentang pemilih Amerika menunjukkan bahwa kelompok partisan tidak hanya secara selektif mengevaluasi pemerintah, tetapi juga secara selektif menilai kinerja ekonomi berdasarkan apakah partai pilihan mereka atau oposisi yang berkuasa

di pemerintahan (Hetherington & Rudolph, 2015). Pemilih partisan cenderung percaya pada legitimasi kebijakan yang diprakarsai oleh presiden yang mereka pilih dalam pemilu (Jacob & Schenke, 2020).

Demikian pula, menjadi pendukung kandidat yang kalah di Indonesia cenderung meyakini bahwa penegakan hukum di bawah pasangan capres yang menang dianggap tidak adil karena persepsi atas peningkatan tindakan negara yang sewenang-wenang terhadap kebebasan berbicara dan berorganisasi dan memburuknya perlindungan hak minoritas (Muhtadi, 2020). Temuan ini juga telah didukung oleh beberapa penelitian lain. Misalnya, Krupenkin menemukan bahwa sikap partisan berkorelasi dengan kepatuhan terhadap rekomendasi pemerintah (Krupenkin, 2021). Temuan ini sangat relevan di dunia pasca-COVID-19 karena pemerintah di beberapa negara sedang berjuang dalam menegakkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker dan lain-lain (Lazar, 2020).

Namun, penting untuk mencatat apakah ancaman atau krisis dianggap sebagai provokasi internal atau eksternal. Ketika warga merasakan bahwa krisis yang sedang berlangsung adalah karena faktor eksternal, mereka cenderung mendukung pemimpin (Newman, 2002). Di sisi lain, jika warga merasakan krisis akibat ulah internal, publik cenderung menganggap pemimpin yang harus bertanggung jawab dan mendukung oposisi (Fiorina, 1981).

Meskipun studi-studi ini telah berkontribusi penting dalam memahami kapan seorang pemimpin dimintai pertanggungjawaban dan dihukum pada masa krisis, ada bukti yang masih terbatas bagaimana seorang pemimpin coba mengurangi persepsi negatif publik dengan menggelontorkan paket bantuan sosial. Kebijakan bansos yang diprakarsai untuk mengurangi krisis tidak hanya menargetkan kelompok partisan, tetapi ruang lingkup kebijakan tersebut seringkali jauh lebih luas dan membidik warga kaya maupun orang miskin.

Ini karena seorang pemimpin yang demokratis tidak bisa secara terbuka menampilkan kebijakan yang partisan selama krisis, sehingga malah menjadi bumerang. Selain itu, meskipun sikap partisan

merupakan faktor penting yang menentukan basis dukungan politik bagi seorang presiden dan legitimasi atas tindakan yang diambil oleh pemimpin selama krisis, sedikit yang diketahui apakah kubu partisan terus mendukung pemimpin mereka selama masa krisis ketika kondisi ekonomi rumah tangga mereka sendiri terpengaruh. Mengingat fakta bahwa COVID-19 telah berdampak negatif baik bagi warga yang kaya maupun miskin, kami berhipotesis bahwa:

H2a. Sikap partisan akan berhubungan positif dengan tingkat penerimaan presiden.

H2b. Hubungan di atas akan dimoderasi oleh apakah orang tersebut telah terkena dampak negatif dari kesulitan ekonomi atau tidak.

Kepuasan terhadap Demokrasi dan *Approval* Presiden

Sejauh mana kepuasan warga terhadap demokrasi memengaruhi *approval* presiden? Literatur menunjukkan bahwa penilaian kepuasan dibuat secara variatif di berbagai negara demokrasi. Dengan menggunakan data survei dari Comparative Study of Electoral Systems di 72 pemilu di 45 negara demokrasi, Daoust dan Nadeau (2020) menemukan bahwa evaluasi pemilih di negara-negara miskin lebih fokus pada ekonomi, tetapi evaluasi di negara-negara yang lebih kaya cenderung pada pertimbangan politik.

Demikian pula, analisis multilevel pada data survei di 26 negara oleh Dahlberg et al. (2015) menunjukkan bahwa representasi politik dan persepsi korupsi merupakan faktor determinan terpenting di negara demokrasi yang sudah mapan, sedangkan negara demokrasi baru mendasarkan penilaian mereka pada kinerja pemerintah.

Penelitian juga menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi berdampak pada kepuasan terhadap demokrasi. Quaranta dan Martini (2016) mempelajari lebih dari 500 survei nasional yang dilakukan di 28 negara Uni Eropa dan menemukan bahwa indikator subjektif persepsi gonjang-ganjing ekonomi dan indikator objektif pengangguran memengaruhi

kepuasan warga negara terhadap demokrasi. Pietsch (2015) menunjukkan bahwa di kawasan Asia Tenggara, warga yang tinggal di negara yang dianggap lebih demokratis cenderung memaknai demokrasi sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan, dan karenanya kinerja ekonomi pemerintah menjadi penting. Kinerja ekonomi yang positif dapat meningkatkan kepuasan publik terhadap demokrasi.

Untuk itu, faktor-faktor yang menjelaskan tingkat *approval* bisa berbeda dalam konteks masyarakat yang timpang secara ekonomi dan dapat memengaruhi sikap warga terhadap demokrasi. Melalui pemodelan bertingkat di 40 negara, Krieckhaus et al. (2014) menemukan bahwa dukungan terhadap demokrasi di negara-negara yang mengalami ketimpangan ekonomi akut cenderung menurun, dan itu terjadi di seluruh strata kelas sosial. Meski secara umum turun, dukungan demokrasi di kalangan orang miskin di negara yang timpang tidak separah kelas sosial lainnya. Krieckhaus dkk. (2014) menduga karena warga miskin masih percaya sistem demokrasi memungkinkan mereka mendapat bantuan melalui kebijakan redistribusi.

Menggunakan data dari Asian Barometer Survey dan Latinobarómetro Survey yang mencakup 28 negara demokrasi Asia Timur dan Amerika Latin, Wu dan Chang (2019) menemukan bahwa persepsi subjektif tentang distribusi pendapatan yang tidak adil berhubungan negatif dengan kepuasan demokrasi. Senada dengan itu, Muhtadi dan Warburton (2020) dalam survei yang representatif secara nasional mengungkapkan bahwa persepsi tentang distribusi pendapatan yang adil dikaitkan dengan kepuasan dan kepercayaan terhadap institusi-institusi demokrasi di Indonesia.

Meskipun studi-studi ini telah memperjelas pemahaman kita tentang kepuasan demokrasi dan pengaruh faktor-faktor struktural, termasuk kondisi ekonomi, tidak banyak yang kita tahu jika krisis eksogen yang menciptakan kesulitan ekonomi akan berpengaruh terhadap *approval* presiden di antara warga yang (tidak) puas dengan demokrasi. Selama krisis, para pemimpin politik tidak hanya melakukan

tindakan tegas, yang berdampak pada orang kaya dan kelas menengah, mereka juga memperkenalkan reformasi untuk meredakan kesulitan ekonomi di kalangan orang miskin.

Dengan menerapkan beberapa kebijakan sosial dan ekonomi pada masa krisis, para pemimpin biasanya menarik simpati kalangan orang miskin, yang notabene merupakan populasi paling besar di banyak negara berkembang. Hal ini penting karena persepsi negatif terhadap pemimpin potensial mengurangi dukungan politik atas kebijakan jangka pendek dan pada akhirnya bisa mengarah pada perubahan rezim (Ruiz-Rufino & Alonso, 2017).

Meskipun pada umumnya krisis berdampak buruk pada masyarakat miskin dan kelas menengah, warga yang mampu secara ekonomi memiliki kapasitas untuk bertahan dari krisis jangka pendek dibandingkan dengan warga miskin. Karena itu, masyarakat miskin secara umum memiliki sikap positif terhadap redistribusi (Nadeau et al., 2020).

Pemerintahan Jokowi di Indonesia juga memperkenalkan beberapa skema kebijakan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak selama pandemi COVID-19 (Lembaga Survei Indonesia, 2020). Bantuan sosial yang diberikan kepada orang miskin selama krisis dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan kelas menengah bahwa mereka kurang dipedulikan dan akhirnya bisa berdampak negatif terhadap demokrasi. Oleh karena itu, kami mengusulkan hipotesis berikut:

H3a. Warga yang puas dengan demokrasi lebih cenderung puas terhadap presiden.

H3b. Kesulitan ekonomi akan memoderasi hubungan antara *approval* presiden dan kepuasan demokrasi sedemikian rupa sehingga warga yang menghadapi kesulitan ekonomi cenderung mengevaluasi presiden secara positif ketika mereka puas dengan demokrasi dibandingkan dengan mereka yang tidak menghadapi kesulitan ekonomi.

Konteks Empirik

Seperti negara-negara lain di dunia, Indonesia juga menghadapi tantangan berat untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Meski Pemerintahan Jokowi telah mendeklarasikan COVID-19 sebagai “bencana nasional”, lonjakan kasus virus corona terus berlanjut, dengan total 4.251.423 kasus per 17 November 2021, termasuk 143.685 kematian (Ritchie et al., 2021). Meski beberapa bulan terakhir pemerintah telah berhasil mengendalikan COVID-19 terutama setelah gelombang kedua pada Juli 2021, Indonesia sebelumnya pernah didapuk sebagai episentrum baru wabah di dunia menjadi negara dengan jumlah kasus COVID-19 yang lebih besar dibanding negara mana pun di dunia (Abdurachman et al., 2021).

Banyak kritik ditujukan kepada Pemerintahan Jokowi pada saat itu dalam menangani krisis kesehatan tersebut. Pemerintah dinilai gagal dan kurang fokus untuk menghasilkan kebijakan yang cepat, koheren, dan efektif untuk memitigasi krisis (Lindsey & Mann, 2020). Pemerintah tampak meremehkan virus di awal krisis pandemi ini dengan mengabaikan peringatan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa virus tersebut merupakan ancaman serius bagi sistem dan kapasitas kesehatan Indonesia yang tidak memadai. Bahkan setelah kasus positif pertama terkonfirmasi pada Maret 2020, respons pemerintah masih setengah hati: Meski mulai sigap menangani wabah dengan meningkatkan kapasitas layanan kesehatan dan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Jokowi menolak kebijakan *lockdown* atau tinggal di rumah secara ketat. Selain itu, dengan keterbatasan testing dan pelacakan kontak, Indonesia ibarat memerangi COVID-19 dengan mata tertutup. The Economist bahkan sempat memasukkan Jokowi dan Presiden Rodrigo Duterte dari Filipina ke dalam satu kategori kepemimpinan, yakni mereka yang berusaha bersikap tegar, namun tidak kompeten (The Economist, 2020).

Banyak analis yang mengklaim Jokowi lebih mengutamakan ekonomi ketimbang aspek kesehatan (Mietzner, 2020). Pada tahap awal pandemi COVID-19,

pemerintah masih menggalakkan sektor pariwisata untuk menangkap “peluang” penutupan destinasi wisata di banyak negara di seluruh dunia. Pada saat pemerintah daerah menyuarakan tindakan yang lebih tegas, Jokowi enggan menerima seruan tersebut karena dianggap berpengaruh terhadap perekonomian sehingga merugikan masyarakat luas. Jokowi meyakini jika *lockdown* ketat diterapkan, semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan sementara kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi terbatas.

Namun demikian, meski dampak ekonomi COVID-19 signifikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak separah negara lain (Amri & Intan, 2020). Meskipun ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,3% pada kuartal kedua tahun 2020 akibat pandemi yang meluluhlantakkan konsumsi rumah tangga—pendorong utama pertumbuhan ekonomi—hampir semua negara di dunia mencatat penurunan ekonomi yang lebih besar.

Beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa Indonesia telah keluar dari resesi pada kuartal kedua tahun 2021 setelah melaporkan tingkat pertumbuhan tahunan terkuatnya dalam lebih dari satu dekade, tumbuh 7,07% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada kuartal ketiga ekonomi kita masih tumbuh positif 3,51% meskipun dilanda lonjakan infeksi COVID-19. Pemerintahan Jokowi juga telah meluncurkan jaring pengaman sosial untuk mengatasi dampak ekonomi dan sosial wabah tersebut. Pemerintah telah menyediakan Rp 139,7 triliun (0,9% dari PDB) untuk mendukung peluncuran bantuan sosial baru bagi masyarakat rentan, peningkatan program bantuan sosial yang ada (misalnya, transfer tunai & barang, penggratiskan tagihan listrik) dan Bantuan Langsung Tunai [BLT] Desa yang dibiayai dana desa, program kartu pra kerja untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan (Amri & Intan, 2020).

Secara umum, meskipun lambat dan kurang merespons penyebaran pandemi seperti dijelaskan di atas, Presiden Jokowi berhasil mempertahankan

kepercayaan dan *approval* publik yang tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana skema kebijakan pemerintah ini didukung oleh berbagai segmen populasi di Indonesia.

Metode dan Data

Kami melakukan survei nasional pada 13-16 Juli 2020 dengan menggunakan telepon. Responden diacak dari database survei tatap muka Indikator Politik Indonesia (INDIKATOR), sebuah lembaga survei independen terkemuka, yang dilakukan antara Maret 2018 dan Maret 2020. Kami hanya memilih responden yang memiliki telepon/ponsel, yang mencakup sekitar 71% dari total populasi.

Dari subset ini, kami memilih 5.872 responden menggunakan prosedur *stratified random sampling*. Pertama, dari subset responden yang memiliki telepon ini dibagi berdasarkan 34 provinsi, kategori desa-kota, dan jenis kelamin; Kemudian jumlah sampel dari setiap strata (persimpangan provinsi, desa-kota, dan gender) dialokasikan secara proporsional. Ini berarti sampel diambil secara proporsional sesuai ukuran populasi setiap strata.

Kedua, responden dipilih secara acak dari setiap strata untuk diwawancarai melalui telepon. Sampel divalidasi dengan membandingkan komposisi data demografi dengan populasi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang dibandingkan adalah provinsi, jenis kelamin, desa-kota, kelompok umur, suku dan agama. Jika sampel menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan populasi, kami menerapkan pembobotan pada data. Dari 5.872 responden, 1.200 berhasil diwawancarai. Dengan asumsi metode *simple random sampling*, ukuran sampel 1.200 responden memiliki margin of error sekitar $\pm 2,9\%$ pada tingkat kepercayaan 95%.

Pengukuran Variabel Terikat

Kami menggunakan *approval* presiden sebagai

variabel dependen atau terikat. Pertanyaan yang kami gunakan: “Secara umum, sejauh ini apakah Anda sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Joko Widodo (Jokowi)? Sebagai presiden” Ini diukur pada skala 4 poin (1=tidak puas sama sekali hingga 4=sangat puas, $M=2,71$, $SD=0,61$).

Variabel Bebas

Kami memasukkan tiga variabel independen atau bebas. Pertama, karena sikap partisan dikaitkan dengan *approval* atau *disapproval* terhadap presiden, kami memasukkan sikap partisan sebagai variabel independen dalam model. Variabel ini diukur melalui apakah responden memilih Presiden Jokowi pada Pemilu 2019 atau lawannya, Prabowo Subianto.

Kedua, kepercayaan pada pemerintah pusat adalah variabel independen kedua, yang kami ukur dengan menanyakan: “Seberapa percaya atau tidak percaya Anda terhadap pemerintah nasional?” pada skala 4 poin (1=sangat tidak percaya dan 4=sangat percaya, $M=2,85$, $SD=0,60$). Ketiga, mengingat fakta bahwa kepuasan demokrasi merupakan faktor signifikan yang memengaruhi *approval* presiden, kami juga memasukkannya sebagai variabel independen. Kami bertanya: “Secara umum, apakah Anda sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan bagaimana demokrasi bekerja di negara kita? (1= tidak puas sama sekali dan 4=sangat puas, $M=2,62$, $SD=0,62$).

Variabel moderasi

Karena banyak rumah tangga warga yang menderita dampak ekonomi akibat COVID-19, kami menggunakan kesulitan ekonomi sebagai variabel moderasi. Kami bertanya: “Bagaimana kondisi pendapatan rumah tangga Anda saat ini dibandingkan sebelum ajakan pemerintah untuk bekerja dan belajar dari rumah (untuk mencegah penyebaran virus Corona)?” Responden yang menjawab “tetap sama” atau “meningkat” diberi

kode 1 (22%), menunjukkan tingkat pendapatan warga yang stabil atau bahkan meningkat, dan responden yang menjawab “menurun” diberi kode 0 (78%) mengindikasikan pendapatan yang memburuk selama pandemi.

Variabel Kontrol

Bantuan sosial: Kami memasukkan bantuan sosial sebagai variabel kontrol dalam model. Karena pemerintahan Jokowi memberikan banyak bantuan sosial kepada warga miskin, kami menggunakannya sebagai variabel kontrol untuk menghindari efek perancu (*confounding*). Pertanyaannya: “Pada masa wabah virus corona, pemerintah memberikan bantuan sosial (Bansos) berupa pembagian sembako dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi warga kurang mampu. Secara umum menurut anda seberapa tepat sasaran bantuan sembako atau BLT tersebut (1= tidak tepat sasaran sama sekali dan 4=sangat tepat sasaran, $M=2.430$, $SD=0.693$).

Kebahagiaan: Kami juga menggunakan kebahagiaan sebagai variabel kontrol karena COVID-19 telah meningkatkan ketidakpastian dan kecemasan di kalangan warga. Kami bertanya: “Secara umum, seberapa bahagia atau tidak bahagia Anda akhir-akhir

ini? Variabel ini diukur pada skala 4 poin (1=sangat tidak bahagia hingga 4-sangat bahagia, $M=2,890$, $SD=0,624$).

Demografi: Kami memasukkan empat variabel demografi sebagai kontrol: pendidikan (kode rendah hingga tinggi pada skala 10 poin 1=tidak pernah sekolah, 10= Menyelesaikan kuliah atau lebih tinggi; $M=5.667$, $SD=2.317$); pendapatan per bulan (kode rendah ke tinggi pada skala 15 poin 1=kurang dari 200 ribu rupiah, 15= 10 hingga 15 juta rupiah; $M=8.08$, $SD=3.58$); usia (17-88; $M=43,86$, $SD=13,45$); dan jenis kelamin (50% perempuan).

Hasil Temuan

Sebelum melakukan analisis data, kami menstandarisasi semua variabel kami menjadi 0,1 untuk memudahkan interpretasi hasil. Statistik deskriptif variabel independen disajikan pada Tabel 1. Secara keseluruhan *approval* Presiden Jokowi cukup tinggi ($M=2,71$, $SD=0,61$). Demikian pula, kepercayaan terhadap pemerintah nasional dan kebahagiaan warga secara umum relatif baik dibandingkan dengan penilaian terhadap program bansos.

Tabel 1. Ringkasan Statistik Deskriptif

	n	M	SD	Skala
Jokowi <i>Approval</i>	1176	2.71	0.61	5-points
Usia	1200	43.86	13.45	continuous
Pendidikan	1179	5.67	2.31	10-points
Pendapatan	1171	8.16	3.22	15-points
Bantuan Sosial	1161	2.43	0.69	4-points
Kebahagiaan	1188	2.89	0.62	4-points
Kepuasan Demokrasi	1105	2.62	0.62	4-points
<i>Trust</i> Pemerintah Pusat	1151	2.86	0.60	4-points

Kemudian kami melakukan analisis regresi ordinary least squares (OLS) dengan *approval* Jokowi sebagai variabel dependen. Sebelum menjalankan regresi, kami memeriksa multikolinearitas. Tabel 2 menunjukkan bahwa tidak ada variabel-variabel yang berkorelasi sangat tinggi. Tabel 3 dan Grafik 1 menunjukkan bahwa sikap partisan, kepercayaan kepada pemerintah dan kepuasan terhadap demokrasi

tetap positif dan signifikan dalam menentukan tingkat *approval* presiden, sekalipun setelah dikontrol variabel kesulitan ekonomi selama pandemi, karakteristik demografi, dan bantuan sosial. Namun, efek moderasi dari kesulitan ekonomi pada hubungan antara *approval* presiden dan kepercayaan pada pemerintah pusat tidak signifikan. Dengan kata lain, temuan ini sesuai H1a kami di atas, tetapi bertentangan dengan H1b.

Tabel 2. Matriks Korelasi Variabel yang Digunakan dalam Model

	Jokowi Approval	Perempuan	Usia	Pendidikan	Pendapatan	Bantuan Sosial	Kebahagiaan	Kepuasan Demokrasi	Memilih Jokowi	Kondisi Ekonomi Rumah Tangga	Trust Pemerintah Pusat
Jokowi Approval	1										
Perempuan	0.05	1									
Usia	0.02	-0.14	1								
Pendidikan	-0.08	-0.1	-0.18	1							
Pendapatan	-0.05	-0.09	-0.05	0.38	1						
Bantuan Sosial	0.26	-0.01	0.02	-0.04	-0.08	1					
Kebahagiaan	0.14	-0.02	0.06	0.05	0.14	0.12	1				
Kepuasan Demokrasi	0.37	-0.05	0.02	-0.09	-0.03	0.21	0.14	1			
Memilih Jokowi	0.35	0.04	0.05	-0.13	-0.04	0.16	0.13	0.22	1		
Kondisi Ekonomi Rumah Tangga	0.16	-0.06	0.01	0.09	0.13	0.11	0.17	0.02	0.07	1	
Trust Pemerintah Pusat	0.43	0.08	0.01	-0.09	-0.13	0.3	0.17	0.27	0.28	0.17	1

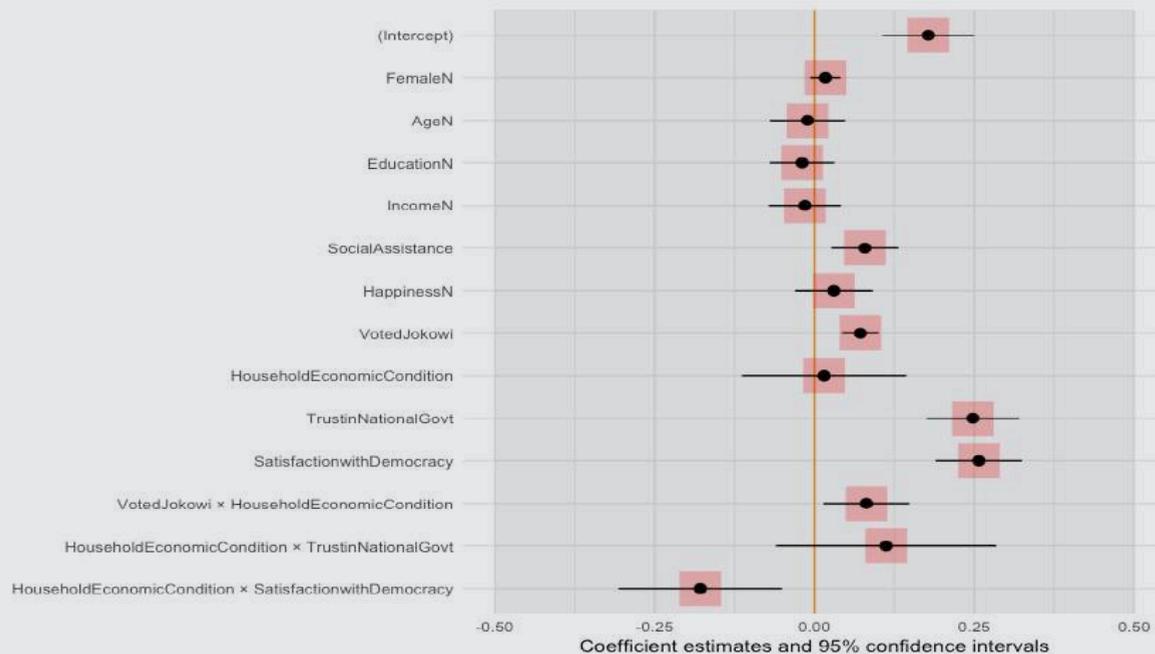
Hubungan positif antara sikap partisan dan *approval* presiden dipengaruhi secara negatif oleh kondisi ekonomi pada tingkat $p < .05$ (Grafik 2) (interaksi). Menarik untuk dicatat bahwa mereka yang memilih Jokowi pada pilpres 2019 terus memberikan *approval* ketika kondisi ekonomi rumah tangga mereka tetap stabil atau membaik selama pandemi. Sementara warga yang pendapatan rumah tangganya menurun, mereka tidak *approve* kepemimpinan Jokowi bahkan sekalipun mereka adalah pendukung Jokowi pada pemilu terakhir (Grafik 2).

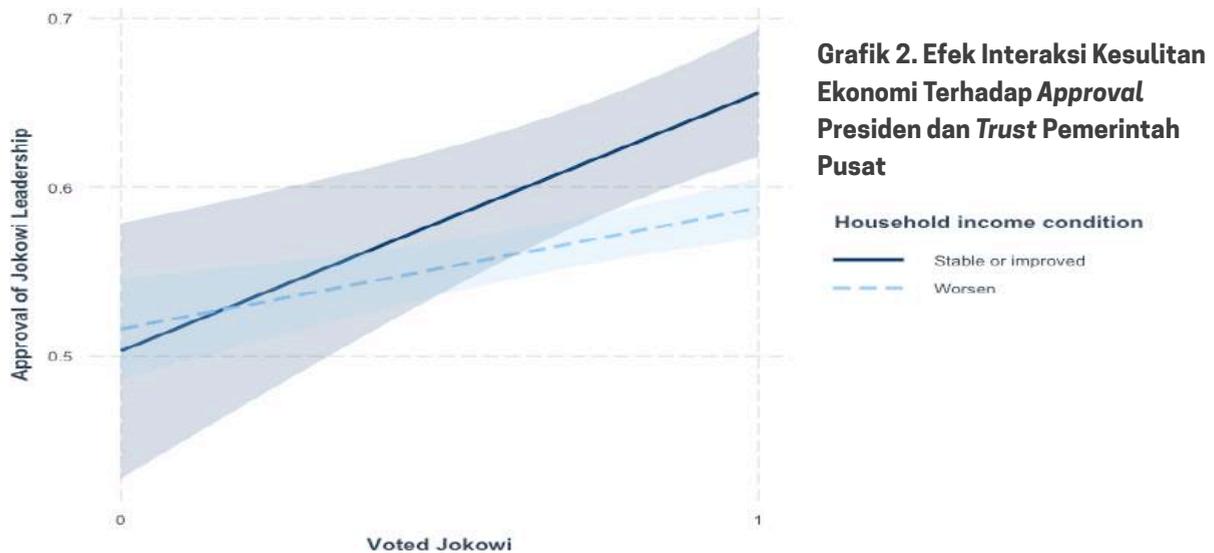
Hasil ini menunjukkan bahwa sikap partisan yang diukur dalam pilihan elektoral pada 2019 lalu memiliki keterbatasan dan tidak dapat memberikan garansi dukungan ketika kondisi ekonomi warga secara personal mengalami dampak negatif akibat krisis. Jadi hipotesis 2a dan 2b terbukti memiliki basis empirik. Namun demikian, hubungan positif antara kepercayaan pada pemerintah pusat dan *approval* presiden tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi.

Tabel 3. Determinan Approval Presiden Jokowi dalam Penanganan COVID-19

	Jokowi Approval
(Intercept)	0.178*** (0.037)
Perempuan	0.017 (0.012)
Usia	-0.011 (0.030)
Pendidikan	-0.019 (0.026)
Pendapatan	-0.015 (0.029)
Bantuan Sosial	0.079** (0.027)
Kebahagiaan	0.030 (0.031)
Memilih Jokowi	0.072*** (0.015)
Kondisi Ekonomi Rumah Tangga	0.015 (0.066)
Trust Pemerintah Pusat	0.248*** (0.037)
Kepuasan Demokrasi	0.257*** (0.034)
Kondisi Ekonomi Rumah Tangga × Memilih Jokowi	0.081* (0.034)
Kondisi Ekonomi Rumah Tangga × Trust Pemerintah Pusat	0.112 (0.088)
Kondisi Ekonomi Rumah Tangga × Kepuasan Demokrasi	-0.179** (0.065)
Jumlah observasi	886
R ²	0.305
R ² Adj.	0.295
AIC	-486.8
BIC	-415.0
Log.Lik.	258.409
F	29.447

Grafik 1. Determinan Approval Presiden Jokowi dalam Penanganan COVID-19

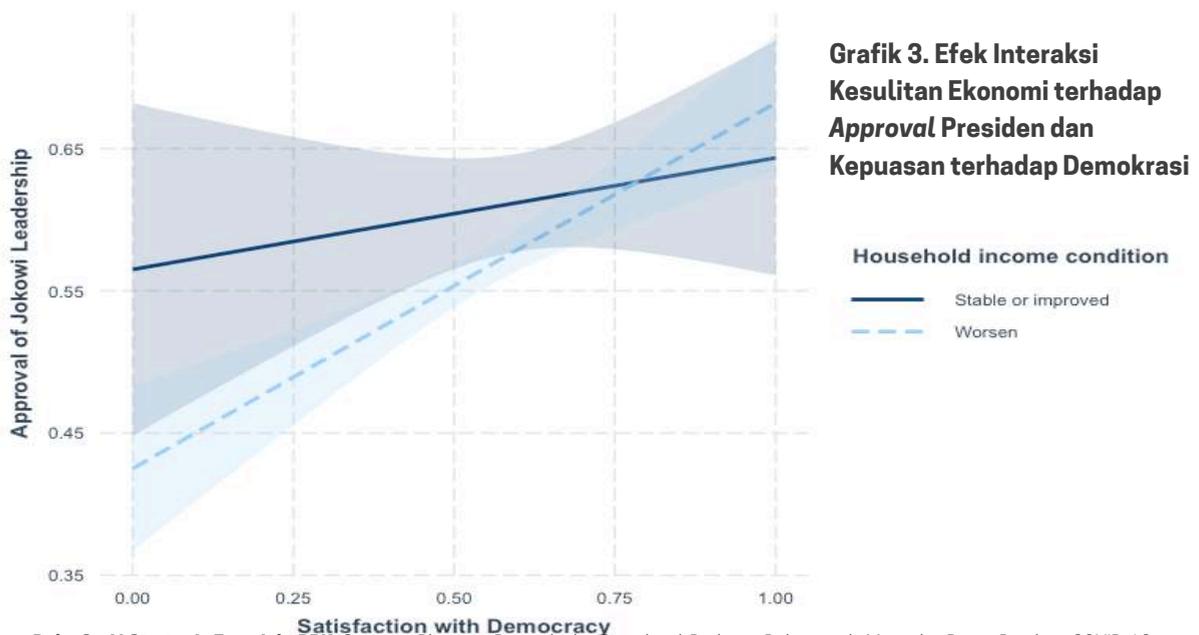




Efek moderasi kondisi ekonomi rumah tangga terhadap hubungan antara kepuasan demokrasi dan *approval* presiden secara statistik signifikan dan negatif. Ini berarti warga yang menderita secara ekonomi selama pandemi justru memberikan *approval* lebih tinggi kepada presiden jika mereka merasa lebih puas terhadap demokrasi (Grafik 3).

Namun di sisi lain, kepuasan terhadap demokrasi berdampak negatif pada *approval rating* presiden bagi mereka yang tidak mengalami dampak ekonomi secara langsung selama COVID-19. Temuan ini jelas mendukung H3a dan H3b. Model ini sudah dikontrol dengan karakteristik

demografi yang penting seperti jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Selain itu, kami juga mengontrol dengan variabel bantuan sosial dan kebahagiaan. Beberapa hasil observasi lainnya yang penting dicatat dari hasil regresi adalah sebagai berikut. Pertama, meskipun usia, pendidikan, dan pendapatan bukan penentu signifikan *approval* presiden, bantuan sosial secara positif terkait dengan tingkat penerimaan presiden. Kedua, sikap partisan secara umum berkorelasi kuat dengan *approval* presiden, yaitu mereka yang memilih Presiden Jokowi pada 2019 lalu cenderung memiliki *approval* yang lebih tinggi.



Diskusi dan Kesimpulan

Temuan kami menunjukkan bahwa para pemimpin tidak secara otomatis menerima dukungan publik secara *taken for granted* terutama selama masa krisis. *Public approval* tidak seragam di seluruh strata ekonomi dan sikap partisan memiliki keterbatasan. Sikap partisan, bersama dengan apakah seseorang terkena dampak ekonomi COVID-19, memiliki efek moderasi yang signifikan terhadap *approval* kepemimpinan Presiden Jokowi. Ini menunjukkan bahwa pemilih yang mencoblos Presiden Jokowi pada 2019 mungkin tidak selamanya setia dan memberikan *approval* ketika pendapatan rumah tangga mereka merosot. Temuan kami ini berbeda dengan data dari negara lain yang mengisahkan efek sikap partisan yang bersifat permanen terhadap *approval* pemimpin (Hetherington & Rudolph, 2015).

Meskipun kepercayaan pada pemerintah secara positif terkait dengan *approval* presiden, hubungan ini tidak terpengaruh secara signifikan oleh kesulitan ekonomi. Meningkatnya kepercayaan pada pemerintah merupakan pertanda baik karena studi menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah yang tinggi akan mengarah pada peningkatan kepatuhan warga terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil pemerintah (Krupenkin, 2021).

Perlu dicatat bahwa dalam sistem presidensial seperti Amerika Serikat dan Indonesia, pemerintah sering disamakan dengan pemimpin. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang digagas pemerintah dalam sistem presidensial seringkali dikaitkan dengan inisiatif pemimpin. Kepercayaan kepada pemerintah dan pemimpin sangat dibutuhkan di masa pandemi karena pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah kebijakan yang tidak populer untuk memastikan kesejahteraan warga dan mengendalikan pandemi. Warga yang memiliki kepercayaan besar pada pemimpin tidak akan melihat tindakan pemerintah sebagai sewenang-wenang dan merugikan (Braithwaite & Levi, 1998).

Menariknya, warga yang mengalami kesulitan ekonomi selama pandemi memberikan rating lebih

tinggi kepada Presiden Jokowi dibandingkan dengan mereka yang pendapatannya stabil atau meningkat, terutama ketika mereka merasa puas dengan demokrasi di negara ini. Secara umum, literatur menunjukkan bahwa mereka yang miskin atau menderita secara ekonomi selama krisis seperti pandemi cenderung memberikan rating yang rendah kepada pemimpin. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa warga yang terdampak selama krisis cenderung tidak mempercayai pemimpin mereka setidaknya dalam jangka pendek (Clarke et al., 1993).

Dalam studi terbaru, Rump dan Zwiener-Collins (2021) menunjukkan bahwa warga yang terkena dampak ekonomi COVID-19 cenderung memiliki tingkat kepercayaan politik yang rendah. Namun, penelitian kami tidak mendukung temuan tersebut. Kesulitan ekonomi selama pandemi tidak berpengaruh signifikan terhadap *approval* presiden di Indonesia. Penelitian kami menunjukkan bahwa orang miskin cenderung mendukung presiden bahkan ketika pendapatan rumah tangga mereka berkurang akibat krisis asalkan mereka merasa puas dengan berfungsinya demokrasi. Temuan ini dapat dijelaskan dengan sistem demokrasi yang menyediakan mekanisme redistribusi bagi orang miskin. Dauost dan Nadeau (2021) menunjukkan bahwa tingkat kepuasan individu terhadap demokrasi bergantung pada kemampuan penguasa untuk memberikan barang ekonomi dan politik yang menguntungkan kelas bawah.

Temuan kami ini penting mengingat fakta bahwa studi ini telah mengontrol pendapatan selain bantuan sosial. Meski kepuasan terhadap demokrasi di kalangan masyarakat miskin sudah disinyalir dalam penelitian sebelumnya (Quaranta & Martini, 2016), penelitian kami menggunakan kesulitan ekonomi pada masa krisis sebagai variabel moderasi, yang memiliki implikasi kebijakan yang krusial. Temuan ini dapat dijelaskan lebih lanjut oleh faktor-faktor kontekstual yang memperkuat potensi redistributif dalam demokrasi maupun langkah-langkah kebijakan populis yang biasa dilakukan seorang pemimpin di era demokratis.

Sejak 2014, basis dukungan Jokowi sebagian besar berasal dari kelas menengah ke bawah (Indikator

Politik Indonesia, 2014; Mietzner, 2020), yang berlanjut pada pemilihan presiden 2019 (Indikator Politik Indonesia, 2019). Pada saat yang sama, pada masa pemerintahan Jokowi, banyak masyarakat miskin (*wong cilik*) mendapat bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan, PKH, Dana Desa, Bantuan Tunai yang menyediakan pekerjaan bagi pekerja kurang terampil dan semi terampil dalam proyek padat karya, dan bantuan kesehatan dan pendidikan. Survei terbaru juga menunjukkan bahwa 50,6% penduduk Indonesia, sebagian besar dari kelas menengah ke bawah, menikmati bantuan atau bantuan sosial terkait COVID-19 (Lembaga Survei Indonesia, 2020).

Meskipun kelas menengah ke atas pada umumnya tidak menerima subsidi apapun, mereka juga diuntungkan karena prioritas Presiden Jokowi terhadap ekonomi lebih tinggi ketimbang aspek kesehatan (Mietzner, 2020). Pada masa awal pandemi, pemerintah masih menggalakkan sektor pariwisata untuk memanfaatkan “peluang” atas penutupan destinasi wisata di banyak negara di dunia. Presiden Jokowi juga mengabaikan tuntutan para kepala daerah untuk menutup kegiatan publik karena berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas. Skema kebijakan pandemi Jokowi yang condong ke arah anti-lockdown juga menguntungkan kelas menengah yang mata pencahariannya bergantung pada pendapatan tetap/bulanan dan perusahaan atasan mereka tetap bisa beroperasi sehingga para pekerja kelas menengah tidak takut diberhentikan.

Untuk memacu konsumsi kelas menengah di masa pandemi, pemerintah juga telah memberikan beberapa insentif berupa pengurangan pajak penjualan kendaraan bermotor/mobil dan uang muka nol persen di sektor properti. Ini bisa menjadi respon khas dari seorang pemimpin populis, yang basis dukungannya berasal dari kelas menengah ke bawah. Selain itu, kepuasan terhadap demokrasi yang tetap berlanjut di kalangan mereka yang menderita kesulitan ekonomi selama pandemi adalah pertanda baik bagi demokrasi yang relatif baru seperti Indonesia. Hal ini juga menunjukkan fondasi struktural demokrasi semakin

kuat dan mampu menyerap guncangan jangka pendek.

Studi kami juga menunjukkan limitasi sikap partisan. Hubungan positif antara sikap partisan dan *approval* kepemimpinan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi rumah tangga. Meskipun studi menunjukkan bahwa apapun kebijakan dan program pemerintah, kelompok partisan lebih cenderung menyetujuinya ketika partai yang mereka dukung berkuasa (Muhtadi, 2020; Muhtadi & Warburton, 2020), temuan kami tidak menunjukkan kekuatan efek partisan yang permanen. Jacob dan Schenke (2020) dalam studi mereka tentang Mongolia menemukan peran penting sikap partisan dalam memengaruhi kepercayaan warga kepada Presiden.

Meskipun kepercayaan tinggi pada pemerintah dan pemimpin nasional dapat membantu meningkatkan kepatuhan, efek positif *trust* yang tinggi ini mungkin tidak bisa diterapkan dalam masyarakat yang terbelah. Namun loyalitas kaum partisan ini tidak bisa diperoleh secara gratisan dan para pemimpin harus bekerja untuk mendapatkan loyalitas tersebut. Dalam penelitian di Kanada, Merkley et al. (2020) menunjukkan dukungan publik kepada pemerintah selama COVID-19, terlepas adanya efek partisan. Ini pertanda baik karena selama ini terjadi polarisasi politik yang berkembang di sebagian besar negara demokrasi (Pew Research Center, 2014), termasuk Indonesia (Neyazi & Muhtadi, 2021).

Studi yang ada tentang sikap partisan menunjukkan bahwa partai-partai politik memiliki preferensi kebijakan yang bersifat divergen dan mereka coba untuk memenuhi tuntutan konstituen mereka terlebih dahulu (Galasso, 2014). Dukungan yang bersifat partisan kepada pemerintah dan pemimpin bisa memarginalkan kepentingan non-pendukung. Studi kami memberikan harapan bahwa loyalitas partisan tidak bersifat *taken for granted* dan tergantung pada kondisi ekonomi rumah tangga yang menunjukkan pentingnya faktor egotropis pada saat merancang kebijakan.

Trust kepada pemimpin merupakan aspek penting selama krisis. Temuan kami mendukung studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan tindakan pemerintah selama krisis tergantung pada

seberapa besar kepercayaan warga negara terhadap pemimpin dan pemerintah (Krupenkin, 2021). Beberapa waktu lalu muncul laporan tentang pengerahan pasukan militer dalam rangka menegakkan aturan penguncian total dan menjaga jarak. Kasus ini terjadi baik di negara-negara Asia maupun Eropa (Lazar, 2020).

Namun, jika warga memiliki kepercayaan yang tinggi pada pemimpin tentu dapat membantu mengurangi kesulitan dalam menegakkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan (Krupenkin, 2021). Studi kami juga sesuai dengan temuan yang menunjukkan variasi kelompok partisan kaitannya dengan tingkat *trust* pada pemerintah (Hetherington & Rudolph, 2015). Studi kami berkontribusi pada literatur yang sedang berkembang yang mempelajari faktor egotropik atau pribadi dan pengaruhnya terhadap kepercayaan politik, terutama selama masa krisis (Rump & Zwiener-Collins, 2021).

Meskipun studi kami menunjukkan keterbatasan sikap partisan dalam menjelaskan *approval* presiden pada masa krisis, pengukuran sikap partisan hanya terkait dengan perilaku memilih di masa lalu. Studi di masa depan dapat mengambil manfaat dengan memasukkan pengukuran partisan yang lebih beragam seperti keterikatan memilih

dengan partai (*party ID*) dan keanggotaan dalam partai (*party membership*).

Namun sayangnya, negara demokrasi berkembang seperti Indonesia memiliki keterikatan partai yang lemah (Fossati, Muhtadi & Warburton, 2021; Muhtadi, 2019) dan tanpa adanya data yang memadai, perilaku memilih di masa lalu masih merupakan indikator sikap partisan yang tersedia. Studi kami dengan demikian memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan bahwa meskipun terdampak secara ekonomi, orang masih percaya pada pemimpin yang mereka pilih ketika mereka puas dengan kinerja demokrasi.

Implikasi penting dari temuan kami adalah resiliensi nilai-nilai demokrasi dan kebutuhan para pemimpin untuk berinvestasi dalam membangun institusi dan kelembagaan demokrasi yang dapat bertahan dari krisis eksogen jangka pendek seperti COVID-19. Studi ini juga berkontribusi pada perdebatan akademik yang intensif tentang kepercayaan politik selama COVID-19 dan memberikan wawasan baru dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia untuk memahami bagaimana kepercayaan pada kepemimpinan politik dipengaruhi oleh kesulitan ekonomi, sikap partisan, dan kepuasan terhadap demokrasi.



Referensi

- Abdurrachman, F, Paddock, R., & Suhartono, M. (2021). The Pandemic has a new epicenter: Indonesia. *New York Times*, 17 July. Available at: <https://www.nytimes.com/2021/07/17/world/asia/indonesia-covid.html>
- Amri, P & Intan, R. (2020). Are democracies equipped to handle fast-moving economic crises? Challenges and opportunities for Indonesia during COVID-19. *CSIS Commentaries* DMRU-093-EN, 7 September. Available at: <https://www.csis.or.id/publications/are-democracies-equipped-to-handle-fast-moving-economic-crises-challenges-and-opportunities-for-indonesia-during-covid-19>
- Anderson, C. J., & Guillory, C. A. (1997). Political institutions and satisfaction with democracy: A cross-national analysis of consensus and majoritarian systems. *American Political Science Review*, 91(1), 66-81.
- Braithwaite, V., & Levi, M. (Eds.). (1998). *Trust and governance*. Russell Sage Foundation.
- Chanley, V. A., Rudolph, T. J., & Rahn, W. M. (2001). Public trust in government in the Reagan years and beyond. *What is it about government that Americans dislike*, 59-78.
- Citrin, J. (1974). Comment: The political relevance of trust in government. *American Political Science Review*, 68(3), 973-988.
- Clarke, H. D., Dutt, N., & Kornberg, A. (1993). The political economy of attitudes toward polity and society in Western European democracies. *The Journal of Politics*, 55(4), 998-1021.
- Dahlberg, S., Linde, J., & Holmberg, S. (2015). Democratic discontent in old and new democracies: Assessing the importance of democratic input and governmental output. *Political Studies*, 63, 18-37.
- Daoust, J. F., & Nadeau, R. (2020). Context matters: Economics, politics and satisfaction with democracy. *Electoral Studies*, 102133.
- Fiorina, M. P. (1981). *Retrospective voting in American national elections*. Yale University Press.
- Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2021). Why democrats abandon democracy: Evidence from four survey experiments. *Party Politics*, February. <https://doi.org/10.1177/1354068821992488>
- Galasso, V. (2014). The role of political partisanship during economic crises. *Public Choice*, 158(1-2), 143-165.
- Grönlund, K., & Setälä, M. (2007). Political trust, satisfaction and voter turnout. *Comparative European Politics*, 5(4), 400-422.
- Healy, A. J., Persson, M., & Snowberg, E. (2017). Digging into the pocketbook: Evidence on economic voting from income registry data matched to a voter survey. *American Political Science Review*, 111(4), 771-785.
- Hetherington, M. J. (1998). The political relevance of political trust. *American political science review*, 92(4), 791-808.
- Hetherington, M. J. (2006). *Why trust matters: Declining political trust and the demise of American liberalism*. Princeton University Press.
- Hetherington, M. J. & Rudolph, T.J. (2015). *Why Washington won't work: Polarization, political trust, and the governing crisis*. Chicago: University of Chicago Press.
- Indikator Politik Indonesia. (2019). 2019 General Election exit poll. 17 April. <https://indikator.co.id/rilis-exit-poll-pemilu-2019-2/>
- Indikator Politik Indonesia. (2014) Hasil exit poll Pemilu Presiden RI 2014, 9 July, 21-22. <https://indikator.co.id/laporan-exit-poll-pemilu-presiden-2014/>
- Jacob, M. S., & Schenke, G. (2020). Partisanship and institutional trust in Mongolia. *Democratization*, 27(4), 605-623.
- Kriekchaus, J., Son, B., Bellinger, N. M., & Wells, J. M. (2014). Economic inequality and democratic support. *The Journal of Politics*, 76(1), 139-151.
- Krupenkin, M. (2021). Does partisanship affect compliance with government recommendations?. *Political Behavior*, 43(1), 451-472.
- Lazar, N. C. (2020). Social trust in times of crises. *The Strait Times*, 3 April. Available at: <https://www.straitstimes.com/opinion/social-trust-in-times-of-crisis>
- Lembaga Survei Indonesia. (2020). The national survey report on corruption and handling of COVID-19 outbreak (Tracking Poll 1). Survey Period: August 13-16th.
- Lindsey, Tim, and Tim Mann. (2020). Indonesia was in denial over coronavirus. Now it may be facing a looming disaster. *The Jakarta Post*, 9 April. Available at: <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/04/09/indonesia-was-in-denial-over-coronavirus-now-it-may-be-facing-a-looming-disaster.html>
- Lockerbie, B. (1993). Economic dissatisfaction and political alienation in Western Europe. *European Journal of Political Research*, 23(3), 281-293.

- Merkley, E., Bridgman, A., Loewen, P. J., Owen, T., Ruths, D., & Zhilin, O. (2020). A rare moment of cross-partisan consensus: Elite and public response to the COVID-19 pandemic in Canada. *Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique*, 53(2), 311-318.
- Mietzner, M. (2014). Indonesia's 2014 elections: How Jokowi won and democracy survived. *Journal of Democracy*, 25(4), 111-125.
- Mietzner, M. (2020). Populist anti-scientism, religious polarisation, and institutionalised corruption: How Indonesia's democratic decline shaped its COVID-19 response. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 227-249.
- Mueller, J. E. (1970). Presidential Popularity from Truman to Johnson. *American Political Science Review* 64(1), 18-34.
- Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Inequality and democratic support in Indonesia. *Pacific Affairs*, 93(1), 31-58.
- Muhtadi, B. (2020). 8 Electoral losers, democratic support and authoritarian nostalgia. In *Democracy in Indonesia* (pp. 141-165). ISEAS Publishing.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Newman, B. (2002). Bill Clinton's approval ratings: The more things change, the more they stay the same. *Political Research Quarterly*, 55(4), 781-804.
- Neyazi, T. A., & Muhtadi, B. (2021). Selective Belief: How Partisanship Drives Belief in Misinformation." *International Journal of Communication* 15: 1286-1308
- Nichter, S. (2010). Politics and Poverty: Electoral Clientelism in Latin America. PhD thesis, University of California at Berkeley, USA.
- Noack, R. (2020). For Some World Leaders, Popularity Grows along with Coronavirus Case Numbers. *Washington Post*, 13 May. Available at: <https://www.washingtonpost.com/world/2020/05/13/some-world-leaders-popularity-grows-along-with-coronavirus-case-numbers/>
- Papadakis, E. (1999). Constituents of confidence and mistrust in Australian institutions. *Australian Journal of Political Science*, 34(1), 75-93.
- Pew Research Center. (2014). Political Polarization in the American Public. 12 June. Available at: <https://www.pewresearch.org/politics/2014/06/12/political-polarization-in-the-american-public/>
- Pietsch, J. (2015). Authoritarian durability: Public opinion towards democracy in Southeast Asia. *Journal of Elections, Public Opinion & Parties*, 25(1), 31-46.
- Quaranta, M., & Martini, S. (2016). Does the economy really matter for satisfaction with democracy? Longitudinal and cross-country evidence from the European Union. *Electoral Studies*, 42, 164-174.
- Ritchie, H, Ortiz-Ospina, E., Beltekian, D., Mathieu, E., Hasell, J., Macdonald, B., Giattino, C., Appel, C., Rodés-Guirao, L., & Roser, M. (2021). Coronavirus Pandemic (COVID-19). *Our World in Data*. Available at: <https://ourworldindata.org/coronavirus>
- Ruiz-Rufino, R., & Alonso, S. (2017). Democracy without choice: Citizens' perceptions of government autonomy during the Eurozone crisis. *European Journal of Political Research*, 56(2), 320-345.
- Rump, M., & Zwiener-Collins, N. (2021). What determines political trust during the COVID-19 crisis? The role of sociotropic and egotropic crisis impact. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 31(sup1), 259-271.
- Soderborg, S., & Muhtadi, B. (2020). Policy, partisanship, and pay: Diverging COVID-19 responses in Indonesia. 28 June. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3636486>
- The Economist. (2020). "Politics is spreading covid-19 in Indonesia and the Philippines." 29 August. Available at: <https://www.economist.com/asia/2020/08/29/politics-is-spreading-covid-19-in-indonesia-and-the-philippines>
- Tormos, R. (2019). Measuring personal economic hardship and its impact on political trust during the great recession. *Social Indicators Research*, 144(3), 1209-1232.
- Warren, M. E. (1999). Democratic theory and trust. In Hardin, R., & Offe, C (Eds.). *Democracy and Trust*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wilkes, R. (2015). We trust in government, just not in yours: Race, partisanship, and political trust, 1958-2012. *Social science research*, 49, 356-371.
- Wong, T. K. Y., Hsiao, H. H. M., & Wan, P. S. (2009). Comparing political trust in Hong Kong and Taiwan: Levels, determinants, and implications. *Japanese Journal of Political Science*, 10(2), 147-174.
- Wu, W. C., & Chang, Y. T. (2019). Income inequality, distributive unfairness, and support for democracy: evidence from East Asia and Latin America. *Democratization*, 26(8), 1475-1492.

PROYEKSI KEBIJAKAN ANTISIPASI PANDEMI: OPSI KEBIJAKAN PEMERINTAH

Julian Aldrin Pasha
Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP UI

Merujuk data resmi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), virus corona diidentifikasi pertama kali berdasarkan laporan Komisi Kesehatan Kota Wuhan, China, tentang kluster kasus pneumonia¹ di Wuhan, Provinsi Hubei, pada akhir 2019. WHO, awal 2020, merespons dengan membentuk IMST (Tim Dukungan Manajemen Insiden) sebagai antisipasi darurat menangani wabah yang diprediksi akan meluas.² Sebenarnya, meluasnya kasus ini telah diprediksi, seperti disebutkan dalam studi Wu, Kathy, dan Leung³

(2020), bahwa sejak kota Wuhan melaporkan

wabah pneumonia a-tipikal yang disebabkan novel coronavirus 2019 (2019-nCoV), kasus tersebut telah menyebar ke kota-kota Cina lainnya dan ke Luar China. Dan dengan memperkirakan tingkat risiko kesehatan masyarakat domestik dan global, COVID-19 hampir pasti menjadi pandemi serius.⁴

Sementara di tanah air, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah mengidentifikasi virus Corona.⁵ Sejak konfirmasi dua kasus pertama WNI yang positif COVID-19, wabah menyebar cepat, tidak saja di Indonesia tetapi di

1 Pada tanggal 31 Desember 2019, dilaporkan bahwa ada kasus pneumonia dengan etiologi yang tidak diketahui (*unknown cause*) terdeteksi di Wuhan, Provinsi Hubei China. Dari 44 kasus, 11 dalam kondisi sakit parah, sedangkan 33 pasien lainnya dalam kondisi stabil. Menurut laporan media, pasar makanan laut Huanan yang diduga sebagai sumber pertama kasus pneumonia di Wuhan ditutup pada 1 Januari 2020 untuk sanitasi dan desinfeksi lingkungan. Otoritas nasional melaporkan bahwa semua pasien diisolasi dan menerima perawatan di institusi medis Wuhan. Tanda dan gejala klinis terutama demam, dengan beberapa pasien mengalami kesulitan bernapas, dan radiografi dada menunjukkan lesi invasif pada kedua paru-paru. Menurut pihak berwenang, beberapa pasien merupakan pedagang di pasar dimaksud. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2020-DON229>, (diakses pada 5 Januari 2020).

2 Sumber WHO. (2020). <https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---COVID-19> (diakses 20 April 2020).

3 Wu, Joseph, Kathy, L. Gabriel M. (2020), "Nowcasting and Forecasting the Potential Domestic and International Spread of the 2019-nCoV Outbreak Originating in Wuhan, China: a Modelling Study" dalam **The Lancet Journal**, Vol. 395 Number 10225 p659-754, e41. Published: January 31, 2020. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30260-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30260-9).

4 *Ibid.*

5 Kompas (2020), Presiden menyatakan bahwa "Orang Jepang ke Indonesia bertemu siapa, ditelusuri dan ketemu. Ternyata orang yang terkena virus corona berhubungan dengan dua orang, ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun," kata Jokowi di Istana Kepresidenan **BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona**. (diakses pada (2/3/2020).

banyak negara sehingga menjadi pandemi. Jumlah kasus harian berlanjut meningkat, meskipun pemerintah telah berupaya menekan penyebaran virus dengan formula kebijakan kampanye pembatasan jarak sosial (*social distancing*). Kebijakan ini disebut sebagai kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa kota. Jumlah total kasus yang dikonfirmasi mencapai 1.641.194 orang dengan 4.402 kasus positif.⁶

Indonesia pernah mencapai titik krusial dalam angka kematian akibat virus COVID-19. Media CNBC

(2021)⁷ memberitakan kasus COVID-19 di Indonesia berfluktuasi bahkan meningkat dan menciptakan rekor baru. Sampai 7 Juli 2020, kasus baru COVID-19 bertambah 34.379 pasien dalam sehari. Mengutip *Worldometers*⁸, posisi RI pada hari yang sama hanya di bawah Brasil dan India dalam jumlah penambahan kasus harian. Brasil melaporkan 54.022 kasus sementara India dengan 45.196 kasus. Selama bulan Juli 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah 37.284 menjadi total 3.409.658 kasus,

6 CNNIndonesia(2020). "Bertambah 4.402 Kasus, Positif Corona Jadi 1.641.194". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210425122843-20-634457/bertambah-4402-kasus-positif-corona-jadi-1641194>. Diakses (25 April 2021).

7 Penambahan ini terus menggenapkan kelamnya data kasus COVID-19 pada pekan ini yang terus mencetak rekor beruntun. Dua hari sebelumnya, Indonesia mencatatkan penambahan sebesar masing-masing 31.189 kasus dan 29.745 kasus. Pada total konfirmasi positif di Indonesia menembus 2,379 juta kasus. Dan, angka penambahan ini menjadikan RI menempati posisi sebagai salah satu negara dengan penambahan harian terbesar. Lihat, Sorongan, T.P., CNBC Indonesia (2021), RI Jadi Negara Pemimpin Kasus Corona Terbanyak Dunia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210708071250-4-259166/ri-jadi-negara-pemimpin-kasus-corona-terbanyak-dunia>. (Diakses 8 Juli 2021).

8 **Worldometers** *Global health statistics in real time*. (diakses 7 Juli 2021)



dengan pasien sembuh bertambah 39.372 menjadi 2.770.092 orang. Meski demikian, jumlah pasien meninggal bertambah 1.808 menjadi 94.119 orang.⁹

Tulisan ini mencoba memberikan alternatif *policy responds* kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam rangka antisipasi kemungkinan pandemi berkelanjutan, dengan melihat perjalanan virus COVID-19 di tanah air. Ini menjadi penting mengingat akhir penyebaran virus belum bisa ditentukan, sehingga dibutuhkan tindakan pemerintah ke depan.

PERMASALAHAN

Sejak awal 2020 sampai 2021, pandemi belum memperlihatkan indikasi hilang sepenuhnya, meski, berdasarkan catatan, dampak mematikan dari kasus di Indonesia dan dunia telah melandai sejak mencapai puncaknya sekitar bulan Juli 2021. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Kawal COVID-19 (Ilustrasi Grafik 1), kasus COVID-19 yang melonjak pada Juli di Indonesia turut memperbesar angka kematian sebanyak 35.628.¹⁰ Angka korban kematian akibat pandemi yang mencapai puncaknya ini menjadi

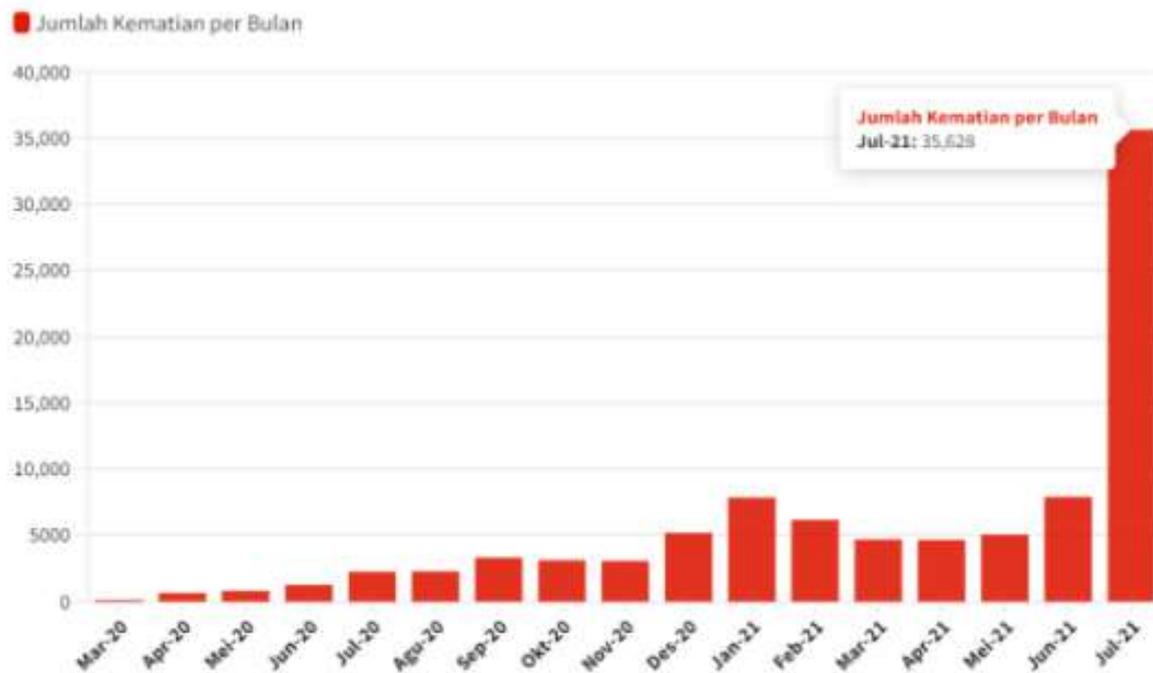
perhatian masyarakat internasional.¹¹

Permasalahan ini disikapi beragam oleh pemerintah dan masyarakat dunia. Pada titik krusial saat kecenderungan kenaikan penyebaran terjadi, muncul diskursus tentang mana yang lebih didahulukan antara penyelamatan kesehatan dengan penerapan *lockdown policy*¹²—yang di Indonesia bermakna seperti kebijakan PSBB— dengan resiko muncul kontraksi ekonomi akibat perlambatan gerak manusia dan jasa, atau melakukan kebijakan pembatasan terbatas (dilonggarkan) untuk memberi keleluasaan agar ekonomi tetap bergerak? Opsi pertama mengarah pada *people-oriented vis-à-vis economy-oriented*. (Ilustrasi 2)¹³

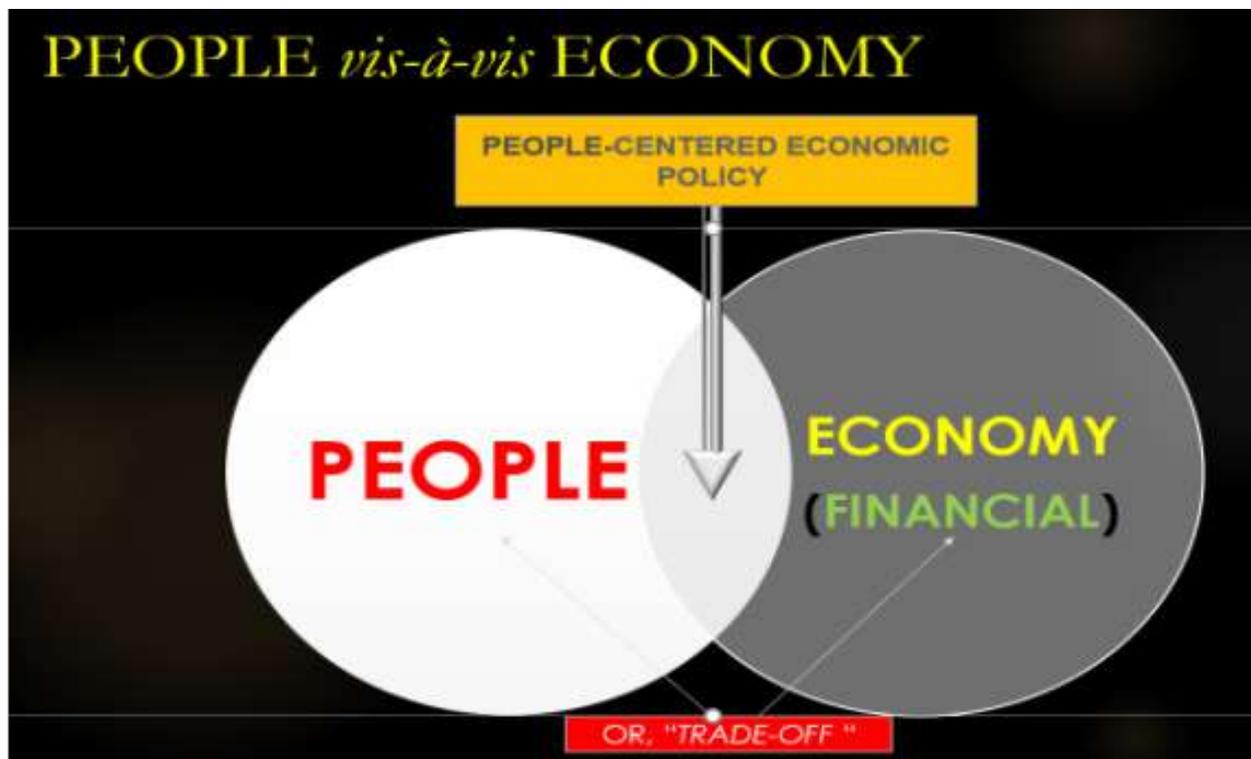
Pemerintah di dunia melakukan kebijakan beragam yang dikenal sebagai *lockdown*. Sementara di Indonesia pemberlakuan PSBB ditentukan secara khusus dan tidak sama di beberapa daerah. Pengetatan dilakukan hanya di beberapa wilayah yang dianggap krusial atau serius terdampak dengan pertimbangan agar tidak menyebar atau masuk ke daerah tertentu.

Dalam konteks Indonesia, dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, maka implementasi kebijakan pembatasan sosial

-
- 9 Wisnoe, M. "Data Terkini Korban Virus Corona di Indonesia pada Juli 2021", Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-virus-corona-di-indonesia-pada-juli-2021.html>. Diakses pada 31 Juli 2020.
 - 10 Dari data yang dihimpun *Tempo*, kematian akibat COVID-19 di bulan Juli mencapai angka 35.628 jiwa. Jumlah itu merupakan jumlah tertinggi selama pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 di Indonesia. Lonjakan angka kematian dari bulan Juni ke bulan Juli bahkan mencapai 350 persen, tertinggi kedua setelah periode Maret hingga April 2020 yang mencapai 390 persen. Selain itu, rata-rata angka kematian harian pada Juli 2021 mencapai 1.187,6 jiwa per hari. Itu artinya hampir 5 kali lipat dari bulan sebelumnya. Begitu pula bila dibandingkan periode Januari dan Februari 2021 yang disebut-sebut sebagai gelombang pertama. Angka kematian harian tertinggi terjadi pada 27 Juli 2021 yang mencapai 2.069 jiwa. Artikel. Javier, F. "Pecah Rekor Kematian COVID-19 di Juli 2021". <https://data.tempo.co/data/1176/pecah-rekor-kematian-COVID-19-di-Juli-2021>.
 - 11 Kematian COVID-19 Indonesia Masih di Puncak Dunia. Baca artikel CNN Indonesia "Kematian COVID-19 Indonesia Masih di Puncak Dunia" <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210730015209-106-674075/kematian-COVID-19-indonesia-masih-di-puncak-dunia>. Diakses pada 30 Juli 2021.
 - 12 Beberapa diantaranya bisa dilihat seperti, Lau, Hien, Khosrawipour, Veria, Kocbach, Piotr, Mikolajczyk, Agata, Schubert, Justyna, Bania, Jacek, Khosrawipour, Tanja. 2020. "The positive impact of Lockdown in Wuhan on containing the COVID-19 outbreak in China" *Journal of Travel Medicine* (March 2020). Atau, Priyanka, Pulla (2020). "COVID-19: India imposes lockdown for 21 days and cases rise " in *Journal BMJ (British Medical Journal)* London, United Kingdom. BMA House Publisher. 2020; 368: (Published 26 March 2020). Atau, Karnon, Jonathan.(2020). A Simple Decision Analysis of a Mandatory Lockdown Response to the COVID-19 Pandemic." *Journal: Applied Health Economics and Health Policy*. Atau, Melnick, Edward R, Ioannidis, John P A (2020). "Should governments continue lockdown to slow the spread of COVID-19?" *BMJ Journal*. *BMJ*. 2020 Jun 3;369:m1924 Or, Kanitkar, Tejal (2020). "The COVID-19 lockdown in India: Impacts on the economy and the power sector" in *Journal of Global Transitions* vol.2 Lihat juga, Xuefei. Ren (2020). "Pandemic and Lockdown: a Territorial Approach to COVID-19 in China, Italy and the United States" *Journal of Eurasian Geography and Economics*. Vol. 61: Issue 4-5, p. 423-434.
 - 13 Materi presentasi disampaikan sebagai narasumber dalam Seminar ILUNI UI, Pasha, Julian (2020), "PEMBANGUNAN EKONOMI MASA PANDEMI PELUANG DAN TANTANGAN", 6 November 2020.



Sumber: Kementerian Kesehatan, KawalCovid-19



berskala besar PSBB¹⁴ mulai diberlakukan pada 17 April 2020 dan kemudian dinyatakan berhasil atau efektif. Namun perbedaan/disparitas penyebaran di satu daerah dengan yang lain belum dapat secara persis diidentifikasi penyebabnya: mengapa ada satu daerah dilaporkan meningkat sementara daerah lain menurun jumlahnya? Sebagian berangkat dari asumsi bahwa anomali itu berasal dari faktor disiplin masyarakat, khususnya terkait ketaatan terhadap protokol kesehatan (antara lain yang terpenting; *social distancing*/jaga jarak, pakai masker dan hidup sehat). Namun mengapa di daerah lain yang menerapkan hal sama tidak menunjukkan hasil serupa? Apakah perbedaannya berdasarkan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah dan sosialisasi kepada masyarakat? Atau mungkin cara pandang masyarakat berdasarkan pengetahuan, wawasan, kesadaran, kultur, tradisi atau *local wisdom* berupa nilai-nilai (*values*) dari daerah setempat ikut mempengaruhi dalam menghasilkan penurunan angka korban terjangkit secara keseluruhan?¹⁵

PEMBAHASAN

Dalam konteks *policy response* pandemi COVID-19 pemerintah beberapa negara telah melakukan respons cepat saat fase awal pandemi. Dalam tulisan ini dipilih tiga negara; China, Australia, dan Selandia Baru dengan pertimbangan negara-negara tersebut melakukan kebijakan 3T: *Testing-Tracking-Treatment* seraya menerapkan *lockdown*. Mereka juga melakukan sosialisasi informasi terkini perkembangan virus, memperketat jalur masuk, menekan laju mobilitas warga, juga mempromosikan penggunaan masker. Pada

gilirannya semua itu berhasil menekan laju eksponensial penyebaran virus COVID-19 secara signifikan.

CHINA / TIONGKOK

Sebagai negara berpengalaman dengan virus SARS-CoV-2, kemunculan virus COVID-19 dikaitkan dengan SARS-CoV-2 karena adanya kemiripan, seperti kombinasi cepatnya penularan dan derajat keparahan dampak yang ditimbulkan. Sebagian pengamat awalnya melihat SARS-CoV-2 sebagai patogen yang sempurna untuk pandemi, meski tidak terjadi. Pada awal 2020, COVID-19 telah menginfeksi warga di China lalu dengan cepat melanda seluruh dunia serta menyebabkan infeksi dan kematian.

Sebagai negara pertama yang terkena dampak dan telah berjuang untuk memahami patogen baru, China melaporkan hanya 0,05% dari jumlah total kasus global meskipun populasi negara tersebut merupakan 19% dari populasi dunia. Merujuk data Johns Hopkins University and Medicine (2020) pada Februari 2020, tercatat 2.685 kasus baru dengan angka kematian nol di China.¹⁶

Pelajaran apa yang dapat diambil dari respons China terhadap SARS-CoV-2? Harus diakui, strategi pencegahan dan pengendalian China tetap lebih agresif daripada kebanyakan negara lain.

China mengatasi dengan cepat sehingga dalam dua bulan telah menahan epidemi dan menghilangkan infeksi lokal di negara itu. *Policy response* awal mengedepankan metode preventif seperti memakai masker, *social distancing*, pembatasan kegiatan, mobilitas serta acara publik dan perjalanan. China

14 Terminologi PSBB merujuk pada strategi penanganan yang kali pertama diperkenalkan saat pandemi Covid 19. Dasar hukum PSBB adalah Kebijakan PSBB tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Pimpinan daerah dapat mengusulkan dan menyatakan PSBB dengan mempertimbangkan penyebaran kasus dan peningkatan jumlah kematian COVID-19 meningkat. PSBB meliputi penyekatan, pembatasan atau penghentian kegiatan seperti mobilitas transportasi, tempat kerja, sekolah, kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan umum serta kegiatan lain khusus, pengecualian di sektor esensial diizinkan beroperasi dengan persetujuan otoritas.

15 Beberapa permasalahan seputar dampak dan opsi kebijakan penanganan pandemic COVID-19 pernah disinggung penulis dalam pembahasan mengenai *policy brief* penanganan pandemi. Lihat, Pasha, J., Anugrah, P., Hidayat, S., "Pemikiran FISIP UI tentang Masyarakat dan Negara di Era Pandemi" dalam **POLICY BRIEF** Edisi 2- 2020 FISIP UI. (November 2020)

16 Lihat, Johns Hopkins University and Medicine (2020), China - COVID-19 Overview - Johns Hopkins (jhu.edu). <https://coronavirus.jhu.edu/region/china>. Diakses pada 16 Juli 2021



melakukan *lockdown*, sebuah kebijakan yang dalam pandangan pemerintah Cina paling penting dilakukan. Pemerintah mengidentifikasi dan mengkarantina penderita COVID-19 dan orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan mereka. Tindakan kuratif terhadap penderita dilakukan di rumah sakit khusus covid. Di samping itu, mereka juga menggunakan metode strategi yang disebut intervensi non-farmakologis.¹⁷

Negara-negara lain juga berhasil menghilangkan infeksi lokal. Ini menunjukkan bahwa penghapusan penyakit yang muncul dengan potensi pandemi dimungkinkan dengan menggunakan intervensi non-farmasi saja.

Teknologi baru sangat membantu, misalnya, dengan pengujian asam nukleat yang memungkinkan untuk diagnosa pasien lebih awal, mendeteksi infeksi asimtomatik, dan menilai potensi risiko bagi seluruh populasi. Handphone atau ponsel digunakan untuk melacak dan mengelola kontak dekat. Pemodelan matematika dengan bantuan komputer yang kuat juga terbukti berguna memahami jalannya pandemi. Pemodelan itu juga penting untuk menilai efek dari strategi pencegahan dan menginformasikan penyesuaian kebijakan. Semua itu dikendalikan dan di bawah kontrol Pemerintah China.

Banyak yang bisa dipelajari dari kampanye nasional China yang terkoordinasi secara terpusat. Misalnya,

pemerintah cepat memobilisasi belasan ribu tenaga kesehatan (nakes) ke Wuhan dari seluruh penjuru China saat awal wabah. Selain itu koordinasi lokal dilakukan secara efektif dan juga terhadap alokasi sumber daya kesehatan. Kapasitas perawatan umum dan penyakit menular ditingkatkan secara cepat dan vaksinasi adalah penentu keberhasilan. Secara efektif, China memberikan fleksibilitas memprioritaskan populasi tertentu untuk vaksinasi dan mencoba transisi yang aman dari kebijakan “*toleransi nol terhadap transmisi lokal*.”¹⁸ Kebijakan tersebut telah membuat China bertahan dengan langkah-langkah kesehatan masyarakat yang kuat sampai kekebalan populasi ditetapkan melalui vaksinasi. Biaya yang digelontorkan sangat besar. Namun dengan pertimbangan rasional diyakini bahwa *cost* untuk strategi lain jauh lebih mahal dalam jangka panjang.¹⁹

China telah secara efektif mengendalikan epidemi COVID-19 lewat penguncian atau *lockdown* Wuhan. Hal itu ditandai dengan jumlah kasus baru yang dikonfirmasi setiap hari menurun drastis menjadi di bawah 100 kasus sejak 7 Maret 2020. Dalam tujuh hari pertama *lockdown*, studi menunjukkan, dengan kebijakan larangan perjalanan dan penguncian kota, telah menurunkan angka penularan rata-rata dan mencegah ratusan ribu kasus di seluruh China.

Shenzhen, yang memiliki hubungan dekat dengan Wuhan, berhasil menahan epidemi. Sebuah studi

17 Metode pencarian literatur elektronik komprehensif dilakukan untuk mengidentifikasi uji coba terkontrol acak (RCT) yang relevan yang diterbitkan hingga 31 Oktober 2019. Sebanyak 41 RCT dimasukkan dalam meta-analisis jaringan ini yang melibatkan 5 intervensi non-farmakologis yang berbeda: rekreasi terapeutik (TC), terapi kenang-kenangan (RT), terapi perilaku (BT), terapi pijat (MT) dan keperawatan individual (IN). Hasil meta-analisis jaringan menunjukkan bahwa keperawatan individual adalah yang terbaik dalam meningkatkan depresi, fungsi kognitif, dan aktivitas kehidupan sehari-hari dari gejala perilaku dan psikologis demensia. Lihat studi Li, Wenjie, Xiaofeng Xu, Fen Wu, Yuanyuan Ni, Jun Lan, Xiuying Hu (2021). Comparative efficacy of Non-Pharmacological Interventions on Behavioural and Psychological Symptoms in Elders with Dementia: A network Meta-Analysis. *First published: 02 September 2021*.

18 China tidak akan menyerah pada kebijakan toleransi nol terhadap kasus COVID-19. Untuk menghentikan kasus-kasus lokal berubah menjadi wabah yang lebih luas, China telah mengembangkan dan terus menyempurnakan kebijakan melawan COVID-nya – termasuk pengujian massal, penguncian yang ditargetkan dan pembatasan perjalanan – bahkan ketika langkah-langkah anti-COVID tersebut kadang-kadang mengganggu ekonomi lokal. Zhong Nanshan, seorang ahli penyakit pernapasan yang membantu merumuskan strategi COVID China pada awal 2020 mengatakan kepada media pemerintah, bahwa “Kebijakan (di China) akan tetap untuk waktu yang lama” Reuters (2021), *China won't give up on its zero-tolerance COVID policy soon – experts*. <https://www.reuters.com/world/china/china-wont-give-up-its-zero-tolerance-covid-policy-soon-experts-2021-11-02/> (diakses 20 November 2021)

19 Studi Wu dan McGoogan melaporkan, sampai 11 Februari 2020, Pemerintah China melaporkan 72,314 cases (44,000 confirmed; 16,000 suspected; 10,000 clinically diagnosed; and 900 positive tests without symptoms (Wu and McGoogan, JAMA, February 24, 2020. Atau, <http://www.sixthtone.com/news/1005213/105-people-were-infected-with-COVID-19-by-dec.-31%2C-study-says>).

dari Shenzhen menemukan bahwa *feedback* masyarakat atas kebijakan *lockdown*, isolasi dan pelacakan kontak, secara substansial mengurangi tingkat penularan dalam komunitas masyarakat. Kasus Wuhan menunjukkan Rumah Sakit Fangcang memainkan peran penting dalam menekan penyebaran. Mereka menangani isolasi pasien, triase, memberikan perawatan medis kepada pasien dengan gejala sedang, dan dengan cepat memblokir penularan masyarakat.²⁰

Sejak 23 Januari 2020, pemerintah China bertindak cepat menangani wabah COVID-19 dengan mengunci total kota Wuhan dan kota-kota lain di Provinsi Hubei.²¹ Hal lain yang dilakukan adalah upaya terkoordinasi dalam menerapkan jarak sosial dan mobilisasi sumber daya medis secara cepat. Selain itu pemerintah juga membangun rumah sakit baru, menyediakan sejumlah besar peralatan alat perlindungan diri (APD), pengujian tes Swab, serta menjaga tingkat pemantauan yang tinggi.²² Upaya mengkonsolidasikan sumber daya dan memberlakukan langkah-langkah drastis seperti di atas dilakukan pemerintah China.

Banyak dari tindakan ini, seperti penguncian kota, sekarang dipraktikkan secara global. Namun ketika pertama kali diterapkan, hal semacam itu dianggap “tak terbayangkan” dilakukan di tempat lain. Ketika dampak buruk pandemi berkembang pesat di seluruh dunia, banyak negara memperoleh manfaat dari pengalaman China tersebut. Mereka pun membuat keputusan sulit dalam upaya mengatasi permasalahan COVID-19 berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Australia

Kasus positif COVID-19 pertama kali di Australia dikonfirmasi pada 25 Januari 2020 terhadap seseorang yang datang dari Wuhan. Sebenarnya dalam dua bulan pertama 2020, kasus positif Covid di Australia jumlahnya relatif rendah. Namun pada pertengahan Maret 2020, angkanya melebihi 1.000 kasus dengan 7 orang meninggal. Otoritas berwenang Australia pun menyatakan negeri itu jelas berada di bagian eksponensial dari kenaikan kasus.²³

Pemerintah Federal Australia merespons wabah dengan membentuk “national cabinet”²⁴ yang melibatkan pemimpin semua Pemerintah Negara Bagian dan Wilayah untuk mengoordinasikan tanggapan. “Kabinet” ini, antara lain, menghasilkan pembatasan *physical distancing* dan *lockdown* demi mengurangi penyebaran infeksi COVID-19. Namun pemerintah memberikan dispensasi (kelonggaran) bagi orang untuk bisa ke luar rumah dengan empat alasan, yakni, berbelanja barang-barang kebutuhan penting/primer; keperluan berobat, pasien yang sedang perawatan medis, dan para tenaga kesehatan (nakes) dengan tidak lebih dari satu orang. Pemerintah juga membatasi penerbangan internasional yang masuk.

Selain itu, ada penutupan untuk layanan publik dan privat yang tidak penting, seperti kafe dan restoran, kecuali beberapa layanan *takeaway*. Perjalanan antarnegara bagian dan wilayah dihentikan atau sangat dibatasi. Orang-orang yang tes-nya menunjukkan positif, kembali dari perjalanan luar negeri atau

20 Lihat studi Simiao Chen, Zongjiu Zhang, Juntao Yang, Jian Wang, Xiaohui Zhai, Till Bärnighausen, Chen Wang (2020). “Fangcang Shelter Hospitals: a Novel Concept for Responding to Public Health Emergencies”. In *Lancet* ; 395: 1305–14 Published Online April 2, 2020 [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30744-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30744-3). Diakses pada 16 April 2020.

21 “Wuhan lockdown ‘unprecedented’, shows commitment to contain virus: WHO representative in China”. Reuters. 23 January 2020. Diakses 24 Januari 2020.

22 Ibid.

23 Keberhasilan Australia dalam menekan lonjakan kasus virus COVID-19 diilustrasikan dalam kurva. Lihat (<https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert>).

24 Dewan Pemerintah Australia (COAG) merupakan “cabinet” yang didedikasikan untuk penanganan Covid-19 dibentuk oleh Pemerintah Australia yang kemudian digantikan menjadi Dewan Reformasi Federasi Nasional (NFRF), dengan Kabinet Nasional tetap berada di pusat NFRF. Kabinet Nasional ini fokus khusus pada penciptaan lapangan kerja dalam menanggapi pandemi COVID-19. Department of the Prime Minister and Cabinet, COAG becomes National Cabinet. <https://www.pmc.gov.au/news-centre/government/coag-becomes-national-cabinet>. Diakses 2 Juni 2020. Lihat pula, <https://www.pm.gov.au/media/national-cabinet-1>. Dan, Health Economics, Policy and Law, First View, pp. 1 – 12.

melakukan kontak dengan penderita kasus positif yang diketahui, diminta melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Karantina lalu jadi wajib untuk semua pelancong yang kembali dari luar negeri terlepas dari status COVID-19. Mereka menjalani karantina di hotel dan diawasi.

Penerapan aturan *lockdown* di Australia sempat menyebabkan *panic buying*, dengan munculnya krisis bahan pokok seperti tepung, pasta dan beras. Akibatnya pembelian oleh individu terhadap produk-produk tersebut dibatasi secara ketat. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan menerapkan pembatasan terhadap obat-obatan tertentu. Komunikasi positif kepada penderita COVID-19 dilakukan untuk mempertahankan pembelian normal mereka dan bukan “persediaan”.

Saat *lockdown*, sekolah ditutup untuk menekan dan menghentikan penyebaran virus. Namun karena sebagian besar sekolah di Australia berada di bawah yurisdiksi Pemerintah Negara Bagian, muncullah respons bervariasi di seluruh negeri terhadap kebijakan Pusat tersebut. Ini memunculkan kebingungan dan kekhawatiran cukup besar dalam masyarakat. Pemerintah Australia kemudian merilis aplikasi ponsel pelacakan *COVIDSafe*²⁵ (seperti *Peduli Lindungi* di Indonesia) dan mengimbau semua warga Australia mengunduh dan menghubungkannya dengan upaya menjaga jarak sosial dan mematuhi penutupan.

Feedback masyarakat positif, mereka mendukung pendekatan proaktif pemerintah dalam mengatasi pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para akademisi, profesional dan peneliti kesehatan Australia juga proaktif dalam mengusulkan dan

berpartisipasi dalam penelitian terkait COVID-19 pada skala nasional dan internasional. Negara lain dapat melakukan pembelajaran dari cara pemerintah Australia menanganai pandemi ini. Bahwa tindakan cepat dan proaktif diperlukan disamping tenaga kesehatan profesional untuk memodifikasi layanan kesehatan dengan cepat, tepat dan aman.

Dengan populasi sekitar 25 juta, Australia mengalami tingkat infeksi dan kematian lebih rendah dari banyak negara OECD yang sebanding. Negara ini mencatat hanya ada 27.912 kasus yang dikonfirmasi, dan 908 kematian pada 1 Desember 2020.²⁶ Apa yang dilakukan Pemerintah Australia adalah membangun kepercayaan, menggunakan data, dan berkolaborasi dengan baik. Ketiga prinsip itu menjadi kunci keberhasilan Australia memerangi pandemi sepanjang 2020. Respons Australia terhadap pandemi COVID-19 ini menawarkan wawasan berharga yang dapat ditindaklanjuti para pembuat keputusan negara-negara lain di dunia.²⁷

SELANDIA BARU

Sebagaimana dialami banyak negara, Selandia Baru juga merasakan bahwa pandemi memberikan dampak signifikan pada masyarakat dan sistem kesehatan. Setelah mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertama pada 26 Februari 2020, pemerintah Selandia Baru melarang masuk sebagian besar orang dari luar negeri, khususnya China. Pelarangan ini berlaku 14 hari. Para wisatawan asing yang berangkat atau transit melalui daratan China ditolak masuk Selandia Baru. Kebijakan pemerintah ini diumumkan sehari setelah Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyatakan menolak masuknya wisatawan asing yang telah

25 Pemerintah Australia melakukan sosialisasi secara massif terhadap *COVIDSafe*, dengan maksud mengimbau masyarakat di Australia agar menginstall aplikasi ini melalui Unduh aplikasi *COVIDSafe* di *Apple App Store* atau *Google Play*. Adapun tujuan *COVIDSafe* untuk memantau penyebaran virus dari mereka yang terindikasi, di samping guna membantu petugas kesehatan memahami dan menahan penyebaran Virus Corona (COVID-19). Aplikasi ini menggunakan teknologi Bluetooth® untuk membantu mengidentifikasi pengguna yang telah melakukan kontak dengan seseorang yang telah dites positif. *COVIDSafe*, <https://www.covidsafe.gov.au/index.html>.

26 “Situasi dan jumlah kasus virus corona (COVID-19) saat ini,” merujuk Departemen Kesehatan Pemerintah Australia, 2 Desember 2020, [health.gov.au](https://www.health.gov.au). (diakses 12 April 2021).

27 Child, J., Roland Dillon, Eija Erasmus, and Jacob Johnson (McKinsey). 2020. “Australia’s response to the COVID-19 pandemic to date offers valuable, actionable insights for decision makers worldwide.” <https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/collaboration-in-crisis-reflecting-on-australias-COVID-19-response>

melewati China.²⁸ Sementara warga negara Selandia Baru dan penduduk tetap masih dapat masuk, seperti juga anggota keluarga dekat mereka. Hanya saja mereka diminta mengisolasi diri selama 14 hari sejak kedatangan kembali di negara itu.

Sebulan kemudian (Maret) saat terdapat 100 kasus yang terkonfirmasi, negara itu melakukan penguncian (*lockdown*). Namun pada pertengahan Mei, otoritas yang berwenang

Pada 21 Maret Perdana Menteri Jacinda Ardern memperkenalkan sistem peringatan empat tingkat baru yang membatasi kontak manusia, perjalanan dan operasi bisnis. Negara itu segera pindah ke Level Peringatan 2, yang mengharuskan warga tinggal di rumah, bekerja dari rumah (WFH) dan membatasi perjalanan yang tidak penting. Dua hari kemudian, karena total kasus yang dikonfirmasi kemungkinan dua kali lipat menjadi 173, Ardern mengumumkan negara akan segera pindah ke Level Peringatan 3. Dua hari kemudian situasi dinyatakan pindah ke Level Peringatan 4, alias tingkat tertinggi.²⁹

Di bawah pembatasan level 4 semua warga Selandia Baru diperintahkan tinggal di rumah. Mereka hanya boleh melakukan kontak fisik hanya dengan yang sama-sama berada dalam 'gelembung'. Keputusan itu muncul setelah pejabat kesehatan masyarakat tidak dapat melacak sumber dua kasus penularan masyarakat.

Keputusan *lockdown* segera memicu situasi yang mirip terjadi di Australia, yakni terjadi *panic buying*. Rak-rak supermarket dibersihkan dari roti, tepung dan kertas toilet, toko peralatan rumah tangga pembuat roti, peralatan masak dan peralatan dapur lainnya, dan toko perangkat keras bahan perbaikan rumah. Pemerintah juga mengumumkan keadaan darurat nasional pada 25 Maret yang akan berlangsung selama hampir dua bulan, sampai kemudian dicabut pada 13 Mei 2020. Lalu pada 12 Agustus 2020, setelah 102 hari tanpa penularan masyarakat, negara itu memasuki penguncian kedua. Ini dilakukan setelah ditemukan kasus komunitas baru di Auckland. Itu merupakan sinyal bahwa perang melawan virus masih jauh dari selesai.³⁰

Upaya Pemerintah Selandia Baru memerangi penyebaran virus menggunakan pendekatan pemerintah yang menyeluruh. Sebagai *leading sector*, Kementerian Kesehatan Negara dan infrastruktur tanggap darurat nasional melakukan koordinasi dengan semua kementerian dan lembaga pemerintah. Pendekatan *all-of-government* dilakukan agar memungkinkan pemerintah meningkatkan tanggapan efektif menghadapi pandemi, baik untuk kepentingan kesehatan warga maupun ekonomi. Kebijakan pemerintah Selandia Baru dalam penanganan COVID-19 dilakukan secara ketat dan komprehensif yang memperoleh dukungan rakyat. Kuncinya, kebijakan itu disampaikan secara transparan kepada publik agar mereka mendapat informasi tentang pandemi.³¹

28 Newhub., "New Zealand to ban travellers from China to protect against coronavirus." <https://www.newshub.co.nz/home/new-zealand/2020/02/new-zealand-to-ban-travellers-from-china-to-protect-against-coronavirus.html> (diakses pada 5 Maret 2020) menyatakan penyebaran virus di masyarakat telah dihilangkan, dan kebijakan penguncian dicabut pada 9 Juni 2020. Pertimbangannya adalah tidak ada lagi kasus baru yang dilaporkan selama lebih dari dua minggu. Bahkan dengan wabah virus yang cukup besar pada Agustus 2020 di banyak negara, Selandia Baru mencatat relatif sedikit kasus kematian yang terkait virus tersebut.

29 Perdana Menteri Ardern menyatakan dalam pernyataan resminya bahwa pemerintah menganggap ada penularan di dalam komunitas warga. Jika penularan komunitas tidak ditangani pada fase pertama di Selandia Baru, jumlah kasus akan berlipat ganda setiap lima hari. Jika itu terjadi tanpa terkendali, sistem kesehatan akan tergenang, dan puluhan ribu warga Selandia Baru akan meninggal. Saat ini Pemerintah memiliki jendela kesempatan untuk memutus rantai penularan masyarakat, untuk menahan virus, untuk menghentikannya berlipat ganda, dan untuk melindungi warga Selandia Baru dari yang terburuk. Rencananya sederhana. Warga masyarakat dapat menghentikan penyebaran dengan tinggal di rumah dan mengurangi kontak. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak. *New Zealand enters nationwide lockdown in fight against COVID-19.* <https://nzhistory.govt.nz/page/new-zealand-enters-nationwide-lockdown-fight-against-covid-19>. 25 March 2020.

30 *Ibid.*

31 Lihat, New Zealand Ministry of Health, "COVID-19 (novel coronavirus)," <https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus>. diakses 26 January 2021.



INDONESIA

Melihat penanganan pandemi dari ketiga negara di atas sejak perjalanan awal masuknya virus, sebenarnya yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak jauh berbeda. Indonesia merespons dengan kebijakan yang serupa, yakni *lockdown*, yang dikenal dengan istilah PSBB, PPKM dst.³² Secara umum, capaian ketiga negara tersebut sebenarnya juga dialami oleh Indonesia. Namun dalam *trend politik*, meski pemerintah telah berupaya *engage* dalam penanganan pandemi, namun

dilihat oleh sebagian kalangan masih sangat elitis, parsial, dan tidak melibatkan komponen masyarakat sesuai yang mereka harapkan. Kurang efektifnya *social distancing* atau PSBB, dan program Bansos merupakan contoh reaksi berupa dukungan atau resistensi dalam masyarakat.³³

Ketika kasus COVID-19 pertama muncul di Wuhan, insiden tersebut dianggap akibat kegagalan sistem China yang kemudian dikaitkan dengan minimnya informasi, penuh kerahasiaan, dan peraturan dari produk

³² *Terms Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)* merupakan kebijakan pertama dalam merespons COVID-19 berdasarkan **Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2020** terkait pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019. PSBB kemudian digantikan dengan **Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**. Beberapa istilah lain yang diperkenalkan di antaranya **3 M**, yakni: 1. Memakai masker 2. Mencuci tangan 3. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan,. Kemudian istilah **3T**, yaitu: 1. **testing**, 2. **tracing**, dan 3. **treatment**. tujuannya melakukan pengujian, pelacakan, kemudian tindakan pengobatan atau perawatan kepada orang yang terpapar virus COVID-19. Kemudian disosialisasikan **Gerakan 5M**, yakni: 1. memakai masker, 2. mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, 3. menjaga jarak, 4. menjauhi kerumunan, serta 5. membatasi mobilisasi dan interaksi antarwarga.

³³ Suyanto. B., "Resistensi Masyarakat Menyikapi PPKM Darurat" (mediaindonesia.com). Media Indonesia, 13 Juli 2021.

budaya politik *narrow-minded* di bawah kepemimpinan politik kuat. Namun saat skala masalahnya meluas, para pimpinan politik China bergerak cepat, tegas, dan secara sentralistik menegaskan kontrol ketat atas pergerakan dan perilaku penduduk. Apa pun penilaian terhadap sistem politik PKC yang menjalankan negara dengan menerapkan kontrol pergerakan masyarakatnya, dan sebagian penduduk China mungkin tidak merasa nyaman—namun terbiasa hidup dalam otoritarianisme, tampaknya mereka bersedia melakukan pertukaran implisit antara tatanan pranata dan kontrol sosial yang dirasakan memberi manfaat besar. Di China, tidak ada ruang untuk kritik atau “tawar-menawar” dalam konteks pandemi. Hasilnya, kasus terkonfirmasi dengan tingkat penyebaran dan infeksi antarpenduduk drastis menurun, terkendali dengan cepat. Strategi kebijakan yang diterapkan China dalam konteks ini sesuai dengan yang diharapkan.

Sistem politik China tentu berbeda dengan negara-negara yang menerapkan demokrasi, seperti Amerika Serikat, India, dan Indonesia. Prinsip demokrasi mengedepankan *society-oriented*, transparansi, akuntabel dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Prosesnya diketahui publik. Ini terkadang membawa konsekuensi bahwa proses pengambilan keputusan menjadi sulit dan tidak cepat. Meskipun terkesan lambat atau kurang responsif khususnya dalam konteks *decision making process*³⁴ karena ada proses politik³⁵, namun seringkali relatif lebih baik dalam hasil (*output*), karena identifikasi masalah relatif cermat. Hal itu disebabkan adanya proses *checks and balances*

antara eksekutif dan parlemen, serta melibatkan suara masyarakat (NGOs) saat proses input.³⁶

Meskipun demikian, karena keterbukaan menjadi salah satu ciri negara demokratis, tidak jarang muncul distorsi di ruang publik dengan munculnya berita yang bercampur hoax dan misinformasi melalui berbagai *channels* media sosial.

Dilihat dari konsep pendelegasian kekuasaan, antara demokratis (desentralisasi) *vis-à-vis* pemerintah otoriter (sentralistik), seringkali proses pengambilan keputusan di negara demokratis kurang efektif, karena kadang muncul perbedaan otoritas kewenangan yang melibatkan Pusat dan Daerah (TK I, II (kotamadya/kabupaten)). Koordinasi menjadi kurang efektif dan lebih panjang. Sementara dalam model sentralistik, pengambilan keputusan relatif cepat secara langsung oleh Pusat. Tidak ada ruang untuk debat dengan berbagai level dan pranata politik. Kecepatan dalam proses pengambilan keputusan jelas, mengikat dan efektif. Keefektifan pengambilan keputusan di luar kewenangan, lebih ditentukan pada proses identifikasi masalah, alternatif solusi, serta penggunaan infrastruktur dan teknologi. Virus COVID-19 adalah wabah penyakit yang tidak berkompromi, tidak menunggu izin untuk masuk atau menulari pihak lain. Dengan tingkat penyebaran sangat tinggi dan cepat, dibutuhkan kebijakan dengan keputusan yang cepat pula. Pengalaman membuktikan bahwa *lockdown* atau PSBB menjadi salah satu kebijakan utama untuk melokalisir penyebaran.

34 Beberapa referensi mengenai decision making process dalam perspektif politik bisa dilihat pada: Parsons. Wayne. (2006) *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis.*, Nauman, Friedrich. (2002) *Warga Negara sebagai Mitra: Buku Panduan OECD tentang Informasi, Konsultasi, dan Partisipasi Publik dalam Pembuatan Kebijakan.* Organization for Economic Co-operation and Development. (terjemahan), Dye, Thomas R., (1975) *Understanding Public Policy.* New Jersey: Engelwood Cliffs., Hogan. John, Michael Howlett (eds.) (2015). *Policy Paradigms in Theory and Practice: Discourses, Ideas and Anomalies in Public Policy Dynamics.* New York: Palgrave Macmillan., Rich. Andrew (2004) *Think Tanks, Public Policy, and the Politics of Expertise.* Cambridge: Cambridge University Press., Gailmard. Sean. J. Patty. (2018) Giving Advice Versus Making Decisions: Transparency, Information, and Delegation. *Political Science Research and Methods*. The European Political Science Association. Knoepfel. Peter, Corinne Larrue, Frederic Varone, Michael Hill (2007) *Public Policy Analysis.* UK: University of Bristol Press. Gailmard, Sean, and John W. Patty. 2012. 'Formal Models of Bureaucracy'. *Annual Review of Political Science* 15:353-77.

35 Lihat Koehler S. (2019), Process Uncertainty: Political Decision-Making in Lobbying, Political Uncertainty and Policy Outcomes. Palgrave Macmillan.

36 Output dan input merupakan terminologi dalam konteks pengambilan keputusan. Input adalah tuntutan yang muncul di lingkungan, beberapa masukan datang dari para penguasa dan elit dari sistem politik. Ketika mereka dimasukkan ke dalam proses, berubah sebagai output atau keputusan otoritatif. Beberapa dari mereka mungkin kembali ke sistem politik sebagai umpan balik (*feedback* dari masyarakat) seperti perubahan kebijakan PSBB menjadi PPKM, dan dengan demikian dapat mempengaruhi atau mengubah sistem. Ini kali pertama diperkenalkan oleh David Easton dalam, Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life.* New York: John Wiley.

Tulisan ini tidak bermaksud memperbandingkan dari perspektif penanganan COVID-19, namun lebih melihat dari aspek ekonomi beserta dampaknya yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia sebagaimana presentasi yang telah disampaikan di BPK RI.³⁷

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran pada Agustus 2020 naik sebagai imbas pandemi COVID-19. Pada saat itu persentase pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu masing-masing naik sebesar 3,77 persen poin dan 3,42 persen poin. Terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Mereka terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (2,56 juta orang), untuk Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (24,03 juta orang).³⁸

Untuk mengatasi dampak tersebut pemerintah menggelontorkan bantuan sosial, antara lain, bansos untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bansos sembako, bantuan sosial tunai (BST), dan bantuan langsung tunai (BLT). Juga ada subsidi listrik, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, bantuan untuk siswa dan guru, apresiasi bagi pelaku budaya, serta insentif bagi industri media.

Adapun bansos yang disalurkan meliputi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako, bantuan beras bagi peserta PKH bantuan usaha mikro bagi 9,1 juta penerima, bantuan upah bagi 10,7 juta penerima.

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Keuangan,³⁹ Pemerintah memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang terimbas guncangan pandemi sebagai bantalan agar dapat bertahan. Pemerintah juga ingin menjaga daya beli (sisi konsumsi) mereka agar secara makro ekonomi tidak tergerus lebih dalam.

Total dana yang dianggarkan pemerintah untuk perlindungan sosial mencapai Rp203,90 triliun. Anggaran ini terbagi dalam pos anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp37,4 triliun, sembako Rp43,6 triliun, bantuan sosial (bansos) Jabodetabek Rp32,40 triliun, kartu Prakerja Rp20 triliun, diskon listrik untuk 450 VA dan 900 VA Rp6,90 triliun, logistik/pangan/sembako Rp25 triliun, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp31,8 triliun. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan insentif perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp1,3 triliun.

Adapun realisasi hingga 17 Juni 2020 untuk Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Rp19,07 triliun atau 51% dari target alokasi sebesar Rp37,4 triliun untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah 10 juta KPM tersebut telah memenuhi target 100%, atau dengan kata lain, PKH telah diterima seluruhnya oleh KPM. Sedangkan realisasi untuk kartu sembako, telah dibagikan sebesar Rp17,21 triliun atau 39,5% dari target alokasi sebesar Rp43,6 triliun untuk 20 juta KPM. Saat ini, bantuan telah menyentuh 18,8 juta KPM atau 94% dari target penerima. Artinya sudah mendekati 100% penerima bantuan.⁴⁰ Data penerima manfaat bansos pada Data Terpadu Kesejahteraan

37 Materi presentasi WEBINAR BPK RI, 27 April 2021.

38 BPS (2020). Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen.: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>.

39 Kementerian Keuangan RI, Hingga 17 Juni 2020, Penerima PKH dan Diskon Listrik Telah Mencapai 100%. (kemenkeu.go.id).<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/hingga-17-juni-2020-penerima-pkh-dan-diskon-listrik-telah-mencapai-100/> (diakses 2 Juli 2020).

40 Namun penerima bantuan dimaksud menjadi pertanyaan, apakah sbenarnya teah 100% tepat sasaran? Hal ini kontras dengan Kumparan, yang memberitakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah mengungkapkan bahwa program-program bantuan sosial (bansos) pemerintah seperti BLT, subsidi gaji hingga kartu prakerja belum tersalurkan tepat sasaran. Seperti diketahui untuk mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah menggelontorkan berbagai program bantuan. Seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, program Jaminan Pengaman Sosial Bansos Rp 600 ribu, program subsidi gaji untuk pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta, Banpres Produktif untuk UMKM senilai Rp 2,4 juta, subsidi pulsa untuk murid dan guru serta program kartu prakerja. Lihat Kumparan (2020). "BPK Beberkan Banyak Program Bansos Tidak Tepat Sasaran" dalam <https://kumparan.com/kumparan-bisnis/bpk-beberkan-banyak-program-bansos-tidak-tepat-sasaran-1ubFwPwVcir/full> (diakses 16 November 2020).



Sosial (DTKS) Kementerian Sosial terus diperbaharui agar penyaluran berikutnya lebih tepat sasaran.

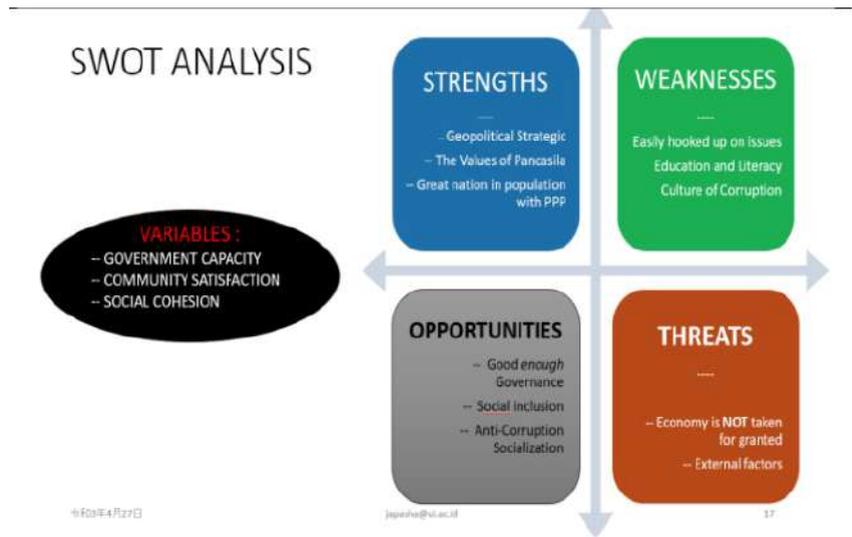
Untuk bantuan tunai non Jabodetabek telah dicairkan sebesar Rp11,47 triliun atau 39,5% dari target sebesar

Rp32,4 triliun untuk 9 juta KPM. Sedangkan untuk bantuan Jabodetabek sebesar Rp0,6 triliun atau 8,9% dari target Rp6,8 triliun untuk 1,9 juta KPM.⁴¹

41 Kementerian Keuangan RI, *op.cit.* (diakses 2 Juli 2020).

THE FORESEEABLE FUTURE SCENARIO

- Make sure on Variables: to implement a good governance within a democratic system
- Empowering the public to enable them to effectively participate in decision making for public interest and to undertake local initiatives;
- Developing and strengthening good governance at the local level;
- Developing the capacity of public and the government at the local level to cooperate in increasing welfare of the people. (SDG Platform)



Sumber : materi presentasi WEBINAR BPK RI , 27 April 2021

Pemerintah beberapa negara memberikan stimulus fiskal demi mengimbangi penurunan pendapatan yang tajam akibat kontraksi ekonomi. Kebijakan ini telah menyebabkan lonjakan utang pemerintah. Sampai dengan Desember 2020, rasio utang pemerintah terhadap PDB di Indonesia adalah 38,5%⁴², Amerika Serikat meningkat dari 84% pada 2019 menjadi 107% tahun 2020. Sementara gejala mirip terjadi di Jerman 59,7%. (38%/2019) Inggris 82,8% (75%/2019),

dan Jepang rasionya 238% dari (154%/2019) dan utang pemerintah tersebut kemungkinan besar berkelanjutan.⁴³

Dengan demikian, pandemi telah membawa dampak secara langsung maupun tidak di sektor ekonomi. Penurunan pendapatan dikombinasikan dengan langkah-langkah bantuan pandemi yang mahal telah meningkatkan utang global sebesar \$20 triliun sejak

42 CNBCIndonesia (2020), "Per Agustus 2020, Rasio Utang RI Capai 34,53% dari PDB". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200907162512-4-184968/per-agustus-2020-rasio-utang-ri-capai-3453-dari-pdb>. Diakses 7 Desember 2020

43 Trading Economics (2020). Country List Government Debt to GDP ([tradingeconomics.com](https://tradingeconomics.com/country-list/government-debt-to-gdp)). <https://tradingeconomics.com/country-list/government-debt-to-gdp> (diakses pada 20 Desember 2020).

kuartal ketiga tahun 2019. Pada akhir tahun 2020, para ekonom memperkirakan utang global akan mencapai \$277 triliun, atau 365% dari PDB dunia. Baik ekonomi negara maju maupun negara berkembang mengalami peningkatan terbesar dalam utang terhadap PDB. Dari sudut yang lebih makro terungkap bahwa tingkat utang meningkat pada kecepatan yang sama di seluruh dunia.

Tabel berikut memperlihatkan bagaimana COVID-19 mempengaruhi ekonomi global dengan utang masing-masing sektor sebagai persentase dari PDB.⁴⁴

Apakah *stimulus* harus dihentikan? Tidak harus, bila dalam konteks penyelamatan. Memang negara tetap menjadi tumpuan terdepan, bukan swasta. Kontur kerangka keseimbangan adalah antara melindungi kesehatan masyarakat dan ekonomi. Ada asumsi bahwa negara menghadapi *trade-off* antara kedua tujuan ini. Apakah asumsi ini benar? (lihat Ilustrasi 2). Menjawab pertanyaan ini bisa melihat perbandingannya dengan kondisi berbagai negara seputar dampak kesehatan dan ekonomi dalam menghadapi pandemi sejauh ini. Apakah negara-negara dengan tingkat kematian yang lebih rendah mengalami penurunan ekonomi yang lebih besar? Juga bisa dengan

membandingkan angka kematian akibat COVID-19 berdasarkan perbandingan rasio utang terhadap PDB yang dianggap memberatkan dan keliru sehingga utang meningkat. Cara lain adalah dengan melihat kemungkinan sebaliknya: negara-negara yang berhasil melindungi kesehatan penduduknya saat pandemi umumnya juga melindungi perekonomiannya.⁴⁵

STIMULUS FISKAL

Program paket pemulihan ekonomi nasional terus disempurnakan dan mencapai Rp 695,2 triliun.⁴⁶ Paket fiskal tersebut terdiri dari: (i) dukungan kepada sektor perawatan kesehatan untuk meningkatkan kapasitas pengujian dan pengobatan untuk kasus COVID-19; (ii) peningkatan manfaat dan cakupan yang lebih luas dari skema bantuan sosial yang ada untuk rumah tangga berpenghasilan rendah seperti bantuan makanan, transfer tunai bersyarat, dan subsidi listrik; (iii) perluasan tunjangan pengangguran, termasuk bagi pekerja di sektor informal, (iv) keringanan pajak, termasuk untuk sektor pariwisata dan individu (dengan pagu pendapatan); dan lain-lain.

44 Marcus. L., Chart: Debt-to-GDP Continues to Rise Around the World. <https://www.visualcapitalist.com/debt-to-gdp-continues-to-rise-around-world/>

45 Dalam dinamika proses pengambilan keputusan politik, khususnya pada situasi sulit atau crucial time, para decision makers biasanya dihadapkan pada dilemma, mengambil satu keputusan dengan resiko yang paling sederhana atau kecil. Dalam ilmu politik ekonomi, dikenal satu teori yakni Teori pilihan rasional (**rational choice theory**). Teori pilihan rasional dibangun dari dasar pemahaman individu atau kelompok pengambil keputusan (negara) yang berorientasi tujuan dari preferensi rasional. Teori ini mendapat manfaat dari formulasi asumsinya yang sangat tepat. Rasionalitas umumnya didefinisikan bahwa terdapat preferensi lengkap dan transitif. Dari preferensi lengkap dan transitif, memungkinkan untuk memproyeksikan risiko. Artinya, fungsi utilitas dapat mencerminkan penerimaan risiko, netralitas risiko, atau penghindaran risiko. Pada titik ini, agregasi preferensi individu terjadi dalam pilihan sosial dan model teori permainan. Teorema Arrow adalah hasil yang paling terkenal dalam teori pilihan sosial. Arrow menunjukkan bahwa rasionalitas preferensi tidak dapat dengan mudah dipertahankan pada tingkat kelompok ketika preferensi dimaksud itu dikumpulkan. Artinya, rasionalitas tingkat individu tidak menjamin rasionalitas tingkat kelompok. Dengan kata lain, irasionalitas pada tingkat kelompok tidak dapat membahayakan rasionalitas pada tingkat individu. Contoh, kebijakan PSBB dapat disimulasikan dalam teori permainan, dari masalah tindakan kolektif menyoroti bagaimana keputusan rasional secara individual/kelompok pengambil keputusan dapat mengarah pada hasil yang kurang optimal. Lihat beberapa teori dimaksud seperti; Ainsworth. S. H. 2021. "Rational Choice Theory in Political Decision Making". Oxford University Press. Petracca. M. P., (2091) *The Rational Choice Approach to Politics: A Challenge to Democratic Theory*. The Review of Politics Vol. 53, No. 2 (Spring, 1991), pp. 289-319 (31 pages) Published By: Cambridge University Press. Eusepi.G., Alan P. Hamlin (2006), *Beyond Conventional Economics: The Limits of Rational Behaviour in Political Decision Making*. UK: Edward Elgar Cheltenham, UK Northampton. Coleman. James.S., Farraro, J (1992). *Rational Choice Theory Advocacy And Critique*. Sage Publication Inc. Pp. 158-261.

46 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, anggaran penanganan pandemi virus corona (COVID-19) dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dalam akun instagramnya @smindrawati bahwa penanganan pandemi dan program PEN bakal memakan anggaran Rp 905,2 triliun. Dari jumlah Rp 695,2 triliun tersebut rinciannya, sebesar Rp 87,55 triliun untuk anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun, sebesar Rp 123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM, pembiayaan korporasi menjadi Rp 53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun-Lihat, Fauzia.

M.Kompas.com.2020"KemenkeuTegaskanAnggaranPenangananCOVID-19Rp695,2Triliun",<https://money.kompas.com/read/2020/06/20/100200226/kemenkeu-tegaskan-anggaran-penanganan-covid-19-rp-695-2-triliun>.



Merujuk data BPS (2020), sampai kuartal III 2020, tercatat jumlah pengangguran pada Agustus 2020 menjadi sebanyak 9,77 juta orang atau naik sebesar 2,67 juta orang sebagai imbas dari pandemi COVID-19. Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020. Berarti jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020, dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.⁴⁷

Pemerintah merespons dengan dana besar untuk memberikan insentif Bantuan Sosial sampai Kartu Pra Kerja, meski yang terakhir tidak diarahkan secara khusus dalam meng-cover mereka. Adapun bantuan sosial yang telah diberikan untuk mengatasi dampak COVID-19, antara lain, bansos untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bansos sembako, bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai (BLT), subsidi listrik, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, bantuan untuk siswa dan guru, apresiasi bagi pelaku budaya, dan

insentif bagi industri media. Sementara kebijakan Bansos yang disalurkan meliputi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako, bantuan beras bagi peserta PKH bantuan usaha mikro bagi 9,1 juta penerima, bantuan upah bagi 10,7 juta penerima. Dengan penggelontoran dana bansos, pemerintah telah meringankan beban warga masyarakat.⁴⁸

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Virus corona Covid 19 telah menyebar dan bermutasi ke seluruh dunia mengikuti lintasan yang sulit dihentikan. Kebijakan pemerintah diperlukan demi penanganan virus dengan memperhatikan tiga hal utama, yakni Kesehatan, Kemanusiaan dan Sosial ekonomi (KKS). Skenario kebijakan lanjutan pro-KKS perlu direncanakan dengan estimasi terukur, sesuai kemampuan negara.

47 BPS 2020. "Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen." Badan Pusat Statistik (bps.go.id) <https://www.bps.go.id/press-release/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-September-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html> (diakses pada 15 Februari 2021).

48 ANTARA News (2020), Pemerintah ringankan beban rakyat akibat pandemi lewat banyak bantuan <https://www.antaranews.com/berita/1793529/pemerintah-ringankan-beban-rakyat-akibat-pandemi-lewat-banyak-bantuan>. Diakses 20 Oktober 2020.

REKOMENDASI:

Evaluasi dari Satgas COVID-19 terhadap penanganan terpadu perlu dilakukan, ditinjau dan diperbarui pada setiap triwulan. Evaluasi dilakukan berdasarkan asesmen *feed-back* masyarakat terhadap implementasi kebijakan penanganan COVID-19.

Komunikasi dan koordinasi antara Pusat dan Daerah (Tk.1 dan II) perlu ditingkatkan terkait peran dan tanggung jawab sehingga proses pengambilan keputusan dan respons kebijakan terhadap kejadian *urgent* dapat dilakukan dengan terukur dan *acceptable* tanpa *overlap*.

Kejadian *urgent* dimaksud (poin 2) adalah saat terjadi lonjakan secara tiba-tiba di satu wilayah/daerah akibat munculnya varian baru yang berdampak serius sehingga dibutuhkan keputusan cepat seperti penguncian dan/atau persiapan rumah sakit, sarana dan tenaga medis, yang merupakan komponen inti dari respons terhadap varian virus COVID-19.

Sejauh ini, tingkat pengendalian paling efektif terhadap pandemi COVID-19 adalah dengan penerapan *social distancing*, dan masyarakat telah terkondisi. Namun untuk hidup dengan COVID-19, garis pertahanan utama

adalah vaksinasi, bukan pembatasan aktivitas secara massif (penguncian). Oleh karena itu, pemerintah secara berkesinambungan melanjutkan vaksinasi—termasuk *booster* vaksin COVID-19 (ketiga dst.) secara merata kepada semua penduduk.

Dalam sektor ekonomi keuangan, diperlukan koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam pengelolaan keuangan khususnya alokasi anggaran pemerintah yang diprioritaskan bagi penanganan varian “*new-covid*” (omicron dsb) dengan memastikan bahwa negara memiliki ruang fiskal untuk membiayai kebijakan sosial, berkaitan dengan Kesehatan, Kemanusiaan, dan Sosial ekonomi (KKS). Pemerintah memastikan sistem perlindungan sosial (*social safety net*) yang berkelanjutan.

Dalam menggerakkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terpukul akibat COVID-19, pemerintah perlu tetap memberikan stimulus bagi KKS disamping pembiayaan pemulihan ekonomi. Pemberian stimulus yang ekspansif akan sangat membantu memulihkan ekonomi nasional dan menaikkan *aggregate demand*, dengan tetap memperhatikan disiplin anggaran dan rasio utang pemerintah terhadap PDB.

REFERENSI

- Ainsworth, S. H. (2021). “*Rational Choice Theory in Political Decision Making*”. Oxford University Press.
- Coleman, James.S., Farraro, J (1992). *Rational Choice Theory Advocacy And Critique*. Sage Publication Inc.
- Australian Government (2020a).
- (<https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert>). Diakses 21 Maret 2020.
- Australian Government (2020b).
- <https://www.pmc.gov.au/news-centre/government/coagbecomes-national-cabinet>. Diakses 2 Juni 2020.
- CNN Indonesia (2020). “Bertambah 4.402 Kasus, Positif Corona Jadi 1.641.194”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210425122843-20-634457/bertambah-4402-kasus-positif-corona-jadi-1641194>. Diakses 25 April 2021.
- CNN Indonesia (2021). “Kematian COVID-19 Indonesia Masih di Puncak Dunia” <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210730015209-106-674075/kematian-COVID-19-indonesia-masih-di-puncak-dunia>. Diakses pada 30 Juli 2021.
- Eusepi.G., Alan P. Hamlin (2006), *Beyond Conventional Economics: The Limits of Rational Behaviour in Political Decision Making*. UK: Edward Elgar Cheltenham, UK Northampton.
- Gailmard, Sean. J. Patty. (2018) *Giving Advice Versus Making Decisions: Transparency, Information, and Delegation. Political Science Research and Methods*. The European Political Science Association.
- Hill, Michael and Peter Hupe (2012) *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. London: SAGE Publications.
- Hogan, John, Michael Howlett (eds.) (2015). *Policy Paradigms in Theory and Practice: Discourses, Ideas and Anomalies in Public Policy Dynamics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Javier, F. “Pecah Rekor Kematian COVID-19 di Juli 2021”. <https://data.tempo.co/data/1176/pecah-rekor-kematian-COVID-19> diakses 23 Juli 2021.

- Kanitkar, Tejal (2020). "The COVID-19 lockdown in India: Impacts on the economy and the power sector" in Journal of Global Transitions vol.2 DOI:10.1016/j.glt.2020.07.005. Karnon, J. (2020). A Simple Decision Analysis of a Mandatory Lockdown Response to the COVID-19 Pandemic." Journal: Applied Health Economics and Health Policy. DOI: 10.1007/s40258-020-00581-w. April, 2020.
- Kementerian Keuangan RI, Hingga 17 Juni 2020, Penerima PKH dan Diskon Listrik Telah Mencapai 100% (kemenkeu.go.id). <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/hingga-17-juni-2020-penerima-pkh-dan-diskon-listrik-telah-mencapai-100/> (diakses 2 Juli 2020).
- Koehler S. (2019) Process Uncertainty: Political Decision-Making. In: Lobbying, Political Uncertainty and Policy Outcomes. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97055-4_3
- Kompas (2020). BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona. (diakses pada (2 Maret 2020).
- Knoepfel, Peter, Corinne Larrue, Frederic Varone, Michael Hill (2007) *Public Policy Analysis*. UK: University of Bristol Press.
- Lau, H., Khosrawipour, Veria, Kocbach, Piotr, Mikolajczyk, Agata. 2020. "The positive impact of lockdown in Wuhan on containing the COVID-19 outbreak in China" Journal of Travel Medicine (March 2020).
- Marcus. L. (2020) *Chart: Debt-to-GDP Continues to Rise Around the World*. <https://www.visualcapitalist.com/debt-to-gdp-continues-to-rise-around-world/>.
- Melnick, E. R, Ioannidis. P.A (2020). "Should governments continue lockdown to slow the spread of COVID-19?" BMJ Journal. DOI: 10.1136/bmj.m1924.
- Nauman, Friedrich. (2002) *Warga Negara sebagai Mitra: Buku Panduan OECD tentang Informasi, Konsultasi, dan Partisipasi Publik dalam Pembuatan Kebijakan*. Organization for Economic Co-operation and Development. (terjemahan).
- New Zealand Ministry of Health, "COVID-19 (novel coronavirus)," <https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/COVID-19-novel-coronavirus>. diakses 26 January 2021.
- New Zealand Ministry of Health (2020)
- <https://www.newshub.co.nz/home/new-zealand/2020/02/new-zealand-to-ban-travellers-from-china-to-protect-against-coronavirus.html> (diakses pada 5 Maret 2020)
- New Zealand Ministry of Health. (2021) "COVID-19 (novel coronavirus)," <https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/COVID-19-novel-coronavirus>. diakses 26 January 2021.
- OECD. (2020).) *Warga Negara sebagai Mitra: Buku Panduan OECD tentang Informasi, Konsultasi, dan Partisipasi Publik dalam Pembuatan Kebijakan*. Organization for Economic Co-operation and Development. (terjemahan).
- Pasha, Julian A., Panji Anugrah, Syahrul Hidayat, "Pemikiran FISIP UI tentang Masyarakat dan Negara di Era Pandemi" dalam POLICY BRIEF Edisi 2- 2020 FISIP UI. (November 2020).
- Parsons. Wayne. (2006) *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing.
- Paulk. D. (2020). "The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19. <http://www.sixthtone.com/news/1005213/105-people-were-infected-with-COVID-19-by-dec.-31%2C-study-says>).
- Petracca. M. P., (1991) *The Rational Choice Approach to Politics: A Challenge to Democratic Theory*. The Review of Politics Vol. 53, No. 2 (Spring, 1991), pp. 289-319 Cambridge University Press.
- Priyanka, P. (2020). "COVID-19: India imposes lockdown for 21 days and cases rise " in Journal BMJ (*British Medical Journal*) London, United Kingdom. BMA House Publisher. 2020; 368:m1251 doi: 10.1136/bmj.m1251 (Published 26 March 2020).
- Ren, Xuefei (2020). "Pandemic and Lockdown: a territorial approach to COVID-19 in China, Italy and the United States" in Journal of Eurasian Geography and Economics. DOI: 10.1080/15387216.2020.1762103
- Reuters. (2020). <https://www.reuters.com/article/us-china-health-who-idUSKBN1ZM1G9> Rich. Andrew (2004) *Think Tanks, Public Policy, and the Politics of Expertise*. Cambridge University Press.
- Sorongan ,T.P., CNBC Indonesia (2021), RI Jadi Negara Pemimpin Kasus Corona Terbanyak Dunia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210708071250-4-259166/ri-jadi-negara-pemimpin-kasus-corona-terbanyak-dunia>.
- Stobart. A., Stephen D. (2021). "Australia's Response to COVID-19". In Journal Health Economics-Policy-and-Law. <https://www.cambridge.org/core/journals/health-economics-policy-and-law/article/abs/australias-response-to-covid19>. Health Economics, Policy and Law, First View, pp. 1 - 12.
- DOI: <https://doi.org/10.1017/S1744133121000244>.
- Suyanto. B. 2021 "Resistensi Masyarakat PPKM Darurat" Media Indonesia, 13 Juli 2021.



- Wisnoe, M. "Data Terkini Korban Virus Corona di Indonesia pada Juli 2021", Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-virus-corona-di-indonesia-pada-juli-2021.html>. Diakses pada 31 Juli 2020.
- WHO. (2020a) <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2020-DON229>. (diakses pada 5 Januari 2020)
- WHO. (2020b). <https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---COVID-19> (diakses 20 April 2020)
- Worldometers Global health statistics in real time. (diakses 7 Juli 2021)
- Wu, J., Kathy, L. Gabriel M. (2020), "Nowcasting and Forecasting the Potential Domestic And International Spread of the 2019 -nCoV Outbreak Originating in Wuhan, China: a Modelling Study" dalam The Lancet Journal, Vol. 395 Number 10225 p659-754, e41. January 31, 2020. DOI:[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30260-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30260-9).
- Xuefei Ren (2020) Pandemic and lockdown: a territorial approach to COVID-19 in
- China, Italy and the United States, Eurasian Geography and Economics, 61:4-5, 423-434, DOI: 10.1080/15387216.2020.1762103
- Zhu, D., Cao, S. Decision-Making and Risk Sources: Key to Source Governance for Social Stability. Chin. Polit. Sci. Rev. 5, 95-110 (2020). <https://doi.org/10.1007/s41111-019-00126-0>



MENATA POLITIK INDONESIA PASCA PANDEMI

Yunarto Wijaya

Direktur Eksekutif Charta Politika

Pandemi Covid-19 mengguncang tatanan global, dari mulai ekonomi, kesehatan hingga politik. Dampak negatifnya hingga kini masih terus dimitigasi. Pada saat bersamaan, pandemi juga dilihat sebagai peluang membentuk tatanan dunia baru yang lebih adil, demokratis dan berkelanjutan.

Dalam konteks politik Indonesia, harapan yang sama juga sempat mencuat. Sekurangnya, dalam hal politik elektoral, preferensi pada pemimpin lebih kuat tariknya pada faktor kompetensi dan integritas alih-alih pada faktor personalitas, tampilan fisik, kekayaan dan atau apalagi garis keturunan.

Secara keseluruhan, ada harapan pandemi akan mendorong tumbuhnya era politik baru, di mana faktor teknologi informasi diharapkan akan menjadi pendorong transparansi, partisipasi dan juga kolaborasi pada berbagai segi kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia.

Masalahnya, situasi empirisnya mengindikasikan

arah yang berlawanan. Demokrasi di Indonesia terus didorong mundur. Situasi kegentingan di era pandemi Covid-19 meneguhkan kecenderungan yang sudah berjejak sejak beberapa tahun terakhir ini: kebebasan sipil yang dipreteli, kepemiluan yang dibonsai, pengedepanan pembangunanisme di atas kebebasan, makin terpinggirnnya publik, dan makin melenggangnya para oligarki. Padatnya, demokrasi sedang defisit (Aspinall dan Mietzner, 2019; Fukuoka, 2013; Fukuoka dan Djani, 2016); Fearly, 2020, Power, 2018; Mietze, 2019. Warbuton, 2017; Wijaya, 2019).

Indikator kebebasan yang dilansir Freedom House mengonfirmasi situasi kebebasan yang terlemahkan sejak 2014. Status kebebasan Indonesia sejak saat itu adalah tidak sepenuhnya bebas (*partly free*). Indikator demokrasi dari Economic Intelligence Unit mengkonfirmasi adanya perlemahan demokrasi sejak 2015. EIU menempatkan Indonesia sebagai negara dengan status demokrasi yang rapuh (*flwan democracy*) (lihat Bagan 1).

Bagan 1. Indeks Demokrasi dan Kebebasan Indonesia



Tahun	status	score	Hak Politik*	*Kebebasan Sipil
2009	Free		2	3
2010	Free		2	3
2011	Free		2	3
2012	Free		2	3
2013	Free		2	3
2014	partly free	64	2	4
2015	partly free	64	2	4
2016	partly free	65	2	4
2017	partly free	65	2	4
2018	partly free	64	2	4
2019	partly free	62	2	4
2020	partly free	61	2	4
2021	partly free	59	2	4

* skor 1-7, 1 paling bebas, 7 paling tidak bebas

Pandemi dan Demokrasi

Keberhasilan dan kegagalan memitigasi pandemi Covid-19 menjadi medan wacana baru untuk mempertanyakan efektivitas rezim demokrasi. Atau sekurang-kurangnya, pandemi memberi rasionalisasi agar demokrasi untuk sementara waktu menepi dahulu. Pokok gagasan dari wacana ini: Pendekatan represif (otoritarian) lebih efektif untuk memitigasi pandemi. Penilaian ini merujuk pada unjuk kinerja negara-negara nondemokratis seperti Vietnam dan China. Namun, benarkah demikian?

Sejumlah studi menunjukkan, jenis rezim bukan

faktor yang signifikan jadi pembeda keberhasilan memitigasi pandemi Covid-19. Fenner (2020), umpamanya, menunjukkan kapasitas negara lebih berperan ketimbang faktor jenis rezim. Studinya juga menginformasikan keluaran yang terbaik berasal dari kecepatan dan sikap proaktif pemimpin dalam merespons pandemi.

Studi Mao (2021) menegaskan bahwa rezim otoritarian maupun demokrasi dapat sama-sama efektif dalam memitigasi Covid-19 dengan menggunakan kapasitas negara yang berbeda. Perbedaan yang signifikan terletak pada kapasitas koersif. Negara demokratis



menghadapi masalah kelembagaan (hubungan pemerintah pusat dan daerah, relasi masyarakat dengan negara). Menurut Mao, tiap negara seharusnya memilih metodenya sendiri berdasarkan pengaturan kelembagaannya untuk meningkatkan kapasitas negara dalam merespons krisis.

Seturut hasil studinya, Cassan dan Van Steenvoort (2021) menegaskan dalam hal tingkat kematian akibat Covid-19, faktor efisiensi otorisasi (asumsi otoritarian lebih baik) maupun bias otorisasi (asumsi otoritarian *under-report*) tidak terbukti jadi faktor pembeda dengan negara dengan rezim demokrasi.

Faktor yang lebih penting adalah tingkat kerentanan populasi terpapar penyakit dan kontrol wilayah secara geografis. Studi Frey, Presidente dan Chen (2020) juga menunjukkan bahwa rezim otoritarian cenderung menerapkan *lock down* yang lebih ketat. Namun, kurang efektif dalam mengurangi mobilitas. Ketimbang tipe rezim, negara-negara yang berkarakter kolektif lebih mampu meningkatkan koordinasi memitigasi Covid-19 dalam hal mengurangi mobilitas dan perjalanan ketimbang negara berkarakter individualis.

Studi Annaka (2021) menunjukkan negara otoritarian cenderung lebih sedikit jumlah kematiannya akibat Covid-19. Namun, ini bukan karena mereka melakukan tindakan yang lebih ketat. Keunggulan negara-negara otoritarian lebih karena mereka lebih mampu memobilisasi tingkat tes.

Mitigasi Covid-19 untuk sebagian memang mengundang kecemasan, terutama ketika dibenturkan dengan nilai-nilai kebebasan individu. Temuan Krasted dan Leonard (2021) menunjukkan variasi sikap antarnegara-negara demokrasi di Eropa.

Secara umum, proporsi masyarakat di negara-negara Eropa yang disurvei tak mencurigai motif pemerintah mereka masing-masing ketika menerapkan kebijakan yang bersifat restriktif, terkecuali di Bulgaria yang tingkat kepercayaannya terhadap motif pemerintah hanya 50% dan Polandia bahkan rendah lagi (38%). Variasi yang sama juga ditemukan dalam kategori

perasaan merasa bebas. Proporsi masyarakat di Jerman dan Austria yang merasa tidak bebas mencapai masing-masing 49% dan 42%, sementara negara lainnya seperti Belanda, Swedia, Polandia, Hungaria rata-rata hanya di bawah 30%.

Krasted dan Leonard dalam kesimpulannya menyebut ada tiga pola dasar dari apa yang disebutnya sebagai politik pascapandemi. *Pertama*, model Polandia. Di negeri ini, pandemi meneguhkan polarisasi. Masyarakat di negeri ini umumnya mencurigai pemerintah punya agenda untuk mengontrol kebebasan individu melalui penerapan kebijakan restriktif. *Kedua*, model Jerman. Di negeri yang menganut demokrasi konsensus ini, mitigasi yang bersifat restriktif diterima tapi pada saat yang bersamaan, individu di negeri ini justru paling merasa tidak bebas relatif terhadap negara-negara Eropa lainnya. *Ketiga*, model Perancis. Di satu sisi, pendukung Macron yang liberal justru mendukung kebijakan yang bersifat intervensionis, sementara cukup besar pendukung LePenn yang menolak kebijakan restriktif karena mencurigai hal tersebut dimaksudkan untuk mengontrol masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya variasi sikap dalam menerima kebijakan restriktif di negara-negara yang sama-sama bertipe rezim demokrasi.

Jika merujuk temuan Eangler dkk (2021), variasi respons di antara negara-negara demokrasi ditentukan oleh faktor institusional. Persisnya, semakin kuat prinsip-prinsip demokrasi diterapkan sejak sebelum pandemi, semakin cenderung negara tersebut mengambil kebijakan yang moderat.

Sebaliknya, di negara-negara yang punya sejarah dan atau sedang mengalami kemunduran demokrasi, ada kecenderungan para pemimpinnya memanfaatkan momentum ini untuk mengonsentrasikan kekuasaannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kualitas demokrasi yang tinggi cenderung akan melindungi kebebasan individu warganya, meski ini harga yang harus dibayar adalah melemahnya kemampuan negara dalam membendung penyebaran virus secara cepat pada akhir gelombang pandemi.

Meski begitu, dalam jangka menengah dan panjang, negara-negara yang memiliki tradisi demokrasi yang kuat sangat mungkin lebih mampu mencegah penyebaran Covid-19.

Penerimaan terhadap kebijakan mitigasi terhadap pandemi Covid-19, termasuk kebijakan restriktif seperti *lock down*, pada level individu dipengaruhi faktor kepercayaan terhadap pemimpin. Tingkat kepercayaan terhadap pemimpin nasional akan memengaruhi individu dalam mengevaluasi kinerja. Namun, faktor kepercayaan ini akan anjlok manakala kebijakan yang diambil pemimpin nasional berbeda dengan kebijakan yang diterapkan banyak negara lainnya (Altiparmakis dkk, 2021).

Dalam kasus di Inggris, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah sudah rendah sejak sebelum pandemi. Salah satunya karena faktor *brexit*. Pilihan Boris Johnson menerapkan kebijakan *lock down* pada awal pandemi melentingkan kepercayaan publik terhadap pemerintahannya. Namun, seiring dengan terkuaknya skandal dan ketidakmampuan mengelola mitigasi membuat faktor kepercayaan kembali rontok.

Dengan kata lain, ada faktor kontekstual yang memengaruhi kepercayaan terhadap pemimpin nasional. Kepercayaan pada sistem politik dan pada pemimpin nasional khususnya akan memengaruhi efektivitas tindak komunikasi publik (Davies dkk, 2021).

Selain faktor kepercayaan, ideologi juga tak bisa diabaikan. Dalam kasus di Amerika Serikat, misalnya, terdapat kecenderungan mereka yang mendaku sebagai konservatif lebih enggan mendukung kebijakan preventif seperti menggunakan masker dibandingkan dengan mereka yang mendaku diri sebagai liberal. Meski begitu, perbedaan sikap ini termediasi oleh pesan-pesan komunikasi yang bersifat manfaat untuk kepentingan diri sendiri ketimbang pesan-pesan yang mengedepankan manfaat untuk orang lain. (Cakanlar, Trudel & White, 2020).

Sikap partisan juga meneguhkan perbedaan tersebut. Pendukung Republik cenderung mengadopsi pesan-pesan politik para elit politik partainya yang

meremehkan risiko pandemi dan juga keengganan terhadap kebijakan preventif (Kerr, Costas dan van der Linden, 2021).

Meski demikian, studi Hardy dkk (2021) di Amerika Serikat menunjukkan adanya persamaan kecemasan, ketidakpercayaan dan pihak yang disalahkan di antara individu-individu yang berbeda spektrum politiknya. Individu-individu ini sama-sama cemas terhadap pemerintah federal dan potensi salah penanganan pandemi Covid-19. Mereka sama-sama memiliki rasa tak percaya.

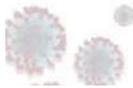
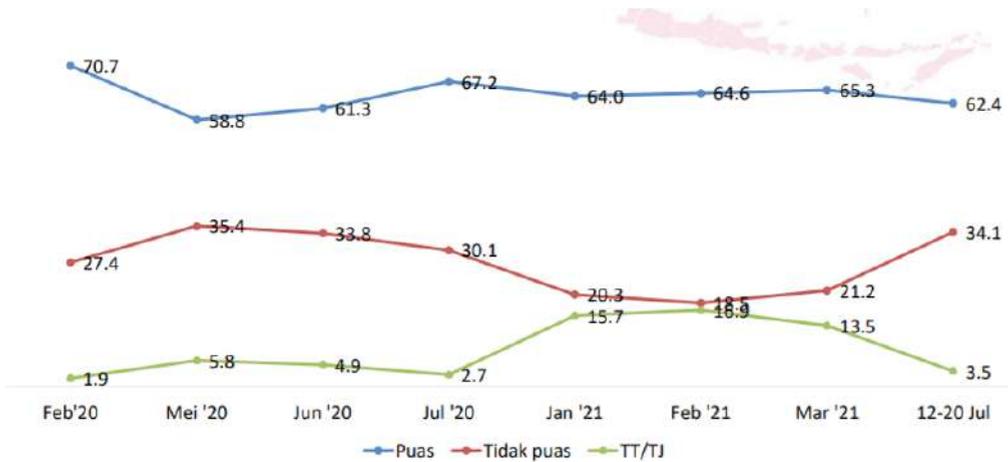
Bedanya, kalangan yang mendaku diri kiri, umumnya tidak percaya terhadap Donald Trump, pemimpin politik dan korporasi besar, tapi percaya pada ilmuwan. Sebaliknya, mereka yang mendaku sebagai kanan umumnya tak percaya pada individu, institusi maupun pemerintah. Mereka juga sama-sama punya pihak yang dipersalahkan atau dituding sebagai penyebab pandemi Covid-19. Dibandingkan dengan yang mendaku sebagai kiri, mereka yang mendaku sebagai kanan lebih menimpakan kesalahan adanya pandemi ini pada (Pemerintahan) China. Sebaliknya, yang kiri lebih cenderung menyalahkan Trump dan pemerintah.

Pengalaman Indonesia

Sebagaimana dialami banyak pemerintahan di belahan dunia lain, pandemi Covid-19 tak pelak membuat anjlok tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintahan Jokowi. Pada Februari 2020, tingkat kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi masih ada di level 70,7%. Pada Mei 2020, hanya 58,3%. Namun setelah itu, trennya mengalami peningkatan meski belum menyamai kembali posisi pra-pandemi.

Pada survei Charta Politika terakhir pada Juli 2021, tingkat kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi ada di posisi 62,4% Meski demikian terdapat indikasi meningkatnya kembali proporsi masyarakat yang tidak puas. Pada survei Juli tersebut, posisinya di 34,1% atau mendekati posisi Mei 2020 yang 35,4% (Lihat Bagan 2).

Bagan 2. Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf



Meskipun masih berada di atas 60%, terdapat kecenderungan penurunan tingkat kepuasan kinerja pemerintah dibandingkan dengan survei periode sebelumnya.

Tingkat kepuasan kinerja yang masih positif (di atas 50%) untuk sebagian ditopang oleh sikap partisan dan utamanya pesona terhadap Jokowi. Sikap partisan dalam kasus Indonesia lebih terkait dengan favorabilitas pada capres-cawapres yang diusung dalam pilpres alih-alih bertumpu sentimen partai politik ataupun aliran politik.

Berdasarkan tabulasi silang, terlihat tingkat kepuasan terhadap kinerja terhadap Pemerintahan Jokowi menyerupai distribusi hasil Pilpres 2019. Di provinsi-provinsi seperti DKI-Banten, Jabar ataupun Sumatera, tingkat kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi hanya di kisaran 50% lebih sedikit. Bahkan di Kalimantan, sentimennya sudah negatif, yakni hanya 47,7 yang merasa puas terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi (Lihat Bagan 3).

Bagan 3. Distribusi Kepuasan terhadap Kinerja Pemerintah Menurut Wilayah

Kategori	Base Line	Puas	Tidak puas	TT/TJ	Total
		62.4	34.1	3.5	
WILAYAH					
Sumatera	20.8	55.2	43.2	1.6	100.0
DKI Jakarta & Banten	8.3	58.0	37.0	5.0	100.0
Jawa Barat	17.5	58.1	41.0	1.0	100.0
Jawa Tengah & DI Yogyakarta	16.7	73.0	26.5	0.5	100.0
Jawa Timur	15.8	72.1	23.2	4.7	100.0
Bali, NTB & NTT	5.0	71.7	16.7	11.7	100.0
Kalimantan	5.4	47.7	49.2	3.1	100.0
Sulawesi	7.1	65.9	27.1	7.1	100.0
Maluku & Papua	3.3	45.0	40.0	15.0	100.0

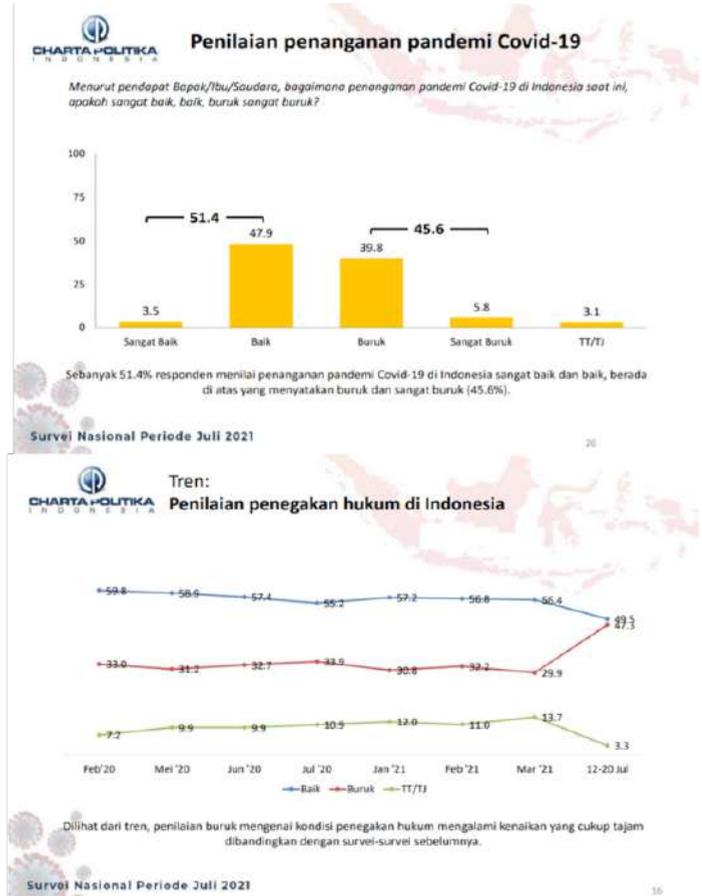
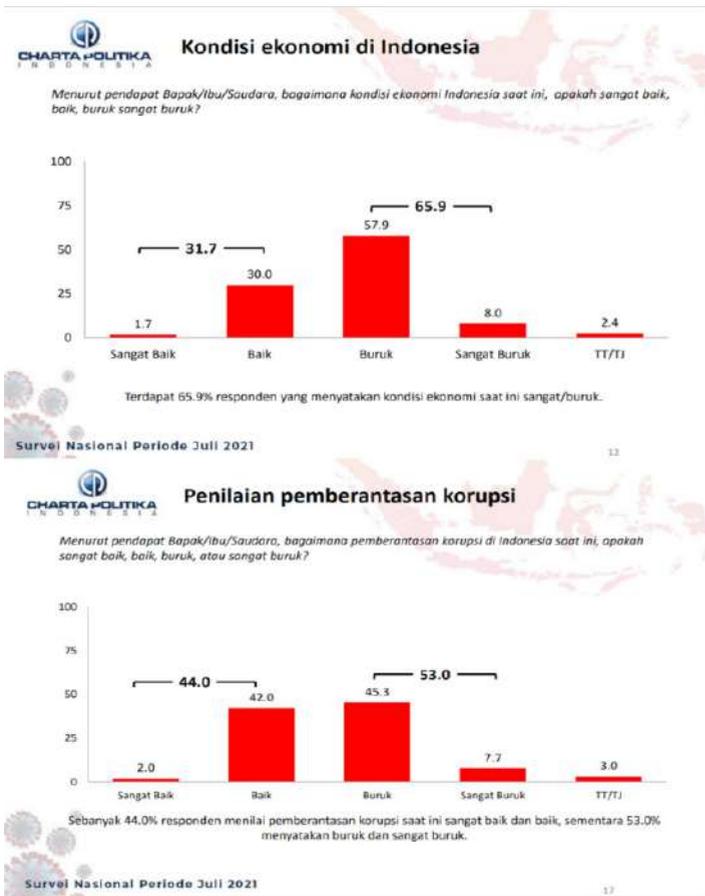


Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah tertinggi berada di wilayah Jawa Tengah & DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali, NTB & NTT. Sementara tingkat kepuasan terendah berada di wilayah Maluku & Papua, Kalimantan, dan Sumatera.

Kekuatan figuritas ini yang bisa menjelaskan situasi yang sebenarnya asimetris karena kinerja sektoral yang dipersepsi tidak bagus, tetapi penilaian umum terhadap kinerja pemerintah tetap tinggi. Penilaian terhadap kinerja penanganan Covid-19 hanya 51,4%. Tak hanya itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja di bidang ekonomi hanya 31,7%. Dalam hal penanganan pemberantasan korupsi hanya 44% yang menilai kinerja Pemerintahan Jokowi baik (baik dan sangat baik). Demikian juga di bidang hukum, hanya 49,5% yang menilai kinerja pemerintah baik (Lihat Bagan 4).

Faktor penopang lain yang tak boleh dimungkiri adalah disiplin parpol pengusung pemerintah di parlemen. Disiplin ini bukan berarti tak ada riak-riak. Namun, secara keseluruhan, agenda-agenda Pemerintahan Jokowi relatif lancar. Keberhasilan meloloskan UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi sebuah *legacy* tersendiri. Namun, yang juga harus diberi catatan, perlawanan terhadap kedua UU tersebut, terutama yang pertama, justru banyak berasal dari komponen masyarakat sipil.

Bagan 4. Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah pada Beberapa Bidang



Dan, inilah paradoksnya. Di satu sisi, pemerintahan koalisi di sistem presidensial bukanlah hal yang mudah. Pengalaman SBY di periode kedua menunjukkan rendahnya disiplin partai pengusung yang menyebabkan pemerintahannya beberapa kali mengalami guncangan politik. Namun, tanpa disiplin koalisi, pemerintah akan sulit menjalankan kebijakannya.

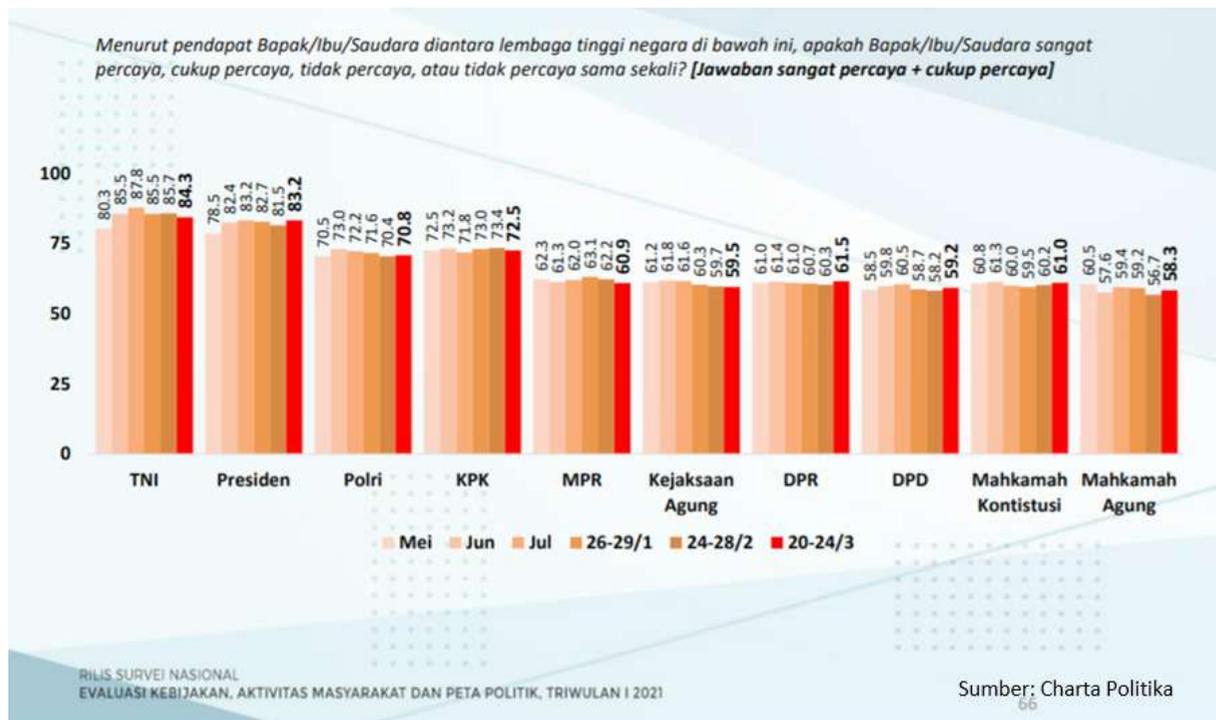
Di sisi lain, disiplin berkoalisi di parlemen yang kuat menghasilkan konsekuensi yang tak diduga: Melemahnya oposisi. Atau sekurang-kurangnya, pengawasan kerja terhadap menteri menjadi lemah. Ketika oposisi di parlemen tak bekerja efektif, fungsi mereka diambil alih komponen masyarakat sipil.

Terkait dengan itu, masyarakat sipil sendiri cenderung terbelah sebagai lanjutan Pilpres 2014, Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. Kontestasi antar masyarakat sipil ini berlangsung sengit di ruang maya. Meski begitu, kedua kubu punya semacam kesamaan agenda: Sama-sama mendukung setiap kebijakan atau tindakan penyimpangan demokrasi jika itu ditujukan kepada kubu lawan. Namun, dalam kasus mitigasi Covid-19, ada

kecenderungan peluberan. Kubu propemerintah dan anti-Jokowi kini cenderung sama-sama kurang menyukai kebijakan restriktif dalam memitigasi Covid-19, meski dengan alasan-alasan yang berbeda.

Padatny, pandemi Covid-19 memang mengguncang berbagai segi kehidupan masyarakat. Penilaian terhadap kinerja pemerintah ikut merosot. Namun, stabilitas politik masih terjaga karena tingkat kepercayaan publik terhadap presiden masih sangat tinggi. Pada survei Maret 2021, tingkat kepercayaan terhadap presiden mencapai 84,2% atau tertinggi sejak kali pertama pandemi Covid-19 dikofirmasi secara resmi ada di Indonesia. Tak hanya pada presiden, tingkat kepercayaan pada Lembaga keamanan juga sangat tinggi (TNI dan Polri). Sebaliknya, ada penurunan kepercayaan terhadap KPK. Yang perlu digaris bawahi, tingkat kepercayaan terhadap Lembaga politik seperti DPR dan DPD dan hukum (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) relatif rendah dibanding Lembaga negara lainnya. Namun, secara keseluruhan, masih tetap positif (> 50%) (Lihat Bagan 5).

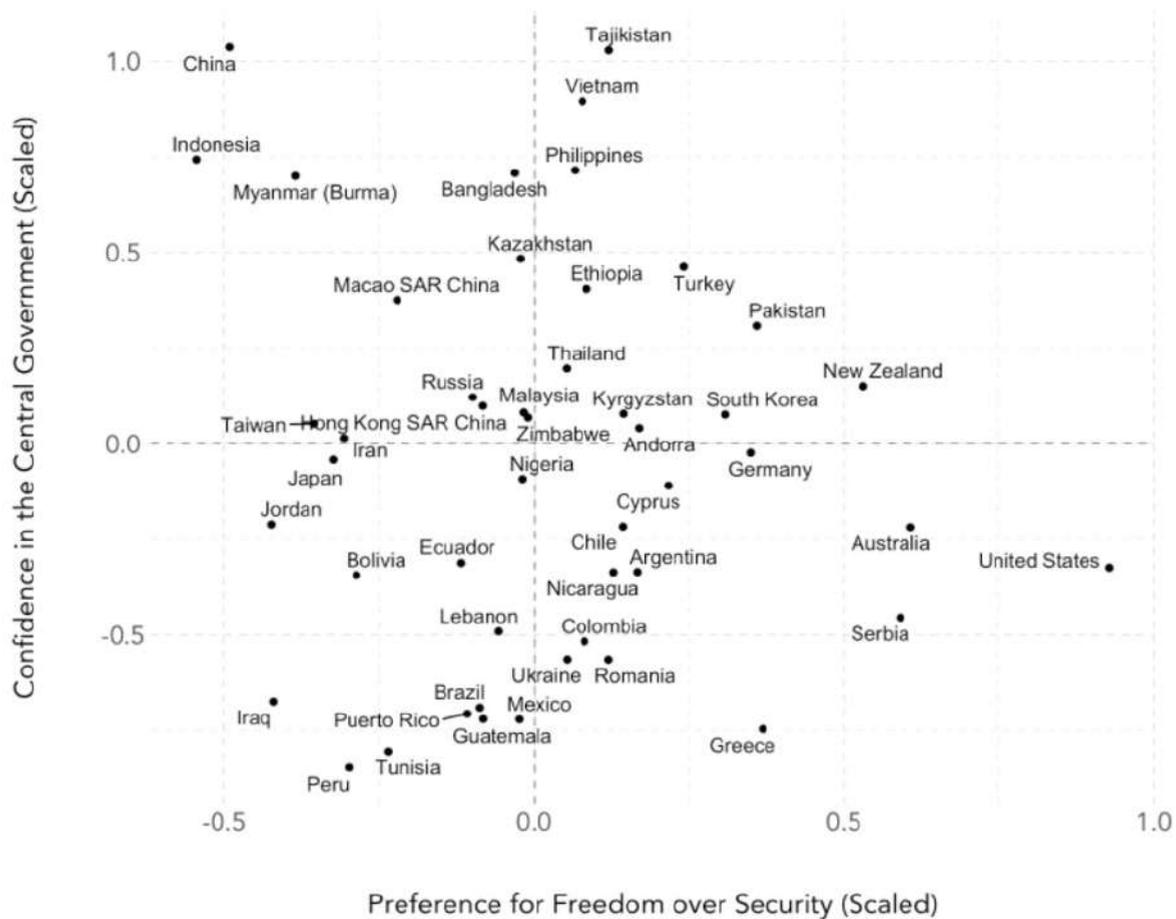
Bagan 5: Tingkat Kepercayaan Terhadap Lembaga Tinggi Negara



Tingginya tingkat kepercayaan ini berkesesuaian dengan temuan Yiqin Fu yang mengombinasikan preferensi kebebasan dan kepercayaan terhadap pemerintah dari hasil survei World Values Survey 2017-2021. Berdasarkan plot yang dibuatnya, Indonesia berada pada kuadran yang sama dengan China dan Myanmar Ketiga negara memiliki preferensi kepercayaan yang sangat tinggi terhadap pemerintah, tetapi sekaligus preferensi yang rendah terhadap kebebasan (<https://cutt.ly/qTQ7z1Y>) (Lihat Bagan 6).

Temuan ini memang perlu dibaca hati-hati. Namun, sekaligus menjadi peringatan dini bahwa gagasan mengembalikan demokrasi pada jalurnya bukanlah perkara mudah. Sekurangnya, ada indikasi bahwa masyarakat Indonesia punya tenggang rasa (permakluman) yang cukup besar terkait dengan situasi ketidakbebasan dan atau penyimpangan-penyimpangan praktik demokrasi.

Bagan 6: Tingkat Kepercayaan Terhadap Lembaga Tinggi Negara



Attitudes data from the World Values Survey (2017 - 2021). Chart by Yiqin Fu @yiqinfu.

sumber: <https://cutt.ly/qTQ7z1Y>

Kepercayaan pada pemerintah pusat yang tinggi merupakan modal politik yang besar bagi pemerintah untuk berani mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak populer tapi dibutuhkan untuk menyejahterakan masyarakat dan atau meningkat daya saing bangsa. Namun, kepercayaan dan permakluman ini juga sekaligus jadi beban politik. Pasaunya, pemerintah yang “kreatif” dapat dengan mudah memanipulasinya untuk melenggangkan agenda-agenda kebijakan yang berlawanan dengan kepentingan publik dan atau punya daya rusak terhadap praktik demokrasi.

Agenda Kerja

Paparan di atas menunjukkan, kualitas demokrasi, adanya sikap bipartisan dan kepercayaan terhadap pemimpin nasional yang kondisional menjadi faktor kunci resiliensi sebuah bangsa ketika menghadapi krisis besar seperti pandemi Covid-19. Lantas, dari mana penataan politik Indonesia harus dilakukan? Secara kelembagaan, mengikuti Merkel (2019), ada tiga agenda kerja strategis yang dapat dipertimbangkan: Representasi demokrasi (makro), partai (meso) perilaku memilih (mikro).

Untuk konteks Indonesia, peninjauan ulang terhadap representasi demokrasi bersoal tentang kemauan bersama untuk meninjau ulang praktik demokrasi (liberal). Di satu sisi, dukungan terhadap demokrasi masih sangat tinggi. Namun, di sisi lain, demokrasi yang dibayangkan tersebut belum tentu sama.

Para pendukung gagasan Islam Politik, misalnya, memberi dukungan terhadap demokrasi yang tinggi baik sebagai sistem pemerintah, solusi atasi masalah juga ketika dihadapkan pada pilihan pembangunisme atau demokrasi. Meski begitu, demokrasi yang dibayangkan pendukung Islam Politik bukanlah tipe demokrasi liberal (Fossati, 2019). Begitupun kalangan nasionalis yang kerap diidentikkan dengan suara PDIP. Ahmad Basarah, salah satu elit partai ini, pernah menyebut demokrasi multikultur sebagai esensi demokrasi Pancasila. Demokrasi multikultur

memberi hak dan kewajiban politik yang sama bagi setiap warga negara tanpa mempersoalkan latar belakang suku, ras, dan agama (SARA). Demokrasi jenis ini, kata dia, tak mungkin hidup dalam ruang demokrasi liberal yang semata bertumpu pada menang-kalah (<https://bit.ly/3Cwusl9>).

Peninjauan ulang terhadap partai bersoal ikhwal bagaimana mewujudkan demokrasi internal dan mengoneksi ulang partai dengan pemilihnya. Partai-partai yang ada di Indonesia secara kategorial merupakan partai elektoralis. Partai-partai tipe ini, risikonya, menjadi kurang memberi perhatian pada aspek kelembagaan internal dan juga relasi dengan pemilih. Dengan derajat yang berbeda-beda hampir semua parpol (kecuali PDIP dan PKS) bergaya *catch all party* dan karenanya cenderung miskin ‘ideologi’, sulit dibedakan dan diramalkan posisi isunya pada sebuah kebijakan publik. Secara padat sekaligus karikatural, parpol saat ini lebih mirip organisasi privat dengan mantel politik.

Perilaku pemilih bersoal tentang preferensi politik yang lebih rasional dan mengoreksi sikap partisan yang berlebih-lebihan yang cenderung menjadi pemujaan personal dan utamanya sikap kewargaan. Dalam banyak kasus, orientasi pada figuritas pemimpin tak terelakkan. Untuk Indonesia, afiliasi terhadap organisasi keagamaan (terutama NU) juga sebuah fakta politik. Berbagai studi politik juga menunjukkan bahwa pendekatan partisan memainkan peranan yang tak kalah penting ketika pemilih memutuskan pilihan. Karena itu, agenda di level mikro ini lebih berkaitan bagaimana elemen partisan dan loyalitas pada organisasi serta figur juga diimbangi dengan meningkatnya porsi pertimbangan terhadap isu-kebijakan.

Tiga agenda strategis tersebut bukanlah kerja ala hikayat Bandung Bondowoso. Fokus awalnya adalah membangun ekosistem. Dan, terima kasih untuk pandemi, adaptasi gaya hidup normal baru menunjukkan digitalisasi demokrasi bukan sesuatu yang mewah dan sulit seperti didemagogkan selama ini.

Digitalisasi akan mendorong inovasi praktik demokrasi, dari mulai *e-town hall meeting* hingga *participatory budgeting*, dari mulai *deliberative polling* hingga *e-voting*. Pokok pentingnya: ada *engagement* yang kuat antara masyarakat, pemerintah dan parlemen. Dalam konteks ini, pemerintah dan parlemen diharapkan akan lebih selektif dalam memilih mode komunikasi. Komunikasi politik merupakan keniscayaan, tetapi pada saat yang sama, komunikasi publik juga harus jadi prioritas ketika berhadapan dengan isu-isu kompleks seperti perpajakan hingga mitigasi pandemi.

Political engagement adalah rute tercepat untuk membangun kembali ‘jembatan komunikasi’ yang selama ini telah terbakar polarisasi politik. Dan, ini harus diawali dengan penerimaan situasi politik yang tengah berubah. Di satu sisi, sejak 2000-an, Indonesia mengalami apa yang disebut Martin van Bruinessen (2014) sebagai *conservative turn*. Kebangkitan Islam konservatif ini dimensinya lebar. Ada yang berhenti pada tataran preferensi individu dalam

beribadah hingga ada subkelompok yang bersikeras dengan agenda pembentukan negara Islam. Di sisi lain, respons terhadap kebangkitan ini dalam kasus tertentu membentuk sikap yang cenderung anti-Islam. Kolam wacana berbangsa menjadi *butek* karena elemen ekstrim dari masing-masing kubu justru menguasai wacana publik.

Karena itu, moderasi dan inklusi menjadi prinsip kunci. Secara umum, polarisasi hanya mungkin dicairkan jika ada pengakuan terhadap eksistensi pihak lain dan pada saat yang sama diikuti tindak pelibatan secara setara. Ini mudah dikatakan, tapi sangat sulit dipraktikkan. Namun, tanpa prinsip dasar ini, penataan ulang politik Indonesia tak akan ke mana-mana.

Sekali lagi, menata ulang politik Indonesia jelas tak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, tanpa langkah pertama untuk mengurainya, kehendak bersama memulihkan demokrasi di Tanah Air hanya akan tetap sebatas gagasan.

Kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi?*



Referensi

- Altiparmakis, A., Bojar, B., Brouard, S., Martial Foucault, Kriesi, H. & Nadeau, R. (2021). Pandemic politics: policy evaluations of government responses to COVID-19, *West European Politics*, 44:5-6, 1159-1179.
- Aspinal, Edward dan Marcus Mietzner. (2019). 'Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism'. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 55 (3): 295-317
- Cakanlar, A., Trudel, R., & White, K. (2020). Political Ideology and the Perceived Impact of Coronavirus Prevention Behaviors for the Self and Others. *Journal of the Association for Consumer Research*. doi:10.1086/711834
- Cassan, G. dan Van Steenvoort, M. (202). Political regime and COVID 19 death rate: Efficient, biasing or simply different autocracies? An econometric analysis. Guilhem Cassan Milan Van *SSM - Population Health Volume 16*, December 2021, 100912
- Davies, Ben., Lalot, F., Peitz, L., Heerng, M.S., Ozkecci, H., Babaian, J., Abrams, D. (2021). Changes in political trust in Britain during the COVID-19 pandemic in 2020: integrated public opinion evidence and implications. Dalam *Humanities and Social Sciences Communications* (2021) 8:166.
- Fenner, S. (2020). diakses melalui <https://tinyurl.com/3yf6h8yx> pada 26 April 2021.
- Fossati, D. (2019). The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behaviour. *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 2019, Vol. 38(2) 119-148
- Frey, C.B., Chen, C. dan Presidente, G. 2020. Democracy, Culture and Contagion: Political Regimes and Countries Responsiveness to Covid-19. Diakses melalui <https://tinyurl.com/qjrppvxv>, 26 April 2021
- Fukuoka, T. (2013). Oligarchy and Democracy in Post-Suharto. *Political Studies Review* 2013 VOL 11, 52-64
- Fukuoka, Y. dan Djani, L. (2016). Revisiting the Rise of Jokowi: The Triumph of Reformasi or An Oligarchic Adaptation of Postclientelist Initiatives? *South East Asia Research* 92016) 24 204-221
- Greg Fealy. (2020). Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56:3, 301-323, DOI: 10.1080/00074918.2020.1846482
- Hardy LJ, Mana A, Mundell L, Neuman M, Benheim S, Otenyo E (2021) Who is to blame for COVID-19? Examining politicized fear and health behavior through a mixed methods study in the United States. *PLoS ONE* 16(9): e0256136. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256136>
- Krastev, Ivan. dan Leonard, M. (2021). Europe's invisible divides: How covid-19 is polarising European politics. *Policy brief*. Diakses melalui <https://tinyurl.com/32n7yj35>, 7 November 2021.
- Kerr, J., Panagopoulos, Costas., van der Linden, Sander. (2021). Political polarization on COVID-19 pandemic response in the United States. *Personality and Individual Differences Volume 179*, September 2021, 110892
- Mao, Y. (2021). Political institutions, state capacity, and crisis management: A comparison of China and South Korea. *International Political Science Review* 2021, Vol. 42(3) 316-332
- Merkel, W. (2019). Past, Present and Future of Democracy. *Policy Review European Commission*. Diakses melalui <https://tinyurl.com/2nsss9nj> pada 5 November 2021.
- Mietzner, M (2019) Authoritarian innovations in Indonesia: Electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization* 27(6): 1021-1036.
- Power, Thomas P. (2018). 'Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline'. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 54 (3): 307-38.
- Engler, S., Brunner, P., Loviat, R., Abou-Chadi, T., Leemann, L., Glaser, A. & Kübler, D. (2021). Democracy in times of the pandemic: explaining the variation of COVID-19 policies across European democracies, *West European Politics*, 44:5-6, 1077-1102,
- Van Bruinessen, M. (2014). *Conservative turn : Islam Indonesia dalam ancaman fundamentalisme*. Mizan, Bandung.
- Warburton, E. (2016). Jokowi and the New Developmentalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 297-320.
- Wijaya, Yunarto. 2019. Defisit Demokrasi Di Tahun Politik. *Harian Kompas*, 18 Desember 2019





PEMIKIRAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

- *Scenario Planning, Impacts and Projections in Various Fields Amid the Post-Pandemic Period*
- **Menghadapi Krisis Iklim dan Lingkungan Hidup Global Pasca Pandemi**



SCENARIO PLANNING, DAMPAK DAN PROYEKSI DI ERA PASCAPANDEMI

Raldi Hendro Koestoer

Fakultas Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia

Pentingnya pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia mengacu pada pembangunan yang ramah lingkungan. Tidak dapat dimungkiri bahwa sektor keuangan hijau merupakan target yang perlu dikejar dalam konteks pembangunan global. Pemanasan global telah memengaruhi situasi lokal di banyak negara, termasuk Indonesia.

Apalagi, situasi pandemi Covid-19 menambah beban lingkungan ke berbagai belahan dunia. Pesatnya penyebaran penyakit endemik yang diperkirakan bermula di Wuhan, China ini berdampak sistemik sesuai dengan mobilitas manusia antarwilayah dan antarnegara.

Dampak dari kelancaran mobilitas, yang dalam situasi normal mendukung pertumbuhan ekonomi riil, menjadi merugikan ketika Covid-19 muncul di Wuhan, menyebabkan kerusakan lingkungan yang cepat kemudian, dan kematian yang tinggi di daerah perkotaan terutama yang terbuka untuk pengunjung dan wisatawan.

Makalah ini memaparkan implikasi dari wabah pandemi Covid-19 pada kota-kota di Indonesia dan memberikan gambaran tentang langkah-langkah apa yang dapat diantisipasi untuk tujuan pengambilan keputusan dalam pandangan ke depan yang strategis, selama dan pascapandemi, terutama terkait dengan ekonomi rendah karbon.

Emisi Rendah Karbon di Hutan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang digulirkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), memitigasi gas rumah kaca di hutan dan lahan gambut mencapai 2.874.585,22 Gg CO₂ eq pada tahun 2030.

Terkait dengan penurunan emisi ini, pemerintah menetapkan beberapa langkah mitigasi sebagai upaya mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui kebijakan penerapan moratorium izin pemanfaatan hutan primer, pengembangan restorasi gambut, serta rehabilitasi hutan dan lahan. Hal ini tertuang dalam dokumen National Determined Contribution (NDC).

Terkait dengan pengendalian pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas melalui Peraturan Pemerintah (PP) 39/2006 bertugas memantau dan mengevaluasi program mitigasi. Proses *monitoring* dan evaluasi dilakukan dengan membuat portal pelaporan kementerian/lembaga untuk melaporkan kemajuan kegiatan mitigasi yang telah dilakukan. Portal tersebut diluncurkan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2019.

Penurunan emisi GRK di hutan dan lahan gambut dari tahun 2011 hingga 2018 tercatat sebesar 365.374,9 ton CO₂ eq. Angka pengurangan tersebut dihitung berdasarkan analisis perubahan tutupan lahan, tidak termasuk emisi yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan gambut.

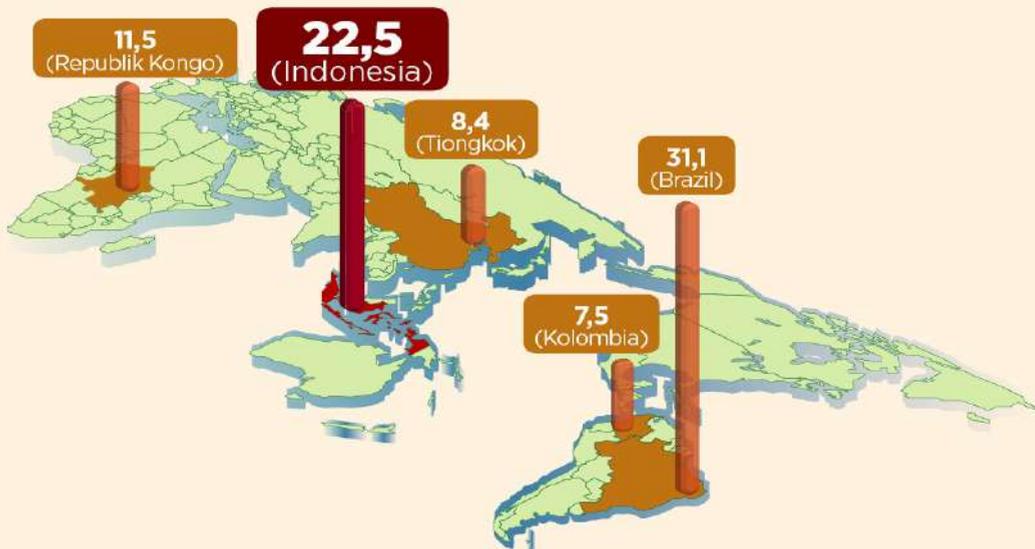


Untuk meningkatkan upaya mitigasi di sektor kehutanan, pemerintah akan meningkatkan restorasi gambut dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mengingat emisi di sektor kehutanan sebagian besar disumbangkan oleh kebakaran hutan, terutama di wilayah sebaran lahan gambut yang menyimpan kandungan karbon kapasitas 30 % dari cadangan dunia.

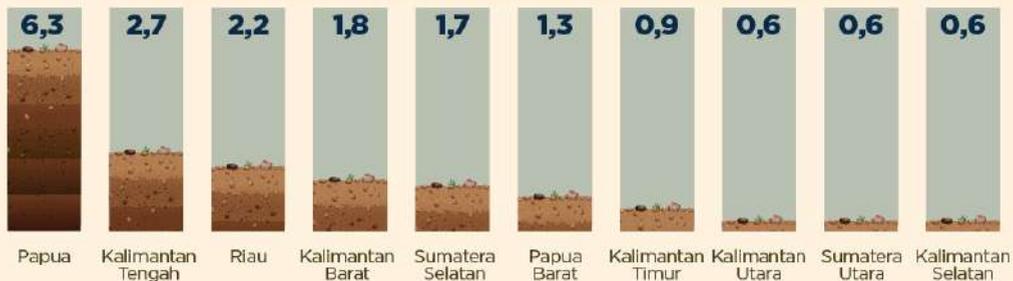
Sebaran lahan gambut di Indonesia meliputi 10 provinsi di 3 pulau besar, yaitu Sumatera (Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan), Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara) dan Papua (Papua dan Papua Barat). Dilihat dari luas lahan gambut di dunia, Indonesia menempati urutan ke-2, hanya dikalahkan oleh Brazil.

Gambar 1 Luas lahan gambut di Indonesia (Ekonografik, 2019)

5 Besar Negara Pemilik Lahan Gambut (juta ha)



10 Provinsi dengan Gambut Terluas (juta ha)



Urgensi Gambut bagi Lingkungan



Menyimpan **30%** karbon dunia



Mencegah kekeringan



Mencegah pencampuran air asin di irigasi pertanian

Konversi lahan gambut di beberapa daerah khususnya Sumatera dan Kalimantan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Di desa, keterlibatan warga desa dianggap krusial. Sujai et.al (2021) berpendapat bahwa penggunaan Dana Desa dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi solusi kebakaran lahan gambut.

Segmen yang perlu mendapat perhatian BPK adalah alokasi untuk pembangunan perdesaan seperti Dana Desa. Seperti diketahui, sebanyak 40 juta hektare dari 188 juta hektare kawasan hutan di Indonesia merupakan lahan basah, di mana lebih dari 20 juta hektare merupakan lahan gambut (Wahyunto dkk, 2003, Ekonografik, 2021).

Perlombaan global menuju dekarbonisasi sedang berlangsung dan data terkait dengan emisi telah menjadi komponen kunci untuk memfokuskan upaya dekarbonisasi. Setelah beberapa dekade kemajuan bertahap tetapi tidak mencukupi, tindakan publik dan swasta terhadap perubahan iklim kini mencapai titik kritis.

Namun, sifat skala besar dan kompleks dari keputusan iklim dan keberlanjutan—ditambah dengan kurangnya data—masih membuat bisnis menjadi sangat menantang untuk mempertimbangkan risiko terkait dengan iklim ke dalam proses strategis mereka. Ini telah meningkatkan permintaan akan data yang berguna untuk keputusan dan analisis yang relevan dengan bisnis.

Emisi Rendah Karbon di Energi dan Pertambangan

Dalam upaya untuk berkontribusi pada upaya global membatasi peningkatan suhu rata-rata global pada pertengahan abad ini hingga 2°C, Indonesia telah berjanji untuk mengejar pembangunan dengan menggunakan pendekatan rendah karbon.

Dalam Intended Nationally Determined Contributions (INDC), Indonesia berjanji tanpa syarat untuk mengurangi emisinya hingga 29% di bawah tingkat emisi bisnis seperti biasa pada tahun 2030. Dengan dukungan internasional, pengurangan ini dapat mencapai 42% (janji bersyarat).

Sebagai sektor penghasil gas rumah kaca (GRK) terbesar kedua di Tanah Air, sektor energi diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi Indonesia. Untuk janji tanpa syarat, pengurangan emisi sektor energi ditargetkan menjadi 17,5% di bawah tingkat emisi sektor energi dasar pada tahun 2030.

Berdasarkan janji bersyarat, pengurangan bisa sampai 32,7%. Besaran penurunan emisi tersebut adalah 253 MtCO₂e (juta ton setara CO₂)/tahun (tanpa syarat) dan 472 MtCO₂e/tahun (bersyarat) pada tahun 2030.

Indonesia memiliki berbagai opsi mitigasi sektor energi yang dapat mencapai pengurangan tersebut, yaitu langkah-langkah efisiensi, penerapan energi terbarukan, dan penggunaan tenaga nuklir dan teknologi batu bara bersih termasuk penangkapan dan penyimpanan karbon, yang dikenal sebagai CCS. Opsi-opsi ini dapat digabungkan dan dianggap sebagai bagian dari strategi sistem energi rendah karbon.

Pengembangan energi menggunakan opsi mitigasi ini melibatkan biaya yang umumnya lebih tinggi daripada biaya di bawah skenario bisnis seperti biasa tanpa tindakan mitigasi. Di negara dengan kekayaan terbatas, dampak ekonomi dari tindakan mitigasi merupakan faktor penting dalam memilih dan akhirnya menerapkan opsi ini.

Beberapa studi telah membahas opsi masa depan untuk sistem energi Indonesia. Hasan dkk. (2012) menguraikan skenario energi untuk Indonesia. Jupesta (2012) memproyeksikan produksi bahan bakar nabati (BBN) hingga tahun 2025 dengan menggunakan model program linier dan menunjukkan bahwa kemajuan teknologi BBN melalui penelitian dan pengembangan serta proses *up-scaling* akan mendukung percepatan BBN.

Berkah minyak sawit mentah cenderung mendorong penyediaan bahan bakar nabati sebagai energi alternatif pengganti sebagian bahan bakar fosil. Meskipun fokus utama dari studi itu adalah biofuel, beberapa opsi sistem energi telah dibahas. Kajian lain yang fokus tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kawasan ASEAN (Association of Southeast Asian



Nations), sebagaimana disebutkan oleh Bappenas (2018), mencoba mengamati implikasi dari opsi teknologi pembangkit listrik rendah karbon dengan menggunakan model *market and allocation*.

Singkatnya, teknologi rendah karbon membawa banyak manfaat, misalnya pengurangan pasokan energi primer serta pengurangan emisi CO₂ dan polutan. Studi lain yang menggunakan 'Markal-Answer' yang merupakan antarmuka Windows yang ramah pengguna dengan kurva pembelajaran yang adil, menunjukkan proyeksi sistem energi Indonesia pada tahun 2050 (Ibrahim, 2010). Ada juga beberapa publikasi yang membahas kebijakan iklim jangka panjang untuk negara (Dewi et al, 2010; Siagian et al. 2015).

Indonesia menargetkan investasi senilai US\$21,28 miliar melalui nilai tambah mineral. Target tersebut dinilai dapat tercapai karena status mineral milik Indonesia sebagai

salah satu dari 10 komoditas teratas dunia. Kemudian, Menteri ESDM saat ini menyebutkan bahwa Indonesia berupaya menarik investasi nikel, yang menempati urutan pertama dalam jumlah komoditas mineral dan produksi menurut United States Geological Survey (USGS). Bahkan, 23% cadangan nikel dunia secara resmi tercatat di Indonesia. Sementara itu, laporan sumber daya lainnya, Indonesia menempati urutan ke-6 dan ke-7 dalam cadangan bauksit dan tembaga dunia. Terakhir, komoditas timbal produksi Indonesia menyumbang 17% cadangan dunia. (Tempo, 2021).

Saat ini, Indonesia memiliki 19 unit pabrik atau smelter pengolahan dan pemurnian mineral, 13 unit di antaranya adalah *smelter* nikel. Pada 2023, pemerintah berencana memiliki 53 unit *smelter* yang beroperasi di Indonesia. Proyek *smelter* diharapkan selesai pada 2022 dan pada 2023 menjadi batas waktu izin ekspor konsentrat.



Covid-19 dan Kasus di Kota

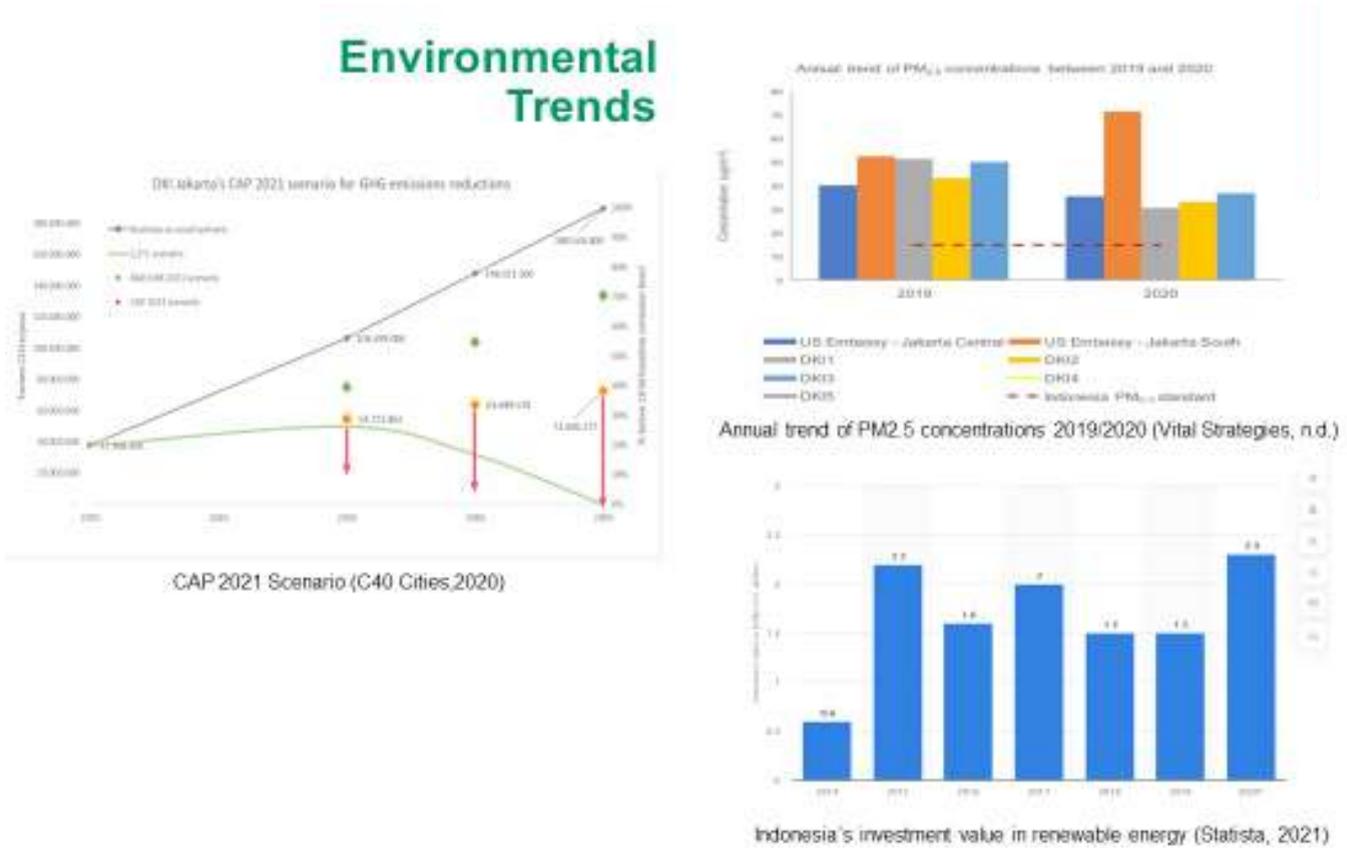
Pada tahun 2020, negara-negara di seluruh dunia menghadapi wabah baru yaitu Covid-19. Endemik ini membawa pengaruh pada beberapa isu dan masalah lingkungan. Covid-19 bermigrasi antarpulau dan antarnegara dan perkotaan. Sejak itu, terakumulasi dan menyebar luas secara spasial menjadi pandemi di semua wilayah perkotaan dan regional.

Kawasan metropolitan Jakarta misalnya, nyaris ambruk akibat Covid 19 yang merajalela di sekitar pemukiman penduduk. Pekerja disarankan bekerja dari rumah (*work*

from home/WfH). Akibatnya, sampah rumah tangga berdampak di kawasan perumahan. Banyak orang harus dirawat di rumah sakit dan paket Lengkap klinik medis dibagikan untuk Limbah medis.

Dalam kondisi seperti itu, akumulasi sampah sebagai jejak karbon, pada tahap pertama, cenderung terabaikan. Melimpahnya sampah rumah tangga dan sampah medis tidak dapat dihindari di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar. C40 Cities menetapkan Skenario Penurunan Emisi GRK Jakarta. (Lihat Gambar 1)

Gambar 1.





Presiden Joko Widodo mengingatkan Indonesia untuk mewaspadaai gelombang ketiga Covid-19 yang terjadi di negara lain, mengingat puncak wabah COVID-19 di kawasan seperti Eropa dan Amerika (Prasetya, 2020). Jokowi menyebut Covid-19 terjadi dalam empat gelombang. Pemerintah menekankan penerapan PPKM Level 3 selama liburan Natal dan tahun baru untuk membatasi mobilitas warga.

Berdasarkan kebijakan tersebut, acara liburan dilarang keras, sementara pengelola mal dan lokasi wisata harus menegakkan protokol kesehatan seperti mewajibkan pengunjung untuk *check-in* melalui aplikasi *PeduliLindungi* dan memakai masker.

Presiden Jokowi mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk menahan penyebaran Covid-19 di Indonesia selama liburan akhir tahun, sehingga memungkinkan negara untuk pulih lebih cepat, dari sisi kesehatan dan ekonomi. Presiden juga menyampaikan bahwa Covid-19 tidak hanya berdampak langsung

terhadap kesehatan dan perekonomian, tetapi juga mengakibatkan kelangkaan energi, menekan ekspor dan mengerek inflasi akibat melonjaknya harga komoditas di sisi produksi.

Infeksi memaksa beberapa negara untuk menggunakan anggaran mereka untuk mengatasi pandemi sampai negara mencapai pemulihan ekonomi, sementara anggaran menderita defisit. Pemerintah menyebutkan bahwa Covid-19 telah menyebabkan ketidakpastian global, yang dipicu oleh masalah yang terjadi di negara lain akibat penyebaran virus.

Salah satu kunci untuk menyelesaikan pandemi adalah mengendalikan penyebarannya. Tanpa kemampuan untuk mengendalikan Covid-19, tidak ada yang bisa mengharapkan ekonomi tumbuh. Setelah dikendalikan penyebarannya, akses ke layanan transportasi berkurang drastis. Anti-gravitasi dalam koneksi transportasi berdampak pada kegiatan ekonomi lainnya.



Scenario Planning dan Pandangan Strategis

Perubahan iklim dan masalah lingkungan memiliki tantangan terbesar bagi manusia di zaman sekarang. Asia Pasifik akan menghadapi dampak dan risiko akibat perubahan iklim di tahun-tahun berikutnya (Deloitte, 2020).

Risiko fisik seperti perubahan cuaca ekstrim dan perubahan iklim, serta risiko transisi seperti kebijakan, teknologi, dan pelanggan, akan berdampak pada ketidakstabilan moneter dan sistem. Perlombaan global menuju dekarbonisasi sedang berlangsung dan data terkait dengan emisi telah menjadi komponen kunci untuk memfokuskan upaya dekarbonisasi. Setelah beberapa dekade kemajuan bertahap tetapi tidak mencukupi, tindakan publik dan swasta terhadap perubahan iklim kini mencapai titik kritis.

Namun, sifat skala besar dan kompleks dari keputusan iklim dan keberlanjutan, ditambah dengan kurangnya data, masih membuat bisnis menjadi sangat menantang untuk mempertimbangkan risiko terkait iklim ke dalam proses strategis mereka. Ini telah meningkatkan permintaan akan data yang berguna untuk keputusan dan analisis yang relevan dengan bisnis.

Negara-negara menengah ke bawah umumnya lebih rentan terhadap risiko fisik (Grippa et.al, 2019). Indonesia telah menandatangani Paris Agreement 2015 melalui Nationally Determined Contribution (NDC) dan telah berupaya mengatasi perubahan iklim dengan menjaga pemanasan global di bawah 2°C, dilakukan melalui pembatasan emisi gas rumah kaca hingga 41% pada tahun 2030 dan memenuhi inisiasi netral karbon pada tahun 2070. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini berdasarkan Climate Transparency Report (2020) adalah:

(1) Emisi gas rumah kaca per kapita yang berada di bawah rata-rata G20.



(2) Meningkatnya emisi karbon yang disumbangkan oleh industri, transportasi dan listrik & uap.



(3) 88% sumber energi masih berasal dari bahan bakar fosil.



Fungsi keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memegang peran dan tanggung jawab untuk mengatasi risiko lingkungan terkait perubahan iklim tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan strategis dalam bidang ekonomi dan keuangan inklusif, antara lain, *pertama*, pengembangan ekonomi sirkular melalui model bisnis *zero waste* di mana limbah dari satu aktivitas dimanfaatkan untuk aktivitas lainnya.

Kedua, membentuk *carbon farming*, model bisnis yang terbentuk untuk mengurangi emisi karbon dari kegiatan pertanian di mana hasil pengujian karbon dapat dijual di pasar karbon, sehingga menghasilkan pendapatan tambahan.

Ketiga, penguatan *green reporting* bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan meningkatkan standar laporan keuangan UMKM yang memenuhi standar lingkungan, meningkatkan akses keuangan UMKM kepada investor.

Untuk mencapai keberlanjutan, sinergi lintas sektor kebijakan menjadi sangat penting. Koordinasi keuangan hijau tidak hanya mendorong pertumbuhan pasokan keuangan hijau tetapi juga permintaannya. Ada kebutuhan untuk meningkatkan peran dewan audit di forum internasional untuk tujuan inisiatif pemantauan dan evaluasi keuangan hijau.

Dari sisi kelembagaan, diperlukan *roadmap* dan rencana aksi yang jelas untuk transformasi sistem keuangan hijau, peningkatan keterampilan sumber daya manusia terkait ekonomi dan keuangan hijau, peningkatan literasi penelitian ekonomi hijau, serta mendorong perilaku dan budaya hijau dalam ramah lingkungan.

Lembaga keuangan

Stabilitas perekonomian dan sistem keuangan dipengaruhi oleh faktor global dan domestik. Pasca pandemi Covid-19, Indonesia masih menghadapi isu berskala global, yaitu fenomena perubahan iklim. Mulai dari perubahan pola cuaca yang berdampak pada siklus pertanian dan produksi pangan hingga naiknya permukaan air laut yang meningkatkan risiko banjir, konsekuensi perubahan iklim sangat besar dalam skala global.

Dampak perubahan iklim terhadap perekonomian dan sistem keuangan relatif signifikan dari sisi keterkaitan keuangan makro. Jejaring Auditor dan Pengawas Penghijauan Sistem Keuangan memiliki pedoman pemetaan risiko yang meliputi:

Risiko fisik dari dampak perubahan iklim berupa banjir, gelombang tinggi, badai dan kekeringan.

Risiko transisi dalam bentuk embargo ekonomi, kenaikan pajak dan pembatasan akses keuangan.

Kedua risiko tersebut dapat memicu ketidakstabilan ekonomi dan sistem keuangan. Selanjutnya, risiko fisik dan transisi akan menyebabkan penurunan PDB yang signifikan jika tidak segera dimitigasi. Peningkatan frekuensi dan skala risiko fisik dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan perubahan permintaan musiman. Putaran umpan balik antara ekonomi makro dan sistem keuangan dapat memperkuat dampak dan risiko perubahan iklim.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan risiko transisi, biaya ekonomi yang dikeluarkan untuk transisi menuju ekonomi hijau akan cenderung diimbangi dengan implikasi positif dari pertumbuhan ekonomi hijau. Transmisi risiko transisi ke sistem keuangan adalah realistis, menyerukan perlunya mengintegrasikan faktor-faktor perubahan iklim ke dalam kerangka manajemen risiko oleh lembaga keuangan dan penyesuaian terhadap strategi dan model bisnis untuk mendukung ekonomi rendah karbon.

Isu perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan instabilitas ekonomi dan sistem keuangan harus

disikapi secara tepat dan masif oleh seluruh otoritas global. Pada Climate Action Summit tahun 2019 disebutkan bahwa respons kebijakan terhadap isu perubahan iklim terutama dilakukan melalui implementasi *green finance* (keuangan hijau).

Pemerintah berupaya mendorong keuangan hijau, terutama melalui penerapan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial dengan: *pertama*, relaksasi kebijakan moneter untuk meningkatkan likuiditas pasar uang dan penggunaan obligasi hijau dan surat berharga komersial hijau sebagai instrumen operasi moneter; *kedua*, alokasi pengelolaan portofolio cadangan devisa yang memperhitungkan risiko iklim; *ketiga*, relaksasi kebijakan makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, antara lain pelonggaran *loan to value* dan *finance to value*, serta kredit properti dan kendaraan bermotor yang berwawasan lingkungan.

Ke depan, strategi yang direkomendasikan untuk mendorong keuangan berkelanjutan hijau terdiri dari: *pertama*, identifikasi dan mitigasi risiko yang tepat dan kebijakan selektif dalam mendorong kegiatan industri yang ramah lingkungan, tetapi tetap mendukung pemulihan ekonomi.

Kedua, implementasi bauran kebijakan hijau, serta sinergi kebijakan nasional yang diperkuat dengan diversifikasi instrumen kebijakan hijau melalui insentif, pendanaan, penyediaan infrastruktur, sertifikasi dan roadmap keuangan hijau terintegrasi. *Ketiga*, strategi yang tepat dalam komunikasi kebijakan dengan seluruh pemangku kepentingan yang memungkinkan sinyal dan arah kebijakan yang efektif.

Melihat pola perdagangan di pasar karbon dunia, pemerintah melalui kebijakan moneter turut andil dalam mengembangkan instrumen pasar keuangan hijau menuju pembangunan berkelanjutan rendah karbon. Dengan menetapkan kebijakan moneter dan makroprudensial, sektor perbankan dapat memengaruhi orientasi investasi dan alokasi kredit serta mendukung investasi yang berkelanjutan.



Dalam mempromosikan keuangan hijau, lembaga audit keuangan memiliki instrumen koreksi kebijakan yang dapat diambil. Yang pertama adalah penerapan plafon kredit atau *green credit ratio*. Groepe (2016) berpendapat bahwa pengawasan makroprudensial harus mempertimbangkan eksternalitas yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan dan mengidentifikasi ketidakseimbangan ekologi yang dapat menyebabkan risiko kerugian.

Salah satu caranya adalah dengan menerapkan pagu kredit pada kredit untuk proyek-proyek transaksi intensif karbon. Schoemaker, dkk. (2015) membahas instrumen makroprudensial hijau lainnya seperti bobot risiko yang lebih tinggi untuk sektor-sektor intensif karbon dan uji stres iklim. Tes jalanan ini menguraikan dampak skenario guncangan iklim terhadap kesehatan lembaga keuangan individu dan sistem keuangan untuk menilai ketahanan guncangan. Pengujian juga digunakan untuk melihat mekanisme transmisi

guncangan tersebut ke sistem keuangan secara keseluruhan (Batten, et al. 2016).

Instrumen yang belum banyak diterapkan, termasuk di Indonesia, adalah pengakuan Sertifikat Karbon. Rozenberg, dkk. (2013) mengatakan pendistribusian Sertifikat Karbon ke proyek rendah karbon akan membuatnya lebih menarik daripada investasi konvensional.

Lebih lanjut, perlu disadari bahwa lembaga keuangan hanyalah salah satu jenis lembaga publik yang dapat memengaruhi hasil investasi hijau. Lembaga serupa lainnya juga dapat menerbitkan obligasi hijau. Meski peminat investor internasional cukup tinggi, tetapi seringkali dinilai tidak tepat sasaran karena kurang dari 50% pembeli *green bond* tergolong *green investor* dengan sisanya pembeli reguler. Terlepas dari kendala yang ada, variasi pola *green bond* perlu dikedepankan, dengan pertimbangan produk ini juga sejalan dengan program pengembangan pasar keuangan.



Referensi:

- Bank Indonesia. (2021). Kebijakan Keuangan Hijau Bank Indonesia. Jakarta: DKMP.
- Bank Indonesia. (2020). Kajian Stabilitas Sistem Keuangan No. 37 September 2021: Bersinergi Mendorong Intermediasi, Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi. Jakarta.
- Bappenas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta, Indonesia, 2018.
- Batten, S., Sowerbutts, R., & Tanaka, M. (2016) Let’s Talk about the Weather: The Impact of Climate Change on Central Banks, Staff Working Paper No. 603, London. Bank of England.
- Bernanke, B. (2013). “Monitoring the Financial System”. Speech At the 49th Annual Conference on Bank Structure and Competition sponsored by the Federal Reserve Bank of Chicago, Chicago, Illinois.
- Campiglio, E. (2016). Beyond Carbon Pricing. The Role of Banking and Monetary Policy in Financing the Transition to a Low-carbon Economy. *Ecological Economics* 121.
- Deloitte (2020). “Financial Risk Stemming from Climate Change: Challenging the Degree of Resilience into a Constantly Changing Environment”.
- Deloitte.(2020). Climate-related Risk Stress-testing. China: Deloitte
- Dewi, R.G.; Kobashi, T.; Matsuoka, Y.; Gomi, K.; Ehara, T.; Kainuma, M.; Fujino, J. (2010) Low Carbon Society Scenario toward 2050: Indonesia Energy Sector; Global Partnership: Nairobi, Kenya.
- Dikau, Simon and Volz, Ulrich (2019). “Central Bank Mandates, Sustainability Objectives and The Promotion of Green Finance”. Working Paper No.222. SOAS, University of London. IFC (2020). “Climate Investment Opportunities Total \$23 Trillion in Emerging Markets by 2030”. International Finance Corporation.
- Ekonografik. (2019). Luas Gambut Indonesia Terbesar Kedua di Dunia. Katadata. <https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/infografik/5e9a519433cb1/luas-gambut-indonesia-terbesar-kedua-di-dunia>
- Economic Intelligent Unit (2021), ‘Climate Change: Will Humanity Survive?’ [y_survive/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=eiu-at-75&utm_term=asia&utm_content=climate-change-policy&gclid=EAlaIqOBChMlre3chai d9AIVln4rCh244QFdEAAVASAAEgLdxPD_BwE](https://www.eiu.com/en/analysis/insights/2021/01/14/climate-change-will-humanity-survive/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=eiu-at-75&utm_term=asia&utm_content=climate-change-policy&gclid=EAlaIqOBChMlre3chai d9AIVln4rCh244QFdEAAVASAAEgLdxPD_BwE),
- Epstein, G. A. (2007). Central Banks as Agents of Economic Development. New York. United Nations University Press and Anthem Press.
- Groepe, F. (2016). The Changing Role of Central Banks. Address by Mr Francois Groepe, Deputy Governor of the South African Reserve Bank, at the University of the Free State. Bloemfontein. BIS Central Bankers’ Speeches.
- Grippa, P., Schmittmann, J., & Suntheim, F. (2019). Climate Change and Financial Risk. Global Financial Stability Report
- Hasan, M.H., Mahlia, T.M.I., Nur, H. (2012) A review on energy scenario and sustainable energy in Indonesia. *Renew. Susta n. Energy Rev.*, 16, 2316–2328.
- Ibrahim, H., Thaib, N., Abdul Wahid, L. (2010) Indonesia energy scenario to 2050: Projection of consumption, supply option and primary energy mix scenarios. In Proceedings of the Energy Links Between Russia and East Asia: Development Strategies for the XXI Century, Irkutsk, Russia, 30 August–3 September.
- Institute for Essential Services Reform – IESR. (2020). Climate Transparency Report 2020: Comparing G20 Climate Action and Responses to The Covid-19 Crisis
- Jupesta, J. (2012) Modeling technological changes in the biofuel production system in Indonesia. *Appl. Energy*, 90, 211–217.
- National Geographic (2020). “Effects of Global Warming”. <https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-effects/>. NGFS (2020).
- Prasetya, M.A. (2021 November 24). Jokowi, “COVID-19 is peaking,”. *GreenUrbanomia*.
- Rozenberg, J., Hallegatte, S., Perrissin-Fabert, B., & Hourcade, J. C. (2013). Funding Low-carbon Investments in the Absence of a Carbon Tax. *Climate Policy* 13 (1).
- Schoemaker, D., van Tilburg, R., & Wijffels, H. (2015). “What Role for Financial Supervisors in Addressing Systemic Environmental Risks?” Sustainable Finance Lab Working Paper. Utrecht. Sustainable Finance Lab
- Siagian, U.W.R.; Dewi, R.G. R. Boer, I., Hendrawana, B.B., Yuwono, G.E. Ginting (2015) ‘Pathways to Deep Decarbonization in Indonesia’, Sustainable Development Solutions Network (SDSN) and Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI): New York, NY, USA.
- Sujai, M. K. Mizuno, T.B. Soessilo. R. Wahyudi, J.T. Haryanto (2021), ‘Village Fund for Peatlands Restoration: Study of Community’s Perceived Challenge and Opportunities in Muaro Jambi District’, *Forest and Society*, Vol 5(2): 604-618.
- Tempo, (2021), Pemerintah Targetkan Investasi USD 21,28 M dari Peningkatan Nilai Tambah Mineral - [Bisnis Tempo.co](https://www.tempo.co.id/berita/ekonomi/2021/08/10/pemerintah-targetkan-investasi-usd-2128-m-dari-peningkatan-nilai-tambah-mineral-1234567890)
- Tempo Magazine (2021), PPKM Level 3 Akhir Tahun, Jokowi: Covid-19 di Eropa dan Amerika Sedang Tinggi-tingginya - [Bisnis Tempo.co](https://www.tempo.co.id/berita/ekonomi/2021/08/10/ppkm-level-3-akhir-tahun-jokowi-covid-19-di-eropa-dan-amerika-sedang-tinggi-tingginya-1234567890)
- United Nations (2021). “Climate Change, Un.org
- Wahyunto, S., Ritung, S., and SUBagyo, H. (2003), Sebaran Gambut dan Kandungan Korban di Sumatra dan Kalimantan. *Wetland International-Indonesia Programme & Wildlife Habitat*.

MENGHADAPI KRISIS IKLIM DAN LINGKUNGAN HIDUP GLOBAL PASCAPANDEMI

Agus P. Sari

Chief Executive Officer (CEO) Landscape Indonesia (PT Bentang Alam Indonesia)

SEBELUM pandemi, 2019 adalah tahun yang sangat menjanjikan untuk Indonesia. Tingkat kemiskinan turun hingga sedikit di bawah 10% dan meraih indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi.¹ **Sesaat** sebelum pandemi dimulai, Indonesia telah naik kelas dari negara berpendapatan menengah-rendah menjadi negara berpendapatan menengah-atas.² *Aspiring middle class* yang berjumlah kira-kira 100 juta orang **itu** bergembira menyongsong kehidupan baru yang lebih sejahtera.³ Semua memperlihatkan batu loncatan Indonesia ke arah kemajuan.

Namun, pada 2 Maret 2020, seorang ibu berusia 64 tahun beserta putrinya yang berusia 31 tahun ditemukan tertular Covid-19, konon dari seorang berkebangsaan Jepang, sebagai kasus pertama dan kedua di Indonesia, dan secara resmi pandemi dianggap telah masuk ke Indonesia.⁴ Indonesia mengalami dua puncak pandemi, dengan puncak terparah adalah yang ke dua saat Indonesia mengalami penambahan kasus 56,757 per hari pada 15 Juli 2021 dengan 982 orang meninggal pada hari itu, sementara pada 27 Juli 2021 kematian per hari memperlihatkan puncaknya pada 2.069 orang.⁵

Pada Juli 2021, keterisian rumah sakit banyak yang sudah melewati kapasitas maksimumnya.⁶ Syukurlah keadaan semakin membaik bahkan di saat kasus meningkat dengan drastis di banyak negara lain. Hari ini, per tanggal 29 November 2021, sebanyak 4.255.936 orang tercatat telah terkonfirmasi Covid-19 dan 143.808 orang meninggal, dengan hanya 264 kasus baru. Kasus aktif tinggal 8.214 kasus.⁷

Dampak pandemi pada ekonomi masyarakat cukup **mengkhawatirkan**. Data Susenas pada Maret 2019 memperlihatkan 25 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan (sekitar 9,4% dari jumlah total penduduk). Sebanyak 55 juta lagi (sekitar 20,6% dari jumlah total penduduk) hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Hanya dengan gangguan sedikit saja, mereka rentan untuk jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan.

Oleh sebab itu, sangat mungkin bahwa saat ini, karena pandemi, sebanyak 30% penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan. Hampir tiga-perempat penduduk yang disurvei oleh SMERU memperlihatkan penurunan pendapatan. Hampir setengah dari mereka yang bekerja di sektor formal pindah ke sektor informal. Lebih dari setengah mengaku tidak memiliki tabungan untuk

1 Pratama, A.M., 2018. "Sri Mulyani: Angka Kemiskinan di Bawah 10 Persen Pertama Kalinya dalam Sejarah Indonesia", *Kompas* (17 Juli 2018).

2 Jayani, D.H., 2020. "Ekonomi Indonesia Naik Kelas", *Katadata* (10 Juli 2020).

3 World Bank, 2019. *Aspiring Indonesia — Expanding the Middle Class*. World Bank dan Pemerintah Australia, Jakarta.

4 Walaupun banyak yang berpendapat bahwa ditemukannya kasus pertama itu adalah hanya puncak gunung es dari banyaknya kasus yang mungkin sudah terjadi pada saat itu, mengingat jumlah kasus mirip pneumonia yang meroket dengan drastis pada waktu sekitar itu, yang dapat dicurigai sebagai awal penemuan covid-19, walaupun tidak dapat dipastikan karena tidak dites. Lihat Ihsanuddin, 2020. "Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia" *Kompas* (3 Maret 2020).

5 Nugroho, Y., and S.S. Syarif, 2021. "Grave Failures in Policy and Communication in Indonesia during the COVID-19 Pandemic", *Perspective 2021* (113). Institute for Southeast Asian Studies, Singapore.

6 "Covid di Indonesia: IGD dan ICU sejumlah rumah sakit penuh, pasien dirawat di tenda - "Kondisinya darurat mirip perang", *BBC News Indonesia* (4 Juli 2021).

7 "Peta Sebaran", Satuan Tugas Covid-19 (<https://covid19.go.id/peta-sebaran>), diakses pada 29 November 2021).

bertahan. Untuk bertahan, lebih dari seperempat menggadaikan apa saja, dan sekitar seperempat meminjam uang dari keluarga, teman, dan kenalan.⁸

Resesi Akibat Pandemi

Melihat sebagaimana porak-porandanya ekonomi masyarakat, stimulus ekonomi dalam jangka pendek memang sangatlah dibutuhkan untuk pulih. Walaupun demikian, dalam jangka panjang stimulus ini harus mendorong sektor-sektor hijau untuk maju sehingga bisa menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi di Indonesia. Stimulus yang dibutuhkan pada jangka pendek ini tidak boleh mengorbankan keberlanjutan ekonomi pada jangka panjang.

Presiden Joko 'Jokowi' Widodo mengumpamakan situasi ekonomi Indonesia seperti sebuah komputer yang sedang *hang*. Komputer tersebut harus direset atau *direboot* agar dapat berfungsi kembali.⁹ Ini senada dengan pernyataan oleh Prof Klaus Schwab, Ketua World Economic Forum, bahwa "pandemi ini memperlihatkan sebuah jendela kesempatan yang sempit dan jarang terjadi untuk melakukan refleksi, reimaginasi, dan *reset* untuk dunia kita". Schwab menyebut situasi ini sebagai "*the great reset*".¹⁰ Untuk melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19 dan melindungi ekonominya, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23/2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional.¹¹

Pada 2020, dari alokasi sebesar Rp695,2 triliun, realisasi belanja Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) mencapai Rp575,8 triliun atau sekitar 83%.¹² Hingga 20 Agustus 2021, realisasi PEN 2021 mencapai Rp326,74 triliun

atau 43% dari alokasi Rp744,77 triliun. Kluster kesehatan memperlihatkan kenaikan signifikan dari anggaran sekitar Rp70 triliun menjadi Rp214 triliun akibat lonjakan kasus yang luar biasa tinggi pada gelombang kedua pandemi Covid-19 akibat varian Delta pada 2021.¹³ Pada 2022, anggaran PEN adalah Rp414 triliun, terdiri atas Rp117,9 triliun untuk bidang kesehatan, Rp154,8 triliun untuk perlindungan masyarakat, dan Rp141,4 triliun untuk pemulihan ekonomi. Anggaran ini masih bisa disesuaikan seiring perkembangan dan penanganan pandemi pada 2022 nanti.¹⁴ Anggaran ini naik dari semula Rp321,2 triliun.¹⁵

Building Back Better: Pemulihan Hijau di Indonesia

Kebutuhan jangka pendek yang mendesak untuk keluar dari resesi **berisiko** meninggalkan kebutuhan jangka menengah dan panjang untuk senantiasa menjaga pembangunan dan pertumbuhan ekonomi agar tetap berkelanjutan. Pemulihan ekonomi hijau, atau "reset hijau" (*green reset*), adalah bagaimana dunia bisa keluar dari resesi ekonomi yang sangat parah akibat pandemi dengan cara yang baik, sehingga akan melanjutkan pemulihan ini dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan pada jangka menengah dan panjang.

Gambar di atas adalah sebuah meme yang sempat viral, memperlihatkan proses pembangunan yang terancam gelombang Covid-19. Meme itu memperlihatkan dengan akurat situasi saat ini. Di belakang gelombang pandemi Covid-19 telah siap mengancam gelombang resesi. Di belakangnya lagi akan datang ancaman krisis iklim, dan kemudian kolapsnya keanekaragaman hayati. Meme ini secara lugas memperlihatkan bahwa pemulihan dari resesi sebagai jalan keluar

8 UNICEF (United Nations Children Fund), UNDP (United Nations Development Program), Prospera (Australia Indonesia Partnership for Economic Development), dan SMERU, 2021. *Analysis of the Social and Economic Impacts of COVID19 on Households and Strategic Policy Recommendations for Indonesia*. United Nations Children Fund, Jakarta.

9 "Jokowi Sebut Ekonomi Negara Mirip Komputer 'Hang'", *CNN Indonesia* (14 Agustus 2020).

10 "The Great Reset", World Economic Forum (<https://www.weforum.org/focus/the-great-reset>, diakses pada 26 November 2021).

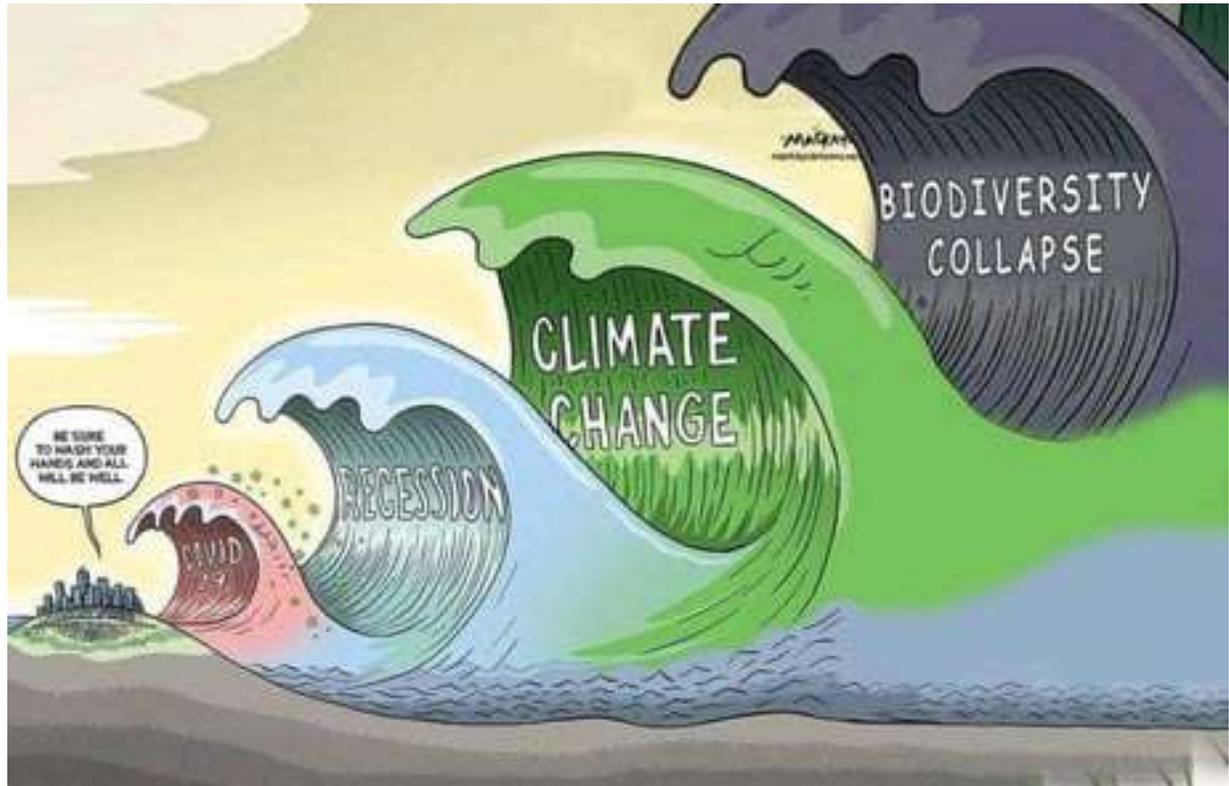
11 Peraturan Pemerintah No. 23/2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

12 "Realisasi Program PEN Tahun 2020 Capai Rp 575,8 Triliun", Kementerian Keuangan (15 Juli 2021) (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-program-pen-tahun-2020-capai-rp575-8-triliun/>, diakses pada 28 November 2021).

13 "Realisasi PEN 2021 Capai Rp 326,74 Triliun", Kementerian Keuangan (6 September 2021) (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pen-2021-capai-rp326-74-triliun/>, diakses pada 28 November 2021).

14 "Menkeu siapkan Rp 414 triliun untuk program PEN 2022", *Antara News* (23 November 2021).

15 "Menkeu: Kebijakan PEN 2022 Responsif dan Fleksibel", Kementerian Keuangan (18 Agustus 2021) (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-kebijakan-pen-2022-responsif-dan-fleksibel/>, diakses pada 28 November 2021).



Gambar. Meme diambil dari 9GAG.com (<https://9gag.com/gag/abGZdAv>). Meme ini mungkin karya yang dilindungi oleh hak cipta. Penggunaannya pada artikel ini adalah hanya untuk kebutuhan ilustrasi.

jangka pendek untuk melindungi pembangunan harus dibarengi dengan persiapan jangka menengah dan panjang untuk menghadapi tantangan global lain yang lebih besar. Pemulihan dari resesi akibat pandemi tidak bisa berdiri sendiri.

Analisis yang dilakukan oleh Vivid Economics pada 25 negara-negara penting dunia—15 di antaranya adalah anggota G20, termasuk Indonesia—memperlihatkan risiko bahwa program stimulus ekonomi mereka akan berdampak negatif pada lingkungan hidup. Selanjutnya, Vivid Economics melihat bahwa negara-negara berkembang yang ekonominya sangat bergantung pada sektor-sektor yang “intensif

lingkungan” dan tanpa pengawasan dan peraturan yang kuat memiliki tugas yang paling besar untuk mengarahkan program stimulus ekonomi mereka untuk mendukung pertumbuhan hijau, tetapi ternyata belum berhasil melakukannya. Menurut mereka, Indonesia termasuk negara yang kinerjanya terburuk, yang upaya untuk mengarahkan program stimulus ekonominya paling sedikit, dan berisiko justru memperburuk kinerja lingkungan hidupnya dengan mendorong industri dan energi dengan kandungan karbon tinggi, serta pertanian yang tidak berkelanjutan yang akan mengorbankan habitat keragaman hayati.¹⁶

Indonesia mengambil tampuk pimpinan G20, sebuah

¹⁶ Vivid Economics, 2021. *Greenness Stimulus Index*. Vivid Economics dan Finance for Biodiversity Initiative, Oxford (Juli 2021).

kelompok negara-negara dengan ekonomi terbesar dunia, dari Italia sejak Oktober 2021, tepat sebelum dimulainya COP26 di Glasgow. Tema yang diusung oleh Indonesia dalam periode kepemimpinannya adalah “*recover together, recover stronger*”. Untuk itu, pemulihan hijau, atau reset hijau (*green reset*) telah menjadi bagian dari programnya. Pada 2022 nanti, Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Untuk memperlihatkan kepemimpinan yang progresif, *green reset* harus menjadi satu agenda di dalamnya.

Perubahan Iklim

Pada September 2021 lalu, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), lembaga saintifik antar-negara yang paling otoritatif dalam pengkajian pengetahuan dunia mengenai perubahan iklim, menerbitkan laporan pertama dari tiga yang akan diluncurkan pada tahun ini dan tahun depan. Laporan itu, *the Sixth Climate Change Assessment Report*, memperlihatkan bahwa krisis iklim sudah terjadi dan semakin sulit untuk ditangani. Kesempatan untuk lepas dari krisis semakin menyempit, dan dibutuhkan tindakan yang sangat transformasional untuk itu. Bila tidak, maka suhu bumi akan meningkat sebesar 1,5 °C paling lama 20 tahun ke depan.¹⁷ Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut laporan ini sebagai tanda bahaya bagi umat manusia (*code red for humanity*).¹⁸

Pada akhir 1980-an, *risiko* akan munculnya krisis iklim telah disadari oleh dunia. Paralel dengan proses ilmiah untuk membentuk IPCC, PBB memulai proses untuk merancang sebuah perjanjian internasional untuk menghadapinya. Pada 1992, pada Konferensi

PBB mengenai Lingkungan Hidup dan Pembangunan (United Nations Conference on Environment and Development, UNCED) — disebut pula KTT Bumi, memperingati Konferensi mengenai Lingkungan Hidup Manusia (Human Environment Conference) pertama di Stockholm, Swedia pada 1972—United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ditandatangani oleh hampir semua negara dunia, dan satu-persatu negara-negara tersebut mulai meratifikasinya (mengadopsinya sebagai perjanjian yang berkekuatan hukum di dalam negerinya). Pada 1995, dengan jumlah ratifikasi yang cukup, UNFCCC berkekuatan hukum. Pada 1997, Protokol Kyoto yang mengatur pelaksanaan UNFCCC diadopsi, disusul oleh Persetujuan Paris yang diadopsi pada 2015.

Pada November 2021 di Conference of the Parties ke-26 (COP26) di Glasgow, Skotlandia, semua aturan-aturan ikutan (*rulebook*) untuk pelaksanaan Persetujuan Paris telah pula disepakati. Persetujuan Paris menegaskan komitmen semua negara untuk menahan kenaikan suhu dunia jauh di bawah 2 °C, bahkan sebisanya hanya 1,5 °C. Semua negara akan mengusulkan komitmen mereka untuk menyumbang pada upaya dunia dalam membatasi emisi, disebut di dalam Persetujuan Paris sebagai “nationally determined contribution” (NDC, kontribusi yang ditentukan secara nasional).¹⁹

Penyebab utama perubahan iklim adalah menebalnya selimut gas-gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas rumah kaca tersebut—utamanya karbon dioksida, CO₂—menyerap radiasi sinar matahari dan mengeluarkan infra-merah yang panas. Sumber terbesar dari emisi karbon dioksida adalah pembakaran energi fosil dan proses industri (sekitar empat perlima) dan perusakan hutan (sekitar seperlima). Energi fosil

¹⁷ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 2021 (*in press*). “Summary for Policymakers”, dalam Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.), *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*, Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge.

¹⁸ McGrath, M., 2021. “Climate change: IPCC report is ‘code red for humanity’”, *BBC News* (9 Agustus 2021).

¹⁹ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 2015. *The Paris Agreement*. United Nations Framework Convention on Climate Change, Paris.

dengan kandungan karbon tertinggi adalah batu bara. Indonesia telah mengadopsi Persetujuan Paris dengan menandatangani dan meratifikasinya pada 2016. Indonesia telah mengajukan komitmen untuk menurunkan emisi gas-gas rumah kacanya sebesar 29% dari perkiraan emisi *business as usual* (BAU, bila tidak ada kebijakan yang sengaja dibuat untuk menghadapi krisis iklim) pada 2030 dengan kekuatan sendiri, atau meningkatkannya menjadi 41% bila ada bantuan internasional. Komitmen ini telah diajukan kepada dunia sebagai NDC Indonesia.²⁰ Komitmen ini telah pula diperkuat dengan target jangka panjang untuk mencapai emisi nol bersih (*net zero emissions*, di mana emisi yang dihasilkan sama jumlahnya dengan emisi yang diserap atau dioffset) pada 2060 atau lebih awal.²¹ Emisi total Indonesia pada 2010 adalah 1,3 miliar

ton setara karbon dioksida (gigaton CO₂-equivalent, GtCO₂e). Bila tidak ada yang dilakukan untuk membatasinya, proyeksi BAU emisi totalnya akan mencapai 2,9 GtCO₂e pada 2030. NDC mengurangi emisi total dari 2.9 GtCO₂e proyeksi BAU, menjadi hanya 2 GtCO₂e dengan kekuatan sendiri, atau 1,9 GtCO₂e dengan bantuan internasional. *Tabel 1* di bawah ini memperlihatkan target itu.²²

Tabel 1 | Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia, yaitu komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi dari proyeksi BAU sebesar 29 dengan kekuatan sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030. **Catatan** | BAU adalah *business as usual*, yaitu emisi bila tidak ada kebijakan untuk menurunkan emisi seperti tercantum dalam NDC Indonesia. UNC

20 Pemerintah Republik Indonesia (RI), 2021. *Updated Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.
 21 Rosana, F.C., 2021. "Luhut Sebut RI Targetkan Nol Emisi Karbon pada 2060 atau Lebih Cepat", *Tempo* (4 November 2021).
 22 RI, 2021, *op cit*.

Sektor	Emisi 2010	Emisi 2030		Penurunan Emisi				Pct AAG 2010- 2030	Pct AAG 2000- 2012	
	MtCO ₂ e BAU	MtCO ₂ e		MtCO ₂ e		pct of BAU				
		UNC	COND	UNC	COND	UNC	COND			
Energy	453.2	1669.0	1,355.0	1,407.0	314.0	441.0	10.9	15.5	6.7	4.5
Waste	88.0	296.0	285.0	270.0	11.0	26.0	0.4	1.0	6.3	4.0
IPPU	36.0	69.6	66.8	66.3	2.8	3.2	0.1	0.1	3.4	0.1
Agric.	110.5	119.7	110.4	115.9	9.2	4.0	0.3	0.1	0.4	1.3
Forestry	647.0	714.0	217.0	68.0	497.0	692.0	17.3	24.5	0.5	2.7
Total	1,334.7	2,869.2	2,033.2	1,927.2	834.0	1,166.2	29.0	41.0	3.9	3.2

adalah target tanpa syarat, yaitu target yang akan dicapai dengan kekuatan sendiri, sementara COND adalah target bersyarat, yang akan dicapai bila ada bantuan internasional. Harap dicatat bahwa bahwa angka yang ada di tabel ini adalah angka pembulatan. **Sumber** | RI, 2021. *Updated Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.

Untuk memenuhi komitmen ini, dua dari lima sektor terlihat dominan. Sektor kehutanan adalah sektor yang memperlihatkan ambisi penurunan emisi yang paling kuat, yaitu 70% dari perkiraan emisi BAU dengan kekuatan sendiri, dan 90% dengan bantuan internasional, pada 2030. Dari 714 juta ton setara karbon dioksida (MtCO₂e) proyeksi emisi BAUnya, emisi di sektor kehutanan akan dibatasi hanya pada



21,7 MtCO_{2e} dengan kekuatan sendiri atau 68 MtCO_{2e} dengan bantuan internasional pada 2030. Dalam NDC yang telah diperbarui, Indonesia telah menentukan target restorasi lahan gambut sebesar 2 juta ha dan rehabilitasi lahan kritis sebesar 12 juta ha.²³ Komitmen jangka panjang pada sektor kehutanan juga memperlihatkan ambisi yang paling kuat untuk menjadi *net sink* pada 2030, di mana emisi yang diserap akan lebih banyak daripada yang dilepaskan.²⁴

Karena penyebab utama emisi karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca lainnya adalah pembakaran energi fosil dan perusakan hutan, maka mitigasi krisis iklim dengan mengurangi emisi karbon dan gas-gas rumah kaca lainnya harus dilakukan dengan mengurangi—bahkan meniadakan—pembakaran energi fosil, dan menurunkan deforestasi hingga emisinya menjadi *netto nol*.

Udara Bersih

Pada September 2021, proses pengadilan yang sudah berlangsung sejak 2019 akhirnya memutuskan bahwa Presiden dan beberapa pejabat negara, termasuk Gubernur DKI, Jawa Barat, dan Banten, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kesehatan, dan beberapa lainnya bersalah membiarkan kualitas udara di Jakarta tetap buruk dan tidak melakukan tindakan yang signifikan untuk memitigasinya. Keputusan ini adalah yang pertama dalam sejarah pengadilan Indonesia. Keputusan pengadilan ini memerintahkan pejabat-pejabat negara untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah pencemaran udara ini.²⁵

Pencemaran udara disebabkan oleh beberapa sumber. Di Jakarta, sumber-sumber pencemaran udara

terpenting ternyata bukanlah kendaraan, seperti biasanya dituduhkan (walaupun merupakan salah satu sumber utama), tetapi justru sumber-sumber tidak bergerak seperti industri dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan-bakar batu bara.²⁶ Di sekitar Jakarta, sumber lain yang mungkin adalah pembangkit bahan bakar batu bara. Yang terdekat adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan-bakar batu bara Babelan Unit 1-2 (280 megawatt, MW) di Jawa Barat, sementara yang agak jauh adalah PLTU Labuan Unit 1-2 (600 MW) dan PLTU Pelabuhan Ratu Unit 1-3 (1,050 MW). Tampaknya pembangkit-pembangkit inilah yang menyumbang cukup signifikan terhadap kualitas udara di Jakarta.²⁷

Kualitas udara di kota-kota besar Indonesia, utamanya di Jakarta, memang memprihatinkan. Pada 2020, konsentrasi PM_{2,5} (material partikulat yang diameternya lebih kecil daripada 2,5 mikron) rata-rata di Jakarta cenderung beberapa kali lebih tinggi dibandingkan baku mutu yang berlaku. Konsentrasi ozon permukaan (O₃) juga memperlihatkan angka yang lebih tinggi daripada baku mutu lingkungan yang berlaku.²⁸ Semua angka kualitas udara ini dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara menurut aturan dalam negeri, yaitu 65 mikro gram per meter kubik (µg per m³) ketimbang standar World Health Organization yang jauh lebih rendah, yaitu 25 µg per m³.

Greenpeace menemukan bahwa pada 14 Juni 2019 Jakarta memiliki indeks kualitas udara 189 yang menempatkan Jakarta sebagai kota dengan kualitas udara terburuk dunia. Bahkan pada saat hari bebas kendaraan (*car free day*) pada 23 Juni 2019, indeks kualitas udara mencapai 190. Indeks kualitas udara ini

²³ RI, 2021, *op cit*.

²⁴ "Menteri LHK jelaskan FoLU Net Sink 2030 bukan berarti nol deforestasi", *Antara News* (3 November 2021).

²⁵ Aqil, A.M.I., 2021. "Court rules government guilty for failing to tackle Jakarta's air pollution", *The Jakarta Post* (17 September 2021). Segera setelah keputusan pengadilan ini, pemerintah segera naik banding. Lihat Aqil, A.M.I., 2021. "Government appeals Jakarta air pollution verdict", *The Jakarta Post* (9 Oktober 2021).

²⁶ Millyvirta, L., Suarez, I., E. Uusivuori, H. Thieriot, 2020. *Transboundary Air Pollution in the Jakarta, Banten, and West Java Provinces*. Center for Research on Energy and Clean Air, Jakarta.

²⁷ *ibid*.

²⁸ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2021. *Laporan Akhir Pemantauan Kualitas Udara DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 Januari – Desember*. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Jakarta.



menunjukkan kualitas udara yang tidak sehat. Pada 4 Juni 2019 di hari lebaran (biasanya jumlah kendaraan sangat sedikit) index masih menunjukkan angka setinggi 213. Ini sangat tidak sehat.²⁹

Selain menjadi sumber emisi gas-gas rumah kaca, utamanya karbon dioksida, PLTU berbahan bakar batu bara juga berkontribusi cukup besar pada polusi udara di sekitarnya. Penyelesaian masalah perubahan iklim akan menyelesaikan pula masalah polusi udara yang bertahun-tahun menyelimuti kota-kota di Indonesia.

Keanekaragaman Hayati

Pada 2019, Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), sebuah panel yang paling memiliki otoritas ilmiah dalam mengkaji situasi terkini dari keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem dunia, merilis sebuah laporan yang cukup membuka mata, bahwa keanekaragaman hayati dunia sedang sangat terancam. Diperkirakan dalam waktu 10 tahun ke depan mungkin sekitar satu juta spesies akan punah akibat kerusakan ekosistem di dunia. Laju kepunahan spesies dunia ternyata sedang semakin cepat secara luar biasa. Kepunahan yang dulu hanya bisa diketahui melalui buku-buku sejarah alam raya, saat ini terjadi—bahkan beberapa kali—di depan mata.³⁰

Indonesia merumahi keanekaragaman hayati terbesar dunia.³¹ Walaupun demikian, kekayaan alam ini akan terancam bila pengelolaan habitatnya tidak dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan kaidah ekologi.

Keanekaragaman hayati daratan di Indonesia paling banyak terdapat di wilayah hutannya. Berkaitan dengan ini, Indonesia pernah menjadi perusak hutan terbesar dunia. Namun, kebakaran hutan dan lahan yang luar biasa

pada 2015 tampaknya telah menjadi alarm pengingat yang cukup kuat. Semenjak itu, angka kecepatan deforestasi konsisten melambat hingga hanya sedikit di atas 100.000 hektar (ha) dari lebih dari satu juta ha sebelum 2015.³² Penurunan kecepatan deforestasi sebanyak hampir 90% ini tentu saja adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.

Pencapaian ini tak lepas disebabkan oleh beberapa kebijakan pemerintah yang cukup efektif. Sejak 2011, melalui Instruksi Presiden No. 10/2011, Indonesia memulai moratorium (penghentian sementara) izin perubahan penggunaan lahan hutan primer. Moratorium tersebut **dijadwalkan** untuk berlangsung selama 2 tahun, tetapi pada akhirnya selalu diperpanjang, hingga pada 2019 diputuskanlah oleh Presiden untuk membuat aturan untuk tidak lagi membolehkan perubahan penggunaan lahan hutan primer secara permanen (dengan beberapa pengecualian).

Sejak itu, wilayah hutan primer sebesar sekitar 65 juta ha dilindungi secara permanen.³³ Selain itu, ada pula moratorium perluasan lahan perkebunan sawit melalui Instruksi Presiden No. 8/2018 yang berlaku hingga baru-baru ini. Belum bisa diperkirakan dampak tidak diperpanjangnya moratorium itu. Tetapi saat masih berlaku, dia telah menyumbang pada pelambatan kecepatan kerusakan hutan.³⁴ Program kehutanan masyarakat (*social forestry*) juga memperlihatkan kemajuan, walaupun masih banyak yang harus dilakukan agar prosesnya semakin cepat. Saat ini, akses perhutanan sosial telah mencapai 4,8 juta ha dari 12,7 juta yang ditargetkan. 1,1 juta ha di antaranya melalui penetapan hutan adat.³⁵

Penegakan hukum juga memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti. Sejak kebakaran hutan dan lahan

29 Greenpeace Indonesia, 2019. "PLTU Batu Bara di Sekitar Provinsi DKI Jakarta dan Dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat Wilayah Jabodetabek",

30 IPBES (Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services), 2019. *Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services*. Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services.

31 Keanekaragaman hayati di Indonesia terdapat pada ekosistem darat dan lautnya. Bila hanya dihitung berdasarkan ekosistem darat, maka Indonesia adalah pemilik keanekaragaman kedua dunia setelah Brazil. Hutan Amazon adalah rumah keanekaragaman hayati darat terbesar dunia.

32 Jong, H.N., 2021. "Deforestation in Indonesia hits record low, but experts fear a rebound", *Mongabay Indonesia* (9 Juni 2021).

33 Winata, D.K., 2019. "Menteri LHK: Presiden Teken Moratorium Hutan Permanen", *Media Indonesia* (6 Agustus 2019).

34 "KLHK Gugat 29 Perusahaan Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan", *CNN Indonesia* (29 Januari 2021).

35 Susanto, V.Y., 2021. "Realisasi perhutanan sosial mencapai 4,8 juta hektare", *Kontan* (7 November 2021).



hebat pada 2015 tersebut 29 perusahaan penyebab kebakaran telah dibawa ke pengadilan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kasus yang telah selesai diputus oleh pengadilan mewajibkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk membayar denda lebih dari Rp19 triliun. Ini adalah jumlah denda terbesar yang pernah ada di Indonesia yang dijatuhkan kepada para perusak hutan.³⁶

Mencegah kerusakan hutan berarti mencegah emisi karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca lainnya untuk terlepas ke atmosfer dan menyebabkan perubahan iklim. Ini juga sebabnya, dengan rekam jejak yang tidak jelek ini, maka dalam NDCnya Indonesia bisa menawarkan pembatasan emisi yang lebih ambisius di sektor kehutanan dibandingkan dengan di sektor lainnya, yaitu 70% dengan kekuatan sendiri dan 90% bila mendapat bantuan internasional.

Tantangan Ke Depan?

Krisis iklim dan keanekaragaman hayati telah menjadi ancaman. Ancamannya akan semakin besar di masa depan. Untuk itu, sebuah *road map* untuk membatasi emisi Indonesia pada 2030 dan 2060 mesti dibuat. Yang paling utama, Indonesia harus melakukan pengembangan energi terbarukan yang jauh lebih ambisius daripada yang pernah ada. Energi terbarukan adalah sumber energi bersih tanpa emisi karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca. Untuk Indonesia, di mana batu bara masih mendominasi baik sebagai sumber energi domestik maupun sebagai komoditas ekspor unggulan, tentu saja ini menjadi tantangan besar.

NDC untuk sektor energi memperlihatkan bahwa penurunan emisi akan dicapai di antaranya melalui target peningkatan pangsa energi terbarukan, yaitu

menjadi 23% pada 2025 dan 31% pada 2050, seperti yang telah diatur dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN).³⁷ Ini memang sebuah target yang cukup ambisius, mengingat pangsa energi terbarukan saat ini baru mencapai sekitar 11%. Melipatduakan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi nasional dalam periode hanya 4 tahun adalah tantangan yang sangat berat. Pada 2020, dengan jumlah produksi sebesar 562,5 juta ton, Indonesia adalah produsen batu bara keempat terbesar, dan eksportir terbesar dunia. Pada 2021, di tengah harga batu bara yang melonjak, target produksi batu bara Indonesia bahkan akan digenjut dari 550 juta ton menjadi 625 juta ton per tahun.³⁸ Duapertiga sistem kelistrikan Indonesia dipenuhi oleh PLTU berbahan bakar batu bara.³⁹ Mungkin itu sebabnya Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) memperkirakan bahwa target 23% bauran energi terbarukan pada 2025 akan molor.⁴⁰

Di sektor kehutanan, Indonesia telah memperlihatkan rekam jejak yang cukup baik. Yang harus dilakukan adalah menjaga momentumnya agar tidak hilang. Penurunan deforestasi yang cukup drastis ini memang sebuah pencapaian yang istimewa, dan kebijakan pemerintah yang baik telah menyumbang pada prestasi ini. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang tampaknya masih perlu diperbaiki agar pencapaian ini bisa lebih berkelanjutan. *Pertama*, harga minyak sawit (*crude palm oil*, CPO) tertekan sejak 2013, sehingga dorongan untuk memproduksi berkurang. *Kedua*, resesi dunia akibat pandemi membuat permintaan akan produk-produk yang berdampak pada deforestasi menjadi berkurang. Dan akhirnya, cuaca yang relatif basah juga menyumbang pada berkurangnya *risiko* kebakaran.⁴¹

Adapula *kekhawatiran* mengenai dampak *omnibus*

36 "KLHK Gugat 29 Perusahaan Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan", *CNN Indonesia* (29 Januari 2021).

37 RI, 2014. Peraturan Pemerintah No. 79/2014 mengenai Kebijakan Energi Nasional.

38 Asmarini, W., 2021. "Lampau AS, RI Jadi Produsen Batu Bara Terbesar Ke-3 Dunia", *CNBC Indonesia* (12 Juli 2021).

39 "Bauran Pembangkitan Listrik di Indonesia", *Transisi Energi* (https://transisienergi.id/data_input/bauran-pembangkitan-listrik-di-indonesia/, diakses pada 29 November 2021).

40 Mudassir, R., 2021. "Banyak Kendala, Target 23 Persen EBT di 2025 Diprediksi Bakal Molor", *Bisnis Indonesia* (25 Oktober 2021).

41 Jong, H.N., 2021, *op cit*.



law (Undang-Undang No. 11/2020) terhadap perlindungan ekosistem hutan. Undang-Undang (UU) tersebut ditengarai menghapus Pasal 18 Ayat 2 UU Kehutanan No. 41/1999 dan Pasal 17 ayat 5 UU Penataan Ruang No. 26/2007 yang mewajibkan paling tidak 30% dari wilayah tangkapan air atau pulau dijaga sebagai wilayah berhutan. Penghapusan kewajiban ini **dikhawatirkan** akan menambah **risiko** kerusakan ekosistem hutan.⁴² Belum diketahui apakah keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan beberapa poin dalam permintaan judicial review atas UU No. 11/2020 dan menganggap UU tersebut inkonstitusional bersyarat sebelum diperbaiki dalam waktu dua tahun akan memberi jalan keluar yang baik.⁴³

Selain itu, **respons** pemerintah terhadap ancaman ketahanan pangan akibat pandemi adalah dengan menambah luas lahan pertanian secara besar-besaran melalui program yang sering disebut dengan *food estate*. Program ini konon akan membuka lahan seluas 3,69 juta ha yang akan dimanfaatkan sebagai daerah pertanian modern. Wilayah terbesar ada di Papua, yaitu lebih dari 3,3 juta ha. Sebesar 1,57 juta ha di antara wilayah yang akan dibuka ini diidentifikasi sebagai wilayah hutan primer, di mana sekitar 1 juta ha di antaranya berada di Papua. Inisiatif ini dikhawatirkan mengancam ekosistem hutan dan lahan gambut.

Yayasan Madani Berkelanjutan merekomendasikan beberapa hal untuk menghindari risiko ini, yaitu: *pertama*, mengeluarkan hutan alam, ekosistem gambut, dan wilayah masyarakat adat dan lokal dari *area food estate*; tidak mengizinkan penebangan hutan dan pembukaan gambut untuk *food estate* agar konsisten dengan komitmen iklim; dan menjalankan

prinsip-prinsip tata kelola yang baik (transparansi, partisipasi, akuntabilitas) dalam pelaksanaan semua program pembangunan termasuk program-program istimewa.⁴⁴

Sebelum COP26, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menerbitkan sebuah laporan yang menarik. Indonesia sebetulnya memiliki kesempatan besar untuk melakukan pemulihan hijau atau *green reset* ini. Pemulihan yang lebih berpihak pada lingkungan hidup dan keberlanjutan (*sustainability*) ternyata juga memperlihatkan manfaat yang lebih besar untuk ekonomi Indonesia, dibandingkan **dengan** pemulihan yang hanya semata-mata mengeluarkan Indonesia dari resesi akibat pandemi.⁴⁵

Sejalan dengan itu, Dyah Roro Esti, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang juga menjadi anggota komisi pengarah studi Low Carbon Development oleh Bappenas tersebut, selain menjadi anggota Kaukus Hijau di DPR, menulis pendapatnya dalam sebuah media segera setelah COP26 di Glasgow. Esti menyebutkan dalam tulisannya itu bahwa kebijakan dan tindakan untuk memitigasi krisis iklim justru akan berdampak positif pada ekonomi Indonesia. Esti memperlihatkan bahwa semakin cepat *net zero* dicapai, semakin bermanfaat pula pada ekonomi Indonesia.⁴⁶ Sebuah laporan dari Swiss Re yang juga dikutip olehnya memperlihatkan sebuah indeks ekonomi perubahan iklim di mana Indonesia berada di ranking terendah dari 48 negara yang dibuatkan rankingnya.⁴⁷ Sementara itu, Climate Action Tracker (CAT) memperlihatkan bahwa komitmen pembatasan emisi Indonesia di luar sektor lahan sebagai “*highly insufficient*” (sangat tidak cukup). CAT

42 Hariandja, R., 2020. “Mengapa Lingkungan Hidup Terancam dengan Ada Omnibus Law?”, *Mongabay* (21 Oktober 2020).

43 “MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Apa Dampaknya?”, *Kompas* (26 November 2021).

44 Permatasari, A.P., 2020. “Menakar Ancaman Kebijakan Food Estate terhadap Hutan Alam dan Lahan Gambut Indonesia”, Yayasan Madani Berkelanjutan, Jakarta (24 Februari 2021).

45 Bappenas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional), 2021. *A Green Economy for a Net-Zero Future: How Indonesia can build back better after COVID-19 with the Low Carbon Development Initiative (LCDI)*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. Lihat juga laporan LCDI sebelumnya, Bappenas, 2019. *Low Carbon Development: A Paradigm Shift Towards a Green Economy in Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

46 Esti, D.R., 2021. “The more ambitious climate action the better for Indonesia’s economy”, *The Jakarta Post* (15 November 2021).

47 Guo, J., D. Kubli, dan P. Saner, 2021. *The Economics of Climate Change: No Action Not An Option*. (April 2021). Swiss Re Institute, Zuerich.

memperlihatkan bahwa bila semua negara memiliki komitmen seperti Indonesia, maka tujuan Perjanjian Paris tidak akan dapat tercapai.⁴⁸

Namun, tampaknya Indonesia akhirnya telah membentur sebuah titik balik. Komitmen untuk mengambil arah pembangunan hijau ini semakin menguat sepulangnya Presiden Joko Widodo dari menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G20 (20 negara dengan ekonomi terbesar dunia) dan the 26th Conference of the Parties (COP26) dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Glasgow, awal bulan November 2021 baru-baru ini. Selain menyepakati **tata cara** pelaksanaan Persetujuan Paris, COP26 juga telah menjadi ajang ‘pamer’ bagi banyak pemimpin negara dan beberapa kelompok negara untuk mengumumkan penguatan ambisi mereka dalam membatasi emisi gas-gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Pada COP26 itu, selain menandatangani beberapa janji (*pledge*) dengan pemimpin dunia lain, Presiden juga memperlihatkan progres Indonesia dalam menangani perubahan iklim.⁴⁹

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang pertama segera sesudah kembali ke **Tanah Air**, Presiden juga menegaskan pentingnya transisi energi dari batu bara ke energi terbarukan. “Betul-betul harus menjadi komitmen kita bersama dan harus kita pastikan berjalannya investasi itu untuk menggeser pembangkit batu bara dan menggantikannya dengan energi baru terbarukan,” ujarnya pada 17 November 2021 lalu.⁵⁰ Selanjutnya, bahkan Presiden mengadakan pertemuan khusus dengan perusahaan-perusahaan energi milik negara, Pertamina dan PLN, dan meminta mereka untuk tidak menunda transisi energi.⁵¹

“Betul-betul harus menjadi komitmen kita bersama dan harus kita pastikan berjalannya investasi itu untuk menggeser pembangkit batu bara dan menggantikannya dengan energi baru terbarukan.”

Indonesia saat ini memimpin G20, kelompok negara-negara dengan ekonomi paling besar dunia. Pada pertemuan G20 yang diadakan tepat sebelum pertemuan COP26 di Glasgow, Presiden menegaskan bahwa G20 harus menjadi contoh bagi negara-negara lain. Selain itu, G20 harus pula menjadi katalis untuk pemulihan hijau. Indonesia juga adalah salah satu pemilik hutan tropik terbesar dunia, dan dengan demikian memiliki posisi strategis untuk menangani krisis iklim. Presiden telah menyatakan bahwa Indonesia akan menyumbangkan posisi strategis ini kepada upaya global untuk menghadapi krisis iklim.⁵²

Kita masih berharap pandemi akan cepat reda. Belum diketahui apakah mutasi virus Covid-19 menjadi varian-varian baru seperti Omicron yang baru-baru ini ditemukan akan memperburuk situasi yang sedang membaik ini.⁵³ Walaupun demikian, kesempatan untuk melakukan **green reset**, atau pemulihan hijau, harus ditangkap, antara lain dengan menggunakan anggaran PEN sebijak mungkin dengan mendukung sektor-sektor yang dalam jangka pendek melindungi masyarakat dari jerat resesi, tapi dalam jangka panjang menyumbang pula kepada pembangunan berkelanjutan.

48 Climate Action Tracker (<https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/>, diakses pada 29 November 2021).

49 Susanto, V.Y., 2021. “COP26 Glasgow, Jokowi sampaikan komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim”, *Kontan* (2 November 2021).

50 “Jokowi Minta Komitmen RI Sulap PLTU Jadi EBT Benar-benar Jalan”, *CNN Indonesia* (17 November 2021).

51 Fajrian, H., 2021. “Jokowi Minta PLN dan Pertamina Tak Menunda Transisi Energi”, *Katadata* (20 November 2021).

52 “President Jokowi: Indonesia Wants G20 to Set Example in Handling Climate Change”, Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia (<https://setkab.go.id/en/president-jokowi-indonesia-wants-g20-to-set-example-in-handling-climate-change/>, diakses pada 29 November 2021).

53 Sangal, A., 2021. “As Omicron variant cases spread, countries rush to impose travel bans”, *CNN* (29 November 2021). Lihat juga Mukherjee, P., 2021. “S.African doctor says patients with Omicron variant have ‘very mild’ symptoms”, *Reuters* (29 November 2021).

Referensi

- CEO, Landscape Indonesia. agus.sari@landscape.id
- Pratama, A.M., 2018. "Sri Mulyani: Angka Kemiskinan di Bawah 10 Persen Pertama Kalinya dalam Sejarah Indonesia", Kompas (17 Juli 2018).
- Jayani, D.H., 2020. "Ekonomi Indonesia Naik Kelas", Katadata (10 Juli 2020).
- World Bank, 2019. *Aspiring Indonesia — Expanding the Middle Class*. World Bank dan Pemerintah Australia, Jakarta.
- Walaupun banyak yang berpendapat bahwa ditemukannya kasus pertama itu adalah hanya puncak gunung es dari banyaknya kasus yang mungkin sudah terjadi pada saat itu, mengingat jumlah kasus mirip pneumonia yang meroket dengan drastis pada waktu sekitar itu, yang dapat dicurigai sebagai awal penemuan covid-19, walaupun tidak dapat dipastikan karena tidak dites. Lihat Ihsanuddin, 2020. "Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia" Kompas (3 Maret 2020).
- Nugroho, Y., and S.S. Syarif, 2021. "Grave Failures in Policy and Communication in Indonesia during the COVID-19 Pandemic", *Perspective 2021* (113). Institute for Southeast Asian Studies, Singapore.
- "Covid di Indonesia: IGD dan ICU sejumlah rumah sakit penuh, pasien dirawat di tenda - 'Kondisinya darurat mirip perang'", BBC News Indonesia (4 Juli 2021).
- "Peta Sebaran", Satuan Tugas Covid-19 (<https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses pada 29 November 2021).
- UNICEF (United Nations Children Fund), UNDP (United Nations Development Program), Prospera (Australia Indonesia Partnership for Economic Development), dan SMERU, 2021. *Analysis of the Social and Economic Impacts of COVID19 on Households and Strategic Policy Recommendations for Indonesia*. United Nations Children Fund, Jakarta.
- "Jokowi Sebut Ekonomi Negara Mirip Komputer 'Hang'", CNN Indonesia (14 Agustus 2020).
- "The Great Reset", World Economic Forum (<https://www.weforum.org/focus/the-great-reset>, diakses pada 26 November 2021).
- Peraturan Pemerintah No. 23/2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
- "Realisasi Program PEN Tahun 2020 Capai Rp 575,8 Triliun", Kementerian Keuangan (15 Juli 2021) (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-program-pen-tahun-2020-capai-rp575-8-triliun/>, diakses pada 28 November 2021).
- "Realisasi PEN 2021 Capai Rp 326,74 Triliun", Kementerian Keuangan (6 September 2021) (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pen-2021-capai-rp326-74-triliun/>, diakses pada 28 November 2021).
- "Menkeu siapkan Rp 414 triliun untuk program PEN 2022", Antara News (23 November 2021).
- "Menkeu: Kebijakan PEN 2022 Responsif dan Fleksibel", Kementerian Keuangan (18 Agustus 2021) (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-kebijakan-pen-2022-responsif-dan-fleksibel/>, diakses pada 28 November 2021).
- IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 2021 (in press). "Summary for Policymakers", dalam Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.), *Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge.
- McGrath, M., 2021. "Climate change: IPCC report is 'code red for humanity'", BBC News (9 Agustus 2021).
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 2015. *The Paris Agreement*. United Nations Framework Convention on Climate Change, Paris.
- Pemerintah Republik Indonesia (RI), 2021. *Updated Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Rosana, F.C., 2021. "Luhut Sebut RI Targetkan Nol Emisi Karbon pada 2060 atau Lebih Cepat", Tempo (4 November 2021).
- RI, 2021, op cit.
- "Menteri LHK jelaskan FoLU Net Sink 2030 bukan berarti nol deforestasi", Antara News (3 November 2021).
- Aqil, A.M.I., 2021. "Court rules government guilty for failing to tackle Jakarta's air pollution", The Jakarta Post (17 September 2021). Segera setelah keputusan pengadilan ini, pemerintah segera naik banding. Lihat Aqil, A.M.I., 2021. "Government appeals Jakarta air pollution verdict", The Jakarta Post (9 Oktober 2021).
- Millyvirta, L., Suarez, I., E. Uusivuori, H. Thieriot, 2020. *Transboundary Air Pollution in the Jakarta, Banten, and West Java Provinces*. Center for Research on Energy and Clean Air, Jakarta.
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2021. *Laporan Akhir Pemantauan Kualitas Udara DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 Januari – Desember*. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Jakarta.
- Greenpeace Indonesia, 2019. "PLTU Batu Bara di Sekitar Provinsi DKI Jakarta dan Dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat Wilayah Jabodetabek",

- IPBES (Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services), 2019. Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services. Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services.
- Keanekaragaman hayati di Indonesia terdapat pada ekosistem darat dan lautnya. Bila hanya dihitung berdasarkan ekosistem darat, maka Indonesia adalah pemilik keanekaragaman kedua dunia setelah Brazil. Hutan Amazon adalah rumah keanekaragaman hayati darat terbesar dunia.
- Jong, H.N., 2021. "Deforestation in Indonesia hits record low, but experts fear a rebound", Mongabay Indonesia (9 Juni 2021).
- Winata, D.K., 2019. "Menteri LHK: Presiden Teken Moratorium Hutan Permanen", Media Indonesia (6 Agustus 2019).
- "KLHK Gugat 29 Perusahaan Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan", CNN Indonesia (29 Januari 2021).
- Susanto, V.Y., 2021. "Realisasi perhutanan sosial mencapai 4,8 juta hektare", Kontan (7 November 2021).
- "KLHK Gugat 29 Perusahaan Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan", CNN Indonesia (29 Januari 2021).
- RI, 2014. Peraturan Pemerintah No. 79/2014 mengenai Kebijakan Energi Nasional.
- Asmarini, W., 2021. "Lampau AS, RI Jadi Produsen Batu Bara Terbesar Ke-3 Dunia", CNBC Indonesia (12 Juli 2021).
- "Bauran Pembangkitan Listrik di Indonesia", Transisi Energi (https://transisienergi.id/data_input/bauran-pembangkitan-listrik-di-indonesia/, diakses pada 29 November 2021).
- Mudassir, R., 2021. "Banyak Kendala, Target 23 Persen EBT di 2025 Diprediksi Bakal Molor", Bisnis Indonesia (25 Oktober 2021).
- Jong, H.N., 2021, op cit.
- Hariandja, R., 2020. "Mengapa Lingkungan Hidup Terancam dengan Ada Omnibus Law?", Mongabay (21 Oktober 2020).
- "MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Apa Dampaknya?", Kompas (26 November 2021).
- Permatasari, A.P., 2020. "Menakar Ancaman Kebijakan Food Estate terhadap Hutan Alam dan Lahan Gambut Indonesia", Yayasan Madani Berkelanjutan, Jakarta (24 Februari 2021).
- Bappenas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional), 2021. A Green Economy for a Net-Zero Future: How Indonesia can build back better after COVID-19 with the Low Carbon Development Initiative (LCDI). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. Lihat juga laporan LCDI sebelumnya, Bappenas, 2019. Low Carbon Development: A Paradigm Shift Towards a Green Economy in Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Esti, D.R., 2021. "The more ambitious climate action the better for Indonesia's economy", The Jakarta Post (15 November 2021).
- Guo, J., D. Kubli, dan P. Saner, 2021. The Economics of Climate Change: No Action Not An Option. (April 2021). Swiss Re Institute, Zuerich.
- Climate Action Tracker (<https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/>, diakses pada 29 November 2021).
- Susanto, V.Y., 2021. "COP26 Glasgow, Jokowi sampaikan komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim", Kontan (2 November 2021).
- "Jokowi Minta Komitmen RI Sulap PLTU Jadi EBT Benar-benar Jalan", CNN Indonesia (17 November 2021).
- Fajrian, H., 2021. "Jokowi Minta PLN dan Pertamina Tak Menunda Transisi Energi", Katadata (20 November 2021).
- "President Jokowi: Indonesia Wants G20 to Set Example in Handling Climate Change", Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia (<https://setkab.go.id/en/president-jokowi-indonesia-wants-g20-to-set-example-in-handling-climate-change/>, diakses pada 29 November 2021).
- Sangal, A., 2021. "As Omicron variant cases spread, countries rush to impose travel bans", CNN (29 November 2021).
- Mukherjee, P., 2021. "S.African doctor says patients with Omicron variant have 'very mild' symptoms", Reuters (29 November 2021).



PEMIKIRAN DI BIDANG TEKNOLOGI

- Transformasi Digital yang Terdorong COVID-19



TRANSFORMASI DIGITAL YANG TERDORONG COVID-19

Onno W. Purbo

Pakar di bidang teknologi informasi

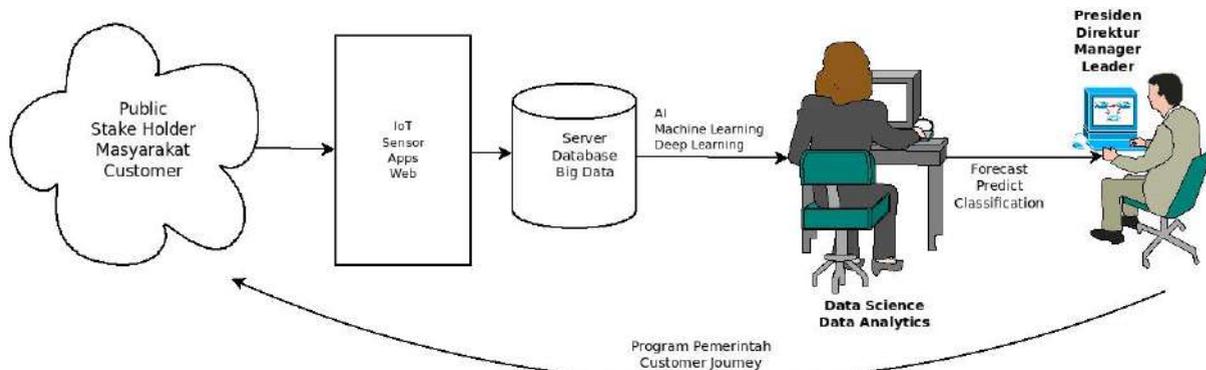
PLATO benar, *necessity is the mother of invention*. Pandemi Covid-19 memaksa perubahan dan inovasi berbagai bidang, aplikasi, pekerjaan hingga pola kerja dan budaya (Al-Sartawi, A.M.A.M. ed., 2021) (Nandan, R.A., 2021).

Selama krisis Covid -19, satu hal yang mengalami pertumbuhan luar biasa adalah digitalisasi, yang berarti segalanya mulai dari layanan online hingga *work from home*, dari penemuan kembali *supply chain* hingga penggunaan *artificial intelligence* (AI) dan *machine learning* untuk meningkatkan operasi. Perawatan kesehatan juga telah berubah secara substansial, dengan *telehealth* dan biofarma yang sangat mewarnai perubahan (Garg, L., et.al., 2022) (Reddy, S., 2021) (Zhu, L., et al., (2021).

Disrupsi menciptakan ruang bagi pengusaha, di satu sisi banyak usaha besar dengan pola

konvensional yang berguguran dan menimbulkan banyak PHK. Di sisi lain, pelapak/entrepreneur perorangan menggunakan platform online bahkan media sosial tumbuh subur (Coughlan, D., 2021) (Bhatti, A., Akram, H., et.al., 2020). Perubahan-perubahan ini yang menjadi dasar utama terjadinya transformasi digital di berbagai lini.

Untuk bisa terjadi transformasi digital dibutuhkan pondasi *mindset* yang jelas tentang transformasi digital itu sendiri. Jangan sampai terkecoh sebatas digitalisasi proses manual/konvensional seperti yang banyak terjadi (Rogers, D.L., 2016). Tentunya dalam proses transformasi, perlu ditekankan kemandirian/berdikari dan kedaulatan agar Indonesia tidak menjadi sekadar konsumen teknologi, tapi semaksimal mungkin memanfaatkan kemampuan internal bangsa Indonesia untuk mendukung proses transformasi digital.



Gambar: Data Driven Proses.

Salah satu kunci utama terjadinya transformasi digital adalah ketersediaan data yang besar dalam *big data* (Al-Sartawi, A.M.A.M. ed., 2021) (Nickels, L., 2019), sehingga kita dapat melakukan proses klasifikasi dan *forecasting* yang presisi untuk melakukan kustomisasi bahkan personalisasi baik pada *startup*, perusahaan/enterprise, maupun kementerian/lembaga bahkan kabinet.

Dalam gambar di atas di perhatikan *data driven proses*, seperti *decision support system*, di mana pimpinan, presiden, menteri bahkan *BoD Startup* akan memonitor semua hal yang terjadi di lapangan dari *customer*, masyarakat, *stakeholder*, *public* melalui aplikasi web, platform, sensor, bahkan Internet of Things (IoT) (Nandan, R.A., 2021).

Semua data dimasukan ke *database* yang besar, hingga *big data* yang tidak terstruktur. Data Scientist melakukan analisis data menggunakan *tools*, seperti AI, *machine learning*, *deep learning* untuk melakukan klasifikasi dan *forecasting* yang hasilnya diberikan kepada para pimpinan agar dapat membuat kegiatan/program yang lebih *personalized* bagi kelompok masyarakat/pengguna sehingga akan meningkatkan *customer journey/experience* (Kumari, S., Tripathy, K.K., & Kumbhar, V., 2021). Perlu dicatat bahwa ini hanya bisa terjadi jika kita dapat memonitor dengan baik apa yang terjadi di lapangan, pada sisi ekstrim proses ini akan menjadi proses memata-matai (Kumari, S., Tripathy, K.K., & Kumbhar, V., 2021).



Transformasi Digital

Pengertian proses konvensional, digitalisasi dan transformasi digital sangat penting untuk dapat mengerti transformasi digital dengan baik. Sebagian besar akan terjebak dalam proses digitalisasi, dan

bukan melakukan perubahan dan transformasi digital (Clemons, E.K., 2019)(Stone, S.M., 2019). Untuk memudahkan memahami transformasi digital, tabel di bawah memperlihatkan perbedaan pola konvensional, digitalisasi dan transformasi di dunia pendidikan yang cukup familiar bagi banyak orang.

Tabel: Konvensional vs. Digitalisasi vs. Transformasi Digital.

	Konvensional	Digitalisasi	Transformasi digital
Sifat	Manual, terikat ruang dan waktu	Informasi digital, terikat ruang dan waktu	Informasi digital Tidak terikat ruang dan waktu
Physical presence/absensi	Penting	Virtual presence	Tidak penting
Siswa	Hanya siswa sekolah	Hanya siswa sekolah	Boleh diikuti oleh umum/secara terbuka.
Proses belajar	Synchronous/berurut	Synchronous/berurut	Asynchronous/bisa paralel, bisa melihat arsip/rekaman
Ujian	Ditentukan ruang & waktu	Ditentukan waktu	Boleh kapan saja, boleh di mana saja Boleh berkali-kali
Remedial	Ada	Ada	Bisa hilang
Siswa sebagai	Konsumen pengetahuan	Konsumen pengetahuan	Didampingi untuk menjadi produsen pengetahuan.

Terlihat pada tabel di atas perbedaan yang jelas antara proses pendidikan konvensional dengan pendidikan yang telah melakukan transformasi digital. Sebagai gambaran yang telah terjadi di Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS),

Semua kuliah OWP, dapat diikuti melalui ZOOM maupun *live streaming* dan di arsip di Youtube OnnoCenter dan situs onnocenter.sakamilenia.id

Semua kuliah OWP, terbuka untuk mahasiswa ITTS mau publik secara bebas (FREE) di seluruh Indonesia secara live.

Semua kuliah ITTS, di arsip di *youtube* dan FREE untuk diakses oleh seluruh Indonesia.

Di sebagian kuliah ITTS, karena *server e-learning* beroperasi 24 jam, mahasiswa dapat mengerjakan kuis, *mid test*, final exam berkali-kali selama satu semester.

Konsekuensi yang menarik semester pendek dan ujian remedial hilang dengan sendirinya.

ITTS mengoperasikan situs <https://opencourse.itts.ac.id>, terbuka untuk umum untuk mengakses kuliah di ITTS termasuk mengerjakan ujian secara FREE.

Di <https://opencourse.itts.ac.id>, umum dapat memperoleh sertifikat secara FREE.

Sertifikat di <https://opencourse.itts.ac.id> dapat ditransfer menjadi kredit sarjana di ITTS mau di kampus-kampus lain yang mengakuinya.

Transformasi digital seperti di atas, jarang dilakukan oleh kampus-kampus Indonesia walaupun telah dicanangkan kampus merdeka & merdeka belajar oleh MENDIKNAS (Admin Sevima, 2021).

Pola transformasi digital yang sama dengan pola pendidikan di atas diharapkan terjadi di berbagai lini, termasuk di swasta, bahkan organisasi dan birokrasi pemerintah. Beberapa contoh pertanyaan yang paling sederhana,

Apakah absensi menjadi relevan pada *work from home*? Memilih *output oriented*? Atau *presence oriented*? Jam? Waktu? Apakah proses harus berjenjang? Berurut? Atau boleh langsung? Atau paralel? Tanda apa yang digunakan untuk otorisasi? Autentikasi? Tanda tangan? Kode?

Tentunya masih banyak pertanyaan mendasar, hingga perubahan kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan terjadinya transformasi digital. Perubahan *mindset* para pimpinan maupun pekerja yang lebih fleksibel dan terbuka menjadi pondasi utama agar terjadi transformasi digital (Clemons, E.K., 2019).

Agility

Agility adalah kemampuan untuk bergerak dengan cepat dan mudah dalam menanggapi perubahan atau tantangan, walaupun dalam lingkungan bisnis/usaha, istilah tersebut sangat tergantung pada konteksnya (Sreenivasan, et.al., 2021). Agility menjadi penting di era kedepan selepas Covid-19.

Khususnya bagi bidang-bidang yang padat dengan IT, konsekuensi logis kemampuan Agility adalah (Sreenivasan, et.al., 2021),

- Investasi menjadi 'risiko'.
- Investasi menjadikan kita lebih sulit bergerak.
- Sewa dan *subcontract* menjadi *new normal*.
- *Agility* menjadi mungkin jika ada SDM yang mumpuni. SDM berkualitas menjadi kunci *agility*.



Permasalahan

Ada beberapa permasalahan yang akan menjadi pembatas dalam melakukan transformasi digital, antara lain:

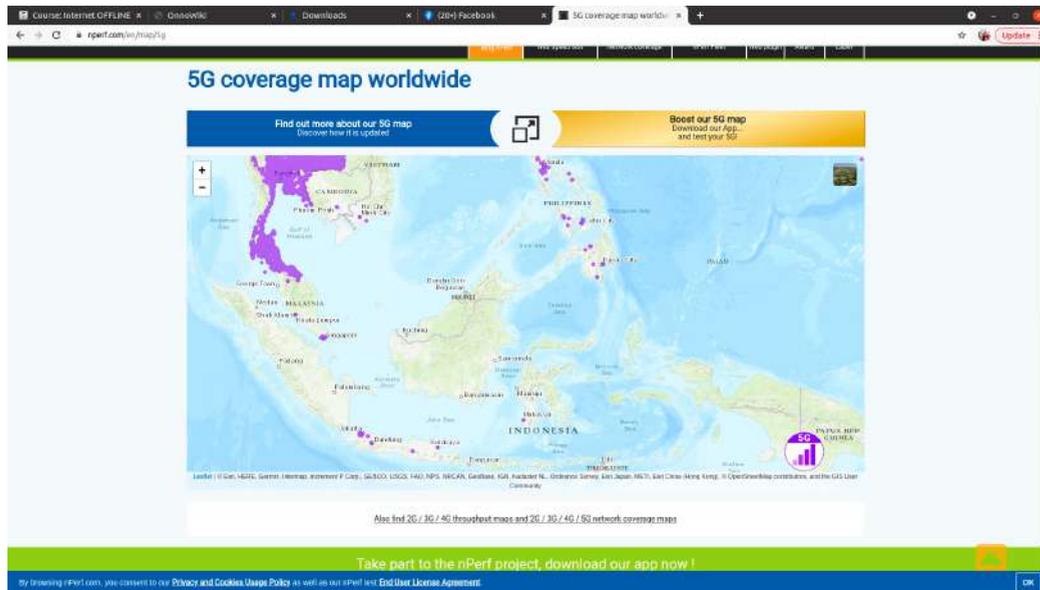
Keterbatasan infrastruktur di daerah.

Sumber daya manusia.

Privacy data protection.

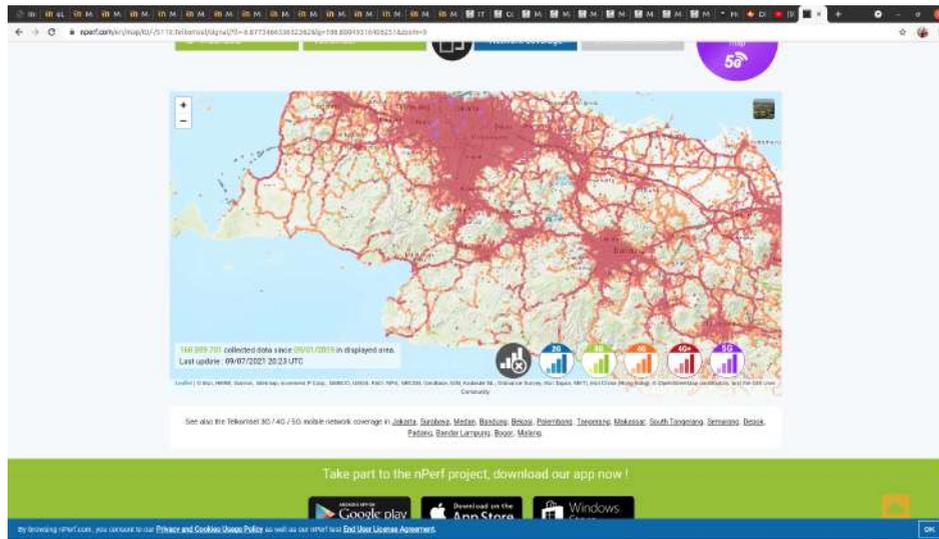
Keterbatasan Infrastruktur di Daerah

Harus diakui, para operator telekomunikasi saat ini sedang berjuang keras untuk memenuhi sambungan telekomunikasi di perdesaan. Sayangnya, akses Internet terutama di daerah/perkampungan/rural biasanya akan sangat tergantung pada keberadaan operator seluler/3G/4G. Data dari situs *nperf.com* memperlihatkan banyak daerah di Indonesia yang masih kesulitan untuk akses Internet. Aplikasi lain untuk analisis sinyal seluler adalah *OpenSignal* yang ada di *playstore* android (Oughton, et.al., R., 2019).



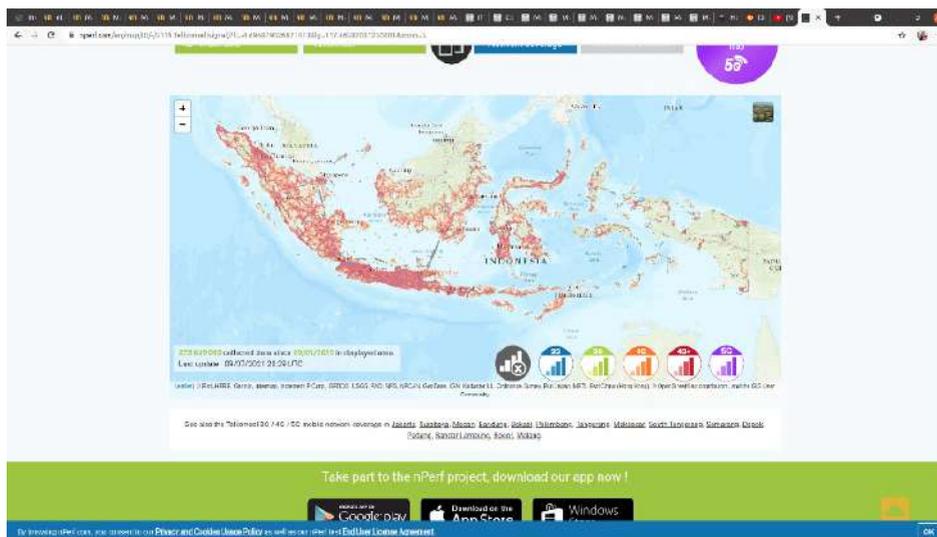
Pada Gambar diperlihatkan kondisi sinyal Telkomsel di seluruh Indonesia yang dapat diakses melalui situs *nperf.com*. Terlihat banyak sekali blank spot terutama di luar Jawa, khususnya di wilayah Indonesia timur. Data coverage operator seluler ini di kumpulkan oleh *nperf.com* sejak tahun 2019. Kondisi tidak berbeda jauh juga dapat kita peroleh dari aplikasi *OpenSignal* di smartphone Android (Oughton, et.al., R., 2019).

Untuk melihat lebih detail kondisi sinyal sebaiknya kita *zoom in* ke wilayah yang kita inginkan. Gambar di samping memperlihatkan kondisi sinyal di wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Terlihat dengan sangat jelas terutama di wilayah yang berada di selatan Jakarta, seperti Sukabumi, Pelabuhan Ratu, dan Pameungpeuk sinyal seluler sangat sulit.



Gambar di samping memperlihatkan kondisi jaringan 5G di kawasan ASEAN di akhir tahun 2021. Terlihat jelas bahwa negara yang sudah dengan baik menggelar 5G di ASEAN hanya dua (2) negara, yaitu, Thailand dan Singapore. Jaringan 5G di Malaysia masih terbatas

di wilayah Kuala Lumpur, Di Indonesia 5G tampaknya hanya tergelar di beberapa kota besar saja, yaitu, Jabodetabek – Jakarta & Bekasi, Karawang, Bandung, Surakarta / Solo, Surabaya, Makassar.



Sumber Daya Manusia & Budaya Arsip

Pada saat berbicara dengan banyak pihak, baik swasta maupun kementerian/lembaga, salah satu masalah paling besar dalam implementasi adalah mencari sumber daya manusia (SDM) yang mampu untuk melakukan *programming* dan analisis data (Nafi'ah, B.A., 2021)(Wuragil, Z., 2020, November 19).

Sialnya, solusi (*mindset*) para pejabat/pimpinan lebih banyak untuk melakukan pengadaan barang. Membeli aplikasi untuk analisis data dengan harga yang fantastis. Barang lebih mudah untuk diperlihatkan dan diaudit keberadaannya. *Mindset* yang ada berasumsi bahwa dengan membeli aplikasi yang baik akan menyelesaikan pekerjaan. Setelah aplikasi, khususnya untuk melakukan AI, *data mining*, *machine learning*, telah dibeli biasanya terjadi kesulitan dalam mengoperasikan bahkan seringkali tidak jalan karena memang tidak ada data yang mumpuni dan SDM yang dapat menjalankan, menganalisis data (Nafi'ah, B.A., 2021)(Wuragil, Z., 2020, November 19).

Bayangkan, data yang akan dianalisis sebagian besar data berbentuk *hardcopy* yang tidak bisa diproses dengan mudah oleh aplikasi analisis data (RMOLNETWORK, 2021, June 22) (Situmorang, A.P., 2021, April 5). Bahkan sebagian besar, kebijakan/prosedur yang ada lebih suka *hardcopy* berpeti-peti, daripada membuat arsip *data/file* secara elektronik yang terstruktur. Kondisi ini akan menyusahakan pekerjaan *data analysis* (simara.id, 2019) (RMOLNETWORK, 2021, June 22) (Situmorang, A.P., 2021, April 5).

Privacy Data Protection

Di masa lalu, serangan terhadap infrastruktur lebih dominan sehingga *cyber security* menjadi salah satu *concern*. Teknologi *firewall*, enkripsi, *public key infrastructure*, SSL menjadi solusi di sisi infrastruktur *cyber security* (Chawki, et.al., 2018) (Elsayed, et.al., 2019) (Virupakshar, et.al., 2020).

Dengan berkembangnya *data analytics*, *data science*, AI, *machine learning*, maka *profiling*, *classification*, dan personalisasi menjadi menarik berdasarkan data pribadi, perilaku, anggaran, baik bagi *startup*, swasta, maupun pemerintah (Christine, et.al., 2021)(Ju, et.al., 2018).

Sayangnya, proses memata-matai data pribadi oleh *machine learning* dan AI menjadi banyak bertentangan dengan prinsip *privacy* dan *data protection*. Oleh karena itu, perlu dipikirkan *ethical data analytics* agar AI dan *machine learning* bisa menjaga *privacy*. Tentunya akan lebih baik jika dapat berupa *policy* bahkan aturan seperti GDPR Eropa (Curry, S., 2021) (Rhahla, et.al., 2021).

Ada beberapa solusi kunci agar transformasi digital dapat terjadi dengan mudah dengan segala keterbatasan yang ada. Beberapa contoh solusi kunci, antara lain solusi Internet komunitas, solusi sewa agar lebih *agile*, kurikulum dan budaya arsip.

Solusi Internet Komunitas

Keinginan untuk maju, sukses, memperoleh akses Internet bukan monopoli mereka yang bekerja di kementerian/lembaga atau di perusahaan besar/swasta. Mereka yang berada di pinggiran kota bahkan desa/rural juga mempunyai keinginan yang sama. Alhamdulillah, pada hari ini telah berkembang sekitar 60.000+ jaringan Internet komunitas di Indonesia, yang terdokumentasi dengan cukup baik (Purbo, O.W., 2016).

Bahkan kita telah menjadi contoh dunia untuk jaringan Internet komunitas, karena hanya Indonesia yang memiliki jaringan Internet komunitas terbesar di dunia sehingga kita memperoleh penghargaan tertinggi di Internet Dunia (Hidayat, M., 2020, 18 November) (Usman, S., 2020, November 23).

Biaya akses jaringan Internet komunitas ini sekitar Rp50-100.000/bulan atau Rp3-5.000/hari untuk kecepatan 10-30Mbps. Harga murah ini tidak mungkin dilakukan oleh operator besar di Indonesia. Hanya



komunitas dan rakyat biasa yang mungkin melakukan implementasi dan operasi dengan margin sangat tipis (Purbo, O.W., 2016).

Sebagian besar masih menggunakan peralatan *WiFi* jarak jauh, secara perlahan mereka melakukan migrasi ke teknologi fiber optik karena investasi relatif lebih murah dengan kecepatan mencapai 1+ Gbps. Untuk jaringan lokal biasanya menggunakan *hotspot WiFi*



yang berbayar, dengan *voucher* yang tersedia di *counter pulsa* di lokal perdesaan. Semua dimungkinkan karena semua peralatan yang dibutuhkan telah tersedia di berbagai toko online di Indonesia (Purbo, O.W., 2016).

Gambar di atas memperlihatkan peta jaringan *wireless* jarak jauh yang sangat *legend* di Indonesia, yaitu, jaringan Manado Ternate Talaud yang dioperasikan oleh teman-teman di Manado yang dipimpin oleh Insan Balandatu dan Nielson Assa dari PT. Infotek Global Network. Mereka mem-*push limit* dari jaringan *wireless* jarak jauh antarpulau di utara Manado hingga Ternate di Maluku dengan rentang *coverage* sekitar 700 km (Purbo, O.W., 2016).

Gambar di atas adalah menara *relay* di Pulau Batang Dua yang berada kira-kira di tengah-tengah antara Manado dan Ternate. Total jarak antara Manado dan Ternate sekitar 300 km-an. Sehingga masing-masing antena yang ada pada foto di atas sebetulnya harus mendorong sinyal *wireless* untuk bisa menempuh jarak masing-masing sekitar 150 km. Ini merupakan jarak yang amat sangat jauh untuk sebuah sambungan *wireless*.

Untuk memberikan gambaran visual tentang terjadinya migrasi rakyat desa ke fiber optik, bisa dilihat contoh gambar yang memperlihatkan instalasi rekan-rekan dari tim Donie Thambas di wilayah Sukabumi¹.

1 Purbo, O. (2021), RT/RW-net: Penggunaan di Sukabumi Pasar, OnnoCenter, http://onnocenter.or.id/wiki/index.php/RT/RW-net:_Penggunaan_di_Sukabumi_Pasar

Saat ini cukup banyak instalasi fiber optik di desa, selain Donie Thambas, juga ada awi.net.id di wilayah Banten dan Lampung, salma.net.id di wilayah Garut-Tasikmalaya dan masih banyak lagi. Bahkan komunitas Internet Desa ini membuat banyak *tutorial* di *youtube* agar bisa diikuti oleh banyak rekan-rekan di Indonesia²³. Untuk memberikan gambaran, diperlihatkan contoh peta sambungan fiber optik Internet Rakyat Desa (Ira Desa) kecepatan 1Gbps yang digelar oleh Dadang dkk salma.net.id di wilayah Garut-Tasikmalaya⁴.

Solusi Sewa agar Agile

Untuk memudahkan pergerakan (*agility*) organisasi, maka 'sewa' menjadi menarik. Terutama karena kita dapat dengan mudah mengatur sumber daya (*resource*) yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi beban pekerjaan/Layanan yang harus ditangani. Bayangkan, sebuah server milik dinas pendidikan saat mengumumkan hasil saringan masuk sekolah negeri. Biasanya server tersebut akan *overload* pada saat masa pengumuman yang mungkin hanya beberapa kali per tahun.

Secara logika sederhana, akan mubazir investasi dan listrik, jika beban tinggi yang hanya beberapa hari per tahun harus diselesaikan dengan membeli server yang besar yang sebagian besar waktu-nya akan *idle* selama setahun. Konsekuensinya, *mindset* pengadaan perlu diubah menjadi *mindset* sewa yang harus bisa sewaktu-waktu mencairkan dana pada saat kebutuhan mendadak.

Teknologi sewa menjadi solusi, salah satunya adalah Cloud. Ada cukup banyak pilihan teknologi Cloud, yang bisa digunakan, seperti,

On Site - teknik lama di mana semua investasi dan operasional dilakukan sendiri.

Infrastructure as a Service (IaaS) - pengguna menyewa

jaringan dan mesin virtual, sistem operasi dan aplikasi di atasnya dioperasikan sendiri oleh pengguna (Tsai, W.L., 2021)(Chawki, et.al., 2018).

Platform as a Service (PaaS) - pengguna mengelola data dan aplikasi sendiri Gesvindr, et.al., 2020).

Software as a Service (SaaS) - pengguna menyewa keseluruhan layanan, termasuk manajemen data dan aplikasi. Contoh gmail dan google docs (ELsayed, et.al., 2019).

Public Cloud - cloud yang dioperasikan oleh penyedia jasa di Internet (Núñez, et.al., (2022).

Private Cloud - cloud yang dioperasikan sendiri semua oleh pengguna, kira-kira mirip dengan on-site (Virupakshar, et.al., 2020)

Edge Cloud - cloud yang terpisah dari Internet, bisa di letakan di tengah hutan saat kita melakukan eksplorasi geologi (Laroui, et.al., 2021)..

Prinsipnya pengguna hanya membayar yang digunakan saja. Untuk penggunaan yang terus menerus dengan beban yang sangat tinggi selama bertahun-tahun, maka dengan memiliki dan mengoperasikan sendiri infrastruktur akan jauh lebih murah⁵.

Kurikulum & Budaya Arsip Elektronik

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Arsip Elektronik menjadi kunci keberhasilan proses transformasi digital. Ketiadaan arsip elektronik yang terstruktur dan tersimpan dengan baik menyulitkan *AI*, *machine learning*, *data mining* yang mengakibatkan *decision support system* tidak berjalan dengan baik (Tibbo, H.R., 2003).

Solusi untuk keberadaan arsip elektronik, selain kebijakan dan peraturan pendukung, akan sangat diperlukan komitmen untuk mengimplementasikan,

2 Purbo, O. (2021), 20211028 foto2 dokumentasi AWI NET.ID, OnnoCenter channel, <https://www.youtube.com/watch?v=vDGMwfMdiW8>

3 Awinet Official awi.net.id, <https://www.youtube.com/channel/UCY7uWTNBBbi74968CxTeCpg>

4 Salma.net.id fiber di desa Garut-Tasik, <https://www.youtube.com/watch?v=G13N3GYItOM>

5 Search Youtube keyword "Membuat RT/RW-net sendiri", https://www.youtube.com/results?search_query=Membuat+RT%2FRW-net+sendiri



Digitalisasi arsip kementerian/lembaga yang sudah ada (Kemenperin, 2021, October 10)(Limanseto, H., 2021, June 23)(Mutiara, P., 2021, October 14).

Sistem penyimpanan elektronik dan *database* dengan *backup* yang terstruktur dengan Disaster Recovery Center (DRC) yang mumpuni (Yu, *et.al.*, 2017).

Sistem autentikasi, enkripsi, sertifikat digital, sertifikat *authority* sebagai *mirror* proses manual yang selama ini berjalan (Li, *et.al.*, 2021).

Mengaktifkan sistem *office* elektronik untuk surat menyurat, dokumen elektronik (Conrath, *et.al.*, 1981).

Implementasi tidak mungkin hanya berupa pengadaan barang saja, yang akan memakan waktu lama adalah menyiapkan SDM maupun tata kelola sekitar perubahan proses, bahkan mungkin mengubah struktur organisasi.

SDM adalah bagian paling sulit karena ini akan melibatkan banyak sektor, banyak orang sekaligus. Kondisi statistik SDM di Indonesia dapat diubah menjadi lebih cerah. Saat ini input anak yang masuk ke SD sekitar 6 juta per tahun sedang sarjana yang dihasilkan hanya sekitar 600.000 per tahun (Wuragil, 2020, November 19).

Dengan kondisi hanya sekitar 9% dari total mahasiswa adalah jurusan teknik. Artinya hanya ada sekitar 60.000 sarjana teknik per tahun. Ini menjadi tantangan terbesar untuk merealisasi cita-cita Presiden Jokowi untuk memperoleh 9 juta *digital talent* di tahun 2035 (Nafi'ah, B.A., 2021) (Wuragil, Z., 2020, November 19).

Indonesia perlu secara masif mengubah kurikulum maupun prioritas penjurusan di sekolah/kampus. Taktik top down seperti kampus merdeka, merdeka belajar yang dicanangkan oleh MENDIKNAS (Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A., 2020)(Muslimat, A., 2021) cukup ampuh untuk memaksa kampus berubah agar lebih dekat ke dunia kerja.

Strategi *bottom-up* juga dapat digunakan, misalnya

yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika (MASTEL - mastel.id) dan juga oleh Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS - itts.ac.id), dalam kasus MASTEL,

MASTEL membuat situs *e-learning* bebas mdamastel.id, di mana semua orang dapat mengambil materi & sertifikasi secara bebas/gratis. Materi di mdamastel.id dikembangkan oleh banyak praktisi lapangan (Hutami, A.S., 2019, December 12).

Operator telekomunikasi, *Software House* menggunakan sertifikat MASTEL sebagai salah satu parameter dalam rekrutmen pegawai.

Beberapa sekolah/kampus menjadi tertarik untuk mengadopsi kurikulum yang ada di mdamastel.id supaya lulusan mudah memasuki dunia kerja.

Dalam kasus ITTS,

ITTS membuat situs *e-learning* bebas (FREE) opencourse.itts.ac.id, dimana semua orang dapat mengambil materi & sertifikasi secara bebas/gratis. Materi di opencourse.itts.ac.id di kembangkan oleh dosen ITTS dan praktisi lapangan (Yusuf, A., 2021, March 12).

Mereka yang memperoleh sertifikat kuliah di opencourse.itts.ac.id dapat mentransfer-nya sebagai kredit di kampus lain, atau dapat ditransfer menjadi kredit sarjana S1 di ITTS (Yusuf, A., 2021, March 12).

Beberapa perusahaan telah menyampaikan minatnya untuk merekrut mahasiswa ITTS maupun umum yang berhasil menyelesaikan kuliah di opencourse.itts.ac.id. Para mahasiswa rekrut ini kemudian dimasukan *bootcamp* dalam perusahaan selama 1-2 semester sebelum langsung bekerja.

Beberapa sekolah, khusus SMK, mulai mengadopsi materi kuliah di opencourse.itts.ac.id supaya lulusannya lebih mudah untuk masuk ke ITTS maupun ke dunia kerja.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Hal terpenting yang perlu kita sadari bersama bahwa kemampuan bangsa Indonesia sebetulnya sangat luar biasa. Kemampuan dan kreativitas dalam merekayasa teknologi sebetulnya bukan main. Ini menjadi modal utama dalam proses transformasi digital bangsa yang jika dilakukan secara benar, dan meninggalkan *mindset* murni pengadaan barang, tetapi merangkul SDM dan kreasi teknologinya bukan mustahil akan menjadikan bangsa ini berdaulat di ranah *cyber*.

Indonesia perlu secara masif mengubah kurikulum maupun prioritas penjurusan di sekolah/kampus. Kebijakan SDM baik strategi *top down* seperti kampus merdeka, merdeka belajar maupun strategi *bottom-up* yang secara halus memaksa sekolah/kampus untuk mengadopsi kurikulum yang cocok dengan kebutuhan dunia kerja menjadi penting.

Pengarsipan elektronik secara masif, didukung oleh teknologi enkripsi, autentikasi yang berjalan di atas *cloud* akan menjadi sumber data bagi *AI* dan *machine learning* yang berguna dalam *decision support system* untuk menerawang program dan kebijakan yang baik untuk ke depan.

Data granular dan presisi memungkinkan *profiling* dan personalisasi program yang baik sehingga mendukung program dan kebijakan tepat dan presisi. Data granular dan presisi akan dimudahkan oleh akses jaringan Internet yang merata di seluruh negeri. Jaringan komunitas berbasis *wireless* akses jarak jauh dan fiber optik berkecepatan tinggi yang saat ini mulai berkembang di banyak desa maupun daerah perlu dirangkul dan diberdayakan untuk menjamin pemerataan akses ke seluruh negeri.



Referensi

- Admin Sevima, (2021, March 09). Apa Itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka? <https://sevima.com/apa-itu-merdeka-belajar-kampus-merdeka/>
- Al-Sartawi, A.M.A.M. ed. (2021), *The Big Data-Driven Digital Economy: Artificial and Computational Intelligence*, Springer Nature Switzerland AG
- Bhatti, A., Akram, H., Basit, H. M., Khan, A. U., Raza, S. M., & Naqvi, M. B. (2020). E-commerce trends during COVID-19 Pandemic. *International Journal of Future Generation Communication and Networking*, 13(2), 1449-1452.
- Chawki, E.B.Ahmed, A., Zakariae, T. (2018). IaaS Cloud Model Security Issues on Behalf Cloud Provider and User Security Behaviors. *Procedia Computer Science*, Volume 134, 2018, Pages 328-333, ISSN 1877-0509, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.07.180>
- Christine, D.I., Thinyane, M. (2021). Citizen science as a data-based practice: A consideration of data justice, *Patterns*, Volume 2, Issue 4, 100224, ISSN 2666-3899, <https://doi.org/10.1016/j.patter.2021.100224>
- Clemons, E.K. (2019), *New Patterns of Power and Profit: A Strategist's Guide to Competitive Advantage in the Age of Digital Transformation*, Springer Nature Switzerland AG
- Conrath, D.W., Higgins, C.A., Thanchenkary, C.S., Wright, W.M. (1981). The electronic office and organizational behavior — measuring office activities. *Computer Networks* (1976), Volume 5, Issue 6, 1981, Pages 401-410, ISSN 0376-5075, [https://doi.org/10.1016/0376-5075\(81\)90040-4](https://doi.org/10.1016/0376-5075(81)90040-4)
- Coughlan, D. (2021), *E-Commerce Activated: The Ultimate Playbook To Building A Successful E-Commerce Business*, Damien Coughlan and DC Global Marketing LLC.
- Curry, S. (2021). Achieving GDPR compliance post-Privacy Shield, *Computer Fraud & Security*, Volume 2021, Issue 2, Pages 6-8, ISSN 1361-3723, [https://doi.org/10.1016/S1361-3723\(21\)00017-8](https://doi.org/10.1016/S1361-3723(21)00017-8)
- Elsayed, M., Zulkernine, M. (2019). Offering security diagnosis as a service for cloud SaaS applications, *Journal of Information Security and Applications*, Volume 44, Pages 32-48, ISSN 2214-2126, <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2018.11.006>
- Garg, L., Basterrech, S., Banerjee, C. & Sharma, T.K. (2022), *Artificial Intelligence in Healthcare*. Springer Nature Singapore Pte Ltd.
- Gesvindr, D., Gasior, O., Buhnova, B., (2020). Architecture design evaluation of PaaS cloud applications using generated prototypes: PaaSArch Cloud Prototyper tool, *Journal of Systems and Software*, Volume 169, 110701, ISSN 0164-1212, <https://doi.org/10.1016/j.jss.2020.110701>
- Hidayat, M. (2020, 18 November). "Onno W. Purbo Raih Penghargaan Bergengsi di Bidang Internet "Jonathan B. Postel Service Award"", *liputan6.com*, <https://www.liputan6.com/tekno/read/4411868/onno-w-purbo-raih-penghargaan-bergengsi-di-bidang-internet-jonathan-b-postel-service-award>
- Hutami, A.S., (2019, December 12). Peluncuran Platform MASTEL Digital Academy, Gatra, <https://www.gatra.com/detail/news/461616/teknologi/peluncuran-platform-mastel-digital-academy>
- Kumari, S., Tripathy, K.K., & Kumbhar, V. (2021), *Application of Big Data and Business Analytics*. Emerald Publishing Limited
- Ju, J., Liu, L., Feng, Y. (2018). Citizen-centered big data analysis-driven governance intelligence framework for smart cities, *Telecommunications Policy*, Volume 42, Issue 10, Pages 881-896, ISSN 0308-5961, <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2018.01.003>
- Laroui, M., Nour, B., Moun gla, H., Cherif, M.A., Afifi, H., Guizani, M. (2021). Edge and fog computing for IoT: A survey on current research activities & future directions, *Computer Communications*, Volume 180, Pages 210-231, ISSN 0140-3664, <https://doi.org/10.1016/j.comcom.2021.09.003>
- Kemenperin. (2021, October 10). Kemenperin: Digitalisasi Dukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. <https://kemenperin.go.id/artikel/22850/Kemenperin:-Digitalisasi-Dukung-Pelaksanaan-Reformasi-Birokrasi>
- Li, Y., Liu, Q. (2021). A comprehensive review study of cyber-attacks and cyber security; Emerging trends and recent developments, *Energy Reports*, 2021, ISSN 2352-4847, <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.08.126>
- Limanseto, H. (2021, June 23). Menko Airlangga: Pembangunan SDM dan Digitalisasi Jadi Kendaraan Menuju Ekonomi Baru. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3108/menko-airlangga-pembangunan-sdm-dan-digitalisasi-jadi-kendaraan-menuju-ekonomi-baru>
- Mark W. Johnson, M.W. (2018), *Reinvent Your Business Model*. Harvard Business Review Press Boston, Massachusetts
- Mutiara, P., (2021, October 14). Digitalisasi Layanan Kesehatan Harus Berbasis Data Cepat dan Akurat. <https://www.kemenkopmk.go.id/digitalisasi-layanan-kesehatan-harus-berbasis-data-cepat-dan-akurat>
- Muslimat, A. (2021). *Masa Depan Kampus Merdeka & Merdeka Belajar: Sebuah Bunga Rampai Dosen*. Bintang Visitama Publisher.

- Nafi'ah, B.A. (2021). Indonesia's Digital Talent Policy Readiness. *Public Administration Journal of Research*, 3(1).
- Nandan, R.A. (2021), *A Closer Look at Big Data Analytics*, Nova Science Publishers, Inc.
- Nickels, L. (2019), The importance of big data, *Metal Powder Report*, Volume 74, Issue 4, Pages 181-183, ISSN 0026-0657, <https://doi.org/10.1016/j.mprp.2019.05.003>
- Núñez, A., Cañizares, P.C., de Lara, J. (2022). CloudExpert: An intelligent system for selecting cloud system simulators, *Expert Systems with Applications*, Volume 187, 115955, ISSN 0957-4174, <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.115955>
- Oughton, E.J., Frias, Z., van der Gaast, S., van der Berg, R. (2019). Assessing the capacity, coverage and cost of 5G infrastructure strategies: Analysis of the Netherlands, *Telematics and Informatics*, Volume 37, Pages 50-69, ISSN 0736-5853, <https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.01.003>
- Purbo, O.W., (2016). "Narrowing the digital divide", in a book "Digital Indonesia: Connectivity and Divergence" edited by Edwin Jurriens and Ros Tapsell, ISEAS – Yusof Ishak Institute, 2016, ISBN: 978-981-47-6298-4
- Rahlha, M., Allegue, S., Abdellatif, T. (2021). Guidelines for GDPR compliance in Big Data systems, *Journal of Information Security and Applications*, Volume 61, 102896, ISSN 2214-2126, <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2021.102896>
- Reddy, S. (2021), *Artificial Intelligence: Applications in Healthcare Delivery*, Routledge.
- RMOLNETWORK. (2021, June 22). Digitalisasi Perbankan di Indonesia Sulit Dilakukan. <https://www.rmolumsel.id/digitalisasi-perbankan-di-indonesia-sulit-dilakukan>
- Rogers, D.L. (2016), *The Digital Transformation Playbook: Rethink your business for digital age*, Columbia Business School.
- simara.id (2019), 7 Alasan Anda Harus Beralih Menggunakan Sistem Persuratan Digital. <https://simara.id/2019/07/22/7-alasan-anda-harus-beralih-menggunakan-sistem-persuratan-digital/>
- Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(1), 141-157.
- Situmorang, A.P., (2021, April 5). Sri Mulyani: Digitalisasi Sulit Terjadi Bila Wilayah RI Belum Terkoneksi Internet. <https://www.merdeka.com/uang/sri-mulyani-digitalisasi-sulit-terjadi-bila-wilayah-ri-belum-terkoneksi-internet.html>
- Sreenivasan, A., Suresh, M. (2021). Agility in startups: Recent advances and constraints, *Materials Today: Proceedings*, ISSN 2214-7853, <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.09.513>
- Stone, S.M. (2019), *Digitally Deaf: Why Organizations Struggle with Digital Transformation*, Springer Nature Switzerland AG
- Tibbo, H.R. (2003). On the Nature and Importance of Archiving in the Digital Age, *Advances in Computers*, Elsevier, Volume 57, Pages 1-67, ISSN 0065-2458, ISBN 9780120121571, [https://doi.org/10.1016/S0065-2458\(03\)57001-2](https://doi.org/10.1016/S0065-2458(03)57001-2)
- Tsai, W.L. (2021). Constructing Assessment Indicators for Enterprises Employing Cloud IaaS, *Asia Pacific Management Review*, Volume 26, Issue 1, Pages 23-29, ISSN 1029-3132, <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2020.06.001>
- Usman, S., (2020, November 23). "Gelisahnya Onno W Purbo, setelah Meraih Jonathan B Postel Service Award". <https://www.merdeka.com/teknologi/gelisahnya-onno-w-purbo-setelah-meraih-jonathan-b-postel-service-award.html>
- Virupakshar, K.B., Asundi, M., Channal, K., Shettar, P., Patil, S., Narayan, D.G. (2020). Distributed Denial of Service (DDoS) Attacks Detection System for OpenStack-based Private Cloud, *Procedia Computer Science*, Volume 167, Pages 2297-2307, ISSN 1877-0509, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.03.282>
- Wuragil, Z., (2020, November 19). Target Jokowi, Indonesia Punya 9 Juta Talenta Digital Hingga 2035, <https://tekno.tempo.co/read/1406741/target-jokowi-indonesia-punya-9-juta-talenta-digital-hingga-2035>
- Yu, J., Yang, L., (2017). The Cloud Technology Double Live Data Center Information System Research and Design Based on Disaster Recovery Platform, *Procedia Engineering*, Volume 174, Pages 1356-1370, ISSN 1877-7058, <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.01.289>
- Yusuf, A., (2021, March 12). ITTS penjelasan tentang opencourse.itts.ac.id Kuliah Online Gratis Dan Open Source Tangerang Selatan, <https://abrahamyusuf.my.id/itts-penjelasan-tentang-opencourse-itts-ac-id-kuliah-online-gratis-dan-open-source-tangerang-selatan/>
- Zhu, L., Chen, P., Dong, D., Wang, Z. (2021). Can artificial intelligence enable the government to respond more effectively to major public health emergencies? — Taking the prevention and control of Covid-19 in China as an example, *Socio-Economic Planning Sciences*, 101029, ISSN 0038-0121, <https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101029>

A conceptual image featuring a blue surgical mask positioned over the lower portion of a globe of the Earth. The globe shows the continents of Africa and Europe, with the word "EPILOG" written in white, bold, sans-serif capital letters across the center. The mask's white elastic straps are visible on the sides.

EPILOG

EPILOG



Dr. Agung Firman Sampurna, C.S.F.A., C.Fr.A., C.G.C.A.E., Q.G.I.A.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Sejak World Health Organisation menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global pada Maret 2020, hingga kini Covid-19 masih menjadi ancaman di hampir seluruh negara. United Nations (UN) bahkan menyatakan pandemi ini merupakan krisis global multidimensi terbesar sejak 75 tahun UN berdiri.

Efek pandemi Covid-19 menjangar dari sisi kesehatan ke hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, teknologi, bahkan hingga ke aspek politik. Efek perambatan tersebut dipicu oleh upaya adaptasi serentak berupa penerapan protokol kesehatan yang dilakukan di hampir seluruh bidang guna mencegah penularan virus tersebut.

Adaptasi itu dimulai dari mengampanyekan 3M kepada penduduk, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Di sisi lain, pemerintah juga menggencarkan 3T, yakni tes (*testing*), telusur (*tracking*), dan tindak lanjut (*treatment*) pencegahan penyebaran virus. Sejak 13 Januari 2021 di Indonesia, kampanye 3M dan 3T ini

disusul oleh vaksinasi, yang hingga 16 Februari 2022 telah terdistribusikan ke 137 juta orang atau 50% dari total populasi, dengan total dosis 334 juta.

Kendati berbagai upaya pencegahan tersebut sudah dilakukan, sampai saat ini belum terlihat tanda-tanda pandemi Covid-19 akan mereda. Sebaliknya, terjadi gelombang ketiga berupa peningkatan tajam penularan Covid-19 akibat varian *Omicron*, menyusul gelombang kedua pada Juni-Juli 2021 yang ditandai dengan penyebaran varian *Delta*.

Di Indonesia, dampak pandemi Covid-19 sudah terlihat di berbagai sisi. Dari sisi kesejahteraan sosial, sampai September 2020 terjadi peningkatan kemiskinan menjadi 10,19% dari 9,22% pada Maret 2020. Kenaikan ini juga diikuti kenaikan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Perubahan perilaku, penurunan aktivitas ekonomi dan pendapatan penduduk juga menyebabkan kenaikan angka kemiskinan. Pandemi telah mendorong tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2020 menjadi 7,07% dari posisi Agustus 2019 sebesar 5,23%.

Dari sisi ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi pada 2020 berkontraksi -2,07% dari sebelumnya melaju 5,02% (2019) dan 5,17% (2018). Sementara itu, inflasi kita melandai hingga 1,68% dari sebelumnya 2,72% (2019) dan 3,13% (2018). Situasi ini terang merefleksikan pukulan terhadap perekonomian nasional. Pukulan itu terutama diterima sektor manufaktur, pertambangan, perdagangan, konstruksi, termasuk yang terparah, akomodasi yang berkontraksi 10,2% dan transportasi yang merosot -15,0%.

Dari upaya adaptasi berupa penerapan protokol kesehatan secara serentak itu pula, akhirnya intensitas *volatility, uncertainty, complexity and ambiguity*, di berbagai bidang semakin meningkat. Dengan meningkatnya intensitas itu, lambat laun persepsi kita terhadap berbagai hal pun berubah. Akhirnya, faktor-faktor pembentuk masa depan ikut berubah. Semua ini mendorong setiap negara merancang skenario masa depan dalam upaya menyusun strategi guna menyongsong perubahan yang lebih baik.

Buku berjudul *Scenario Planning, Dampak, dan Proyeksi di Berbagai Bidang pada Masa dan Pascapandemi Covid-19: Pandangan Para Pakar dan Praktisi* ini adalah bagian dari upaya tersebut. Di buku ini, sejumlah pakar dan praktisi dari berbagai bidang antara lain dari bidang ekonomi, keuangan, kesehatan, sosiologi, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi membagi pandangannya mengenai *scenario planning*, dampak, dan proyeksi di berbagai bidang yang menggambarkan kemungkinan yang terjadi pada masa depan.

Dimulai dari membahas ketidakpastian yang melingkupi Indonesia dan dunia, dan mengidentifikasi faktor yang mungkin memengaruhi masa depan, para pakar dan praktisi ini memberikan tinjauan masa depan dengan menyoroti implikasi jangka panjang kebijakan saat ini, mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang dihadapi sebelum hal tersebut muncul menjadi krisis, serta merespons isu strategis yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Dengan membagikan pandangannya itu, mereka sekaligus memfasilitasi para pengambil keputusan untuk memilih alternatif kebijakan masa depan.

Di buku ini, sejumlah pakar dan praktisi dari berbagai bidang antara lain dari bidang ekonomi, keuangan, kesehatan, sosiologi, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi membagi pandangannya mengenai *scenario planning*, dampak, dan proyeksi di berbagai bidang yang menggambarkan kemungkinan yang terjadi pada masa depan.

Pandangan para pakar dan praktisi tersebut diharapkan dapat menginspirasi para pengambil keputusan, kementerian, lembaga, dan instansi di pusat dan daerah, juga masyarakat luas agar menggunakan *foresight* dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas respons kebijakannya. Hal itu dilakukan terutama agar kita bisa keluar dari pandemi Covid-19 dan dapat membangun pemerintah dan masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai krisis, sekaligus mengawal agenda 2030 dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Jakarta, Maret 2022

Ketua BPK

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFA., CGCAE., QGIA.



SCENARIO PLANNING, DAMPAK, DAN PROYEKSI DI BERBAGAI BIDANG PADA MASA DAN PASCA PANDEMI COVID-19

PANDANGAN PARA PAKAR DAN PRAKTIISI

BUKU SERI 1
**STRATEGIC
FORESIGHT**
BPK

Dalam praktik, kapabilitas *foresight* telah terbukti membantu pemerintah menyiapkan diri memitigasi skenario buruk yang mungkin terjadi secara preventif.

Shuhaela Haqim, Direktur Government and Public Services, Deloitte Consulting Southeast Asia

Pandemi COVID-19 telah menghasilkan perilaku sosial dengan protokol kesehatan, yang melahirkan perubahan tatanan sosial, interaksi sosial, dan ruang publik.

Imam B. Prasodjo, sosiolog Universitas Indonesia

Belajar dari COVID-19, liberalisasi layanan kesehatan demi pembangunan ekosistem kesehatan harus dilakukan. Dengan liberalisasi ini, ada harapan akan meningkatnya infrastruktur layanan kesehatan.

Caroline Riady, CEO Siloam Hospitals Group

Pandemi COVID-19 mengakibatkan melimpahnya sampah rumah tangga dan sampah medis di kota-kota besar. Akumulasi sampah sebagai jejak karbon cenderung terabaikan.

Raldi Hendro Koestoer, pengamat lingkungan Universitas Indonesia

Pandemi COVID-19 telah menunjukkan digitalisasi demokrasi bukan sesuatu yang mewah dan sulit. Digitalisasi ini akan mendorong inovasi praktik demokrasi.

Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika

Kemampuan dan kreativitas bangsa Indonesia dalam merekayasa teknologi sebetulnya bukan main. Ini menjadi modal utama dalam proses transformasi digital bangsa untuk menjawab tantangan pandemi COVID-19.

Onno W. Purbo, dosen Institut Teknologi Tangerang Selatan

Kesempatan untuk melakukan pemulihan hijau (*green reset*) harus ditangkap antara lain dengan menggunakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional.

Agus P. Sari, CEO Landscape Indonesia

- Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA., QGIA.
- Drs. Daniel Sparringa, M.A., Ph.D.
- Shuhaela F. Haqim ▪ Dr. Adhiatma Gunawan ▪ Caroline Riady, BA. ▪ Prof Dr. Anwar Nasution
- Teguh Dartanto, Ph.D; Dr. Imam B. Prasodjo ▪ Metta Dharmasaputra, S.E., M.M
- Burhanuddin Muhtadi, Taberez A. Neyazi & Sourabh B. Paul
- Julian Aldrin Pasha, M.A., Ph.D. ▪ Yunarto Wijaya ▪ Prof. Dr. Raldi Hendro Koestoer, M.Sc., Ph.D., APU
- Agus Pratama Sari, Ph.D. ▪ Ir. Onno W. Purbo, M.Eng., Ph.D



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

